



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KOTA BANDA ACEH 2025-2029



TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2026, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 merupakan Dokumen Perencanaan khusus Bidang Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang menjadi salah satu bagian dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah khususnya yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh sesuai dengan Matriks Program di bidang penanggulangan kemiskinan.

Dokumen ini juga dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 sudah terintegrasi dengan dokumen RPJP Kota Banda Aceh 2025-2045 dan Dokumen RPJM Kota Banda Aceh 2025-2029 dan tentunya sejalan dengan Renstra dan Renja OPD terkait, sehingga seluruh program kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan untuk melaksanakan tugas dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, Mei 2026

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kota Banda Aceh



AFDHAL KHALILULLAH, BSc (HONS), M.T

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	11
1.3. Maksud dan Tujuan.....	14
1.4. Sistematika RPKD Kota Banda Aceh.....	14
 BAB II KONDISI UMUM DAERAH DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KOTA BANDA ACEH	
2.1. Geografis.....	16
2.2. Demografis.....	23
2.3. Pertumbuhan Ekonomi.....	26
2.4. Pendidikan.....	51
2.5. Kesehatan.....	55
2.6. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	59
2.7. Sosial.....	64
2.8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	69
2.9. Urusan Koperasi UMKM.....	90
2.10. Pertanian.....	91
2.11. Kelautan dan Perikanan.....	94
2.12. Pariwisata.....	95
2.13. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	95
 BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH	
3.1. Konsep Kemiskinan.....	97
3.1.1. Pengertian Kemiskinan.....	97
3.1.2. Definisi Kemiskinan Secara Umum.....	98
3.1.3. Skema Terbentuknya Perangkap Kemiskinan.....	100
3.1.4. Bentuk dan Definisi Kemiskinan.....	102
3.1.5. Indikator-Indikator Mengenai Kemiskinan.....	105
3.1.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin.....	108
3.2. Kondisi Kemiskinan Daerah.....	122
3.3. Identifikasi Kemiskinan Daerah.....	134
3.3.1. Bidang Pendidikan.....	135
3.3.2. Bidang Kesehatan.....	139
3.3.3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	152
3.3.4. Bidang Ketenagakerjaan.....	158
3.3.5. Isu Strategis Kemiskinan dalam Bidang Lainnya.....	165
3.3.6. Kemiskinan Ekstrem.....	166

BAB IV PRIORITAS PROGRAM

4.1. Penyusunan Teori Perubahan (<i>Theory of Change</i>) atau Logika Program.....	171
4.2. Analisis Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan..... Kota Banda Aceh	186

BAB V LOKASI PRIORITAS

5.1. Isu Strategis.....	211
5.2. Sebaran dan Tingkat Status Kesejahteraan.....	212
5.3. Lokasi Prioritas.....	214
5.3.1. Kecamatan Baiturrahman.....	215
5.3.2. Kecamatan Kuta Alam.....	216
5.3.3. Kecamatan Meuraxa.....	217
5.3.4. Kecamatan Syiah Kuala.....	218
5.3.5. Kecamatan Lueng Bata.....	218
5.3.6. Kecamatan Kutaraja.....	219
5.3.7. Kecamatan Jaya Baru.....	219
5.3.8. Kecamatan Bandaraya.....	220
5.3.9. Kecamatan Ulee Kareng.....	221
5.4. Rekomendasi Kebijakan.....	221
5.4.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.....	221
5.4.2. Kebijakan Pendidikan.....	222
5.3.3. Kebijakan Kesehatan.....	223
5.3.4. Kebijakan Infrastruktur Dasar.....	225
5.3.5. Kebijakan Pertanian dan Perkebunan.....	226
5.3.6. Kebijakan UMKM.....	227

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Matriks Kebijakan Dan Sasaran , Indikator Sasaran Serta Target Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029.....	9
Tabel 2. 1	Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan Kota Banda Aceh.....	16
Tabel 2. 2	Nama Sungai dan Panjang Alirannya di Kota Banda Aceh.....	21
Tabel 2. 3	Kondisi Klimatologi Kota Banda Aceh Tahun 2024.....	22
Tabel 2. 4	Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	23
Tabel 2. 5	Indikator Kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	25
Tabel 2. 6	Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2020 s/d 2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Banda Aceh	29
Tabel 2. 7	Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2020 s/d 2024 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Banda Aceh	31
Tabel 2. 8	Distribusi PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024.....	33
Tabel 2.9	Persentase Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024	44
Tabel 2.10	Jenis Pelatihan yang Dilakukan Disnaker Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024	46
Tabel 2.11	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024	48
Tabel 2.12	Persentase Pengeluaran Non Makanan Kelompok Pengeluaran Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024	48
Tabel 2.13	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 (Rupiah)	49
Tabel 2.14	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024	49
Tabel 2.15	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.	54
Tabel 2.16	Perkembangan Rasio Pelayanan Posyandu Per Satuan Balita di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.	56
Tabel 2.17	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.	57
Tabel 2.18	Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.	58
Tabel 2.19	Perkembangan Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.	58
Tabel 2.20	Status Kondisi Jalan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.	59
Tabel 2.21	Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase Tahun 2020-2024.	61
Tabel 2.22	Persentase Luas Permukiman Tertata Tahun 2020-2024.....	62
Tabel 2.23	Luas Kawasan Kumuh Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.	64
Tabel 2.24	Indikator Kinerja Daerah Bidang Sosial Tahun 2020-2024.	65
Tabel 2.25	Indikator Kinerja Daerah Bidang Tenaga Kerja Tahun	

2020-2024.	66
Tabel 2.26 Indikator Kinerja Daerah Pangan Tahun 2020-2024.	67
Tabel 2.27 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024	69
Tabel 2.28 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	69
Tabel 2.29 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Mukim yang Baik di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	72
Tabel 2.30 Kelompok Binaan LPM Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024..	74
Tabel 2.31 Kelompok Binaan PKK Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024..	77
Tabel 2.32 PKK Aktif Tahun 2020-2024 Kota Banda Aceh.....	78
Tabel 2.33 Jumlah Posyandu dalam Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024....	79
Tabel 2.34 Strata Posyandu dalam Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	80
Tabel 2.35 Daftar Partisipasi Masyarakat Dalam Pilchiksung Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	81
Tabel 2.36 Data Mukim dalam Kota Banda Aceh.....	82
Tabel 2.37 Fasilitasi Dana Pembangunan Untuk Gampong di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	83
Tabel 2.38 Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang Baik Tahun 2020-2024.....	84
Tabel 2.39 Realisasi Bantuan Tanggap Darurat Tahun 2020-2024.....	85
Tabel 2.40 Realisasi Penyaluran Paket Bantuan Anak Kurang Mampu Tahun 2020-2024.....	85
Tabel 2.41 Realisasi Bantuan Tanggap Darurat Tahun 2020-2024.....	86
Tabel 2.42 Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Melalui Program PUEM di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	86
Tabel 2.43 Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang Baik Tahun 2020- 2024 (dalam persen)	89
Tabel 2.44 Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong Yang Baik Tahun 2020-2024 (dalam persen).....	90
Tabel 2.45 Persentase Koperasi Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2020- 2024.....	90
Tabel 2.46 Jumlah UMKD dan BPR/LKM di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	91
Tabel 2.47 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	92
Tabel 2.48 Cakupan Bina Kelompok Pertanian Tahun 2020-2024.....	92
Tabel 2.49 Data Kelistrikan Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	93
Tabel 2.50 Cakupan Binaan Kelompok Nelayan Tahun 2020-2024.....	94
Tabel 2.51 Produksi Ikan Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022.....	95
Tabel 2.52 Indikator Kinerja Daerah Bidang Pariwisata Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	95
Tabel 2.53 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2020-2024.....	96
Tabel 2.54 Indikator Kota Layak Anak (KLA) yang Dicapai Tahun 2020-2024.....	96
Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem, Miskin dan Rentan (Desil 1-4) Kota Banda Aceh Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2024.....	126

Tabel 3. 2	Jumlah anak usia sekolah, 7-12 Tahun (SD/MI), 13-15 Tahun (SMP/MTs) dan 16-18 tahun (SMA/MA), yang bersekolah dan tidak bersekolah, menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2024.....	136
Tabel 3. 3	Perkembangan Rasio Pelayanan Posyandu Per Satuan Balita di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	143
Tabel 3. 4	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	145
Tabel 3. 5	Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	145
Tabel 3. 6	Perkembangan Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	146
Tabel 3.7	Perkembangan Rasio Tenaga Medis di Puskesmas Per 100.000 Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2025.....	147
Tabel 3. 8	Data Sebaran Kasus DBD Tahun 2020-2024.....	150
Tabel 3. 9	Rumah Layak Huni Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	153
Tabel 3.10	Persentase Luas Permukiman Tertata Tahun 2020-2024.....	154
Tabel 3.11	Luas Kawasan Kumuh Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024....	155
Tabel 3.12	Jumlah Rumah tangga di Kota Banda Aceh Berdasarkan Sumber Air Minum Yang Dapat Dikonsumsi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024.....	157
Tabel 3.13	Persentase Rumah Tangga di Kota Banda Aceh Berdasarkan Sumber Penerangan Menurut Kecamatan Tahun 2024.....	158
Tabel 3.14	Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Status Bekerja Tidak Bekerja Menurut Kecamatan Tahun 2024.....	164
Tabel 3.15	Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan Tahun 2022.....	165
Tabel 4. 1	Status Pekerjaan Kepala Keluarga 40% Penduduk Miskin Ekstrem Tahun 2024	183
Tabel 4. 2	Status Bekerja Penduduk Miskin Ekstrem (Usia 15+ dalam persen), 2022	183
Tabel 4. 3	Informasi 40% Penduduk Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Pekerjaan Individu Menurut Kecamatan Di Kota Banda Aceh Tahun 2024.....	183
Tabel 4. 4	Alokasi Anggaran Kemiskinan Program Prioritas Dan Pendukung Kota Banda Aceh Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029.....	196

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh.....	17
Gambar 2. 2	Peta Keiringan Lereng Kota Banda Aceh.....	18
Gambar 2. 3	Kondisi Geologi Kota Banda Aceh.....	19
Gambar 2. 4	Peta Hidrologi Kota Banda Aceh.....	21
Gambar 2. 5	Jumlah Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 (jiwa)	23
Gambar 2. 6	Piramida Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	26
Gambar 2. 7	Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024....	27
Gambar 2. 8	Grafik Laju Inflasi Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	34
Gambar 2.9	Indeks Harga Konsumen Kota Banda Aceh Tahun 2020-2025	35
Gambar 2.10	PDRB Perkapita Banda Aceh Tahun 2020-2024 (Juta).....	36
Gambar 2. 11	Indeks Gini Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	37
Gambar 2. 12	IPM Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Nasional Tahun 2020-2024.....	38
Gambar 2. 13	Angka Melek Huruf (%)	39
Gambar 2. 14	Angka Kematian Ibu di Kota Banda Aceh 2020-2024.....	40
Gambar 2. 15	Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Banda Aceh dan Aceh Tahun 2020-2024.....	42
Gambar 2. 16	Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024.....	45
Gambar 2. 17	Jumlah Pencari Kerja Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	47
Gambar 2. 18	Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Banda Aceh	50
Gambar 2. 19	Rasio Guru/Murid Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	52
Gambar 2. 20	Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	53
Gambar 2. 21	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	55
Gambar 2. 22	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	60
Gambar 2. 23	Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024.....	61
Gambar 3. 1	IPM Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024	123
Gambar 3. 2	Analisis Identifikasi Masalah Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Banda Aceh, Prov. Papua, Tahun 2020-2024	124
Gambar 3. 3	Analisis Identifikasi Masalah Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2020-2024.....	125
Gambar 3. 4	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kelompok Makanan Dan Non Makanan di Kota Banda Aceh (dalam rupiah), 2022	128
Gambar 3. 5	Persentase Pengeluaran Perkapita Perbulan Komoditas Makanan Terpilih di Kota Banda Aceh, 2012-20122.....	130
Gambar 3. 6	Persentase Pengeluaran Perkapita Perbulan Komoditas Makanan Terpilih di Kota Banda Aceh, 2012-2022.....	131
Gambar 3. 7	Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2022 dan Perkembangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	132
Gambar 3. 8	Analisis Identifikasi Masalah Indeks Kedalamam Kemiskinan (P1) (Indeks) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun	

	2020-2024.....	133
Gambar 3. 9	Analisis Identifikasi Masalah Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2020-2024.....	134
Gambar 3.10	Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2020-2024.....	135
Gambar 3.11	Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2020-2024.....	137
Gambar 3.12	Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2020-2024.....	138
Gambar 3.13	Angka Kematian Ibu di Kota Banda Aceh, Tahun 2020-2024.	140
Gambar 3.14	Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Banda Aceh, Tahun 2020-2024.....	141
Gambar 3.15	Perkembangan Usia Harapan Hidup di Kota Banda Aceh, Tahun 2020-2024.....	142
Gambar 3.16	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) Menurut Puskesmas di Kota Banda Aceh, Tahun 2024.	148
Gambar 3.17	Persentase Gizi Buruk pada Balita 0-59 Bulan Menurut Puskesmas Kota Banda Aceh Tahun 2024.....	149
Gambar 3.18	Jumlah Kasus HIV Positif yang Dilaporkan di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	151
Gambar 3.19	Analisis Identifikasi Masalah Penduduk Dengan Pengobatan Sendiri (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2018-2022.....	152
Gambar 3.20	Analisis Identifikasi Morbiditas (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2016-2022.....	156
Gambar 3.21	Analisis Identifikasi Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2016-2022.....	156
Gambar 3.22	Analisis Identifikasi Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2018-2022.....	160
Gambar 3.23	Analisis Identifikasi Masalah Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2017-2022.....	161
Gambar 3.24	Analisis Identifikasi Masalah Tingkat Kesempatan Kerja (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2017-2022.....	162
Gambar 3.25	Analisis Identifikasi Masalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2017-2022	163
Gambar 3.26	Analisis Identifikasi Masalah Setengah Pengangguran (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tahun 2016-2020.....	168
Gambar 3.27	Sebaran Kantong Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Tahun 2023.....	169
Gambar 3.28	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2022.....	169
Gambar 3.29	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem dan Jumlah Penduduk	

	Miskin Ekstrem Kota Banda Aceh Tahun 2021-2022.....	170
Gambar 4. 1	Theory of Change untuk peningkatan partisipasi dan akses pendidikan dasar di Kota Banda Aceh.....	173
Gambar 4. 2	Theory of Change untuk meningkatnya kesehatan ibu dan bayi Kota Banda Aceh.....	176
Gambar 4. 3	Theory of Change untuk meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman Kota Banda Aceh.....	179
Gambar 4. 4	Theory of Change untuk menurunnya tingkat pengangguran terbuka.....	181
Gambar 4. 5	Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Derajat Otonomi Fiskal (%) Provinsi Aceh Tahun 2024	187
Gambar 4. 6	Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) dan Derajat Otonomi Fiskal (%) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024	188
Gambar 4. 7	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Ruang Fiskal (%) Aceh Tahun 2021.....	188
Gambar 4. 8	Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) dan Ruang Fiskal (%) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	189
Gambar 4. 9	Komposisi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	190
Gambar 4.10	Rincian Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	191
Gambar 4.11	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Penduduk Miskin (%) dan Belanja Modal (%) dan Perkembangan Belanja Modal Kota Banda Aceh Tahun Tahun 2015-2021.....	191
Gambar 4.12	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Penduduk Miskin (%) dan Belanja Tidak Langsung (%) Aceh Tahun 2020 dan Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kota Banda Aceh Tahun Tahun 2015-2021.....	192
Gambar 4.13	Perkembangan Belanja Kesejahteraan (%) di Kota Banda Aceh Tahun 2015-2020 serta Relevansi Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	193
Gambar 4.14	Perkembangan Belanja Pendidikan di Kota Banda Aceh Tahun 2021-2024 Serta Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	193
Gambar 4.15	Perkembangan Belanja Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2021-2024 Serta Relevansi Penduduk Dengan Pengobatan Sendiri (%) dan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	194

Gambar 4.16	Perkembangan Belanja Infrastruktur di Kota Banda Aceh Tahun 2021-2024 Serta Relevansi Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak (%) dan Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak (%) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024	195
Gambar 4.17	Perkembangan Belanja Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2021-2024 Serta Relevansi Penduduk Miskin (%) dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024.....	196
Gambar 5.1	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Provinsi Aceh Tahun 2024.....	213
Gambar 5.2	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (%) dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (jiwa) Provinsi Aceh Tahun 2024.....	214
Gambar 5.3	Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Individu Desil 1 Terhadap 40% P3KE dan Persentase Keluarga Desil 1 Terhadap 40% P3KE) Kota Banda Aceh Tahun 2024.....	215
Gambar 5.4	Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Gampong Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Baiturrahman	216
Gambar 5.5	Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Gampong Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kuta Alam	216
Gambar 5.6	Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Gampong Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Meuraxa	217
Gambar 5.7	Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Gampong Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Syiah Kuala	218
Gambar 5.8	Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Gampong Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Luengbata	219
Gambar 5.9	Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Gampong Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kutaraja	219
Gambar 5.10	Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Gampong Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Jaya Baru	220
Gambar 5.11	Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Gampong Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bandaraya	220
Gambar 5.12	Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Gampong Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Ulee Kareng	221

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah pokok yang sudah lama dihadapi oleh berbagai bangsa di dunia, termasuk Indonesia, hingga saat ini. Permasalahan kemiskinan perlu diatasi dengan menerapkan langkah-langkah penanganan yang berorientasi pada tujuan, dilakukan secara terstruktur, dan diterapkan secara luas. Upaya mengatasi kemiskinan bertujuan untuk mengurangi kesulitan yang dialami oleh masyarakat yang kurang mampu serta memastikan hak-hak pokok warga negara dapat terpenuhi secara layak, melalui pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang bermartabat.

Penghapusan kemiskinan ekstrem bagi siapa pun dan di mana pun merupakan tujuan pertama dari 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kemiskinan ekstrem, yang didefinisikan sebagai kemampuan bertahan hidup di bawah US\$3,00 per orang per hari berdasarkan paritas daya beli tahun 2021, telah mengalami penurunan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Namun, pada tahun 2025, ada 808 juta orang, atau 1 dari 10 penduduk di seluruh dunia, yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, yang merupakan revisi peningkatan dari perkiraan sebelumnya karena adanya penyesuaian terhadap garis kemiskinan. Jika tren yang saat ini terjadi berlangsung terus, maka 8,9 persen dari total populasi dunia masih akan hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem hingga tahun 2030.

Yang mengejutkan adalah kembalinya tingkat kelaparan ke tingkat tertinggi yang pernah tercatat sebelumnya pada tahun 2005. Yang juga menjadi kekhawatiran adalah kenaikan harga bahan pangan yang terus berlangsung di berbagai negara dibandingkan masa 2015 hingga 2019. Tantangan ganda, yakni kemiskinan dan ketahanan pangan, menimbulkan kekhawatiran penting secara global.

Masalah kemiskinan yang menimbulkan dampak negatif yang besar, membuat isu ini menjadi permasalahan global. Oleh karena itu, masalah kemiskinan ditetapkan sebagai tujuan pertama dari 17 tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang terdiri dari 169 target, salah satunya adalah upaya pengentasan kemiskinan. Pengurangan jumlah penduduk miskin di dunia merupakan salah satu kesepakatan global

yang dijabarkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus tercapai secara signifikan. Masalah kemiskinan sangat penting sehingga upaya penanggulangannya menjadi sebuah gerakan bersama yang dilakukan oleh seluruh dunia, baik oleh lembaga pemerintahan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, serta berbagai pihak terkait lainnya.

Di Indonesia, kemiskinan juga menjadi masalah utama yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan menjadi prioritas utama dalam menjalankan program pembangunan. Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk mengurangi jumlah orang yang masih berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Komitmen Pemerintah terhadap penduduk miskin diwujudkan melalui bentuk program penanggulangan kemiskinan yang menjadi bagian dari rencana pembangunan, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Program ini terwujud dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya dalam menangani masalah kemiskinan dengan menerapkan pendekatan percepatan. Hal ini terlihat dari keluarnya Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 yang mengatur percepatan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan. Aturan tersebut mencakup peningkatan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pengusaha, serta masyarakat. Tujuan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu melalui berbagai bentuk bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program-program lainnya. Salah satu program tersebut adalah Program Perlindungan Sosial yang terdiri dari Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat." Ini berarti bahwa mengatasi kemiskinan harus dilakukan agar rakyat bisa hidup lebih sejahtera. Hasil pembangunan seharusnya dapat dinikmati secara merata dan adil oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan.

Menurut data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin (P0) di Kota Banda Aceh pada tahun 2025 adalah 5,45%, yang menunjukkan penurunan sekitar 1,5%

dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2024 yang mencapai 6,95%. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Banda Aceh pada tahun 2025 tetap sama seperti tahun 2024, yaitu 0,71%. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Banda Aceh pada tahun 2025 meningkat sebesar 0,03% dibandingkan tahun 2024, di mana pada tahun 2024 angkanya adalah 0,11% dan pada tahun 2025 menjadi 0,14%. Semakin menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi kemiskinan sudah tepat jalannya dan harus terus dilakukan secara konsisten dan dalam skala besar. Meskipun terjadi peningkatan kecil pada indeks tingkat kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk yang tinggal di Kota Banda Aceh semakin jauh dari batas kemiskinan.

Seluruh kabupaten dan kota di provinsi Aceh mengalami penurunan persentase penduduk miskin, termasuk provinsi Aceh sendiri yang berhasil menurunkan persentase penduduk miskin (P0) dari 14,23% pada tahun 2024 menjadi 12,33% pada tahun 2025. Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Provinsi Aceh pada tahun 2025 menurun sekitar 0,78% dibandingkan tahun 2024, yaitu dari 2,62% menjadi 1,84%. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Aceh pada tahun 2025 mencapai 0,42%, turun sekitar 0,29% dibandingkan angka pada tahun 2024 yang sebesar 0,71%.

Sebagai ibukota provinsi dan pusat pemerintahan di Aceh, Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Kebijakan mengatasi kemiskinan di Kota Banda Aceh bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu dan mengurangi risiko terjadinya bencana. Kebijakan tersebut didasarkan pada penerapan Syariat Islam melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh lembaga khas Aceh seperti Baitul Mal serta instansi pemerintahan terkait lainnya.

Isu Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh tahun 2025 sampai 2029, penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu tujuan pemerintah yang diprioritaskan dalam pembangunan. Untuk mengurangi kemiskinan di Kota Banda Aceh, pemerintah harus menyusun prioritas kebijakan dan rencana tindakan penanggulangan kemiskinan. Hal ini berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan menggunakan strategi yang

ditentukan.

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat
2. Peningkatan pendapatan masyarakat
3. Penurunan jumlah kantong – kantong kemiskinan

Visi Kota Banda Aceh sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 hingga 2029 adalah "Banda Aceh Kota Kolaborasi", yang memiliki 7 misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar
2. Meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengelola urusan dengan lebih cepat, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Memperkuat kerja sama pembangunan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam bersaing.
4. Memanfaatkan potensi sumber daya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kota.
5. Meningkatkan Nilai-nilai Agama dan Budaya
6. Memberdayakan Generasi Muda dan Memajukan Olahraga
7. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Secara tegas, strategi penanggulangan kemiskinan difokuskan pada penelitian jenis keempat, yaitu "Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemajuan Kota", namun secara tidak langsung juga didukung oleh misi-misi lainnya. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang merata bagi seluruh masyarakat, serta pemberdayaan perempuan dan anak, memberikan dampak yang positif dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh. Selain itu, berbagai program berdasarkan Syariat Islam juga dilakukan dengan sangat aktif di Kota Banda Aceh, diharapkan dapat memperkuat semangat dan mental masyarakat, serta mendorong peningkatan zakat yang dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pada saat yang sama, pemerintah Kota Banda Aceh masih menghadapi beberapa

masalah dalam internal mereka saat berusaha mengatasi kemiskinan. Hal ini terjadi karena program-program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan belum terintegrasi dengan baik. Beberapa masalah kemiskinan yang terjadi di Kota Banda Aceh adalah bantuan yang saling tumpang tindih kepada orang yang tidak beruntung, bantuan tidak diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, orang yang tidak mampu tidak bisa mendapatkan bantuan, serta kemiskinan yang timbul karena budaya yang tidak menghasilkan seperti kebiasaan merokok, menggunakan narkoba, dan lain sebagainya.

Selain itu, hingga kini program penanggulangan kemiskinan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah masih fokus pada strategi mengurangi beban pengeluaran (bansos) yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar dapat tetap hidup. Padahal dukungan semacam ini hanya bersifat sementara dan tidak bisa membawa seseorang keluar dari kemiskinan.

Seharusnya di masa depan lebih banyak program yang ditujukan untuk mencapai pendekatan penelitian tentang strategi peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan strategi ini, orang yang sudah memiliki penghasilan cukup bisa meningkatkan kualitas hidupnya dan keluarganya, sehingga bisa mendorong keluarga keluar dari keadaan tertekan kemiskinan.

Selain itu, posisi Kota Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan provinsi Aceh membuat tantangan yang dihadapi kota tersebut relatif berbeda dengan daerah lain di Aceh. Sebagai tempat beraktivitas di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan ekonomi, Banda Aceh menarik banyak orang dari daerah lain untuk pindah ke kota ini. Akibatnya, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di Kota Banda Aceh semakin sulit. Bahkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal saja sudah sulit, apalagi di sektor informal yang juga sangat kompetitif, sehingga Kota Banda Aceh mengalami masalah pengangguran dan kemiskinan pada kelompok usia kerja produktif.

Kenaikan jumlah pengangguran dan penduduk miskin memberikan dampak besar terhadap beban ekonomi yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kota Banda Aceh wajib menyiapkan dana yang cukup untuk membangun fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, terutama bagi warga yang memiliki ekonomi lemah. Program dan kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja baru juga menjadi perhatian utama dalam upaya mengurangi kemiskinan di Kota Banda Aceh.

Isu lainnya yang perlu diperhatikan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan adalah mendorong terciptanya sinergi yang lebih baik dengan sektor swasta. Koordinasi yang lebih intensif perlu didorong untuk memastikan program-program sosial yang dilakukan oleh pihak swasta memiliki keselarasan dengan berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu pemerintah juga harus meningkatkan sinkronisasi dan integrasi program-program penanggulangankemiskinan yang ada, baik yang bersumber dari Pusat, Provinsi, Daerah, maupun sumber-sumber lainnya seperti dana dari Pihak Swasta dan LSM.

Selanjutnya, hal lain yang penting mendapatkan perhatian adalah isu penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik peningkatan SDM pada OPD pelaksana maupun pada TKPK. Pendampingan dan sosialisasi kepada OPD terkait juga masih perlu dilakukan agar penyusunan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan memberikan hasil yang maksimal. Penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dengan memperhatikan jumlah, lokasi, dan sasaran rumah tangga/penduduk miskin yang akan diintervensi (*by name, by address*) untuk memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Peran dan Fungsi TKPK di Daerah

Dalam rangka meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam peraturan presiden tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya sedangkan di level provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk menjalankan Tugas dan Fungsi TKPK di daerah, Walikota Banda Aceh setiap tahunnya mengeluarkan Surat Keputusan Walikota tentang “Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh”. Pembentukan tim TKPK ini dilakukan dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan serta mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh sesuai dengan Kebijakan Nasional. Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh tersebut, TKPK Kota Banda Aceh mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh, dengan

fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Banda Aceh sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. Pengkoordinasian OPD bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal Penyusunan Rencana Strategis OPD;
 - c. Pengkoordinasian OPD bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. Pengkoordinasian OPD bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja OPD;
 - e. Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
2. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh, dengan fungsi :
- a. Pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program serta kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. Pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah oleh OPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dan kendala yang dihadapi;
 - c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. Evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan;
 - f. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan untuk disampaikan kepada Walikota Banda Aceh dan TKPK Provinsi.

Untuk mencocokkan dan menyelaraskan rencana penanggulangan kemiskinan antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibutuhkan dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah. Dokumen ini bertujuan untuk menjadi bagian dari

RPJMD, agar penanggulangan kemiskinan dapat terintegrasi dengan baik. Selain itu, dokumen ini juga digunakan dalam penyusunan arah kebijakan dan program dalam rencana strategis Perangkat Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan. Dokumen ini tidak hanya menjadi bagian dari RPJMD untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menjelaskan permasalahan kemiskinan yang rumit di daerah tersebut. Kemiskinan juga terkait dengan permasalahan di tingkat lokal, di mana setiap daerah memiliki masalah kemiskinan yang berbeda dan penyebabnya juga berbeda, sehingga kebijakan serta upaya penanganannya pun tidak sama.

Penyusunan dokumen RPKD ini dilakukan secara bersama-sama oleh Bappeda dan Perangkat Daerah yang beranggotakan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK). Proses ini melibatkan minimal pejabat dan/atau personel terkait dari berbagai dinas dan instansi seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pusat Statistik, Dinas Informasi dan Komunikasi, Bagian Perencanaan di Sekretariat Daerah, Bagian Ekonomi dan Keuangan Daerah, serta OPD terkait lainnya. Selain itu, juga melibatkan perwakilan masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan langsung dengan penanggulangan kemiskinan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh perlu menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan dengan menyusun Tujuan dan Saran Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banda Aceh kurun waktu 2025-2029 yang disinkronkan dengan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah serta Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang tertuang dalam SDG's sebagai program Nasional, sebagaimana tertuang dalam matriks dibawah. Penyusunan dokumen RPKD 2025-2029 ini termasuk sedikit terlambat karena penyelesaian RPJMD sendiri juga seikit terlambat.

**Tabel 1.1 MATRIKS KEBIJAKAN DAN SASARAN, INDIKATOR SASARAN SERTA TARGET PENANGGULANGAN
KEMISKINANDI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025-2029**

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun				
						2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Visi: BANDA ACEH KOTA KOLABORASI Misi: 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Adaptif, Inovatif, dan Responsif 3. Memperkuat Kemitraan Pembangunan dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah 4. Memanfaatkan Potensi Sumber Daya untuk Peningkatan Kesejahteraan	T1. Terwujudnya Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Inklusif serta Generasi Muda Unggul		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	88,85	88.56	88.69	88.81	88.93	89.05
		1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata	Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,94	18.25	18.39	18.52	18.65	18.78
			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	13.10	13.11	13.12	13.13	13.14	13.15
			Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75.25	75.36	75.54	75.73	75.91	76.10
		2. Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas dan Daya Saing Generasi Muda	Indeks Pembangunan Keluarga (i-BANGGA)	Angka	69.5	70.5	71.4	72.3	73.2	74
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan, dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5
			Peningkatan Prestasi Olahraga	%	45	0	50	0	55	0
	T3. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Kemajuan		Pertumbuhan Ekonomi	%	6,08	6,13	6,17	6,22	6,27	6,32
			Tingkat Kemiskinan	%	6,95	6.81	6.72	6.63	6.55	6.46
		1. Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Berbasis	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	2.95	3	3.2	3.5	4	4.5
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi	%	5.05	5.08	5.11	5.14	5.17	5.20

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun				
						2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Masyarakat dan Kemajuan Kota 5. Meningkatkan Nilai-Nilai Agama dan Budaya 6. Memberdayakan Generasi Muda dan Memajukan Olahraga 7. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota	Keunggulan Daerah	dan Makan Minum (%)							
			Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	%	21,3	21,79	21,96	22,12	22,28	22,45
			Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	%	1,76	1,77	1,89	2,05	2,22	2,41
		2. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	59.06	59.08	59.1	59.12	59.14	59.16
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,55	7.45	7.1	6.14	5.75	5.38
		1. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	57,24	58,95	60,01	61,07	62,14	63,20
			Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	95.45	95.69	95.86	96.05	96.27	96.43
			Kinerja Lalu Lintas Kota	Nilai	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Banda Aceh antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Politic Right (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

- 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 23. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
 24. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif;
 25. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19;
 26. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional;
 27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus;
 28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
 30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
 32. Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat;

33. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah:

1. Sebagai referensi dalam memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai arus utama (mainstreaming) dalam penyusunan program kerja tahun 2025-2029 di Kota Banda Aceh;
2. Sebagai pedoman dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan peran perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh;
3. Sebagai pedoman dalam menentukan target yang harus dicapai Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kemiskinan.

Tujuan dari disusunnya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah:

1. Menggambarkan kondisi umum kemiskinan Kota Banda Aceh saat ini dan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai 4 (empat) tahun;
2. Menegaskan komitmen dan mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengatasi kemiskinan di Kota Banda Aceh;
3. Menjadi salah satu tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dari dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota adalah:

BAB I. PENDAHULUAN, memuat mengenai latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Banda Aceh.

BAB II. KONDISI UMUM DAERAH, memuat aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat meliputi fokus kesejahteraan dan pemertaan ekonomi termasuk didalamnya situasi Pandemi COVID-19 di tingkat Nasional, Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh, serta fokus kesejahteraan sosial.

BAB III. PROFIL KEMISKINAN DAERAH, memuat mengenai kondisi kemiskinan konsumsi, dan upaya penanggulangan kemiskinan bagi penduduk terdampak COVID-19 di Kota Banda Aceh, serta kondisi kemiskinan non konsumsi Kota Banda Aceh meliputi Bidang Ketenagakerjaan, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dasar, Ketahanan Pangan dan Sosial, termasuk didalamnya faktor/determinan permasalahan kemiskinan dari sisi penyedia layanan (*supply side*) dan penerima manfaat (*demand side*), serta dampak pandemi COVID-19 tiap bidang.

BAB IV. PRIORITAS PROGRAM, memuat tinjauan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara Nasional, Propinsi Aceh dan Kota Banda Aceh, analisis APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan, isu strategis dan rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan Kota Banda Aceh tahun 2020-2024, serta sistem monitoring dan evaluasi.

BAB V. LOKASI PRIORITAS, memuat analisis prioritas wilayah intervensi berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, meliputi Bidang Ketenagakerjaan, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dasar, Ketahanan Pangan dan Sosial.

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KOTA BANDA ACEH

2.1. Geografis

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

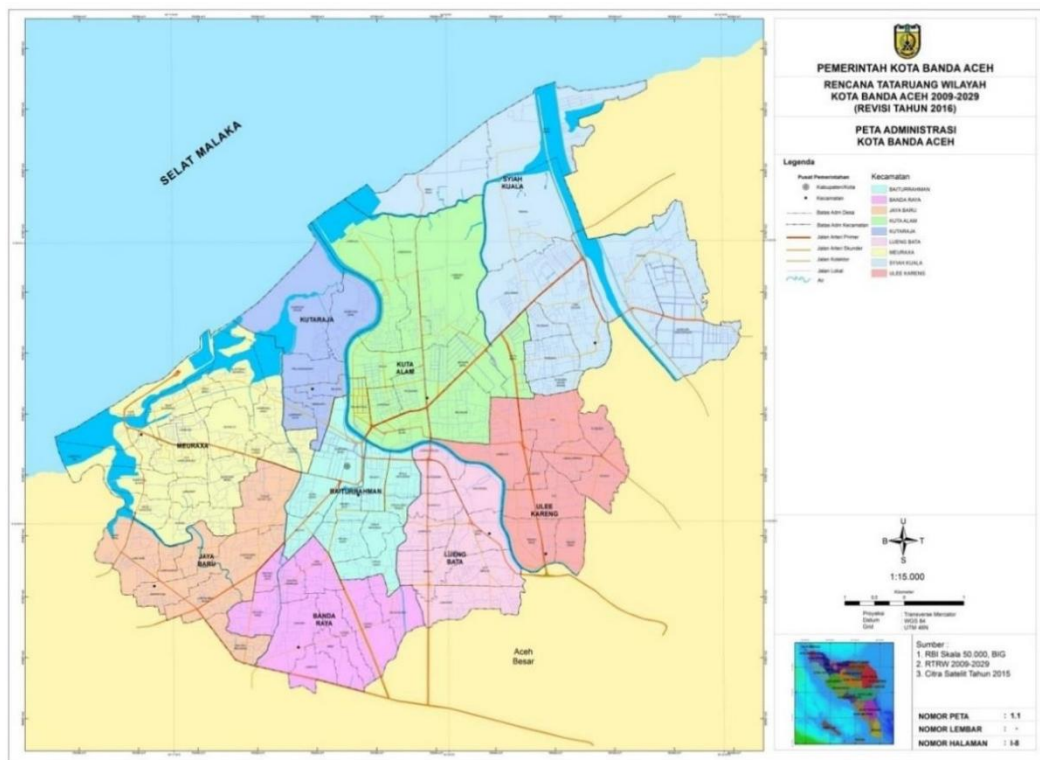
Secara geografis, letak Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh sangat strategis. Kota Banda Aceh berada di bagian barat Indonesia dengan letak geografis berada antara 05°30' – 05°35' LU dan 95°30' – 99°16' BT. Kota ini terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dengan 90 Gampong. Luas wilayah Kota Banda Aceh secara administratif adalah 61,36 km² atau 6136 Ha, namun berdasarkan hasil digitasi GIS Citra Satelit Resolusi Tinggi pada Tahun 2015, luas wilayah Kota Banda Aceh secara spasial mengalami perubahan luas wilayah yaitu menjadi 59,002 km². Berkurangnya luas wilayah tersebut akibat adanya bagian daratan di pesisir sepanjang garis pantai Kota Banda Aceh yang masuk ke area perairan laut dan penyesuaian tapal batas gampong setelah terjadinya bencana Tsunami 2004. Luas wilayah administrasi Kota dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2. 1
Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Luas Secara administrasi		Luas secara Digitasi Spasial	
		(Km ²)	Persentase	(Km ²)	Persentase
1	Kec. Meuraxa	7,260	11,83	8,459	14,34%
2	Kec. Baiturrahman	4,540	7,40	4,142	7,02%
3	Kec. Kuta Alam	10,050	16,38	9,587	16,25%
4	Kec. Syiah Kuala	14,240	23,21	13,591	23,03%
5	Kec. Ulee Kareng	6,150	10,02	5,182	8,78%
6	Kec. Banda Raya	4,790	7,81	4,949	8,39%
7	Kec. Kuta Raja	5,210	8,49	3,889	6,59%
8	Kec. Lueng Bata	5,340	8,7	4,445	7,53%
9	Kec. Jaya Baru	3,780	6,16	4,759	8,07%
Jumlah		61,360	100,00	59,002	100,00

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2026

Luas Wilayah Kota Banda Aceh berdasarkan RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018) dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh

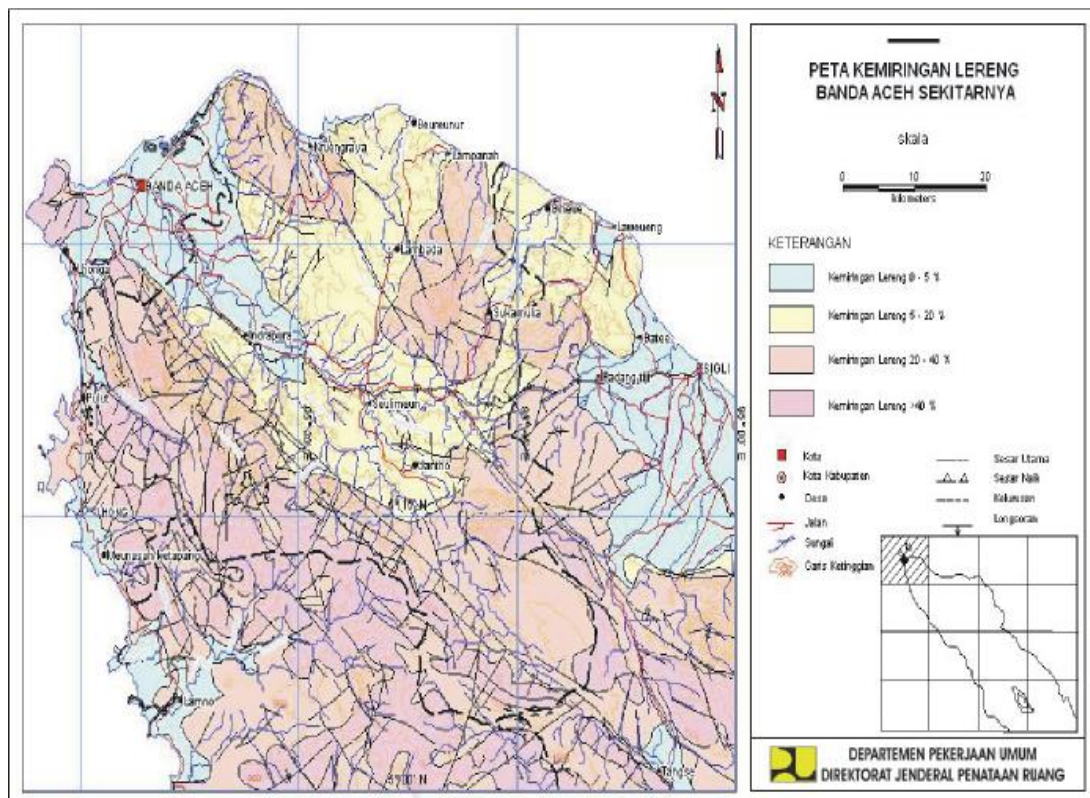
Secara administrasi batas-batas wilayah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Malaka
- Sebelah Timur : Kecamatan Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar
- Sebelah Selatan : Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar
- Sebelah Barat : Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar

b. Topografi

Kondisi topografi (ketinggian) Kota Banda Aceh berkisar antara -0,45 m sampai dengan +1,00 m di atas permukaan laut (dpl), dengan rata-rata ketinggian 0,80 m dpl. Bentuk permukaan lahannya (fisiografi) relatif datar dengan kemiringaan (lereng) antara 2-8%. Bentuk permukaan ini menandakan bahwa tingkat erosi relatif

rendah, namun sangat rentan terhadap genangan khususnya pada saat terjadinya pasang dan gelombang air laut terutama pada wilayah bagian Utara atau pesisir pantai. Dalam lingkup makro, Kota Banda Aceh dan sekitarnya secara topografi merupakan dataran banjir Krueng Aceh dan 70% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 5 meter dpl. Ke arah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang dengan ketinggian hingga 50 meter dpl. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah Barat dan Timur dan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut. Kondisi topografi dan fisiografi lahan sangat berpengaruh terhadap sistem drainase. Kondisi drainase di Kota Banda Aceh cukup bervariasi, yaitu jarang tergenang seperti pada wilayah Timur dan Selatan kota, kadang-kadang tergenang dan tergenang terus-menerus seperti pada kawasan rawa-rawa/genangan air asin, tambak dan atau pada lahan dengan ketinggian di bawah permukaan laut baik pada saat pasang maupun surut air laut. Lebih jelasnya gambaran kondisi topografi kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng Banda Aceh

Berdasarkan Gambar 2.2 di atas dapat dilihat bahwa Kota Banda Aceh terletak pada dataran rendah dengan kemiringan 0-5%.

c. Geologi

Secara geologis, Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif yang memanjang dari Banda Aceh di utara hingga Lampung di selatan, yang dikenal sebagai Sesar Semangko (*Semangko Fault*). Oleh karenanya daerah yang terlintasi patahan ini rentan terhadap gempa dan longsor. Berada pada pertemuan Plate Euroasia dan Australia berjarak ± 130 km dari garis pantai barat sehingga daerah ini rawan terhadap Tsunami. Litologi Kota Banda Aceh merupakan susunan batuan yang kompleks, terdiri dari batuan sedimen, meta sedimen, batu gamping, batuan hasil letusan gunung api, endapan alluvium, dan intrusi batuan beku, dan secara umum dibagi atas 4 (empat) kelompok, yaitu :

- Alluvium
- Batuan Kuarter (sedimen dan vulkanik)
- Batuan Tersier (sedimen dan vulkanik)
- Batuan metasedimen, malihan, dan terobosan Pra-Tersier

Untuk mengetahui kondisi geologi Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.3 di bawah ini.



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2.3
Kondisi Geologi Kota Banda Aceh

Pada Gambar 2.3 di atas menunjukkan ruas-ruas patahan Semangko di Pulau Sumatera dan juga kedudukan-nya terhadap Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh diapit oleh dua patahan di Barat dan Timur kota, yaitu patahan Darul Imarah dan Darussalam, dan kedua patahan yang merupakan sesar aktif tersebut diperkirakan bertemu pada pegunungan di tenggara kota.

d. Geomorfologi

Secara umum geomorfologi wilayah Kota Banda Aceh terletak di atas formasi batuan vulkanis tertier (sekitar Gunung Seulawah dan Pulau Breueh), formasi batuan sedimen, formasi endapan batu (di sepanjang Kr. Aceh), formasi batuan kapur (di bagian timur), formasi batuan vulkanis tua terlipat (dibagian selatan), formasi batuan sedimen terlipat dan formasi batuan dalam. Geomorfologi daerah pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar dibagi menjadi dataran yang terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian Kecamatan Kuta Raja, dan pesisir pantai yang terletak di wilayah barat atau sebagian Kecamatan Meuraxa. Daerah dataran di pesisir Kota Banda Aceh secara umum terbentuk dari endapan sistim marin yang merupakan satuan unit yang berasal dari bahan endapan (aluvial) marin yang terdiri dari pasir, lumpur dan kerikil. Kelompok ini dijumpai di dataran pantai yang memanjang sejajar dengan garis pantai dan berupa jalur-jalur beting pasir resen dan subresen. Beting pasir resen berada paling dekat dengan laut dan selalu mendapat tambahan baru yang berupa endapan pasir, sedangkan beting pasir subresen dibentuk oleh bahan-bahan yang berupa endapan pasir tua, endapan sungai, dan bahan-bahan aluvial/ koluvial dari daerah sekitarnya.

e. Hidrologi

Terdapat 7 (tujuh) sungai yang melalui Kota Banda Aceh yang berfungsi diantaranya sebagai daerah aliran sungai dan sumber air baku dan kegiatan perikanan. Wilayah Kota Banda Aceh memiliki air tanah yang bersifat asin, payau dan tawar. Daerah dengan air tanah asin terdapat pada bagian utara dan timur kota sampai ke tengah kota. Air payau berada di bagian tengah kota membujur dari timur ke barat. Sedangkan wilayah yang memiliki air tanah tawar berada di bagian selatan kota membentang dari Kecamatan Baiturrahman sampai Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan

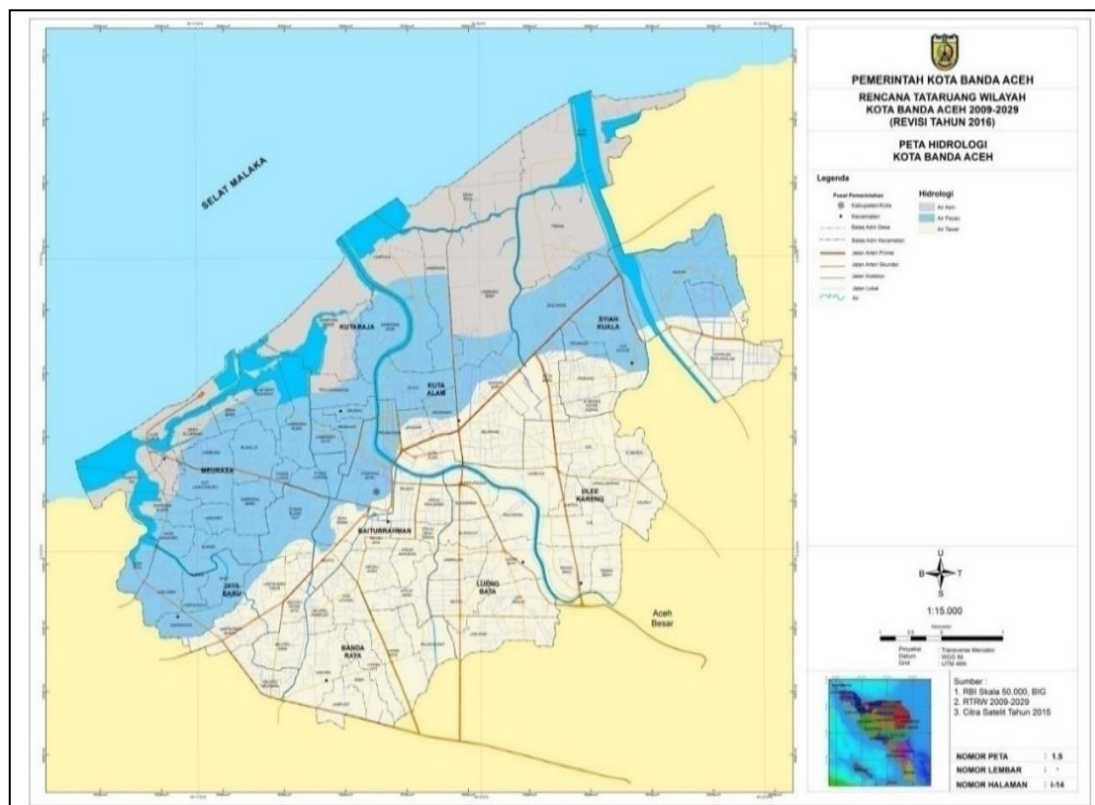
Lueng Bata, Kecamatan Ulee Kareng dan Kecamatan Banda Raya. Untuk mengetahui nama sungai dan panjang alirannya, dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2. 2
Nama Sungai dan Panjang Alirannya di Kota Banda Aceh

No	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Krueng Aceh	723,60
2	Krueng Daroy	3,60
3	Krueng Doy	2,00
4	Krueng Neng	4,10
5	Krueng Lueng Paga	26,33
6	Krueng Tanjong	2,25
7	Krueng Titi Panjang	1,60
8	Krueng Kon Keumeh	3,27
9	Krueng Geunasen	1,25

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Peta Hidrologi di Kota Banda Aceh dapat di lihat pada Gambar 2.4 berikut ini.



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2.4
Peta Hidrologi Kota Banda Aceh

f. Klimatologi

Schmidt dan Ferguson menentukan tipe iklim dengan menghitung angka perbandingan antara rata-rata bulan kering (BK) dengan bulan basah (BB) dikali 100 persen. Bulan kering ditandai dengan jumlah curah hujan kurang dari 60 mm, sedangkan bulan basah adalah jumlah curah hujan di atas 100 mm. Kondisi iklim Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kondisi Klimatologi Kota Banda Aceh Tahun 2024.

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (Hari)	Suhu (°C)	Kelembaban (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Januari	603.70	16	26.0	84.10
2	Februari	355.90	17	26.3	82.60
3	Maret	253.60	12	26.8	80.00
4	April	59.80	6	27.8	78.80
5	Mei	64.50	14	28.6	77.20
6	Juni	72.30	9	28.8	69.30
7	Juli	111.60	8	28.8	66.70
8	Agustus	53.70	11	28.2	71.30
9	September	131.60	20	27.5	75.00
10	Oktober	199.60	25	26.8	81.50
11	November	411.90	26	26.6	84.60
12	Desember	217.90	20	26.7	83.60
Jumlah		253.1	184	-	-
Rata-Rata		211.3	15	27.4	77.89

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025

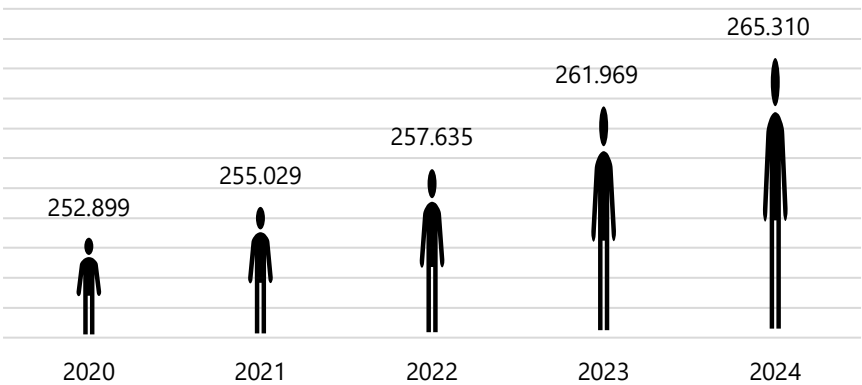
Tabel 2.3 menunjukkan bahwa curah hujan Kota Banda Aceh Tahun 2023 tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 603,70 mm dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 53,70 mm yang berlangsung selama 11 (sebelas) hari. Hari hujan terlama terjadi pada bulan November yaitu selama 26 hari. Secara keseluruhan, jumlah curah hujan selama tahun 2023 mencapai 253.1 mm, dengan rata-rata 211,3 mm/bulan. Rata-rata suhu udara pada tahun 2023 adalah 27,400C dengan kelembaban rata-rata sebesar 77,89 persen. Dari hasil perbandingan BK dan BB didapatkan nilai Q sebesar 0,25 yang menunjukkan tipe iklim di Kota Banda Aceh termasuk iklim tipe B (iklim basah).

2.2. Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah penduduk yang tercatat sebagai warga Kota Banda Aceh. Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2024 sebanyak 265.310 jiwa.

Secara rinci peningkatan jumlah penduduk Kota Banda Aceh dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.5 di bawah ini.



Gambar 2.5 Grafik Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024
Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2026

Berdasarkan data di atas pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Banda Aceh sebanyak 252.899 jiwa menurun daripada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena sensus penduduk dilakukan oleh BPS pada bulan September 2020 bersamaan dengan terjadinya pandemic Covid-19. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kota Banda Aceh meningkat menjadi 255.029 jiwa. Dan di tahun 2024 jumlah penduduk Kota Banda Aceh bertambah menjadi 265.310 jiwa. Data terkait jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Banda Aceh Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel. 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kelompok Umur	Kota Banda Aceh			
	Lk	Pr	Total Penduduk	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0-4	11.463	10.837	22.300	8.41
5-9	13.763	13.077	26.840	10.12
10-14	13.364	12.541	25.905	9.76

Kelompok Umur	Kota Banda Aceh			
	Lk	Pr	Total Penduduk	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15-19	1.603	11.166	22.769	8.58
20-24	9.282	9.106	18.388	6.93
25-29	8.986	9.894	18.880	7.12
30-34	10.476	11.596	22.072	8.32
35-39	11.293	12.284	23.577	8.89
40-44	10.831	10.718	21.549	8.12
45-49	8.762	8.134	16.896	6.37
50-54	7.169	7.101	14.270	5.38
55-59	5.455	5.803	11.258	4.24
60-64	4.174	4.248	8.422	3.17
65-69	2.743	2.724	5.467	2.06
70-74	1.576	1.795	3.371	1.27
75+	1.309	2.037	3.346	1.26
Total	132.249	133.061	265.310	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025

Tabel 2.4 menunjukkan komposisi penduduk di Kota Banda Aceh menurut kelompok umur dan jenis kelamin tertinggi adalah pada kelompok umur antara 5-9 tahun yaitu sebanyak 26.840 jiwa atau 10,12 persen dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebesar 13.763 jiwa atau 5,19 persen dan jenis kelamin perempuan sebesar 13.077 jiwa atau 4,93 persen. Sedangkan kelompok umur dan jenis kelamin terendah di Kota Banda Aceh adalah pada kelompok umur 75+ tahun, yakni sebesar 3.346 jiwa atau 1,26 persen dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebesar 1.309 jiwa atau 0,49 persen dan jenis kelamin perempuan sebesar 2.037 jiwa atau 0,77 persen. Untuk jumlah penduduk usia muda pada kelompok umur antara 10-14 tahun sebesar 25.905 jiwa atau 9,76 persen dan jumlah penduduk usia remaja pada kelompok umur 15-19 tahun sebesar 22.769 atau 8,58 persen.

Sedangkan di Kota Banda Aceh komposisi penduduk yang berada pada kelompok umur 5-9 tahun sebesar 26.840 jiwa, dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok umur 75 tahun keatas sebesar 3.346 jiwa. Pada tabel provinsi aceh sebagian besar penduduk Provinsi berada pada kelompok 0-4 tahun sebesar 506.039 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok umur (75+) tahun sebesar 91.871 Jiwa.

Permasalahan kependudukan yang terjadi di Kota Banda Aceh saat ini tidak jauh berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia. Salah satu masalah yang terjadi ialah

perpindahan penduduk dari daerah lain di Provinsi Aceh ke Kota Banda Aceh yang menyebabkan bertambahnya penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya di ibukota Provinsi. Daya tarik Kota Banda Aceh yang memiliki prasarana dan sarana yang relatif lebih baik dan berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, ekonomi, sosial dan bidang lainnya.

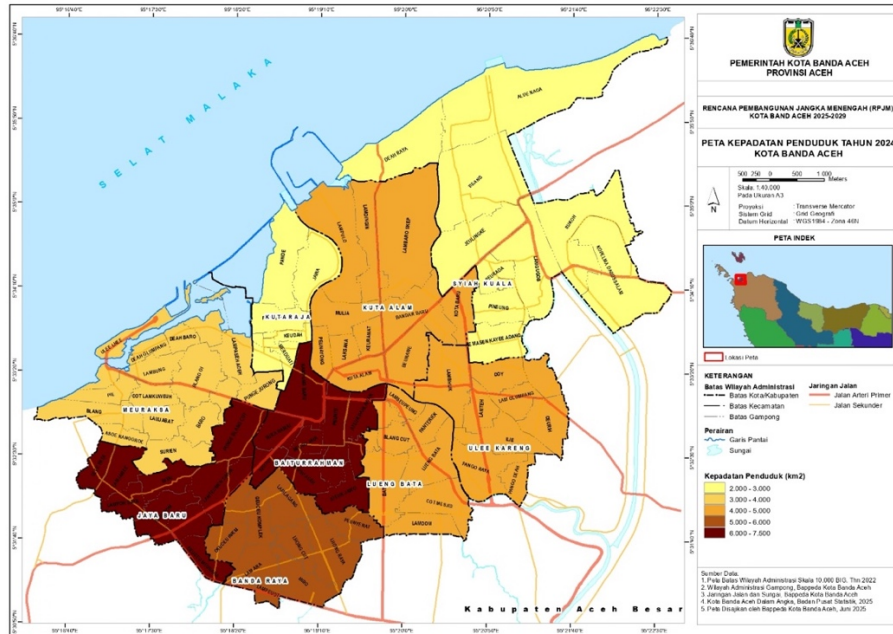
Di samping itu, untuk mengetahui indikator kependudukan Kota Banda Aceh yang meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, dan sex ratio penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5 Indikator Kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah	Jiwa	252.899	255.029	257.635	261,969	265.310
Pertumbuhan	%	-6,44	0,84	1,02	1,23	1,16
Kepadatan	Ribu Jiwa/ km ²	4,12	4,15	4,19	4,27	4,32
Sex Ratio	%	102	102	102	101,02	99,39

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2026

Laju pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 sebesar -6,44 persen yang diakibatkan oleh pandemi Covid 19. Namun pada tahun 2021 dan tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan sebesar 0,84 persen dan 1,02 persen. Pada tahun 2024 terus mengalami peningkatan sebesar 2,22 persen. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh tahun 2024 berjumlah 4.319 jiwa per km² yang mengalami peningkatan kepadatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 4.269 jiwa per km².



Gambar 2.6 Peta Kepadatan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025 (data diolah)

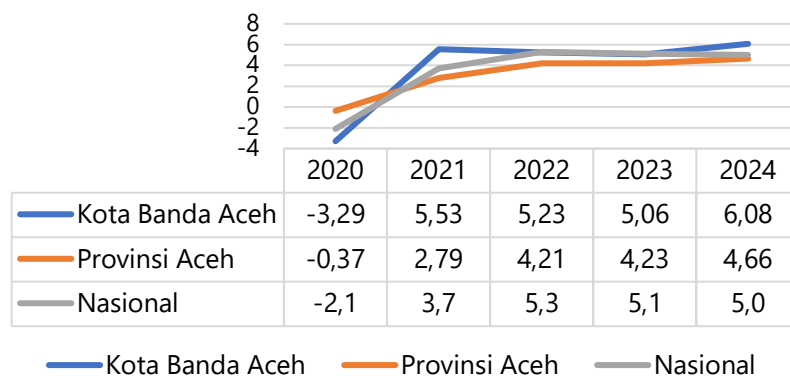
Berdasarkan data dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 jumlah rasio penduduk Kota Banda Aceh didominasi oleh jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 138.993 jiwa, jumlah penduduk Perempuan 131.328 jiwa dan pada tahun 2022 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 129.868 jiwa, jumlah penduduk Perempuan 127.767 jiwa. Pada tahun 2023 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 131.651, jumlah penduduk Perempuan 131.318 jiwa. Sedangkan pada tahun 2024 jumlah penduduk didominasi oleh perempuan dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 132.249 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 133.061 jiwa. Jika dipersentasekan, sex ratio dari tahun 2020 s/d 2022 mengalami kesamaan berjumlah 102 persen. Persentase sex ratio tahun 2023 sebesar 101,02 persen. Sedangkan persentase sex ratio tahun 2024 sebesar 99,39 persen. Artinya perkembangan peningkatan jumlah perempuan lebih.

2.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator kunci dalam menilai kinerja ekonomi suatu wilayah atau negara. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan proses perubahan

dalam kondisi perekonomian yang dapat terjadi secara positif maupun negatif, yang berarti perekonomian bisa mengalami peningkatan maupun penurunan dari waktu ke waktu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kota Banda Aceh Selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.7 Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Indonesia
Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2026

Gambar 2.7 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir mengalami trend yang fluktuatif. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh mengalami perlambatan akibat dari pandemi COVID-19 yang menghambat berbagai kegiatan ekonomi di Kota Banda Aceh. Seluruh sektor mengalami perlambatan yang pada akhirnya menurunkan secara drastis pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2020 menurun drastis sebesar -3.29%. Pertumbuhan ekonomi kembali meningkat pada tahun 2021 yaitu sebesar 5,53 %. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh kembali menurun pada tahun 2022 dan 2023. Kemudian pada tahun 2024 meningkat kembali sebesar 6,08%. Jika dilihat dari sisi pertumbuhannya, perekonomian Kota Banda Aceh secara umum tumbuh lebih baik dengan laju yang cenderung stabil jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Banda Aceh memiliki kemampuan yang baik dalam mempertahankan dan meningkatkan produksi sebagai ukuran perekonomiannya.

Kenaikan pertumbuhan ekonomi (PDRB) selama 3 tahun terakhir disebabkan adanya peningkatan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Struktur perekonomian Kota Banda Aceh hingga tahun 2024 didominasi oleh sektor jasa

yakni Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kedua kategori tersebut memiliki peranan yang besar hingga 43,36 persen terhadap pembentukan PDRB (masing-masing 22,06 persen dan 21,30 persen).

Sektor real estate dan jasa pendidikan mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir mengalahkan sektor konstruksi yang mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19. Pengerjaan beberapa proyek infrastruktur berskala besar seperti Trans Studio Mall yang terhenti akibat pandemi Covid-19 menjadi kegagalan dalam kegiatan ekonomi sebagai penyumbang nilai tambah yang besar sekaligus meningkatkan percepatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh secara keseluruhan. Terdapat tiga sektor yang tumbuh di atas 10 persen (dua digit) pada tahun 2024 yakni sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (22,06 persen), sektor perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor (21,30 persen), dan sektor transportasi dan pergudangan (11,09), Sedangkan sektor lainnya masih dibawah 10 persen.

Dalam perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku masih terdapat pengaruh perubahan harga sehingga dapat memberikan pengertian yang salah akan perkembangan perekonomian. Untuk itu agar dapat melihat perkembangan riil PDRB maka digunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2022. Nilai PDRB ADHK Kota Banda Aceh pada tahun 2022 sebesar Rp16,25 Juta naik pada tahun 2023 sebesar Rp17,07 juta. Adapun perkembangan PDRB atas dasar harga konstan kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut

Tabel 2.6 Nilai dan Kontribusi Per Sektor PDRB Tahun 2020 s.d 2024 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Banda Aceh

No	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	246,29	1,33	253,95	1,27	274,74	1,27	393,38	1,65	458,49	1,76
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	395,97	2,14	436,74	2,19	480,55	2,23	493,48	2,08	541,49	2,08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	70,81	0,38	71,84	0,36	74,61	0,35	79,44	0,33	85,56	0,33
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30,27	0,16	30,02	0,15	33,34	0,15	35,10	0,15	43,21	0,17
6	Konstruksi	1 175,72	6,35	1 194,85	5,99	1 280,42	5,94	1 358,68	5,71	1.468,05	5,64
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3 875,51	20,95	4 208,23	21,1	4 563,76	21,17	5 237,04	22,03	5.543,51	21,30
8	Transportasi dan Pergudangan	1 352,99	7,31	1 714,52	8,60	1 928,40	8,95	2 338,13	9,83	2.886,61	11,09
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	785,44	4,25	769,87	3,86	1 022,32	4,74	1 220,85	5,13	1.313,40	5,05
10	Informasi dan	960,39	5,19	999,34	5,01	1 107,86	5,14	1 283,92	5,40	1.294,40	4,97

No	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Komunikasi										
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	611,61	3,31	621,35	3,12	653,53	3,03	591,19	2,49	702,69	2,70
12	Real Estate	1 545,84	8,36	1 604,64	8,05	1 719,40	7,98	1 803,85	7,59	1.880,74	7,23
13	Jasa Perusahaan	464,11	2,51	475,35	2,38	534,02	2,48	551,75	2,32	577,47	2,22
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4 326,81	23,39	4 729,95	23,72	4 808,66	22,31	5 121,50	21,54	5.741,91	22,06
15	Jasa Pendidikan	1 473,45	7,96	1 548,02	7,76	1 631,47	7,57	1 703,04	7,16	1.828,82	7,03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	796,39	4,30	881,69	4,42	990,93	4,60	1 047,41	4,41	1.106,84	4,25
17	Jasa lainnya	390,02	2,11	403,01	2,02	452,97	2,10	518,72	2,18	551,94	2,12
	PDRB	18 501,63	100	19 943,40	100	21 556,95	100	23 777,46	100	26.025,15	100

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 202

Tabel 2.7 Nilai dan Kotribusi Per Sektor dalam PDRB Tahun 2020 s.d 2024 Atas Dasar Harga Konstan Kota Banda Aceh (Juta)

No	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	170,01	4,64	170,11	0,06	177,65	4,43	242,84	36,69	272,48	12,21
2	Pertambangan dan Penggalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	307,51	-4,72	315,96	2,75	323,95	2,53	323,85	-0,03	349,38	7,89
4	Pengadaan Listrik dan Gas	68,84	5,76	68,64	-0,28	70,21	2,28	73,12	4,14	75,78	3,64
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,82	-2,76	16,67	-0,88	18,30	9,79	18,55	4,19	19,40	4,58
6	Konstruksi	1 008,50	4,42	1 019,22	1,06	1 022,54	0,33	1 060,13	3,68	1.135,08	7,07
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 940,62	-5,13	3 073,18	4,51	3 274,16	6,54	3 541,43	8,16	3.633,29	2,59
8	Transportasi dan Pergudangan	1 366,71	-24,53	1 717,31	25,65	1 821,86	6,09	1 899,29	4,26	2.222,59	17,02
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	467,19	-11,56	451,62	-3,33	581,06	28,66	692,61	19,20	732,39	5,74
10	Informasi dan Komunikasi	1 245,76	9,52	1 350,92	8,44	1 476,56	9,30	1 599,55	8,33	1.678,59	4,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	415,51	2,24	400,82	-3,53	395,10	-1,43	352,12	-10,88	412,19	17,06

No	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Real Estate	1 097,92	-3,10	1 135,07	3,38	1 183,77	4,29	1 221,17	3,16	1.275,40	4,44
13	Jasa Perusahaan	345,92	-3,87	348,24	0,67	375,40	7,80	372,33	-0,82	393,86	5,78
14	Administrasi	3 206,04	-1,57	3 326,18	3,75	3 341,84	0,47	3 427,18	2,55	3.576,10	4,35
	Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib										
15	Jasa Pendidikan	1 036,33	5,31	1 065,12	2,78	1 102,63	3,52	1 128,80	2,37	1.183,96	4,89
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	639,73	7,11	675,86	5,65	740,26	9,53	749,45	1,24	758,32	1,18
17	Jasa lainnya	310,89	0,17	315,03	1,33	352,64	11,94	377,45	7,04	398,96	5,70
	PDRB	14 644,29	-3,39	15 449,97	5,50	16 257,93	5,23	17 079,85	5,06	18.117,78	6,08

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2026

Tabel 2.7 diatas menunjukkan bahwa bila dibandingkan untuk setiap lapangan usaha/sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 pada masing-masing lapangan usaha ada yang mengalami peningkatan akan tetapi juga ada sedikit yang mengalami penurunan dibandingkan di tahun 2020. Peningkatan laju pertumbuhan terbesar dialami oleh sektor jasa keuangan dan asuransi. Sektor ini mengalami peningkatan laju pertumbuhan yang sangat signifikan dibanding tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 17,06 persen. Terdapat 3 sektor berdasarkan PDRB ADHB dan ADHK yang mengalami pertumbuhan di atas 10 persen (dua digit) pada tahun 2023. Berdasarkan PDRB ADHB terdapat tiga sektor yaitu administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib (22,06 persen), perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (21,30 persen) dan transportasi dan pergudangan(11,09 persen) Sedangkan berdasarkan PDRB ADHK juga terdapat tiga sektor yang mengalami pertumbuhan diatas 10 persen yaitu sektor jasa keuangan dan asuransi (17,06 persen), transportasi dan pergudangan (17,02 persen), dan pertanian, kehutanan, dan perikanan (12,21 persen).

Adapun Distribusi PDRB berdasarkan pengeluaran dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang menunjukkan kontributor terbesar pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Komponen ini terlihat mendominasi dalam PDRB yang melebihi 50 persen sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8 Distribusi PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024

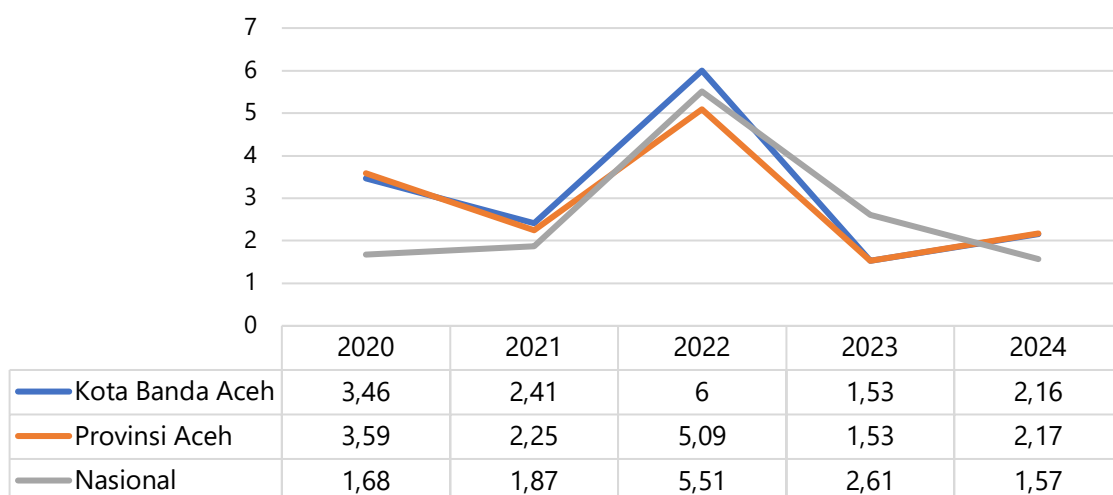
Komponen	2020		2021		2022		2023		2024	
	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60,38	-2,12	58,46	2,36	57,14	3,43	55,73	4,33	53,62	3,57
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,75	-5,44	1,59	-2,78	1,63	9,98	1,64	9,90	1,81	14,68
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	42,69	-6,85	41,70	2,95	37,14	-5,83	35,27	1,32	37,17	14,13
Pembentukan Modal Tetap Bruto	25,21	2,00	24,22	0,85	23,29	0,37	23,52	5,87	24,26	8,43

Komponen	2020		2021		2022		2023		2024	
	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Perubahan Inventori	0,78	-29,41	0,91	4,90	0,87	4,22	0,85	-	0,10	-
Net Ekspor	-30,81	-2,72	-26,88	-20,6	-20,06	-48,32	-17,01	-	-16,95	-
P D R B	100,00	-3,39	100,00	5,50	100,00	5,23	100,00	5,06	100,00	6,08

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2026

Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Laju inflasi adalah tingkat perubahan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Laju inflasi mengukur seberapa cepat harga-harga meningkat, yang mencerminkan penurunan nilai mata uang. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, sementara inflasi yang terlalu rendah atau deflasi dapat mengindikasikan stagnasi ekonomi. Adapun laju inflasi di kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:



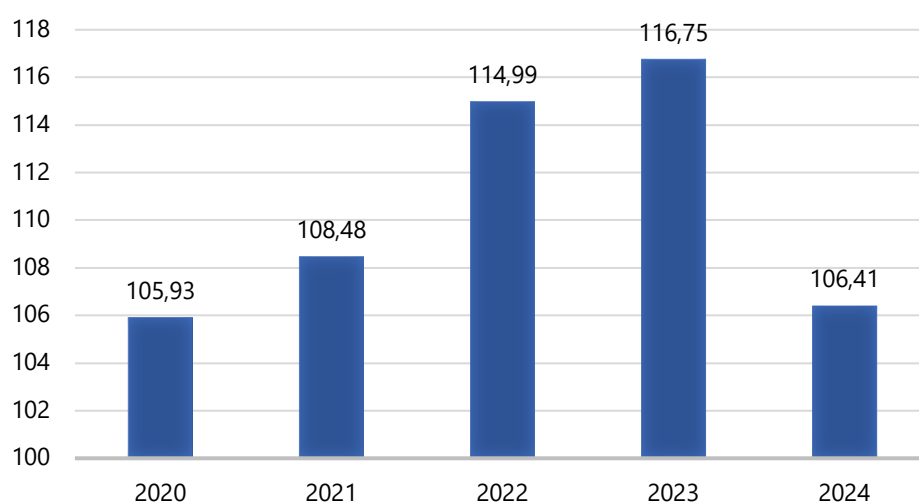
Gambar 2.8 Grafik Laju Inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2026

Gambar 2.8 di atas menunjukkan bahwa laju inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional cukup fluktuatif. Pada tahun 2024 laju inflasi Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023, sedangkan laju inflasi nasional mengalami penurunan dari tahun 2023. Pada tahun 2022 laju inflasi Kota Banda Aceh lebih tinggi dibandingkan laju inflasi Provinsi Aceh dan Nasional. Fluktuasi dari laju inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh menunjukkan adanya kejutan/*shock* yang disebabkan faktor-faktor penyebab inflasi baik dari sisi permintaan (masyarakat) atau yang lebih dikenal dengan istilah tarikan dari sisi permintaan (*demand pull inflation*) ataupun dari sisi penawaran (pelaku usaha) atau dikenal dengan istilah dorongan dari sisi penawaran (*cost push inflation*).

Perhitungan inflasi ini menggunakan Indeks Harga Konsumen baru dengan tahun dasar 2012 sejak tahun 2014. Perbedaan perhitungan tahun dasar ini juga membedakan cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. IHK adalah salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen.

Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai indikator inflasi dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH). SBH mencakup tujuh (7) kelompok yaitu: bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; transpor, komunikasi, dan jasa keuangan. IHK ditampilkan dalam gambar 2.9 berikut:



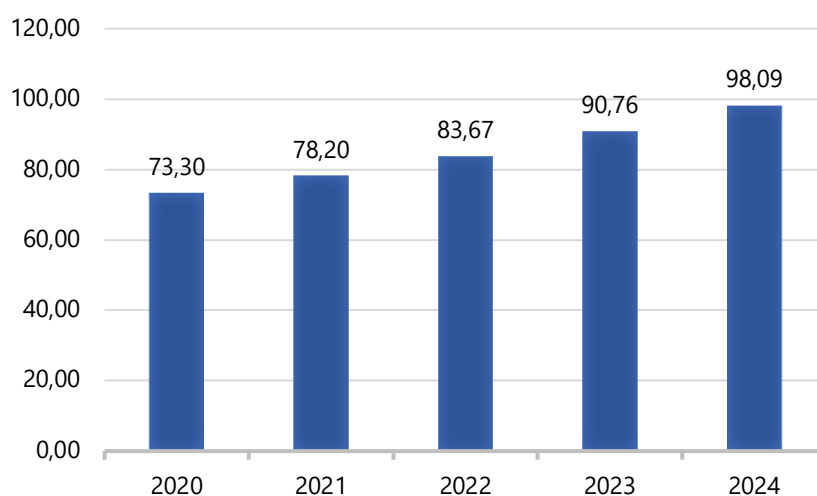
Gambar 2.9 Indeks Harga Konsumen Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025

Secara umum, perkembangan IHK Kota Banda Aceh tumbuh positif sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. IHK Kota Banda Aceh meningkat dari 105,93% menjadi 116,75% pada 2023. IHK yang semakin meningkat mengindikasikan naiknya tingkat harga umum. Hal ini akan mendorong perubahan pada daya beli masyarakat, terutama bagi masyarakat yang pendapatannya tetap atau tidak naik secara cepat mengingat mereka akan semakin sulit menjangkau harga barang yang semakin tinggi. Sedangkan pada tahun 2024 IHK Kota Banda Aceh mengalami penurunan yang berarti perubahan positif pada daya beli masyarakat yakni dari 116,75% tahun 2023 menjadi 106,41% di tahun 2024.

PDRB Per Kapita

Pendapatan perkapita yang dihitung dari PDRB perkapita merupakan salah satu indikator awal untuk mengukur kesejahteraan penduduk suatu daerah. PDRB Perkapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh sebab itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB perkapita dan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Semakin tinggi pendapatan per kapita sering dikaitkan dengan semakin baiknya tingkat kesejahteraan penduduk di daerah tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Adapun nilai PDRB Perkapita kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada Gambar 2.10 berikut ini.

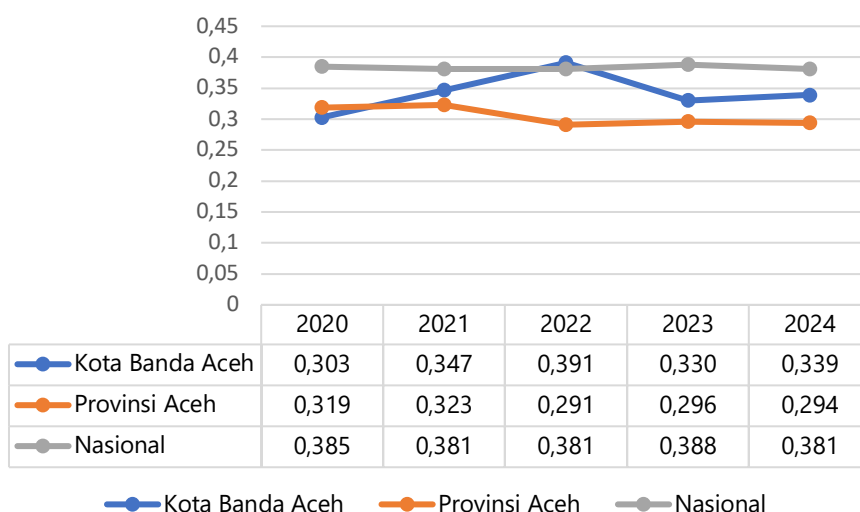


Gambar 2.10 PDRB Per Kapita Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2025

Berdasarkan gambar 210 di atas menunjukkan bahwa PDRB perkapita Kota Banda Aceh atas dasar harga berlaku selama periode Tahun 2020 sampai Tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan. PDRB kota Banda Aceh pada tahun 2024 mencapai angka 98.09 juta rupiah.

Indeks Gini Rasio

Indeks Gini merupakan indikator untuk mengukur ketimpangan pengeluaran. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai Indeks Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks Gini mampu mencerminkan tingkat pemerataan kesejahteraan. Perkembangan Indeks Gini Banda Aceh, Aceh dan nasional tahun 2020-2024 ditampilkan dalam gambar 2.11.



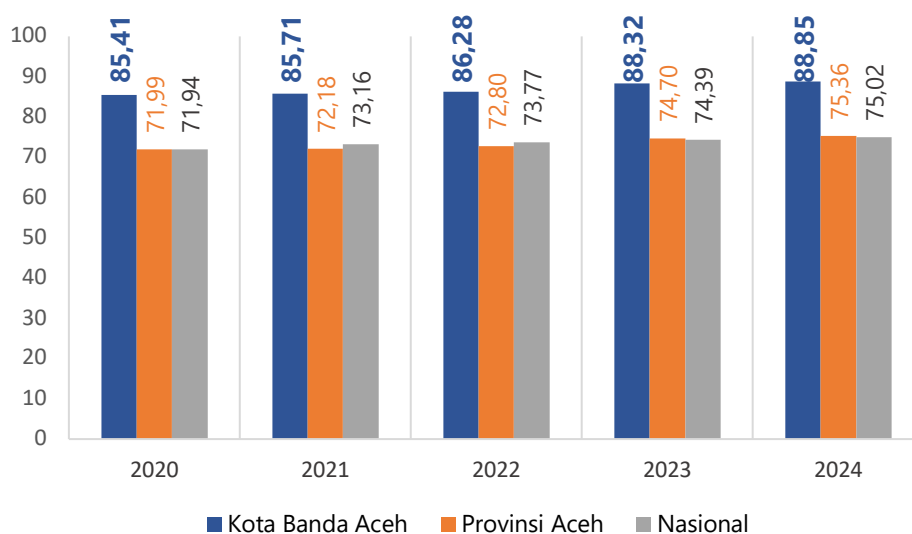
Gambar 2.11 Gini Ratio Kota Banda Aceh, Aceh, dan Nasional
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 gini ratio kota Banda Aceh masih berada pada kisaran mendekati nilai “nol”. Nilai indeks yang terendah sebesar 0,303 berada pada tahun 2020. Ketimpangan pendapatan rendah di tahun 2020 didukung dengan menurunnya tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh yakni sebesar 6,90 persen. Indeks Gini Kota Banda Aceh pada tahun 2021 sampai dengan 2024 berfluktuasi dari 0,347 menjadi 0,339 akan tetapi masih jauh dari angka “satu”. Indeks gini ini termasuk dalam kategori ketimpangan moderat. Dari segi ketimpangan, dapat dikatakan Kota Banda Aceh masih dalam tingkat pemerataan yang baik. Namun, melonjaknya indeks gini sejak 2020 perlu diantisipasi dengan kebijakan pemerataan ekonomi yang lebih efektif.

Indeks Gini Kota Banda Aceh menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang stabil dan rendah dibandingkan dengan tingkat Provinsi Aceh dan Nasional pada tahun 2020. Indeks Gini kota Banda Aceh menjadi lebih tinggi dari provinsi Aceh pada tahun 2021 dan 2024, dan lebih tinggi dari nasional di tahun 2022 oleh karenanya perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih baik dan merata di masa depan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Perhitungan IPM melibatkan tiga dimensi, yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak. Ada empat indikator yang digunakan yaitu angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita disesuaikan. Perkembangan IPM Kota Banda Aceh, Aceh dan Nasional tahun 2020-2024 ditunjukkan dalam grafik berikut.



Gambar 2.12 IPM Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2020-2024

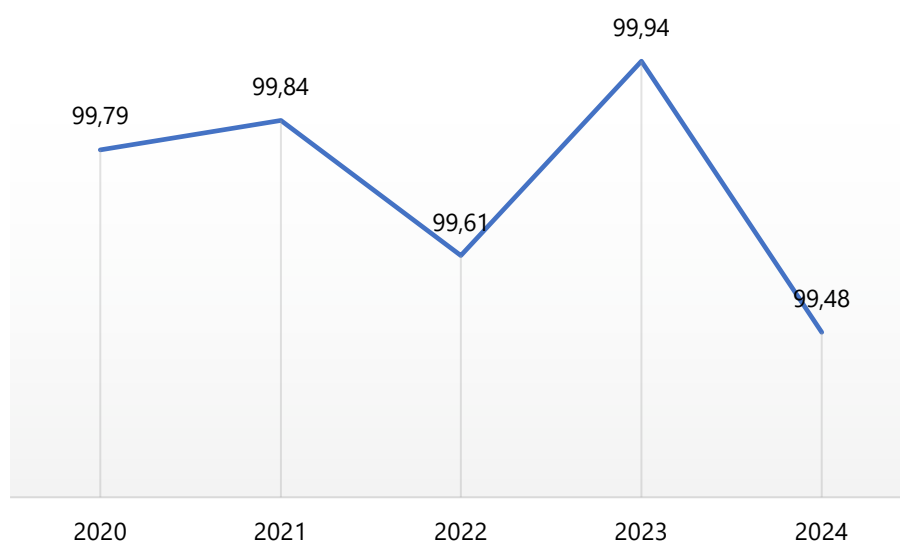
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025

Gambar 2.12 diatas menunjukkan bahwa IPM Kota Banda Aceh mengalami trend yang terus meningkat setiap tahun, terlihat peningkatan IPM dari 85,41 pada 2020 menjadi 88,85 pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Banda Aceh terus membaik seiring berjalannya waktu. Angka ini lebih tinggi dari provinsi Aceh (75,36 persen) dan nasional (75,02 persen), menunjukkan bahwa

pembangunan manusia di Kota Banda Aceh mengungguli Aceh dan Nasional. Kesenjangan IPM antara Banda Aceh dan Provinsi Aceh menunjukkan adanya kesenjangan kualitas pembangunan manusia antara Kota Banda Aceh dan kabupaten lainnya di Provinsi Aceh. Tingginya kesenjangan dalam pembangunan manusia di Kota Banda Aceh dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh adalah salah satu pemicu tingginya migrasi penduduk terutama tenaga kerja ke Kota Banda Aceh.

Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf merujuk pada persentase populasi yang memiliki kemampuan membaca dan menulis. Pengukuran ini mencerminkan tingkat literasi dalam suatu masyarakat, yang menjadi indikator penting untuk mengukur pendidikan dan perkembangan manusia. Angka melek huruf digunakan sebagai alat evaluasi kualitas pendidikan dan kemampuan fungsional masyarakat dalam berbagai konteks. Dengan memantau angka melek huruf, pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi internasional dapat menilai efektivitas program-program pendidikan, mengidentifikasi kelompok yang memerlukan dukungan tambahan, dan merancang kebijakan literasi yang lebih tepat sasaran. Untuk mengetahui angka melek huruf di Kota Banda Aceh selama periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Gambar 2.13.



Gambar 2.13 Angka Melek Huruf (%)

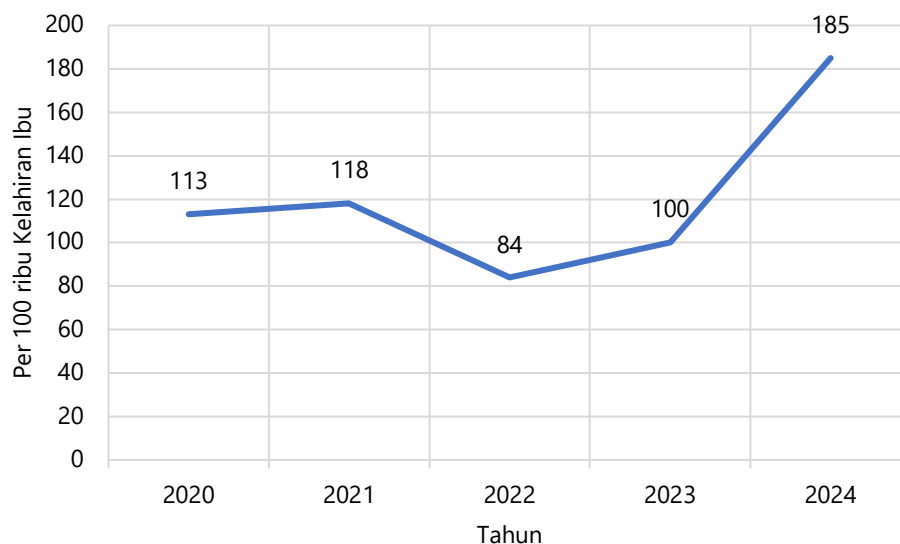
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025

Gambar tersebut menunjukkan angka melek huruf dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, angka melek huruf tercatat sebesar 99,79%. Angka ini mengalami peningkatan kecil pada tahun 2021 menjadi 99,84%. Pada tahun 2022,

angka melek huruf mengalami penurunan menjadi 99,61%. Meski begitu, pada tahun 2023, angka melek huruf kembali meningkat signifikan dan mencapai titik tertinggi selama periode yang ditunjukkan, yaitu 99,94%. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan di titik terendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan angka melek huruf di tahun 2024 mengindikasikan adanya upaya-upaya yang perlu dibenahi untuk meningkatkan literasi di masyarakat pada masa yang akan datang.

Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita

Angka kematian ibu (AKI) adalah suatu indikator statistik yang mengukur jumlah kematian yang terjadi pada ibu saat hamil, melahirkan, atau dalam 42 hari setelah melahirkan, per 100,000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Banda Aceh pada 2020 adalah 113 dari 100.000 kelahiran hidup.



Gambar 2.14 Angka Kematian Ibu

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2025

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Banda Aceh menunjukkan pola fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Setelah mencatat kenaikan dari 113 kasus pada 2020 menjadi 118 pada 2021, terjadi penurunan signifikan menjadi 84 pada 2022, yang sempat menjadi titik optimistis dalam upaya penurunan risiko maternal. Namun, angka tersebut kembali meningkat menjadi 100 pada 2023, dan melonjak tajam menjadi 185 pada 2024.

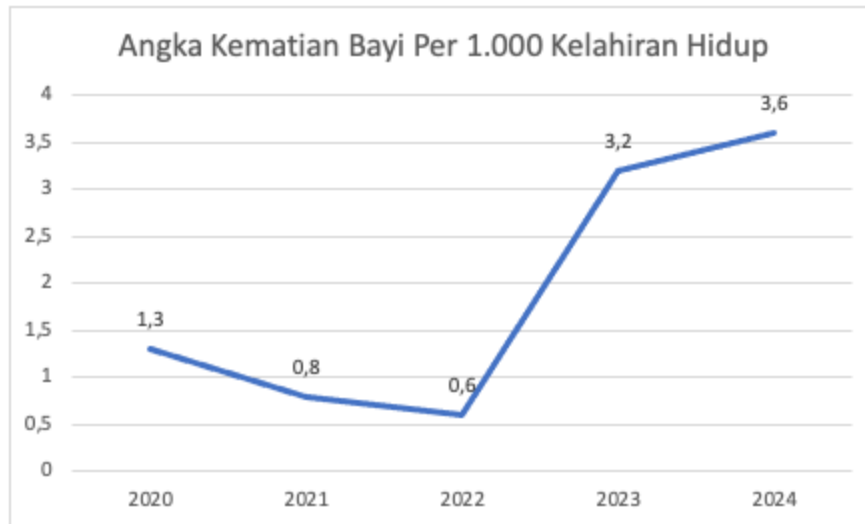
Tren ini mengindikasikan bahwa meskipun telah terjadi upaya perbaikan layanan kesehatan ibu dan anak, sistem belum sepenuhnya resilien dalam merespons

dinamika lapangan. Capaian 2024 juga melebihi target RPJMN 2020–2024 (183 per 100.000 kelahiran hidup) dan masih jauh dari target SDGs (<70), sehingga intervensi lintas sektor mutlak dibutuhkan. Penanganan kasus berisiko tinggi, penguatan peran bidan komunitas, serta literasi kesehatan ibu hamil menjadi bagian penting dalam strategi perbaikan ke depan.

Salah satu indikator utama kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan naik turunnya angka kematian bayi, diantaranya:

- 1) masih ada ibu dengan penyakit penyerta yang ingin hamil tanpa direncanakan dengan baik;
- 2) masih rendahnya kepedulian dan keterampilan petugas dalam penatalaksanaan ibu hamil dan bayi;
- 3) kurangnya kepedulian keluarga terhadap ibu hamil dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perawatan bayi;
- 4) wanita usia subur (WUS) yang menderita Kurang Energi Kronis (KEK) dan anemia kurang mendapat perhatian sehingga saat hali akan menimbulkan risiko bagi janin yang dikandung.

Sampai dengan akhir tahun 2024 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Banda Aceh sebanyak 3,6 bayi per 1000 kelahiran hidup. Jumlah ini meningkat dibandingkan kasus kematian bayi tahun 2023 dimana AKB sebesar 3,2 per 1000 kelahiran hidup. Ada banyak faktor yang mempengaruhi AKB tetapi tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat AKB.



Gambar 2.15

Perkembangan AKB Banda Aceh Tahun 2020 – 2024
Sumber : Profil Kesehatan Kota Banda Aceh, 2020-2024

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan angka kematian bayi di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan. Trend yang meningkat ini perlu mendapat perhatian dari pihak terkait. Diperlukan usaha dari pihak terkait untuk terus berupaya menurunkan angka kematian bayi.

Indikator Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang melingkupi banyak faktor termasuk ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Arti kemiskinan lebih dari sekedar rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari indikator kesejahteraan terukur seperti garis kemiskinan, namun berkaitan juga dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses kebutuhan dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. Mengingat multidimensionalnya permasalahan kemiskinan, penanganannya memerlukan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh.\

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin yang dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu. Dalam hal ini, perhatian

terfokus pada golongan penduduk “termiskin” yang ditetapkan misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/ pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”. dengan menggunakan definisi ini, penduduk miskin di suatu negara kaya dapat dikategorikan sebagai penduduk sejahtera di negara berkembang seperti Indonesia.

Selain itu, juga dikenal terminologi kemiskinan lain seperti kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan bahwa “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat.

Kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang sehingga ia tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Dalam hal ini, faktor-faktor adat dan budaya justru menyebabkan seseorang tetap dalam kemiskinan. Hal ini seperti yang dialami oleh suku terasing yang terikat dengan tradisi sosio-kultural seperti suku Badui, suku Dayak di pedalaman Kalimantan dan lain-lain. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan demikian, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan dapat diinterpretasikan sebagai jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Tabel 2.9
Persentase Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Garis Kemiskinan
di Kota Banda Aceh 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Banda Aceh (persen)	6,90	7,61	7,13	7,04	6,95
2	Provinsi Aceh (persen)	14,99	15,33	14,64	14,45	12,64
3	Nasional (persen)	9,78	10,14	9,54	9,36	8,57
4	Penduduk Miskin (Jiwa)	18,970	20,950	19,900	19.940	19.970
5	Garis Kemiskinan (Rp.)	674.977	698.617	737.016	814.530	862.944

Sumber: BPS Pusat, BPS Propinsi Aceh dan BPS Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin di Kota Banda Aceh selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan dari 7,61 persen di tahun 2021 menjadi 6,95 persen pada tahun 2024. Ini merupakan perkembangan yang sangat menggembirakan karena Kota Banda Aceh terus menuju pemberantasan kemiskinan.

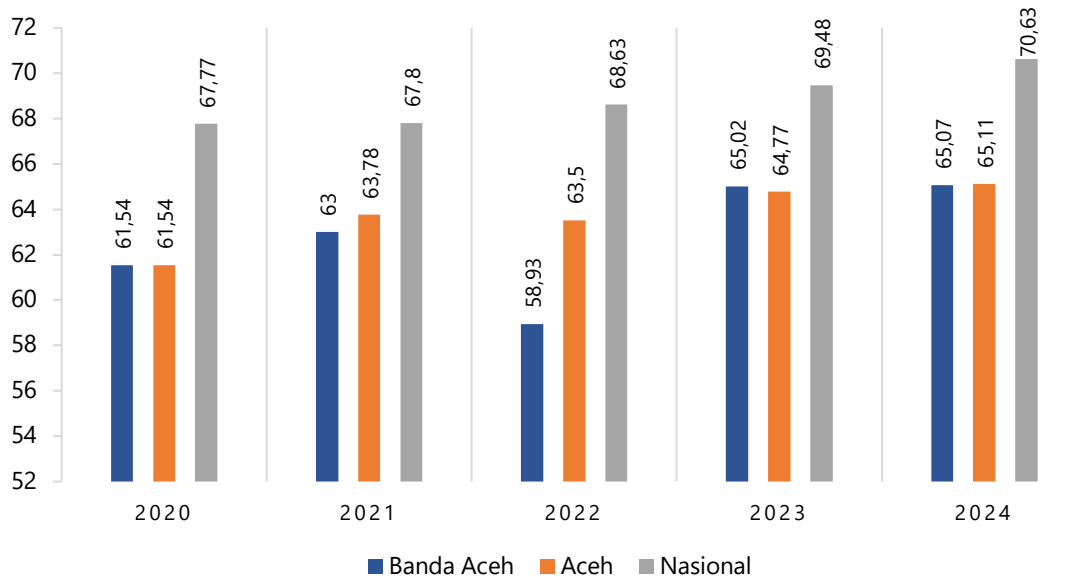
Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Banda Aceh, menunjukkan trend peningkatan meskipun persentase penduduk miskinnya berkurang. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan laju peningkatan kesejahteraan.

Garis kemiskinan di Kota Banda Aceh terus menunjukkan peningkatan. Jika dilihat dari trend sejak tahun 2020 sampai dengan 2024. Di tahun 2024 garis kemiskinan di Kota Banda Aceh mencapai angka Rp. 862.944 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 48.414 bila dibandingkan dengan garis kemiskinan tahun 2023. Garis kemiskinan Kota Banda Aceh merupakan yang tertinggi di provinsi Aceh yang berarti batas pengeluaran penduduk miskin juga paling tinggi di Aceh.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah salah satu indikator yang bisa mengukur persentase penduduk yang bekerja. TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK

mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Banda Aceh Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.16 dibawah ini:



Gambar 2.16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.16 di atas memperlihatkan bahwa angka TPAK setiap tahunnya mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 semakin meningkat baik di kota Banda Aceh, provinsi Aceh, dan nasional. Hanya TPAK Kota terjadi penurunan ada tahun 2022 dengan 58,93. Selain tahun tersebut terjadi kenaikan sampai pada tahun 2024. Akan tetapi, TPAK Kota Banda Aceh selama beberapa tahun terakhir selalu lebih rendah dibandingkan dengan provinsi Aceh dan nasional. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja di kota Banda Aceh yang mengindikasikan masih kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan menambah pengangguran. Semakin tingginya pengangguran dapat menambah jumlah penduduk miskin di kota Banda Aceh.

Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh sebagai dinas yang berhubungan langsung dengan pengangguran telah melakukan usaha-usaha pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja setiap tahunnya melalui BLK Kota Banda

Aceh. Pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan setiap tahun nya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Jenis Pelatihan yang dilakukan Disnaker Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Kejuruan Pelatihan	Tahun					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
Menjahit pakaian dengan mesin	80	32	32	48	16	208
Teknisi Cooling System	16	0	0	32	16	64
Teknisi Sepeda Motor	32	16	16	16	-	96
Las Listrik	32	36	16	32	16	116
Kewirausahaan Membuat Kue	32	32	32	32	16	144
Tata Rias Pengantin dan Hantaran	0	0	32	32	16	80
Kecantikan kulit	0	0	0	0	16	16
Pariwisata/English for Tour Guides	0	0	0	16	0	16
Penggambaran Auto CAD	0	16	0	0	0	16
Estimator Bangunan Gedung	0	0	16	16	16	48
Juru Gambar Arsitektur	0	0	16	16	0	32
Pengolahan Ikan	0	0	16	16	16	48
Front Office Kejuruan Pariwisata	0	0	0	16	0	16
Menjahit Set Bed Cover	0	0	0	0	16	16
Jumlah	192	132	176	272	144	916

Tabel 2.10 menunjukkan secara rata-rata dalam 5 tahun terakhir (2020-2024), Pemerintah Kota Banda Aceh hanya mampu memberikan pelatihan untuk pengangguran/pencari kerja sebanyak rata-rata 183 orang per tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah pencari kerja yang mencapai 388 orang per tahun, maka Kota Banda Aceh belum bisa memenuhi keseluruhan pencari kerja untuk mengikuti pelatihan yang diberikan. Jumlah pencari kerja di Kota Banda Aceh untuk periode 2020-2025 terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.17 Jumlah Pencari Kerja Tahun 2020 – 2024

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka, 2025

Pemerintah Kota Banda Aceh terus meningkatkan perbandingan antara jumlah pencari kerja terdaftar dengan pelatihan yang diberikan. Namun berdasarkan data tahun 2023 dan 2024 terlihat bahwa jumlah pelatihan yang dibuat lebih banyak dari jumlah pencari kerja, hal ini kemungkinan masih banyak pencari kerja yang belum terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap APBD

Pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh dari tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan tren meningkat. Tahun 2020 PAD Kota Banda Aceh adalah sebesar Rp. 227,729 miliar, namun tahun 2021 turun menjadi 224,621 miliar. Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 314,822 miliar dan kembali turun tahun 2023 menjadi 287,441 miliar. Tahun 2024 kembali meningkat menjadi 324,931 miliar. Sementara itu, APBD Kota Banda Aceh juga mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2025. Namun bila dilihat dari rasio PAD terhadap APBK, terlihat tren yang meningkat secara konsisten. Untuk selengkapnya dapat dilihat padatable berikut ini:

Tabel 2.11 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD Kota Banda Aceh 2020-2024

Uraian	PAD	APBK	Kontribusi (%)
Realisasi 2020	227.729.361.364	1.258.996.719.879	18,09
Realisasi 2021	224.421.757.903	1.209.579.173.418	18,55
Realisasi 2022	314.822.335.792	1.355.675.342.907	23,22
Realisasi 2023	287.441.269.069	1.258.600.994.660	22,84
Realisasi 2024	324.931.657.286	1.320.752.493.749	24,60

Sumber: *Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh, 2025*

Persentase Pengeluaran Non Makanan

Persentase pengeluaran non makanan rata-rata penduduk Kota Banda Aceh dalam 5 tahun terakhir (2020 – 2024) sebesar 57,72%, baik pada penduduk dengan pendapatan rendah, sedang maupun tinggi. Sedangkan pengeluaran makanan hanya 42,28%.

Pengeluaran non makanan merupakan biaya konsumsi rumah tangga selain pangan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi, yang menjadi indikator penting tingkat kesejahteraan. Komponen utamanya meliputi sewa rumah/listrik, belanja sandang, barang tahan lama, dan aneka jasa, yang sering kali meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. Perkembangan pengeluaran non makanan penduduk Kota Banda Aceh tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.12 Persentase Pengeluaran Non Makanan Kelompok Pengeluaran Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Makanan (%)	41,95	40,63	41,08	44,80	42,93
Pengeluaran Non Makanan (%)	58,05	59,37	58,92	55,20	57,07

Sumber : *Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2026*

Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan

Sepanjang tahun 2020-2024 rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat di Kota Banda Aceh dalam sebulan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah sebesar Rp. 2.402.736 jauh meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata pendapatan yang diperoleh lebih dominan dikeluarkan untuk belanja non makanan dibandingkan makanan. Hal tersebut dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.13 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kota Banda Aceh Tahun 2020- 2024 (rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Makanan (Rp)	839.685	973.988	903.779	939.850	1.031.427
Pengeluaran Non Makanan (Rp)	1.161.846	1.423.313	1.296.525	1.157.905	1.371.309
Jumlah (Rp)	2.001.531	2.397.301	2.200.304	2.097.755	2.402.736

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2026

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Penggunaan moda angkutan darat sangat dipengaruhi oleh jalan yang tersedia di wilayah Kota Banda Aceh. Sebagai barang publik yang merupakan bagian dari layanan public pemerintah Kota Banda Aceh, jalan raya mempunyai kapasitas tertentu agar dapat dilalui dengan nyaman. Berikut perkembangan panjang jalan dan kendaraan di Kota Banda Aceh. indikator yang membandingkan total panjang jalan (km) dengan jumlah kendaraan (unit) untuk mengukur kapasitas akses jalan terhadap beban kendaraan

Tabel 2.14
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan (km)	765,66	765,66	765,66	683,65	683,65
2	Jumlah kendaraan	281.698	294.330	303.648	294.244	340.279
	Rasio	0,27	0,26	0,25	0,23	0,20

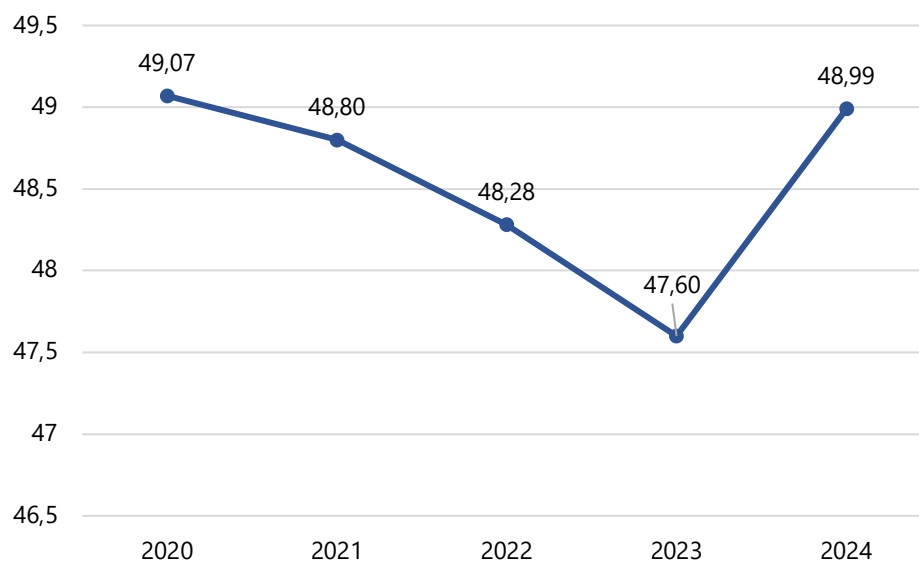
Sumber: Dinas Perhubungan, 2026

Semakin rendah rasionya (semakin sedikit panjang jalan per kendaraan), semakin tinggi risiko kemacetan lalu lintas karena jalan semakin padat.

Peningkatan pendapatan dan aktivitas ekonomi menyebabkan jumlah kendaraan yang melalui jalan-jalan di Kota Banda Aceh bertambah dari tahun ke tahun sementara penambahan jalan sulit dilakukan mengingat luas area kota tidak mungkin bertambah. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan di jalan-jalan utama dalam kota. Oleh karena itu, kemacetan menjadi permasalahan yang mempunyai urgensi tinggi untuk diselesaikan dalam urusan perhubungan di Kota Banda Aceh.

Rasio Ketergantungan Penduduk

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk memperlihatkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun atau lebih) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15 sampai dengan 65 tahun). Rasio ketergantungan yang tinggi menunjukkan tingginya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Rasio ketergantungan Kota Banda Aceh ditunjukkan dalam gambar berikut.



Gambar 2.18 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Banda Aceh
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan gambar 2.18 di atas, dari tahun 2020 hingga 2023, terdapat tren penurunan yang konsisten dalam angka kebergantungan penduduk, dari 49.07 menjadi 47.60. Ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang tidak aktif berkurang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk usia kerja relatif terhadap mereka yang di luar angkatan kerja (anak-anak dan orang tua). Pada tahun 2024, angka kebergantungan meningkat kembali menjadi 48.99 setelah mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut sebelumnya. Angka ini menjelaskan bahwa setiap 100 penduduk yang berusia produktif akan menanggung 49 penduduk yang tidak produktif. Jika persentasenya terus meningkat maka hal ini akan menjadi masalah jika penduduk yang saat ini berada pada struktur umur usia belum produktif tidak mampu meningkatkan kualitas dirinya sebagai persiapan memasuki usia produktif yang akan menanggung penduduk

yang tidak produktif lagi.

Jika tren positif berlanjut dengan pengurangan angka kebergantungan dalam jangka panjang, Kota Banda Aceh memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas ekonominya serta memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal. Secara keseluruhan, meskipun terjadi fluktuasi di akhir periode analisis ini dengan adanya peningkatan rasio ketergantungan pada tahun 2024 setelah penurunan berturut-turut sebelumnya, hasil menunjukkan adanya perkembangan positif dalam struktur demografi Kota Banda Aceh selama sebagian besar periode ini. Hal ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perencanaan pembangunan daerah agar tetap responsif terhadap dinamika populasi yang berubah-ubah.

2.4. Pendidikan

1. Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar

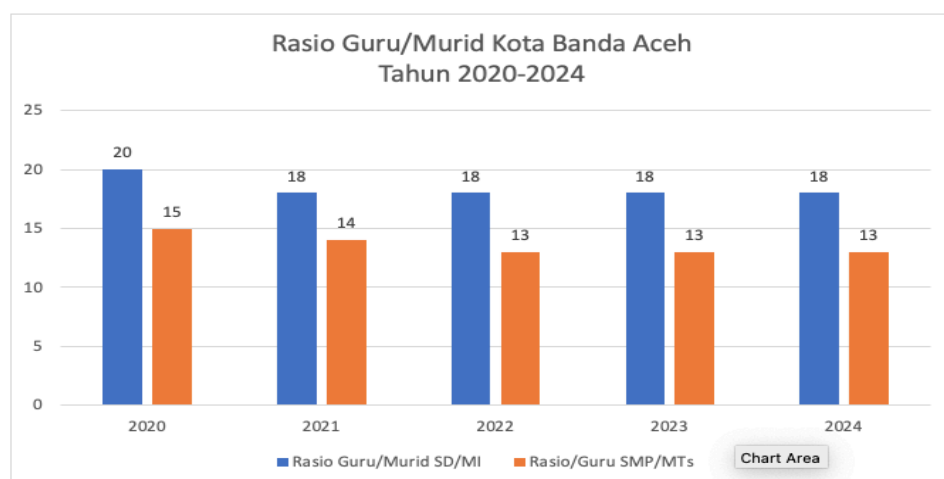
Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 1.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru adalah sebagai berikut :

Pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwa: Jumlah Peserta Didik per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan paling banyak:

- a. 10 (sepuluh) Peserta Didik untuk pendidikan anak usia dini dari usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun;
- b. 12 (dua belas) Peserta Didik untuk pendidikan anak usia dini dari usia di atas 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun;

- c. 15 (lima belas) Peserta Didik untuk pendidikan anak usia dini dari usia di atas 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- d. 28 (dua puluh delapan) Peserta Didik untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah;
- e. 32 (tiga puluh dua) Peserta Didik untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah;
- f. 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik untuk sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan;
- g. 5 (lima) Peserta Didik untuk sekolah dasar luar biasa;
- h. 8 (delapan) Peserta Didik untuk sekolah menengah pertama luar biasa dan sekolah menengah atas luar biasa;
- i. 20 (dua puluh) Peserta Didik untuk program paket A atau bentuk lain yang sederajat;
- j. 25 (dua puluh lima) Peserta Didik untuk program paket B atau bentuk lain yang sederajat; dan
- k. 30 (tiga puluh) Peserta Didik untuk program paket C atau bentuk lain yang sederajat.

Untuk rasio guru terhadap murid SD/MI dan SMP/MTs yang ada di Kota Banda Aceh pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

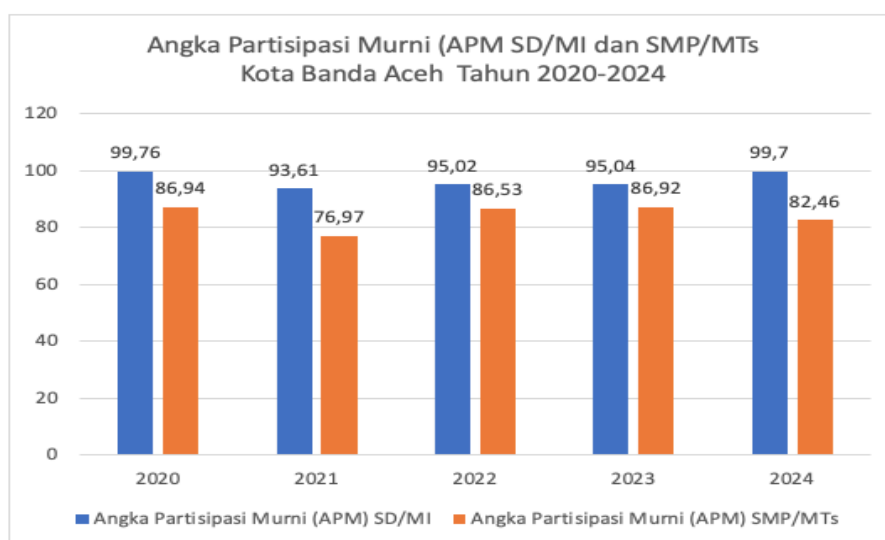


Gambar 2.19 Rasio Guru/Murid Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024
Sumber : Profil Pendidikan Kota Banda Aceh, 2025

Selama tahun 2020 hingga tahun 2024, dibandingkan standar nasional terlihat bahwa rasio guru terhadap siswa pada per-jenjang sekolah sudah memenuhi standar minimal. Pencapaian ini sangat menggembirakan. Sudah saatnya Kota Banda Aceh tidak hanya melihat rasio jumlah kuantitas guru terhadap murid saja namun perlu melihat rasio jumlah ketersediaan guru menurut mata pelajaran yang ada di SD/MI dan SMP/MTs. Hal ini untuk mendapatkan pemerataan yang proporsional di setiap sekolah dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh.

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun. APM tahun 2024 di Kota Banda Aceh untuk tingkat SD/MI adalah 99,70 persen dan SMP/MTs 82,46 persen. Penyebaran sekolah untuk jenjang SD/MI sampai SMP/MTs sudah merata dan menjangkau seluruh wilayah Kota Banda Aceh sampai ke daerah pinggiran kota. Grafik berikut menggambarkan perkembangan APM Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024.



Gambar 2.20
Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kota Banda Aceh Tahun 2020–2024
Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2025

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan rasio anak yang masih sekolah pada usia tertentu (usia sekolah) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sama

tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang dijalani. APS juga merupakan indikator yang digunakan sebagai petunjuk keberhasilan program wajib belajar. Program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS umur 7 – 12 tahun lebih dari 98,58 persen dan APS umur 13 – 15 tahun lebih dari 70 persen. Berdasarkan tabel dibawah ini diketahui bahwa pada tahun ajaran 2024 APS usia 7 – 12 tahun sebesar 99,98 persen. Sedangkan untuk APS usia 13 – 15 tahun di tahun 2024 mencapai 99,95 persen. Angka tersebut menunjukkan pencapaian APS usia 13 – 15 tahun dan APS usia 7 – 12 tahun sudah melebihi standar yang ditetapkan.

Tabel 2.15

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024

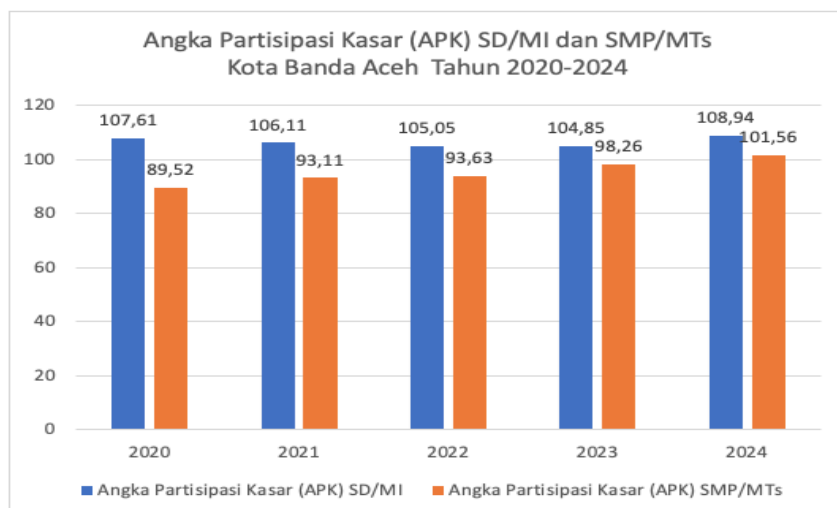
No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	APS SD/MI (usia 7 -12 tahun)	99,99	99,98	99,58	99,98	99,98
2	APS SMP/MTs (usia 13 – 15 tahun)	99,89	99,99	98,00	83,53	99,95

Sumber BPS Kota Banda Aceh, 2025

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar merupakan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK yang tinggi menandakan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

Berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang tercatat pada tahun 2024, APK tertinggi di Kota Banda Aceh terdapat di tingkat SD/MI/Sederajat yaitu 108,94 persen dan yang terendah di tingkat SMP/MTs/Sederajat yaitu 101,56 persen. Pada tahun 2024, baik tingkat SD dan SMP mengalami kenaikan tingginya APK adalah akibat banyaknya siswa usia di luar usia sekolah yang berada di jenjang tersebut ditambah dengan siswa lain penduduk luar Kota Banda Aceh yang bersekolah di Kota Banda Aceh. Berikut grafik penjelasan perkembangan APK Kota Banda Aceh tahun 2020 – 2024.



Gambar 2.21
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2025

2.5 Kesehatan

1) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak balita. Jadi posyandu adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. Posyandu dibentuk bertujuan untuk :

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas)
2. Membudayakan NKKBS.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Tujuan pembentukan posyandu tersebut didukung dengan 5 kegiatan pokok posyandu, yaitu :

1. KIA
2. KB
3. Imunisasi

4. Gizi
5. Penanggulangan Diare.

Tabel 2.16
Perkembangan Rasio Pelayanan Posyandu Per-Satuan Balita di Kota Banda
Aceh Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
2020	114	27.572	1 : 241
2021	114	11.323	1 : 99
2022	114	13.775	1 : 120
2023	114	11.887	1 : 104
2024	114	11.781	1 : 103

Sumber: BPS Banda Aceh, 2025

Perkembangan rasio pelayanan posyandu di Kota Banda Aceh untuk per-satuan balita terus membaik. Dari tahun 2020 1 posyandu harus melayani 241 balita, maka pada tahun 2024 sudah bisa melayani 1 posyandu sudah bisa melayani 103 balita. Jumlah ini sangat menggembirakan karena setiap gampong sudah memiliki posyandu yang aktif sehingga beban setiap posyandi tidak begitu memberatkan untuk memberikan pelayanan yang melebihi kemampuan pelayanan posyandu.

2) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk

Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia meliputi pelayanan rujukan yang berupa:

1. Pelayanan Kesehatan Dasar

Pada umumnya pelayanan dasar dilaksanakan di puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan Pelayanan lainnya di wilayah kerja puskesmas selain rumah sakit.

2. Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pada umumnya dilaksanakan di rumah sakit. Pelayanan keperawatan diperlukan, baik dalam pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan.

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Pelayanan kesehatan dasar yang diterapkan di Indonesia memegang peranan penting dalam pemberian layanan kesehatan yang dapat menjangkau wilayah-wilayah pedesaan. Untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang terjangkau, maka sarana

dan prasarana pelayanan kesehatan harus tersedia atau tersebar di setiap kecamatan. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik. Kota Banda Aceh saat ini telah memiliki 11 puskesmas, 27 puskesmas pembantu, 34 polindes/poskedes, 114 posyandu, 54 klinik/balai kesehatan, dan 7 puskesmas keliling yang tersebar di 9 kecamatan dan 90 gampong. Gambaran fasilitas kesehatan di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2020 - 2024

Fasilitas Kesehatan	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit Umum	13	14	14	14	14
Rumah Sakit Bersalin	7	7	7	7	7
Puskesmas	11	11	11	11	11
Puskesmas Pembantu	27	27	27	27	27
Polindes/Poskedes	34	34	34	34	34
Posyandu	114	114	114	114	114
Klinik/Balai Kesehatan	39	54	54	54	54
Puskesmas Keliling	7	7	7	7	7

Sumber: BPS Banda Aceh, 2025

3) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan kesehatan dibidang pelayanan langsung seperti Rumah sakit, bertujuan untuk meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi pelaksanaan rujukan medik dan rujukan kesehatan secara terpadu serta meningkatkan dan memantapkan manajemen pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian.

Pelayanan kesehatan rumah sakit di Kota Banda Aceh telah menunjukkan kinerja yang baik. Ketersediaan rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta sudah tersebar dan mencukupi untuk pelayanan kesehatan rujukan. Dengan adanya program BPJS dan JKA pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat sudah memberikan pelayanan yang maksimal.

Tabel 2.18
Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per-Satuan Penduduk di Kota Banda Aceh
Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit (Umum +Khusus)	13	15	15	15	15
Jumlah Penduduk	252,899	255,029	257,635	261.969	265.310
Rasio per satuan penduduk	1:19.453	1:17.001	1:17.175	1: 17.464	1: 17.687

Sumber: BPS Banda Aceh, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit masih memenuhi standar rasio rumah per-satuan penduduk. Idealnya satu rumah sakit melayani seratus ribu penduduk, sementara data diatas menunjukkan rata-rata rumah sakit melayani dibawah 20.000 penduduk. Namun over capacity pelayanandapat terjadi apabila banyaknya pasien dari luar wilayah Kota Banda Aceh yang dirujuk ke rumah sakit di Banda Aceh terutama rumah sakit pemerintah.

4) Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio Dokter per 100.000 Penduduk adalah Dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di suatu wilayah (di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain) per 100.000 penduduk. Ketersediaan jumlah dokter memberikan gambaran pelayanan kesehatan dari sisi kuantitas tenaga medis terhadap masyarakat. Pola hidup yang semakin berubah terutama di perkotaan menjadikan masyarakat rentan terhadap gejala penyakit maupun keluhan kesehatan lainnya yang membutuhkan penanganan dokter. Kota Banda Aceh sebagai pusat pelayanan kesehatan di Provinsi Aceh memiliki beban besar dalam pelayanan kesehatan terutama penyediaan tenaga medis. Tabel berikut menggambarkan kondisi pelayanan dokter terhadap penduduk di Kota Banda Aceh.

Tabel 2.19
Perkembangan Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk di Kota Banda Aceh
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Dokter (rumah sakit dan puskesmas)	469	697	665	706	663
Jumlah Penduduk	252,899	255,029	257,635	261.969	265.310
Rasio/100.000 penduduk	185,45	273,30	258,12	269,49	249,89

Sumber: BPS Kota Banda Aceh dan Profil Kesehatan Kota Banda Aceh, 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah dokter yang tersedia di Kota Banda Aceh cenderung fluktuatif sejak tahun 2020 sampai dengan 2024. Penurunan jumlah dokter terbesar terjadi pada tahun 2022 yang diakibatkan karena pandemi *Covid-19*. Namun, pada tahun 2023 jumlah dokter kembali meningkat meskipun di tahun 2024 kembali menurun. Jika dilihat dari rasio dokter per satuan penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan rasio jumlah dokter yang ada di Kota Banda Aceh sudah sangat cukup yaitu tersedia 185 orang dokter untuk melayani 100.000 penduduk.

2.6 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Kondisi Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan di Kota Banda Aceh mutlak diperlukan, mengingat peran dan kontribusinya terhadap pertumbuhan Kota Banda Aceh. Dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, disebutkan bahwa jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, artinya infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian suatu wilayah, hal ini disebabkan perannya dalam menghubungkan serta meningkatkan pergerakan manusia, dan barang. Kota Banda Aceh pada tahun 2024 ini memiliki jalan nasional 32,56 Km, jalan provinsi 22,61 Km, dan jalan kota 620,96 Km. Untuk kondisi jalan Kota Banda Aceh bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Status Kondisi Jalan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

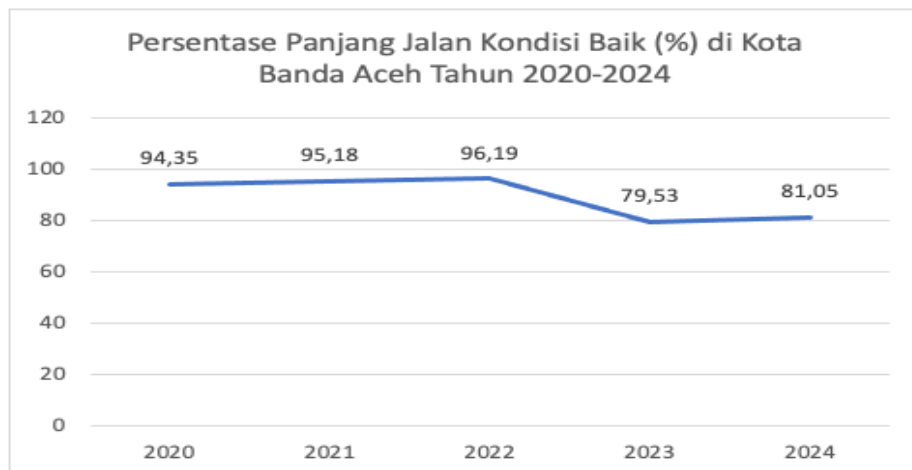
Tahun	Panjang Jalan (km) (SK No. 221A Thn 2010)	Kondisi Ruas Jalan							
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
2020	620,960	585,890	94,35	22.329	3,59	10.795	1,74	1.949	0,31
2021	620,96	591,03	95,18	18.891	3,04	9.112	1,47	1.926	0,31
2022	620,96	597,33	96,19	15,89	2,56	6,8	1,10	0,92	0,15
2023	620,96	493,85	79,53	78,88	12,70	47,6	7,67	0,63	0,10

2024	620,96	503,3	81,05	78,88	12,70	38,15	6,14	0,63	0,10
------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, 2025

Tabel 2.20 menunjukkan status kondisi jalan Kota Banda Aceh pada tahun 2020-2024, dimana pada tahun 2024, dari 620,96 Km jalan di Banda Aceh, 81,05 persen dalam kondisi baik, 12,70 persen dalam kondisi sedang, 6,14 persen dalam kondisi rusak ringan, dan hanya 0,10 persen dalam keadaan rusak berat.

Pertumbuhan sosial, ekonomi, dan pembangunan di kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan infrastruktur jalan yang memperlancar, merangsang dan memacu aktivitas pembangunan. Saat ini panjang jalan di Kota Banda Aceh 620,960 km dengan kondisi baik 81,05 persen.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh

Gambar 2.22

Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Banda Aceh Tahun 2020 - 2024

Gambar di atas terlihat bahwa trend panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 terus menunjukkan peningkatan, namun sejak tahun 2023 menunjukkan penurunan.

Dari total jalan yang ada di Kota Banda Aceh, panjang jalan yang memiliki trotoar tidak mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai 2024 yaitu 59,435 km (9,57%). Namun demikian persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Banda Aceh masih sangat kecil. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Banda Aceh untuk menyediakan trotoar dan drainase untuk menciptakan Kota Banda Aceh yang bebas dari banjir. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.25.

Tabel 2.21
Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase
Tahun 2020-2024

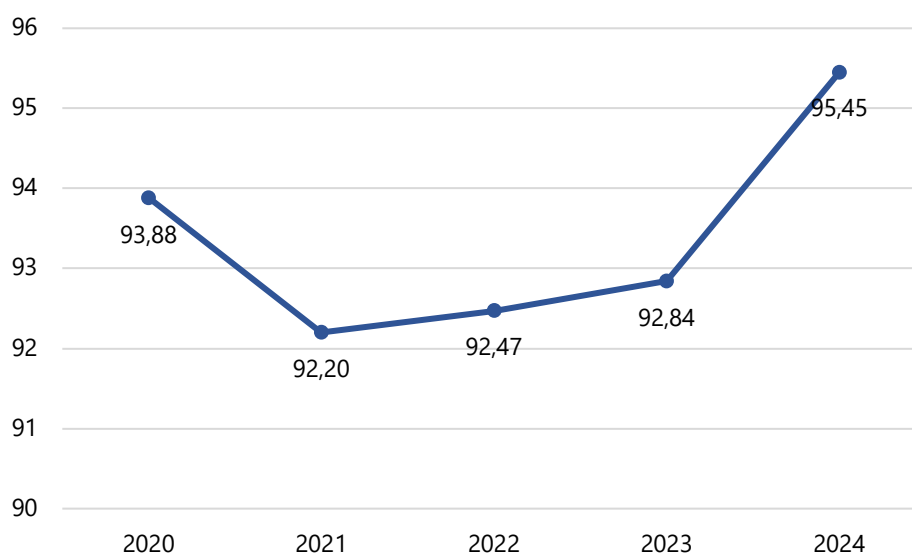
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km)	59,435	59,435	59,435	59,435	59,435
Panjang seluruh jalan kota (km)	620,960	620,960	620,960	620,960	620,960
Persentase	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, 2025

Perumahan dan Kawasan Pemukiman

1) Rasio Rumah Layak Huni

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Rumah layak huni dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi yang memadai, ventilasi yang baik, serta struktur bangunan yang kokoh dan aman. Selain itu, rumah layak huni juga menyediakan ruang yang cukup untuk setiap anggota keluarga, lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental dan fisik. Persentase rumah layak huni di Kota Banda Aceh periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.23 Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banda Aceh, 2025

Dari Gambar 2.23 di atas terlihat persentase rumah layak huni di Kota Banda Aceh mulai tahun 2021 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan. Meskipun persentase rumah layak huni sempat turun di tahun 2021, namun sejak tahun 2022 hingga 2024 terus menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2024 persentase rumah layak huni sudah mencapai 95,45%. Penurunan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi akibat perbedaan metode perhitungan.

Tahun 2020, jumlah rumah dihitung berdasarkan jumlah bangunan yang ada di Kota Banda Aceh, termasuk di antaranya adalah toko-toko di kawasan perdagangan dan jasa, sehingga jumlah rumah di tahun tersebut belum sepenuhnya mewakili jumlah rumah eksisting di Kota Banda Aceh. Jumlah rumah tahun 2021-2023 merupakan data hasil survei yang dilaksanakan pada 90 Gampong di Kota Banda Aceh, sehingga data ini lebih mewakili kondisi eksisting jumlah rumah di Kota Banda Aceh.

Namun demikian, Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan pembangunan rumah layak huni dari berbagai sumber pendanaan, seperti APBK, DAK Fisik Perumahan, Dana Otsus, dan ZIS. Hal ini tentu saja dimaksudkan untuk memberikan akses terhadap pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

2) Persentase Permukiman yang Tertata

Pemukiman yang tertata adalah permukiman yang dibangun menurut tata ruang yang tepat dengan memperhatikan hal dasar dalam sebuah permukiman, seperti akses jalan, sanitasi, air bersih, dan sebagainya. Persentase permukiman yang tertata dapat diukur dari perbandingan luas permukiman yang tertata dengan jumlah permukiman keseluruhan. Persentase luas permukiman yang tertata di Kota Banda Aceh bisa dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.22
Persentase Luas Permukiman Tertata Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Area Permukiman tertata (Ha)	620,56	1.485,83	1.546,04	1.300,10	1.318,21

2	Luas Area Permukiman Keseluruhan (Ha)	2.635,99	1.936,83	1.936,83	926,09	1.025,03
	Persentase	23,54	76,71	79,82	71,23	77,76

Sumber: Dinas Perkim Kota Banda Aceh, 2025

Persentase permukiman yang tertata di Kota Banda Aceh terus meningkat sejak 2020 sampai dengan 2024. Pada tahun 2020, jumlah permukiman yang tertata adalah 23,54 persen, kemudian meningkat menjadi 79,82 persen di tahun 2022 dan kemudian turun di tahun 2023. Tahun 2024 kembali meningkat dengan persentase luas permukiman tertata mencapai 77,76%.

3) Kawasan Permukiman Kumuh

Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh belum sepenuhnya terlepas dari permasalahan lingkungan bersih yang bebas dari kawasan kumuh. Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman kumuh yang umumnya terjadi pada masyarakat miskin adalah rendahnya kualitas lingkungan dan kesehatan yang dianggap sebagai bagian kota yang harus disingkirkan. Terbentuknya pemukiman kumuh, yang sering disebut sebagai *slump area* sering dilihat berpotensi menimbulkan banyak masalah perkotaan, karena bisa menjadi sumber timbulnya berbagai masalah lingkungan, kesehatan, dan perilaku menyimpang, seperti kejahatan, serta sumber penyakit sosial lainnya.

Tertatanya kawasan permukiman kumuh akan memberikan manfaat terhadap lingkungan, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan mengurangi kekumuhan
2. Mengurangi dampak pencemaran lingkungan
3. Mengurangi tingkat bahaya pada saat bencana
4. Mengurangi dampak banjir yang kerap terjadi karena tidak tersedianya drainase lingkungan yang layak

Berdasarkan hasil Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK), pada tahun 2024 luas area permukiman kumuh mengalami penurunan menjadi 366,30 ha. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan yang telah dilakukan di berbagai wilayah permukiman kumuh

sudah baik. Namun perlu juga dilakukan upaya pencegahan agar tidak ada penambahan lokasi kumuh di Kota Banda Aceh. Diharapkan Kota Banda Aceh bisa mewujudkan terciptanya kotaku (kota tanpa kumuh) sehingga target 0% daerah kumuh dapat terwujud.

Tabel 2.23
Luas Kawasan Kumuh Kota Banda Aceh Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	461,48	451,40	451,40	374.01	366,30
2	Luas Wilayah (Ha)	59.002	59.002	59.002	59.002	59.002
3	Luas Penanganan (Ha)	4,90	N/A	60,61	77.39	7,710
4	Sisa Luas Kawasan (Ha)	456,58	451,40	390,79	296,62	358,59

Sumber: Dinas Perkim Kota Banda Aceh, 2025

Tabel 2.23 menunjukkan luas kawasan kumuh yang ada di Kota Banda Aceh sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 terus menurun. Sejak tahun 2020, luas kawasan kumuh dihitung tidak hanya dalam penanganan kawasan kumuh saja, namun telah menambahkan luas kawasan yang berpotensi kumuh dan perlu dicegah menjadi kawasan kumuh.

Pembangunan kawasan permukiman kumuh yang perlu ditekankan adalah pada penanganan 7 indikator kumuh, diantaranya pembangunan rumah layak huni pembangunan sarana prasarana dasar permukiman seperti jalan, drainase, pengelolaan sampah dan lampu jalan. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena kebutuhan dasar dari sarana prasarana permukiman merupakan hal utama terkait dengan kegiatan sehari-hari masyarakat, yaitu meningkatnya akses masyarakat dari kawasan permukiman ke pusat aktivitas perekonomian berupa pertokoan dan pasar.

2.7 Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial meliputi kegiatan Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) dan Pembinaan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Berikut indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Tabel 2.24
Indikator Kinerja Daerah Bidang Sosial Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase PMKS yang Mampu Memiliki Kemandirian Ekonomi	%	5,07	50,86	4	69,36	72,5
2	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	8,33	8,33	8	8,33	16,67
3	Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Tersertifikasi Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	0	0	5	5	10
4	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	40	50,86	29	85	87
5	Persentase PMKS yang Tertangani	%	84,94	90,39	139	100	100
6	Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	99,83	51,68	79	85	88
7	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	30	0	5	10	10
8	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, sertalanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	27	66,94	37	24,3	27
10	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan uang duka	Jiwa	746	253	509	0	0

Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2025

Tenaga Kerja

Untuk mengukur keberhasilan Indikator kinerja daerah di bidang tenaga kerja

ada 17 indikator yang telah ditetapkan dan menjadi tanggungjawab dinas tenaga kerja.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Indikator Kinerja Daerah Bidang Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,54	8,94	8,62	8,03	7,55
2	Jumlah Industri Kecil Menengah Produktif	Unit	2.594	2.620	2.672	2.672	2.698
3	Jumlah Penetapan Sentra Industri	unit	0	1	1	1	1
4	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	41,18	52,25	40	42,74	31,57
5	Persentase penyelesaian perselisihan buruh dengan pengusaha	%	52,22	72	76,19	87,95	74,47
6	Jumlah Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan aktif	Naker	19930	29744	30056	17160	23614
7	Rasio daya serap tenaga kerja	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun		94	65	35	83	47
9	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	92	65	0	0	0
10	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	75,29	60,82	62,50	65,65	70,31
11	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kontribusi sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	2,14	2,19	2.08	2.08	2.15
14	Kontribusi Rumah Tangga terhadap PDRB sektor Industri	%	16,78	15,62	5.06	6.08	4.66
15	Pertumbuhan Industri	%	1.31	0,99	1,17	1,44	0.93
16	Besaran pekerja/buruh yang menjadi program JAMSOSTEK	%	23,33	23,24	18	38,62	38,40
17	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	%	80	71	59	10	24

Sumber : *Disnaker Kota Banda Aceh, 2025*

Urusan Pangan

Untuk mengembangkan potensi pertanian yang ada di Kota Banda Aceh, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan pembinaan/pelatihan bagi aparatur penyuluh pertanian dan petani. Dengan keterbatasan lahan pertanian di Kota banda aceh salah satu cara yang dilakukan agar ketersediaan pangan keluarga terpenuhi adalah mengoptimalkan lahan pekarangan masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai lahan budidaya tanaman pangan (jagung, ubi dan lain-lain), Hortikultura (sayur, buah dan lain-lain) dan Biofarmaka (tanaman obat-obatan). Untuk mengukur keberhasilan dibidang pangan, dapat dilihat dari indikator keberhasilan yang dapat dicapai dalam tabel berikut:

Tabel 2.26
Indikator Kinerja Daerah Bidang Pangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama/Skor PPH	Kg/%	116,3	80%	82,5%	83,3%	83,8%
2	Persentase Keanekaragaman Pangan	persen	81,7	-	-	-	-

3	a. Sapi	ton	995	1.020	209	249,18	550,3
	b. Unggas	ton	1495	1415,6	1.205,88	1.198,32	1.230,18
	c. Kambing	ton	53,078	59,01	27	15,95	14,25
4	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	0,73	399	883	839,9	805,3
5	Jumlah Produksi Hasil Perikanan Tangkap	ton	28.498	27.203	22.665	28.106	28.923
6	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	ton	174,71	-	349,97	429,3	340,19

Sumber : DP2KP Kota Banda Aceh, 2025

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Kepemilikan KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi bagi warga negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kartu identitas ini dapat dimiliki apabila warga sudah mencapai umur 17 tahun atau sudah menikah. Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal, 1 point 14 bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) diproses secara komputerisasi dan dilengkapi cip yang berfungsi untuk menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan. KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah menikah. Dengan memiliki KTP penduduk dapat diakui secara legal keberadaannya dan bermanfaat sebagai alat keamanan sekaligus untuk pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya. Sebagai contoh urusan dengan Bank, mengurus BPJS, passport, untuk mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, Pendidikan, bisnis dan lain sebagainya.

Tabel 2.27
Rasio Kepemilikan KTP di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan	165.307	168.067	169.083	N/A	179.317
Jumlah Wajib KTP Elektronik	165.415	171.676	174.140	189.807	190.265
Rasio	99,93	97,90	97,10		94,24

Sumber Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa Kota Banda Aceh sudah menyelesaikan perekaman KTP-el 179.317 orang dari 190.265 orang wajib KTP yaitu sebesar hingga 94,24 persen pada tahun 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh terus melakukan upaya jemput bola perekaman KTP-el pemula ke sekolah-sekolah dalam wilayah Kota Banda Aceh.

2.8 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Sarana dan prasarana perkantoran desa merupakan pendukung seluruh aktifitas pemerintahan di desa/gampong. Kondisi sarana dan prasarana yang baik akan sangat mempengaruhi layanan yang diberikan oleh aparat gampong bagi masyarakat. Berikut cakupan sarana dan prasarana perkantoran gampong yang baik di gampong-gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh dalam periode 2020-2024.

Tabel 2.28
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik
KotaBanda Aceh Tahun 2020-2024

No	Kec.	Jml. Gampong	2020		2021		2022		2023		2024	
			Jlh. Kantor Pemrt. Desa yang baik	Cakupan Sarpras Perktr. Pemrt. Desa yang baik	Jlh. Kantor Pemrt. Desa yang baik	Cakupan Sarpras Perktr. Pemrt. Desa yang baik	Jlh. Kantor Pemrt. Desa yang baik	Cakupan Sarpras Perktr. Pemrt. Desa yang baik	Jlh. Kantor Pemrt. Desa yang baik	Cakupan Sarpras Perktr. Pemrt. Desa yang baik	Jlh. Kantor Pemrt. Desa yang baik	Cakupan Sarpras Perktr. Pemrt. Desa yang baik
(1)	(2)	(3)	(6)	$(7=6/3 \times 100)$	(8)	$(9=8/3 \times 100)$	(10)	$(11=10/3 \times 100)$	(12)	$(13=12/3 \times 100)$	(14)	$(15=14/3 \times 100)$
1	Baiturrahman	10	10	100	10	90	10	90	10	90	10	90
2	Kuta Alam	11	10	90,91	11	100	11	100	11	100	11	100

3	Meuraxa	16	16	100	16	100	16	100	16	100	16	100
4	Syiah Kuala	10	9	90	10	100	10	100	10	100	10	100
5	Lueng Bata	9	9	100	9	100	9	100	9	100	9	100
6	Kutaraja	6	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100
7	Banda Raya	10	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100
8	Jaya Baru	9	9	100	9	100	9	100	9	100	9	100
9	Ulee Kareng	9	9	100	9	100	9	100	9	100	9	100
	Jumlah se-Kota Banda Aceh	90	88	97,78	90	100	90	100	90	100	90	100

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan cakupan sarana dan prasarana di gampong-gampong di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2018 masih terdapat 3 gampong yang kondisi sarana dan prasarannya belum baik. Namun, pada tahun 2019 dan 2020 hanya 2 gampong saja yang belum baik kondisi sarana dan prasarannya. Pada tahun 2021 seluruh gampong sudah mempunyai sarana dan prasarana yang baik kondisinya sehingga cakupan sarana dan prasarana perkantoran gampong sudah mencapai 100 persen. Cakupan yang sudah sangat baik ini haruslah diikuti oleh layanan yang juga dapat memuaskan keperluan masyarakat gampong. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah berupa bangunan fisik perkantoran dan juga sarana seperti mobile, peralatan kantor dan akses internet.

Permasalahan yang dialami sebelumnya antara lain untuk kecamatan Kuta Alam, Gampong Peunayong, kantor geuchiek adalah ruko milik pemko. Kecamatan Syiah Kuala Gampong Kopelma Darussalam, terjadi perselisihan kepemilikan dengan pihak lain dan saat ini digunakan gedung pkk bersama. Pada kecamatan Lueng Bata Kantor Keuchik Gampong Lampaloh pada Tahun 2022 mengalami kebakaran hal ini mengakibatkan seluruh sarana prasarana Kantor Keuchik hangus terbakar, dan untuk saat ini pelayanan untuk masyarakat menggunakan gedung serba guna Gampong. Sedangkan di Kecamatan Baiturahman, Gampong Peuniti Kantor Keuchik berstatus sewa disebabkan tidak tersedia lahan untuk pembangunan kantor Keuchik.

2) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Mukim yang Baik

Mukim merupakan bentuk keistimewaan Aceh yang diterapkan dalam

pemerintahan. Kota Banda Aceh secara khusus menuangkan peran mukim dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 tahun 2021 tentang Pemerintahan Mukim. Dalam qanun ini dituangkan bahwa terdapat fungsi mukim diantaranya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah gampong dalam mukim, penyelenggaraan pelaksanaan Syariat Islam, pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara inklusif dan berkeadilan gender, penyelesaian sengketa adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat gampong, dan juga termasuk pengawasan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam dalam mukim. Fungsi ini dapat dilaksanakan dengan apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang baik. Cakupan sarana dan prasarana pada tingkat mukim di Kota Banda Aceh ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 2.29
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Mukim yang Baik Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Jlh. Mukim	2020		2021		2022		2023		2024	
			Jlh. kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik
(1)	(2)	(3)	(6)	(7=6/3 *100)	(8)	(9=8/3*100)	(10)	(11=10/3 *100)	(12)	(13=12/3*100)	(14)	(15=14/3*100)
1	Baiturrahman	2	0	0	2	100	2	100	2	100	2	100
2	Kuta Alam	2	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50
3	Meuraxa	2	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50
4	Syiah Kuala	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Lueng Bata	1	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
6	Kutaraja	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Banda Raya	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Jaya Baru	2	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50
9	Ulee Kareng	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	17	4	23,53	6	35,29	6	35,29	6	35,29	6	35,29

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh Tahun 2025

Cakupan sarana dan prasarana perkantoran mukim pada tahun 2018 adalah 23,53 persen yang berarti baru 4 mukim yang memiliki sarana dan prasarana perkantoran yang baik. Namun, kondisi ini terus diperbaiki sehingga tahun 2022 sudah menjadi 35,29 persen.

3) Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga/ wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah gampong dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Sedangkan kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah gampong dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, misalnya kelompok pemuda/ karangtaruna, remaja masjid dan lain-lain. Jumlah Kelompok binaan LPM dalam Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.30
Kelompok Binaan LPM Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020			2021			2022			2023			2024		
		Jlh. LPM	Jlh. Klp. Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jlh. LPM	Jlh. Klp. Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jlh. LPM	Jlh. Klp. Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jlh. LPM	Jlh. Klp. Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jlh. LPM	Jlh. Klp. Binaan	Rata-rata Jumlah LPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=13/12)	15	16	(17=16/15)
1	Baiturrahman	10	21	2,1	10	21	2,1	10	21	2,1	10	21	2,1	10	21	2,1
2	Kuta Alam	11	25	2,27	11	25	2,27	11	25	2,27	11	25	2,27	11	25	2,27
3	Meuraxa	16	30	1,88	16	30	1,88	16	30	1,88	16	30	1,88	16	30	1,88
4	Syiah Kuala	10	22	2,2	10	22	2,2	10	22	2,2	10	22	2,2	10	22	2,2
5	Lueng Bata	9	22	2,44	9	22	2,44	9	22	2,44	9	22	2,44	9	22	2,44
6	Kutaraja	6	14	2,33	6	14	2,33	6	14	2,33	6	14	2,33	6	14	2,33
7	Banda Raya	10	22	2,2	10	22	2,2	10	22	2,2	10	22	2,2	10	22	2,2
8	Jaya Baru	9	20	2,22	9	20	2,22	9	20	2,22	9	20	2,22	9	20	2,22
9	Ulee Kareng	9	20	2,22	9	20	2,22	9	20	2,22	9	20	2,22	9	20	2,22
	Jumlah	90	196	2,18	90	196	2,18	90	196	2,18	90	196	2,18	90	196	2,18

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh Tahun 2025

Data di atas menggambarkan bahwa sejak tahun 2020 sampai saat ini tiap gampong mempunyai 1 LPM dan setiap LPM mempunyai rata-rata 2 kelompok binaan. Hal ini mencerminkan aktifitas dalam gampong tersebut. Apabila dapat ditingkatkan lagi jumlah kelompok binaannya maka akan menunjukkan penambahan aktifitas yang terorganisir dengan baik di setiap gampong.

4) Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 5/2007 Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan basil Rakerda Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
- h. membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kota Banda Aceh melaksanakan pembinaan secara berjenjang dari TP. PKK Kecamatan sampai TP. PKK Gampong. Selanjutnya TP. PKK Gampong membina kelompok PKK Dusun dan Kelompok Dasa Wisma. Kelompok binaan PKK merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Gampong yang terdiri dari Kelompok PKK Dusun, Kelompok Dasa Wisma, Kelompok UP2K dan lain-lain. Jumlah Kelompok PKK Dusun dan Dasawisma adalah sesuai dengan jumlah dusun dan dasawisma yang ada di gampong.

Tabel 2.31
Kelompok Binaan PKK Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020			2021			2022			2023			2024		
		Jlh. PKK	Jlh. Klp. Binaan	Rata-rata Jlh. Klp. Binaan PKK	Jlh. PKK	Jlh. Klp. Binaan	Rata-rata Jlh. Klp. Binaan PKK	Jlh. PKK	Jlh. Klp. Binaan	Rata-rata Jlh. Klp. Binaan PKK	Jlh. PKK	Jlh. Klp. Binaan	Rata-rata Jlh. Klp. Binaan PKK	Jlh. PKK	Jlh. Klp. Binaan	Rata-rata Jlh. Klp. Binaan PKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=13/12)	15	16	(17=16/15)
1	Baiturrahman	11	412	37,45	11	412	37,45	11	403	36,64	11	693	63,00	11	693	63,00
2	Kuta Alam	12	341	28,42	12	341	28,42	12	440	36,67	12	633	52,72	12	633	52,75
3	Meuraxa	17	361	21,24	17	361	21,24	17	431	25,35	17	669	39,35	17	669	39,35
4	SyiahKuala	11	321	29,18	11	321	29,18	11	382	34,73	11	682	62,00	11	682	62,00
5	Lueng Bata	10	405	40,5	10	405	40,5	10	351	35,10	10	398	39,80	10	398	39,80
6	Kutaraja	7	324	46,29	7	324	46,29	7	241	34,43	7	365	52,14	7	365	52,14
7	Banda Raya	11	239	21,73	11	239	21,73	11	441	40,09	11	441	40,09	11	473	43,00
8	Jaya Baru	10	309	30,9	10	309	30,9	10	335	33,50	10	335	33,50	10	543	54,30
9	Ulee Kareng	10	350	35	10	350	35	10	293	29,30	10	293	29,30	10	593	59,30
	Jumlah	99	3,062	30,93	99	3,062	30,93	99	3.317	33,51	99	4509	411,9	99	5049	465,64

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh Tahun 2025

TP PKK Kota Banda Aceh terdiri dari 90 TP PKK gampong, 9 TP PKK kecamatan sehingga jumlah TP PKK adalah 99 yang dibina oleh TP PKK kota. Kelompok binaan TP sehingga berjumlah 100 untuk kota. TP PKK membina Dasawisma, UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), Posyandu balita & lansia), Posbindu, Jumentik (Juru Mantau Jentik). Sesuai tabel di atas dapat dilihat pada Tahun 2024 terdapat 5.049 kelompok binaan yang ada di seluruh Kota Banda Aceh. Jumlah kelompok binaan ini dapat berubah karena ada peleburan di tingkat desa tergantung kondisi desa.

5) Persentase PKK aktif

Berdasarkan pembinaan, jumlah PKK aktif meningkat setiap tahun, karena dukungan dari pemerintah gampong melalui Dana ADG dan Dana Desa. Jumlah PKK Aktif dari tahun 2020 s/d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
PKK Aktif Tahun 2020-2024 Kota Banda Aceh

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah TP. PKK	100	100	100	100	100
2	Jumlah TP. PKK tidak aktif	-	-	-	-	-
3	Jumlah TP. PKK aktif (1-2)	100	100	100	100	100
4	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh Tahun 2025

Keaktifan TP PKK menunjukkan bahwa tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada TP PKK telah dilaksanakan dengan baik terutama dalam membantu mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

6) Persentase Posyandu aktif

Posyandu merupakan bentuk kegiatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan pada tingkat gampong dan kegiatan ini diawasi oleh petugas kesehatan di gampong tersebut. Keaktifan kegiatan Posyandu dapat menjadi indikator kualitas kesehatan pada tingkat gampong. Berikut adalah gambaran jumlah Posyandu aktif yang ada di Kota Banda Aceh.

Tabel 2.33
Jumlah Posyandu dalam Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu Aktif				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Baiturrahman	19	19	19	19	19
2	Kuta Alam	15	15	15	15	15
3	Meuraxa	18	18	18	18	18
4	Syiah Kuala	12	12	12	12	12
5	Lueng Bata	9	9	9	9	9
6	Kutaraja	6	6	6	6	6
7	Banda Raya	10	10	10	10	10
8	Jaya Baru	16	16	16	16	16
9	Ulee Kareng	9	9	9	9	9
	Jumlah se-Kota Banda Aceh	114	114	114	114	114

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2025

Pada tahun 2020 jumlah Posyandu aktif adalah 114 unit dan setelah itu tidak ada lagi penambahan jumlah Posyandu hingga saat ini. Keaktifan posyandu diklasifikasikan berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh posyandu tersebut. Posyandu Pratama adalah posyandu yang masih belum memiliki kegiatan rutin, Posyandu Madya adalah posyandu yang memiliki kegiatan rutin lebih dari 8 kali per tahun dengan minimal 5 orang kader tetapi cakupan kegiatan utama masih di bawah 50%. Selanjutnya, Posyandu Purnama merupakan posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader

sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan, serta telah memperoleh dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat dipergunakan untuk upaya kesehatan di Posyandu. Peringkat tertinggi yang ingin dicapai adalah Posyandu Mandiri, yaitu Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan, serta telah memperoleh dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat dan kelompok usaha bersama (usaha dikelola oleh masyarakat) yang dipergunakan untuk upaya kesehatan di Posyandu.

Posyandu dalam Kota Banda Aceh memiliki strata yang berbeda-beda, tergantung pada pencapaian indikator tingkat perkembangan posyandu. Strata Posyandu dalam Kota Banda Aceh selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34
Strata Posyandu Tahun 2020 – 2024 di Kota Banda Aceh

No	Strata Posyandu	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pratama	0	1	1	1	1
2	Madya	90	88	88	88	88
3	Purnama	24	25	25	25	25
4	Mandiri	0	0	0	0	0
	Jumlah	114	114	114	114	114

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2025

Pada awal periode yaitu tahun 2020 Kota Banda Aceh belum mempunyai Posyandu Pratama, 90 Posyandu Madya, dan 24 Posyandu Purnama, sedangkan pada akhir periode yaitu tahun 2024 jumlah posyandu dengan peringkat Pratama hanya tinggal 1 posyandu, 88 Posyandu Madya dan 25 Posyandu Purnama.

7) Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)

Fasilitasi pemilihan kepala desa di Kota Banda Aceh dilaksanakan melalui kegiatan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung). Selama tahun 2022 s/d 2024 data kegiatan Pilchiksung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.35
Data Partisipasi Masyarakat dalam Pilchiksung di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa Pelaksana Pilchiksung	Gampong	16	22	0	24	0
2	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Orang	29,620	24,999	0	40.651	0
3	Jumlah Pemilih	Orang	18,067	17,058	0	25.513	0
4	Partisipasi Masyarakat	%	61	68,23	0	62,76	0

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh, 2025

Pada tahun 2022 dan 2024 tidak ada pemilihan Geuchiek secara langsung (pilchiksung) karena tahun ini adalah masa transisi untuk pemilihan serentak. Jadwal pemilihan Geuchiek untuk Kota Banda Aceh adalah tahun 2020, 2021, 2023, dan 2025. Dimasa penyesuaian pemilihan geuchiek maka ditunjuk pejabat sementara sebagai pelaksana tugas Geuchiek.

8) Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kota

Pemerintah Kota Banda Aceh telah memiliki gedung pemerintahan yang unik dan megah. Kemegahan tersebut diiringi dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang bersih dan berwibawa serta pelayanan yang optimal bagi warga kota. Sampai tahun 2018, sesuai dengan SOTK Baru Pemerintah Kota Banda Aceh telah memiliki 44 satuan kerja (termasuk 9 kecamatan).

Secara administratif Kota Banda Aceh terdiri atas 9 kecamatan, 90 gampong, dan 17 mukim, dari 90 gampong di Kota Banda Aceh, 16 gampong atau sekitar 17,78 persen terdapat di Kecamatan Meuraxa. Selanjutnya disusul Kecamatan Kuta Alam sebanyak 11 gampong (12,22 persen). Kemudian, tiga kecamatan masing-masing memiliki 10 gampong, meliputi Banda Raya, Baiturrahman, dan Syiah Kuala. Tiga

kecamatan lainnya, seperti Jaya Baru, Lueng Bata, dan Ulee Kareng, masing-masing memiliki 9 gampong. Adapun Kuta Raja hanya memiliki 6 gampong (6,67 persen).

Sebagaimana halnya kabupaten/ kota lainnya di Aceh, di Kota Banda Aceh terdapat pula mukim yang fungsinya dinilai penting dalam mendorong perkembangan aktivitas sosial-kemasyarakatan di gampong dan kecamatan. Dari 17 mukim yang ada di Banda Aceh, 3 mukim terdapat di Kecamatan Syiah Kuala. Di Kecamatan Lueng Bata dan Kuta Raja masing-masing memiliki 1 mukim dan kecamatan lainnya memiliki masing-masing 2 mukim. Secara lebih rinci, jumlah gampong dan mukim menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Data Mukim Dalam Kota Banda Aceh

No	Kecamatan		Nama Mukim	Jumlah Gampong
1	2		3	4
1	Baiturrahman	1	Baiturrahman	5
		2	Putro Phang	5
2	Kuta Alam	3	Kuta Alam	5
		4	Lam Kuta	6
3	Meuraxa	5	Meuraxa	8
		6	Tgk. Chik Lamjabat	8
4	Syiah Kuala	7	Tgk. Syeh Abdurrauf	4
		8	Tgk.Chik di Lamnyong	2
		9	Kayee Adang	4
5	Lueng Bata	10	Lueng Bata	9
6	Kutaraja	11	Tgk. Dianjong	6
7	Banda Raya	12	Banda Jaya	4
		13	Lam Ara	6
8	Jaya Baru	14	Pos Blang	5
		15	Lambaro Banda	4
9	Ulee Kareng	16	Simpang Tujoh	4
		17	Poeteumeureuhom	5

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh Tahun 2026

9) Presentase Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang baik

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada poin (b) lebih dikenal dengan nama Dana Desa (DD), sedangkan alokasi Dana Desa pada poin (d) untuk Provinsi Aceh dikenal dengan nama Alokasi Dana Gampong (ADG). ADG paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Sementara itu, untuk Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota poin (c) paling sedikit 10 persen dari pajak dan retribusi daerah. Besaran dana pembangunan untuk gampong periode tahun 2017 s/d tahun 2022 untuk Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.37
Fasilitasi Dana Pembangunan Untuk Gampong di Kota Banda Aceh
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Alokasi Dana Gampong (ADG)	48.862.057.710	57.111.381.200	57.481.003.700	53.252.810.748	64.904.606.505
2	Dana Desa (DD)	75.977.398.000	77.702.442.000	70.100.703.000	76.172.967.000	77.088.372.000
3	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	6.064.790.652	5.142.160.652	2.565.987.274	413.136.691	1.085.729.786

4	Dana Bagi Hasil Restribusi Daerah	2.565.987.274	2.565.987.274	5.142.160.652	0	0
	Jumlah	133,470.233.636	142.521.971.126	135.289.854.626	129.838.914.439	143.078.708.291

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2025

Transfer bantuan keuangan baik dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Desa maupun Transfer dari Pemerintah Kota yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong (ADG), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari Tahun 2018 hingga 2022 mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif, dimana pada Tahun 2018 merupakan transfer dana terendah dan pada tahun 2019 dengan transfer tertinggi.

Walaupun alokasi dana untuk gampong mengalami penurunan akibat pandemic, kemampuan gampong dalam mengelola dana gampong telah menjadi lebih baik dari tahun ke tahun sebagaimana tergambar pada tabel capaian pengelolaan keuangan gampong berikut ini.

Tabel 2.38
Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang Baik Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang baik (%)	47	64,44	66,67	72.22	73,33

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2025

Pada awal periode capaian pengelolaan keuangan gampong relatif masih rendah. Kemampuan aparat gampong dalam mengelola dana gampong mengalami beberapa kendala dan belum mampu memenuhi kriteria cakupan yang baik yaitu Perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Kendala yang dialami antara lain dari segi perencanaan sering terlambat akibat ketidakharmonisan dengan tuha peut gampong; penatausahaan, kelengkapan berkas/dokumen pencairan; pelaksanaan, perubahan harga barang, menyebabkan perubahan proses pengadaan. Akibatnya mempengaruhi proses pertanggungjawaban. Pergantian Keuchik dapat menyebabkan kapasitas aparat yang juga berbeda dan bermasalah dengan proses

perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Untuk itu perlu upaya peningkatan kapasitas aparatur gampong di bidang pengelolaan keuangan gampong perlu dilaksanakan secara berkesinambungan. Upaya berkesinambungan ini kemudian berdampak kepada membaiknya capaian pengelolaan keuangan gampong yang hanya 47 persen di awal periode menjadi 73,33 persen pada tahun 2024.

Tabel 2.39
Realisasi Bantuan Tanggap Darurat Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Realisasi Penyaluran BLT (Rp)	26.637.300.000	26.258.400.000	29.865.600.000	14.133.600.000	13.114.800.000

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2025

Alokasi untuk peruntukan Bantuan Langsung Tunai (BLT) besarnya disesuaikan dengan persentase tranfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang berpedoman pada arahan dari peraturan pemerintah/Menteri.

Pemerintah Gampong melalui transfer bantuan Pemerintah Pusat melakukan kegiatan penyaluran Paket Bantuan Kepada anak kurang mampu dalam rangka mengurangi dampak kemiskinan di Gampong yaitu berupa bantuan paket keperluan sekolah dengan realisasi bantuan seperti tabel di bawah :

Tabel 2.40
Realisasi Bantuan Paket Bantuan Anak Kurang Mampu Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Realisasi Penyaluran Paket Bantuan Rutin (Rp)	640.980.500	810.673.260	504.212.000	744.308.523	973.396.450

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2025

Tabel 2.41
Realisasi Bantuan Tanggap Darurat Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Realisasi Bantuan Tanggap Darurat (Rp)	4.109.682.411	4.773.291.483	999.240.391	258.011.500	201.564.916

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2025

Bantuan Tanggap Darurat ini disamping dana untuk mencegah dan bantuan terhadap bencana alam seperti kebakaran, banjir dan angin ribut juga termasuk bantuan dalam penanganan Covid-19.

10) Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dilaksanakan melalui fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dengan pemberian dana revolving. Pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan BPRS Baiturrahman sejak tahun 2009 telah melaksanakan program PUEM dengan tingkat suku bunga 6% per tahun. Pada Tahun 2013 Program PUEM ini dihentikan dan digantikan dengan PUEM Al Qardul Hasan (pinjaman tanpa bunga) sejak tahun 2015. Untuk lebih jelasnya Jumlah Penyaluran Dana Bergulir dan jumlah penerima permodalan melalui program PUEM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.42
Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Melalui Program PUEM di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penyaluran Dana Bergulir (Rp)	187.000.000	203.000.000	170.000.000	179.000.000	132.000.000
2	Jumlah Penerima (orang)	40	35	26	33	25

Sumber: Diskoperasi,UMKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, 2025

Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Banda Aceh mengalihkan dana Program

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Al-Qardhul Hasan dari PT. BPRS Baiturrahman menjadi Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Kota Banda Aceh dan disalurkan oleh PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah milik Pemerintah Kota Banda Aceh bertujuan untuk mewujudkan sistim penyaluran dana PUEM lebih efektif dan efisien serta bermanfaat bagi masyarakat. Penempatan Dana Awal Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Kota Banda Aceh sebesar Rp. 2.436.000.000,- (Dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang ditempatkan pada rekening angsuran pokok nomor : 121.01.00587 an. Pemerintah Kota Banda Aceh pada PT. LKMS Mahirah Muamalah dan rekening jasa bagi hasil nomor : 121.01.00590 untuk penyeteroran jasa mengendap serta jasa bagi hasil dari debitur PUEM.

Adapun Jumlah permohonan yang diterima dari masyarakat pada DPMG Kota Banda Aceh sejak 2022 s.d 2024 jumlahnya sebanyak 156 debitur dengan jumlah dana yang disalurkan dari tahun 2022 s.d 2024 sebesar Rp. 871.000.000,-

Penyaluran Dana Revolving Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Kota Banda Aceh diperuntukan kepada pedagang, sektor perikanan, industri kecil, jasa dan usaha rumah tangga khususnya masyarakat kurang mampu dan memiliki usaha. Jumlah plafon pembiayaan awal yang dapat diberikan adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah,-) s.d Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah,-) per anggota kelompok atau perorangan dan jumlah plafon pembiayaan tahap selanjutnya dapat diberikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah,-) s.d Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah,-) per anggota kelompok atau per orangan adapun masyarakat mengajukan permohonan bantuan modal usaha kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Banda Aceh, dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh DPMG dengan melampirkan foto copy KTP, Kartu Keluarga (KK) dan foto copy surat jaminan/borok serta jasa pembiayaan kepada debitur ditetapkan setara 6% per tahun dengan pembagian 3% sebagai modal PUEM yang disetor ke rekening jasa bagi hasil dan 3% untuk pendapatan pihak penyalur. Jangka waktu pembiayaan adalah 40 (empat puluh) minggu dengan akad pembiayaan dalam bentuk murabahah/ mudharabah.

Adapun permohonan tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong bersangkutan guna menghindari terjadinya tumpang tindih dengan dana PUEM-G dan dana lain yang telah disalurkan di masing-masing gampong.

Permohonan tersebut diteliti dan diseleksi keabsahan dokumennya kemudian petugas LKMS Mahirah Muamalah meninjau langsung ke lokasi di gampong dan menganalisa kelayakan usahanya. Petugas LKMS Mahirah Muamalah mengadakan pertemuan dengan calon debitur di gampong sebanyak tiga kali pertemuan serta meninjau kelayakan usaha dan mengambil keputusan nama-namayang layak menjadi debitur dan jumlah dana yang harus diberikan untuk penambahan modal usahanya.

Nama-nama debitur tersebut disampaikan kepada DPMG, kemudian DPMG membuat Surat Keputusan plafon dana yang ditandatangani oleh Walikota Banda Aceh untuk dicairkan kepada para debitur PUEM Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Penetapan Plafon dan Debitur Penerima Dana Bergulir Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, nama-nama debitur dan jumlah dana yang layak diberikan, SK tersebut dikirim kepada LKMS Mahirah Muamalah untuk proses pencairan dana. Petugas LKMS Mahirah Muamalah kemudian mencairkan dana sesuai dengan dana yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Banda Aceh.

11) Presentase Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang Baik

Definisi aset desa yang diuraikan dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Oleh karena itu kemampuan aparat gampong dalam mengelola asset desa menjadi indikator penting dalam pembangunan di gampong. Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang baik di Kota Banda Aceh periode 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.43
Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang baik Tahun 2020-2024 (dalam persen)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang baik	40	44,44	46,67	47.78	51,11

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2025

Capaian yang diraih pada awal periode belum begitu menggembirakan. Kapasitas aparat gampong dalam mengelola aset ini masih perlu untuk ditingkatkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kemampuan dalam inventarisir barang, laporan aset sangat kurang dilakukan oleh desa. Kemampuan ini terus diupayakan oleh DPMG sebagai OPD yang membantu gampong melalui program pelatihan pelaporan aset. Upaya ini kemudian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan aparat gampong yang terlihat dari meningkatnya capaian pengelolaan aset gampong diakhir periode yaitu tahun 2022 yang mencapai 46,67 persen. Namun, tentu belum dapat berpuas diri dengan capaian ini. Perlu upaya peningkatan kapasitas aparatur gampong di bidang pengelolaan aset gampong perlu dilaksanakan secara berkesinambungan.

12) Presentase Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong yang baik

Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan mukim/gampong. Penyusunan perencanaan gampong, pengelolaan keuangan dan aset gampong, penyusunan profil gampong, pembuatan produk hukum gampong dan pelaksanaan administrasi pemerintahan mukim/gampong akan dapat berjalan baik bila gampong memiliki SDM yang baik. Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong yang baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.44
Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong yang baik
Tahun 2020-2024 (dalam persen)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong yang baik	45	59,81	60,75	63,55	65,42

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2025

2.9 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Persentase Koperasi Aktif

Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, menyatakan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Peran ini diberikan karena koperasi merupakan bentuk usaha yang mencerminkan sikap khas bangsa Indonesia yang saling tolong menolong dan selalu begotong royong. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat dalam menggiatkan koperasi. Kota Banda Aceh turut mendorong tumbuhnya dan aktifnya koperasi dalam pemberdayaan ekonomi anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Perkembangan jumlah koperasi selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 507 jumlah tahun 2020 menjadi 521 koperasi pada tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.45
Persentase Koperasi Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi Aktif	386	395	395	397	403
2	Jumlah Koperasi	507	513	514	518	521
3	Persentase Koperasi Aktif	76,13	77,00	77,18	76,64	77,35

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh 2025

Persentase koperasi aktif di kota Banda Aceh mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan rata-rata persentase koperasi aktif per tahun 75,69 persen dari total koperasi yang dibentuk. Peningkatan jumlah koperasi aktif dari awal periode yaitu tahun 2020 adalah 76,13 persen bertambah menjadi 77,35 persen pada akhir periode tahun 2024.

2) Jumlah UMKM dan BPR/ LKM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai sebuah lembaga keuangan telah mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi kota Banda Aceh bagi para pelaku ekonomi lemah, dimana pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada masyarakat tanpa peraturan yang ketat, yang menjadi permasalahan sekarang permodalan lembaga keuangan mikro sangat terbatas sementara masih banyak UMKM yang membutuhkan modal dari LKM. Dinas teknis dalam menyikapi hal tersebut menginisiasi melakukan penyaluran bantuan modal kerja berupa dana revolving Paopia Peduli dari salah satu pelaku usaha yang memiliki kelebihan dana dengan memberikan pinjaman tanpa bunga dan tanpa anggunan kepada pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan dana tapi tidak memiliki anggunan. Adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan dengan pola penjaminan dengan suku bunga pinjaman yang relatif rendah belum maksimal di mamfaatkan oleh pelaku usaha yang disebabkan oleh persyaratan atau informasi yang tidak tersampaikan sehingga ditahun 2022 masih ada sisa dana yang belum tersalurkan. Perkembangan jumlah BPR/ LKM dari Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.46

Jumlah UMKM dan BPR/LKM di Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah seluruh UMKM	12.012	19.590	34.428	34.428	34.464
2	Jumlah BPR/LKM	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh 2025

2.10 Pertanian

1) Produktivitas Padi Per Hektar

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh merupakan kota yang berkembang pesat dan menjadi tujuan urbanisasi. Oleh sebab itu kegiatan ekonomi

utama yang dimiliki adalah perdagangan dan jasa, sedangkan lahan pertanian semakin lama semakin berkurang seiring dengan meluasnya area permukiman. Kondisi ini telah mempengaruhi sektor pertanian di Kota Banda Aceh terutama pada tanaman padi. Luas panen, produksi dan produktivitas padi di Kota Banda Aceh tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Kota Banda Aceh
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Panen (Ha)	16,41	13,19	13,07	10,09	12,77
2	Produksi (Ton)	86,90	70,32	72,69	49,85	65,63
3	Produktivitas (Kw)	5,30	5,33	5,56	4,94	5,14

Sumber: DP2KP Kota Banda Aceh, 2025

Tabel di atas memperlihatkan telah terjadi pengurangan luas lahan tanam padi yang signifikan yang mempengaruhi turunnya jumlah produksi padi.

2) Cakupan Bina Kelompok Petani

Perkembangan kelompok binaan pertanian/peternakan dari tahun 2018 sampai 2022 terjadi fluktuasi karena pembinaan terhadap kelompok pertanian/ peternakan dipengaruhi oleh permintaan masyarakat pada tingkat Musrenbang dan juga ketersediaan lahan pertanian/ peternakan semakin berkurang serta ketersediaan dana terbatas. Permasalahan dalam pembinaan kelompok pertanian/peternakan yaitu kurangnya sarana dan prasarana.

Tabel 2.48
Cakupan Bina Kelompok Pertanian Tahun 2020-2024

Bidang Urusan/ Indikator	Rumus	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Cakupan Bina Kelompok	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan Bantuan pemda tahun n					

Pertanian/ Pernakan	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Petani/Peternak}}{\text{Jumlah Kelompok Petani/Peternak}} \times 100\%$	18,75	5,4	3,24	4,70	2,99
------------------------	--	-------	-----	------	------	------

Sumber : DP2KP Kota Banda Aceh Tahun 2025

Energi dan Sumber Daya Mineral

Energi listrik di Kota Banda Aceh disediakan oleh PLN melalui pembangkit listrik yang terkoneksi ke system transmisi dan pembangkit listrik yang tidak terkoneksi ke sistem transmisi. Pembangkit listrik yang terkoneksi merupakan sambungan koneksi jaringan listrik dari Sumatera Utara. Seluruh kecamatan (9 kecamatan) dan 90 gampong di wilayah Kota Banda Aceh sudah dialiri oleh listrik. Secara lebih rinci kelistrikan Kota Banda Aceh sejak tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Data Kelistrikan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi (kWh)	42.825.326	39.020.453	39.216.695	40.970.026	44.407.982
2	Penjualan (X Rp 1.000)	730.241	881526553	990565397		
3	Gardu Hubung (Unit)	13	13	13	16	16
4	Trafo Distribusi (Buah)	2.730	2.760	2.790	2820	2850
5	Panjang JTM (kms)	1.717,14	1.757	1.813	1.802	1.826
6	Panjang JTR (kms)	2.745,45	2.757	2.758	2.847	2.882
7	Pembangkit Non PLN (kVA)	-	-	-	-	-
8	Pelanggan (Orang)	259.149	269.958	281.351	292.071	300.994
9	Daya Tersambung (VA)	485.823,57	516.552	556.550	610.086	644.779
10	Terima (kWh Salur) (kWh)	791.834.788	819.603.379	878.405.005	996.285.273	1.063.979.778
11	Penjualan (kWh)	730.241.630	758.566.098	816.649.731	965.831.313	1.031.175.148
12	Daya Trafo Distribusi (kVA)	261.757	274.580	274.580	323.380	343.880
13	Jumlah Kecamatan Terlistriki	9	9	9	9	9
14	Jumlah Desa Terlistriki	90	90	90	90	90
15	Jumlah Desa Seluruhnya	90	90	90	90	90
16	Rata-rata tarif per Kwh	1.135	1.163	1.213	1.229	1.231

Sumber : BPS Kota Banda Aceh, 2025

2.11 Kelautan dan Perikanan

1) Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Pembinaan terhadap kelompok nelayan terus dilaksanakan secara berkelanjutan mengingat Kota Banda Aceh adalah kota yang dikelilingi lautan dan ramai masyarakat yang bekerja di sektor ini. Berikut cakupan binaan kelompok nelayan di Kota Banda Aceh periode tahun 2020-2024.

Tabel 2.50
Cakupan Binaan Kelompok Nelayan Tahun 2020-2024

Bidang Urusan/ Indikator	Rumus	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	4	5	6	7	8
Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan Bantuan pemda tahun n $\times 100\%$ Jumlah Kelompok Nelayan	107	115	0,1	0,03	0

Sumber : DP2KP Kota Banda Aceh Tahun 2025

2) Produksi Perikanan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya

Kota Banda Aceh merupakan Sentra terbesar pendaratan ikan yang terdapat di Provinsi Aceh. Hampir seluruh armada dengan berbagai jenis komoditi perikanan didaratkan, produksi perikanan dari tahun ketahun telah terjadi peningkatan, hal ini sangat didukung oleh armada dan teknik penangkapan ikan yang diterapkan oleh nelayan di Kota Banda Aceh, selain itu dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam memberantas *Illegal Fishing* telah berdampak positif bagi usaha perikanan tangkap, meningkatnya ketersediaan sumber daya ikan di perairan laut Aceh. Penerapan teknologi usaha penangkapan ikan telah berhasil meningkatkan produksi perikanan di Kota Banda Aceh sehingga membantu nelayan dalam meningkatnya taraf hidup mereka.

Tabel 2.51
Produksi Ikan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	0,73	399	883	839,9	805,3
Jumlah Produksi Hasil Perikanan Tangkap	Ton	28.498	27.203	22.665	28.106	28.923
Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton	174,71	NA	349,97	429,3	360,14

Sumber : DP2KP Kota Banda Aceh Tahun 2025

2.12 Pariwisata

Untuk mengukur tingkat keberhasilan di bidang pariwisata telah ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu jumlah kunjungan wisata dan Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD Kota Banda Aceh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Indikator Kinerja Daerah Bidang Pariwisata Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Nusantara + Mancanegara)	Wisatawan	143.801	251.836	328.169	382.029	420.637
2	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD Kota Banda Aceh	%	5,5	15	12,43	12,45	12,47

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, Tahun 2025

2.13 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keluarga merupakan unit terkecil dalam bernegara, tetapi merupakan unit yang utama dalam penentuan kesejahteraan. Perhatian terhadap perlindungan anak dan

perempuan dalam rumah tangga telah menjadi sorotan utama dan menjadi factor penting dalam aspek kesejahteraan. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan capaian indikator Kota Layak Anak (KLA) tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Perempuan	0,05	0,07	0,07	0,11	0,06
Anak	0,04	0,05	0,06	0,05	0,02

Sumber: DP3AP2KB Kota Banda Aceh, 2025

Tabel 2.54
Indikator Kota Layak Anak (KLA) yang dicapai tahun 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Indikator KLA yang dicapai	664	693	788	766	802

Sumber: DP3AP2KB Kota Banda Aceh, 2025

BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

3.1. Konsep Kemiskinan

3.1.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang sering kali dijumpai di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2004). Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*) (Harahap, 2006). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang

menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengidentifikasi segala aspek yang dapat menjadikan miskin.

3.1.2 Definisi Kemiskinan Secara Umum

Definisi mengenai kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat/golongan yang selanjutnya disebut miskin (Nugroho, 1995). Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status pendidikan, dan kondisi kesehatan.

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004: 122). Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan dunia ketiga. Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

1) Kemiskinan (*Poverty*)

Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.

2) Ketidakberdayaan (*Powerless*)

Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of Emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat 25 mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.

4) Ketergantungan (*Dependency*)

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau

penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

5) Keterasingan (*Isolation*)

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

3.1.3 Skema Terbentuknya Perangkat Kemiskinan

Skema terbentuknya kemiskinan yang didasarkan pada konsep yang dikemukakan oleh Chambers menerangkan bagaimana kondisi yang disebut miskin di sebagian besar negara-negara berkembang dan dunia ketiga adalah kondisi yang disebut memiskinkan. Kondisi yang sebagian besar ditemukan bahwa kemiskinan selalu diukur/diketahui berdasarkan rendahnya kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok berupa pangan, kesehatan, perumahan atau pemukiman, dan pendidikan. Rendahnya kemampuan pendapatan diartikan pula sebagai rendahnya daya beli atau kemampuan untuk mengkonsumsi.

Kemampuan pendapatan yang relatif terbatas atau rendah menyebabkan daya beli seseorang atau sekelompok orang terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi rendah (Nugroho, 1995: 17). Konsumsi ini terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan gizi dan kesehatan standar. Akibatnya, kemampuan untuk mencapai standar kesejahteraan menjadi rendah seperti:

- 1) Ketersediaan pangan tidak sesuai atau tidak mencukupi standar gizi yang disyaratkan sehingga beresiko mengalami mal gizi atau kondisi gizi rendah yang selanjutnya sangat rentan terhadap resiko penyakit menular.

- 2) Kesehatan relatif kurang terjamin sehingga rentan terhadap serangan penyakit dan kemampuan untuk menutupi penyakit juga relatif terbatas sehingga sangat rentan terhadap resiko kematian
- 3) Perumahan atau pemukiman yang kurang/tidak layak huni sebagai akibat keterbatasan pendapatan untuk memiliki/mendapatkan lahan untuk tempat tinggal atau mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kondisi ini akan berdampak mengganggu kesehatan.
- 4) Taraf pendidikan yang rendah. Kondisi ini disebabkan karena keterbatasan pendapatan untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkan atau sesuai dengan standar pendidikan.

Kondisi-kondisi akibat keterbatasan atau rendahnya pendapatan di atas menyebabkan terbentuknya status kesehatan masyarakat yang dikatakan rendah (morbiditas) atau berada dalam kondisi gizi rendah. Kondisi seperti ini sangat rentan terhadap serangan penyakit dan kekurangan gizi yang selanjutnya disertai tingginya tingkat kematian (mortalitas).

Angka mortalitas yang tinggi dan keadaan kesehatan masyarakat yang rendah akan berdampak pada partisipasi sosial yang rendah, ketidakhadiran yang semakin tinggi, kecerdasan yang rendah, dan ketrampilan yang relatif rendah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing keadaan yang disebabkan oleh adanya mortalitas maupun morbiditas yang tinggi.

1) Tingkat Partisipasi Sosial Yang Rendah

Kondisi kesehatan maupun gizi yang rendah menyebabkan ketahanan fisik atau modal fisik yang diperlukan untuk partisipasi sosial menjadi rendah. Hal ini dikarenakan kesehatan yang terganggu tidak dapat menunjang partisipasi secara penuh baik di lingkungan kemasyarakatan maupun di lingkungan kerja. Sebagian besar golongan masyarakat miskin relatif jarang terlibat secara aktif dalam aktivitas sosial.

2) Absensi Meningkat

Faktor kualitas kesehatan yang rendah tidak mendukung adanya aspek kehadiran dalam aktivitas kemasyarakatan baik di lingkungan sosial, pendidikan, maupun pekerjaan. Akibatnya, ketidakhadiran atau absensi dalam segala aktivitas menjadi semakin meningkat sehingga tidak

memiliki kesempatan untuk berperan secara aktif dalam lingkungan sosial tersebut.

3) **Tingkat Kecerdasan Yang Rendah**

Faktor gizi buruk ataupun kualitas kesehatan yang rendah akan berdampak pada menurunnya kualitas intelektual. Seperti diketahui bahwa kinerja otak manusia yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah memerlukan gizi yang memadai atau ideal. Kekurangan gizi termasuk faktor yang paling utama terhadap adanya penurunan kualitas intelektual.

4) **Ketrampilan Yang Rendah**

Pada prinsipnya, ketrampilan merupakan salah satu bentuk dari adanya kreativitas. Aktivitas ini harus ditunjang dengan kondisi kesehatan yang mencukupi dan tentunya adalah kualitas intelektual yang memadai. Masyarakat yang mengalami kekurangan gizi ataupun rentan terhadap gangguan kesehatan relatif sulit untuk mengembangkan ketrampilannya. Hal ini dikarenakan dukungan kesehatan untuk menunjang pengembangan kreativitas kerja relatif rendah sehingga tidak memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan kualitas keterampilannya.

3.1.4 Bentuk dan Dimensi Kemiskinan

Dimensi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers memberikan penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut memiskinkan. Konsep kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu sosial terhadap kemiskinan yang tidak hanya sekedar kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi juga kondisi ketidakberdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kejahatan (kriminal), resiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sendiri.

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004):

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau 30 mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

4) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial terutama di kalangan negaranegara pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia. Bentuk kemiskinan struktural juga dianggap paling banyak menimbulkan adanya ketiga bentuk kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya (Jarnasy, 2004: 8-9). Setelah dikenal bentuk kemiskinan, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah:

1) Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan pra sarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

2) Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan (developmentalism) yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industri misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Kedua jenis kemiskinan di atas seringkali masih dikaitkan dengan konsep pembangunan yang sejak lama telah dijalankan di negara-negara sedang berkembang pada dekade 1970an dan 1980an (Jarnasy, 2004: 8).

Persoalan kemiskinan dan pembahasan mengenai penyebab kemiskinan hingga saat ini masih menjadi perdebatan baik di lingkungan akademik maupun pada tingkat penyusun kebijakan pembangunan (Suryawati, 2004: 123). Salah satu perdebatan tersebut adalah menetapkan definisi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang

disebut miskin. Pada umumnya, identifikasi kemiskinan hanya dilakukan pada indikator-indikator yang relatif terukur seperti pendapatan per kapita dan pengeluaran/konsumsi rata-rata. Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah:

- 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan ketrampilan yang memadai.
- 2) Tingkat pendidikan yang relatif rendah
- 3) Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja di lingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur
- 4) Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (slum area)
- 5) Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa ciri-ciri kemiskinan di atas tidak memiliki sifat mutlak (absolut) untuk dijadikan kebenaran universal terutama dalam menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan ataupun terbentuknya kemiskinan. Sifat-sifat kemiskinan di atas hanya merupakan temuan lapangan yang paling banyak diidentifikasi atau diukur.

3.1.5 Indikator-Indikator Mengenai Kemiskinan

Pengukuran mengenai kemiskinan yang selama ini banyak dipergunakan didasarkan pada ukuran atas rata-rata pendapatan dan rata-rata pengeluaran masyarakat dalam suatu daerah. Perluasan pengukuran dengan menyertakan pandangan mengenai dimensi permasalahan dalam kemiskinan mengukur banyaknya individu dalam sekelompok masyarakat yang mendapatkan pelayanan atau fasilitas untuk kesehatan dan pendidikan. Beberapa perluasan pengukuran lainnya adalah menyertakan dimensisosial politik sebagai referensi untuk menerangkan terbentuknya kemiskinan. Keseluruhan hasil pengukuran ini selanjutnya dikatakan sebagai indikator-indikator kemiskinan yang digolongkan sebagai indikator-indikator sosial dalam pembangunan.

Adapun mengenai beberapa indikator-indikator kemiskinan akan diuraikan pada subsub bab berikut ini.

3.1.5.1. Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Ekonomi

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, kemiskinan adalah bentuk ketidakmampuan dari pendapatan seseorang maupun sekelompok orang untuk mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Dimensi ekonomi dari kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan seseorang baik secara finansial maupun jenis kekayaan lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suryawati, 2004: 123). Dari pengertian ini, dimensi ekonomi untuk kemiskinan memiliki dua aspek, yaitu aspek pendapatan dan aspek konsumsi atau pengeluaran. Aspek pendapatan yang dapat dijadikan sebagai indikator kemiskinan adalah pendapatan per kapita, sedangkan untuk aspek konsumsi yang dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan adalah garis kemiskinan.

1) Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita menyatakan besarnya rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah selama kurun waktu 1 tahun. Besarnya pendapatan per kapita (income per capita) dihitung dari besarnya output dibagi oleh jumlah penduduk di suatu daerah untuk kurun waktu 1 tahun (Todaro, 1997: 437). Indikator pendapatan per kapita menerangkan terbentuknya pemerataan pendapatan yang merupakan salah satu indikasi terbentuknya kondisi yang disebut miskin.

2) Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan per kapita pada kelompok referensi (*reference population*) yang telah ditetapkan (BPS, 2004). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal, yaitu mereka yang hidupnya dikategorikan berada sedikit di atas garis kemiskinan. Berdasarkan definisi dari BPS, garis kemiskinan dapat diartikan sebagai batas konsumsi minimum dari kelompok masyarakat marjinal yang berada pada referensi pendapatan sedikit lebih besar daripada pendapatan terendah. Pada prinsipnya, indikator garis kemiskinan mengukur kemampuan pendapatan

dalam memenuhi 36 kebutuhan pokok/dasar atau mengukur daya beli minimum masyarakat di suatu daerah. Konsumsi yang dimaksudkan dalam garis kemiskinan ini meliputi konsumsi untuk sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan (Suryawati, 2004: 123).

3.1.5.2 Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Peran Pemerintah

Pemerintah sebagai regulator sekaligus dinamisator dalam suatu perekonomian merupakan salah satu pihak yang memiliki peran sentral dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. Di Indonesia, pelaksanaan penanggulangan permasalahan kemiskinan dikoordinasikan oleh Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan yang bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial. Program penanggulangan masalah kemiskinan ini dibiayai melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional (APBN) melalui pos pengeluaran untuk Program Pembangunan. Prinsip yang digunakan untuk program ini bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui upaya untuk meningkatkan pembangunan di bidang sumber daya manusia dan pemenuhan sarana maupun pra sarana fisik. Kedua bentuk pelaksanaan dalam APBN ini disebut juga investasi pemerintah untuk sumber daya manusia dan investasi pemerintah di bidang fisik.

1) Investasi Pemerintah di Bidang Sumber Daya Manusia

Investasi pemerintah di bidang sumber daya manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang direalisasikan di bidang pendidikan, agama, kebudayaan, kesejahteraan, pembinaan wanita dan anak-anak, pengembangan kualitas tenaga kerja, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pendidikan agama. Keseluruhan aspek di bidang sumber daya manusia di atas merupakan salah satu syarat dasar dalam program penanggulangan masalah kemiskinan.

2) Investasi Pemerintah di Bidang Fisik

Investasi pemerintah di bidang fisik atau disebut juga investasi fisik pemerintah adalah pengeluaran pemerintah yang secara umum ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat yang direalisasikan ke dalam pembangunan fisik. Pada APBN, pos pengeluaran untuk investasi fisik pemerintah ini adalah

keseluruhan pos pengeluaran pembangunan kecuali untuk bidang investasi sumber daya manusia.

3.1.5.3 Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Kesehatan

Dari berbagai data kemiskinan yang dihimpun menyebutkan adanya keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas kesehatan masyarakat. Rendahnya kemampuan pendapatan dalam mencukupi/memenuhi kebutuhan pokok menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk menjangkau atau memperoleh standar kesehatan yang ideal/layak baik dalam bentuk gizi maupun pelayanan kesehatan yang memadai. Dampak dari kondisi seperti ini adalah tingginya resiko terhadap kondisi kekurangan gizi dan kerentanan atau resiko terserang penyakit menular. Kelompok masyarakat yang disebut miskin juga memiliki keterbatasan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan yang memadai sehingga akan menyebabkan resiko kematian yang tinggi.

Indikator pelayanan air bersih atau air minum merupakan salah satu persyaratan terpenuhinya standar hidup yang ideal di suatu daerah. Ketersediaan air bersih akan mendukung masyarakat untuk mewujudkan standar hidup sehat 39 yang layak. Dalam hal ini, ketersediaan air bersih akan mengurangi resiko terserang penyakit yang diakibatkan kondisi sanitasi air yang buruk. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka terdapat keterkaitan/hubungan antara ketersediaan pelayanan air bersih dan jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Pada sisi permasalahan lain, ketersediaan air bersih sangat ditentukan oleh kemampuan pembangunan pra sarana air bersih dalam menjangkau lingkungan atau pemukiman masyarakat. Masyarakat yang kurang terjangkau oleh pelayanan air bersih/minum relatif lebih rendah kualitas kesehatannya dibandingkan masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan air bersih.

3.1.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Pada prinsipnya, PDRB per kapita merupakan konsep dari pendapatan per kapita yang diimplementasikan penjelasannya pada lingkup 40 regional/daerah. Besarnya pendapatan per kapita di suatu daerah mencerminkan aspek pemerataan pendapatan dengan menggunakan besarnya nilai rata-rata keseluruhan pendapatan

rumah tangga dalam perekonomian daerah. Pendapatan per kapita menggambarkan kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah. Konsep pendapatan per kapita seperti ini dianggap masih relevan untuk menerangkan terbentuknya jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Apabila pendapatan per kapita meningkat, maka kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah akan semakin meningkat. Ini berarti kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok di daerah tersebut juga akan semakin meningkat. Jika kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok meningkat, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan berkurang. Sebaliknya, apabila pendapatan per kapita di daerah berkurang/menurun, maka akan menurun pula kemampuan pendapatan rata-rata masyarakat di daerah tersebut. Jika kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok menurun, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

2) Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan

Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan merupakan faktor penentu jumlah penduduk miskin yang berasal dari sisi pendekatan anggaran pemerintah (Saleh, 2002). Pengeluaran tersebut meliputi keseluruhan pengeluaran untuk program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, maka akan semakin tinggi pula taraf kesejahteraan yang dapat dicapai atau diperoleh penduduk di suatu daerah.

3) Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator kesejahteraan di bidang pendidikan adalah indikator jumlah penduduk yang dinyatakan melek huruf. Indikator ini mencerminkan kemampuan penduduk di suatu daerah untuk mengakses fasilitas, layanan pemerintahan, dan sarana lainnya yang membutuhkan kemampuan untuk bisa membaca dan menulis, termasuk di antaranya adalah persyaratan dalam mencari kerja (Suryawati, 2004). Semakin tinggi jumlah penduduk yang melek huruf, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas maupun sarana untuk dapat meningkatkan taraf kesejahtraannya.

4) Jumlah Penduduk Yang Tidak Mendapatkan Akses Air Bersih (RPA)

Air bersih atau air minum merupakan salah satu sarana publik yang cukup vital, sehubungan dengan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik individu maupun keluarga (Harahap, 2006). Akses terhadap air bersih atau air minum akan menentukan kemampuan penduduk untuk mencukupi kebutuhan pokoknya yang terdiri atas kebutuhan atas makanan dan minuman, serta kebutuhan lain yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses atas air bersih, maka akan semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

5) Jumlah Penduduk Yang Tidak Mendapatkan Akses Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu fasilitas publik yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan (Saleh, 2002). Fasilitas kesehatan sekarang ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan layanan kesehatan, akan tetapi berperan pula untuk memberikan perbaikan gizi keluarga. Layanan kesehatan akan memberikan pencegahan dan pengobatan atas penyakit atau gangguan medis, sehingga akan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses fasilitas kesehatan, maka akan semakin tinggi resiko penularan penyakit ataupun gizi buruk yang selanjutnya akan menjadi penyebab tingginya angka kematian dan buruknya kesehatan ibu dan bayi.

Mengenai daerah pemekaran baru dan keterkaitannya dengan jumlah penduduk miskin dijelaskan sebagai faktor kesejahteraan yang disebabkan adanya perubahan pada pengembangan administrasi wilayah (TMPK, 2005). Daerah pemekaran baru akan mengubah struktur administrasi atas pengaturan wilayah dan jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah lama dan wilayah pemekaran baru. Ada dua pandangan, terkait dampak dari pemekaran wilayah baru terhadap jumlah penduduk miskin, yaitu:

1) Perubahan Struktur Kependudukan

Pemekaran wilayah baru akan menyebabkan terjadinya perubahan pada jumlah penduduk yang menempati di masing-masing wilayah tingkat kecamatan. Perubahan pada jumlah penduduk akan berdampak pula pada komposisi jumlah penduduk berdasarkan indikator sosialnya, seperti jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk usia sekolah, jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses air bersih, dan jumlah penduduk yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan. Saleh

(2002) menerangkan bahwa konsentrasi kemiskinan di suatu daerah ditentukan pula oleh aspek regional seperti pemusatan jumlah penduduk miskin yang tidak menyebar di suatu daerah (tingkat kecamatan).

2) Perubahan Pada Kebijakan Kesejahteraan

Setiap daerah pemekaran di tingkat kabupaten/kota akan mendapatkan fasilitas dan kewenangan yang sama dengan daerah lainnya di tingkat kabupaten/kota. Salah satu kewenangan adalah pelimpahan wewenang untuk mengelola kebijakan, terutama kebijakan yang berorientasi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan (Suwandi, 2002). Pelimpahan wewenang ini termasuk salah satunya adalah adanya tambahan alokasi dana dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan. Daerah pemekaran baru memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan, dibandingkan dengan daerah lain yang tidak mengalami pemekaran.

3.2 Kondisi Kemiskinan Daerah

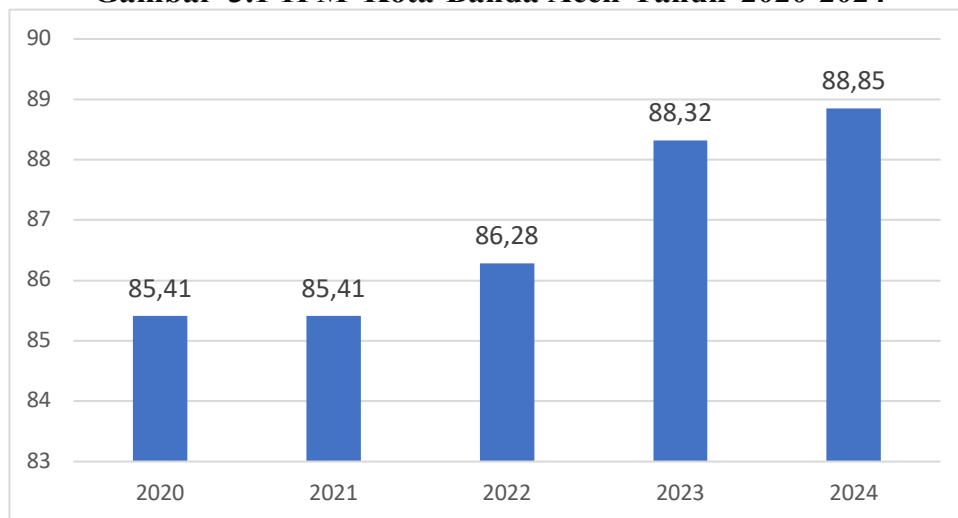
Pada masa lalu, pembangunan lebih diorientasikan pada usaha pemerintah untuk mengejar dan mewujudkan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara menambah jumlah investasi-investasi baru yang pada akhirnya akan menyerap banyak tenaga kerja. Dengan cara ini, diharapkan akan terjadi *"Trickle Down Effects"* atau efek tetesan. Kesejahteraan diasumsikan akan menetes sampai ke semua level sosial ekonomi masyarakat. Namun pendekatan yang hanya terpusat pada pertumbuhan ekonomi ternyata memiliki dampak yang kurang baik. Peningkatan pendapatan nasional tidak otomatis berarti kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Yang terjadi kemudian adalah pendapatan terdistribusi secara tidak merata, sehingga meskipun secara nasional perhitungan pendapatan lebih tinggi, mayoritas rumah tangga tetap berada pada keadaan sosial ekonomi yang buruk.

Oleh karena itu, banyak kritik yang terlontar dan mengatakan bahwa pembangunan yang lebih menekankan pada sisi peningkatan PDB akan berorientasi materialis dan mendorong masyarakat untuk terus memproduksi barang-barang tak berguna. Belajar dari pengalaman serta perkembangan pemikiran mengenai pengukuran keberhasilan pembangunan, maka *United Nation Development Programme* (UNDP) menyusun paradigma baru yang tidak hanya menonjolkan sisi material tetapi juga kemajuan-kemajuan yang

terkait dengan sisi harkat kesejahteraan manusia. Kemudian dikenalkanlah paradigma pembangunan yang lebih berorientasi kepada *human development center*, UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Nilai IPM ini menunjukkan seberapa jauh wilayah tersebut telah mencapai sasaran yang ditentukan.

Gambar 3.1 IPM Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024



Sumber : Banda Aceh Dalam Angka, 2025

Di samping pergeseran paradigma dalam mengukur keberhasilan pembangunan, pemerintah juga terus memperbaiki kebijakan yang terkait dengan isu pencapaian kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur dan mengidentifikasi keberhasilan usaha mendorong sebanyak mungkin masyarakat ke tingkat kesejahteraan, maka pemerintah mengembangkan berbagai pendekatan perhitungan. Dalam usaha untuk melakukan pengukurannya tersebut, maka Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari

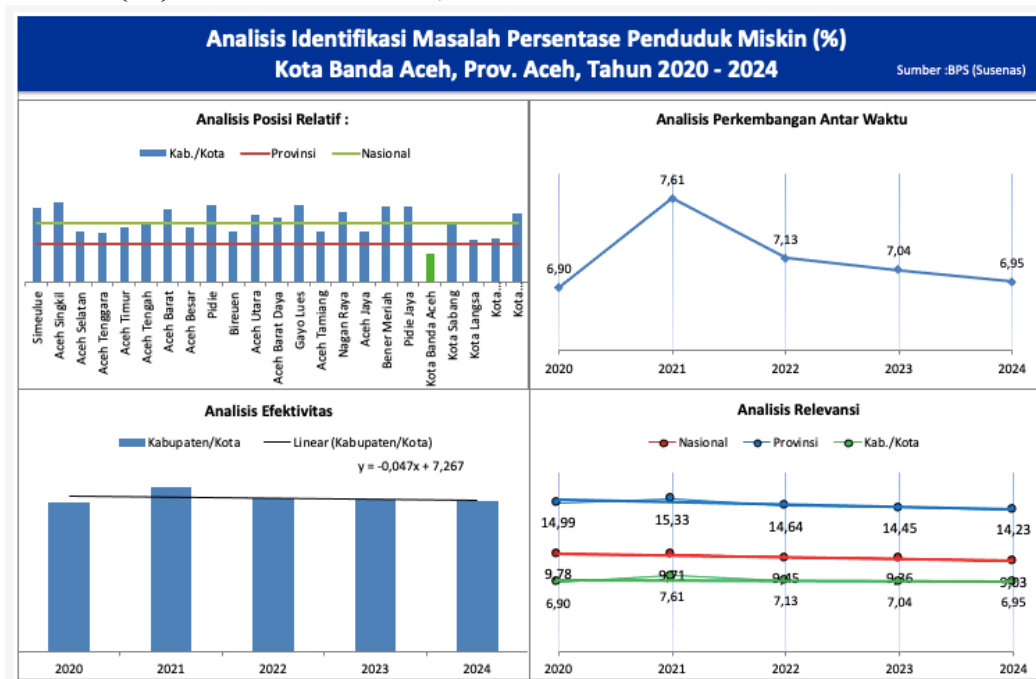
sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kebijakan dan program tersebut, maka digunakan beberapa indikator statistik kemiskinan umum diantaranya:

1. Persentase Penduduk Miskin (P0)

Tingkat Kemiskinan adalah indikator yang digunakan untuk memotret besaran porsi penduduk miskin pada suatu wilayah. Tingkat kemiskinan atau sering juga disebut sebagai persentase penduduk miskin merupakan nilai yang menunjukkan proporsi penduduk miskin terhadap total penduduk di suatu wilayah.

Gambar 3.2 Analisis Identifikasi Masalah Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Tahun 2020-2024



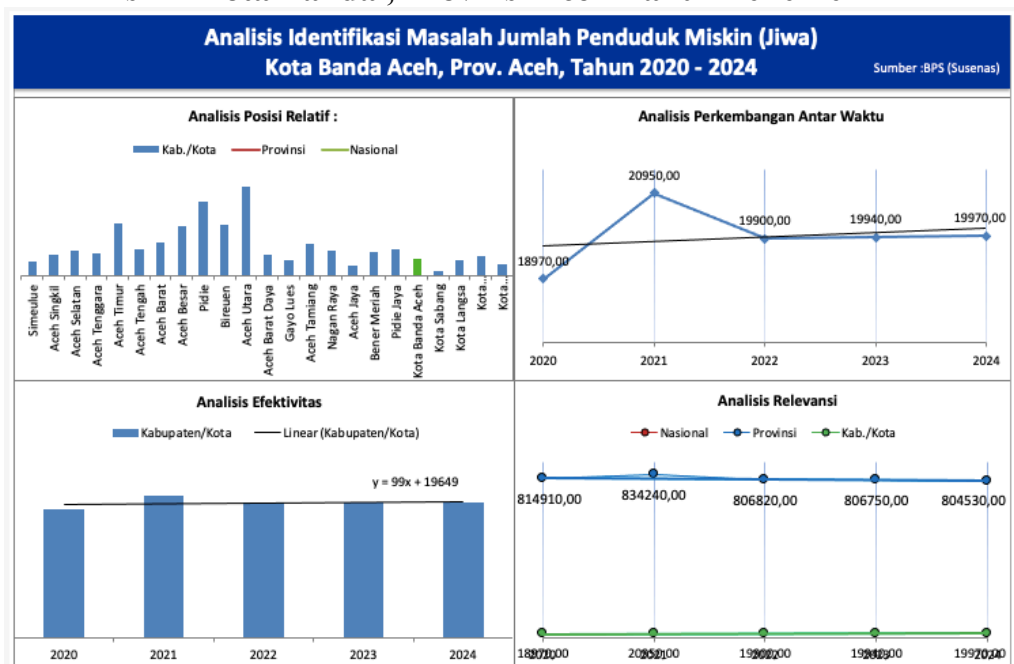
Meskipun terus menurun dalam beberapa tahun terakhir, namun terjadi perlambatan dalam penurunannya, bahkan sempat naik di tahun 2021. Proporsi penduduk miskin Kota Banda Aceh pada tahun 2024 adalah 6,95%. Ini menempatkan Kota Banda Aceh sebagai kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Aceh (14,23%) dan berada dibawah Nasional (9,03%). Angka tersebut merupakan hasil dari penurunan yang konsisten selama tahun 2021-2024. Meskipun terjadi kenaikan pada tahun 2021 (7,61%), namun demikian secara keseluruhan persentase penduduk miskin Kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir membentuk tren linier yang menurun sebesar 0,047% sehingga kondisi yang ada saat ini dapat

dijadikan basis untuk meneruskan penurunan kemiskinan pada tahun-tahun mendatang, dengan catatan bahwa Kota Banda Aceh dapat mempertahankan kecepatan penurunan persentase penduduk miskin dalam beberapa waktu terakhir.

2. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah tertentu dengan pengeluaran dibawah garis kemiskinan. Meskipun jumlah penduduk miskin Kota Banda Aceh pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 (dari 18.970 jiwa menjadi 19.970 jiwa). Meskipun persentase penduduk miskin terus menurun, namun hingga tahun 2024 jumlah penduduk miskin di kota Banda Aceh cenderung bertambah dengan penambahan rata-rata 99 jiwa setiap tahunnya.

Gambar 3.3 Analisis Identifikasi Masalah Jumlah Penduduk Miskin Kota Banda , Provinsi Aceh Tahun 2020-2024



Bertambahnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 diduga berasal dari penduduk yang semula termasuk pada kategori rentan miskin yaitu penduduk yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum sedikit di atas garis kemiskinan, namun di tahun 2021 mereka ini menjadi penduduk yang tidak lagi dapat memenuhi batas minimal kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan (garis kemiskinan) akibat adanya pandemi Covid-19. Adanya pandemi Covid-19 yang terjadi selama tahun 2021 menjadi penyebab stagnasi atau bahkan penurunan pendapatan

penduduk (PDRB per-kapita), sementara disisi lain, nilai garis kemiskinan dari tahun ke tahun senantiasa meningkat.

Penurunan yang terjadi pada tahun 2022 patut diduga dikarenakan semakin membaiknya kondisi perekonomian dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga sebagian masyarakat yang sebelumnya berada dibawah garis kemiskinan mampu keluar dari garis kemiskinan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain pembagian beras bagi untuk masyarakat miskin, kenaikan upah, pemberdayaan masyarakat melalui UMKM, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan program-program pemerintah lainnya.

Sedangkan berdasarkan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, informasi 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan Nasional (Desil 1,2,3 dan 4) Tahun 2022 Kota Banda Aceh berjumlah 73.602 jiwa dengan ketentuan; Desil 1, penduduk dengan kesejahteraan 10% paling rendah sebesar 17.699 jiwa, desil 2 penduduk dengan kesejahteraan 11-20% sebesar 19.283 jiwa, desil 3 penduduk dengan kesejahteraan 21-30% sebesar 18.028 jiwa serta desil 4 penduduk dengan kesejahteraan 31-40 sebesar 18.592 jiwa.

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem, Miskin dan Rentan Miskin (Desil 1-4) Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2022

No.	Kecamatan	Keluarga				Individu					
		Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4
	Total (9)	16.740	3.619	4.308	4.190	4.623	73.602	17.699	19.283	18.028	18.592
1.	Baiturrahman	2.247	431	545	596	675	9.811	2.087	2.434	2.583	2.707
2.	Kuta Alam	2.986	636	847	689	814	13.156	3.103	3.764	2.979	3.310
3.	Meuraxa	2.172	397	542	592	641	9.990	2.047	2.571	2.728	2.644
4.	Syiah Kuala	1.705	449	443	407	406	7.171	2.116	1.871	1.637	1.547
5.	Lueng Bata	1.550	330	393	391	436	6.648	1.608	1.713	1.625	1.702
6.	Kuta Raja	1.416	399	362	316	339	6.280	1.985	1.631	1.339	1.325
7.	Banda Raya	1.678	408	423	418	429	7.343	1.972	1.880	1.773	1.718
8.	Jaya Baru	1.459	222	373	407	457	6.639	1.133	1.754	1.803	1.949
9.	Ulee Kareng	1.527	347	380	374	426	6.564	1.648	1.665	1.561	1.690

Berdasarkan Data P3KE tersebut, menunjukkan bahwa penduduk dengan 10% kesejahteraan paling rendah paling banyak di Kecamatan Kuta Alam sebesar 3.103 jiwa, dengan terbesar kedua ada di Kecamatan Syiah Kuala sebesar 2.116 jiwa, sedangkan penduduk dengan 10% kesejahteraan

paling rendah paling sedikit adalah di Kecamatan Jaya Baru dengan jumlah 1.133 jiwa. Demikian juga berdasarkan rumah tangga, rumah tangga dengan 10% kesejahteraan paling rendah paling banyak di Kecamatan Kuta Alam sebesar 636 rumah tangga, terbesar kedua rumah tangga desil 1 berada di Kecamatan Syiah Kuala, sedangkan kecamatan paling rendah rumah tangga desil 1 nya adalah Kecamatan Jaya Baru dengan jumlah 222 rumah tangga.

Berdasarkan keseluruhan data P3KE 40% tersebut (73.602 jiwa), dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 sebesar 19.970 jiwa, maka terdapat 53.632 jiwa penduduk Kota Banda Aceh berada dalam kondisi rentan miskin atau sedikit saja diatas garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Banda Aceh pada tahun 2024 adalah 862.944 rupiah sebagai kebutuhan minimum perkapita per bulan.

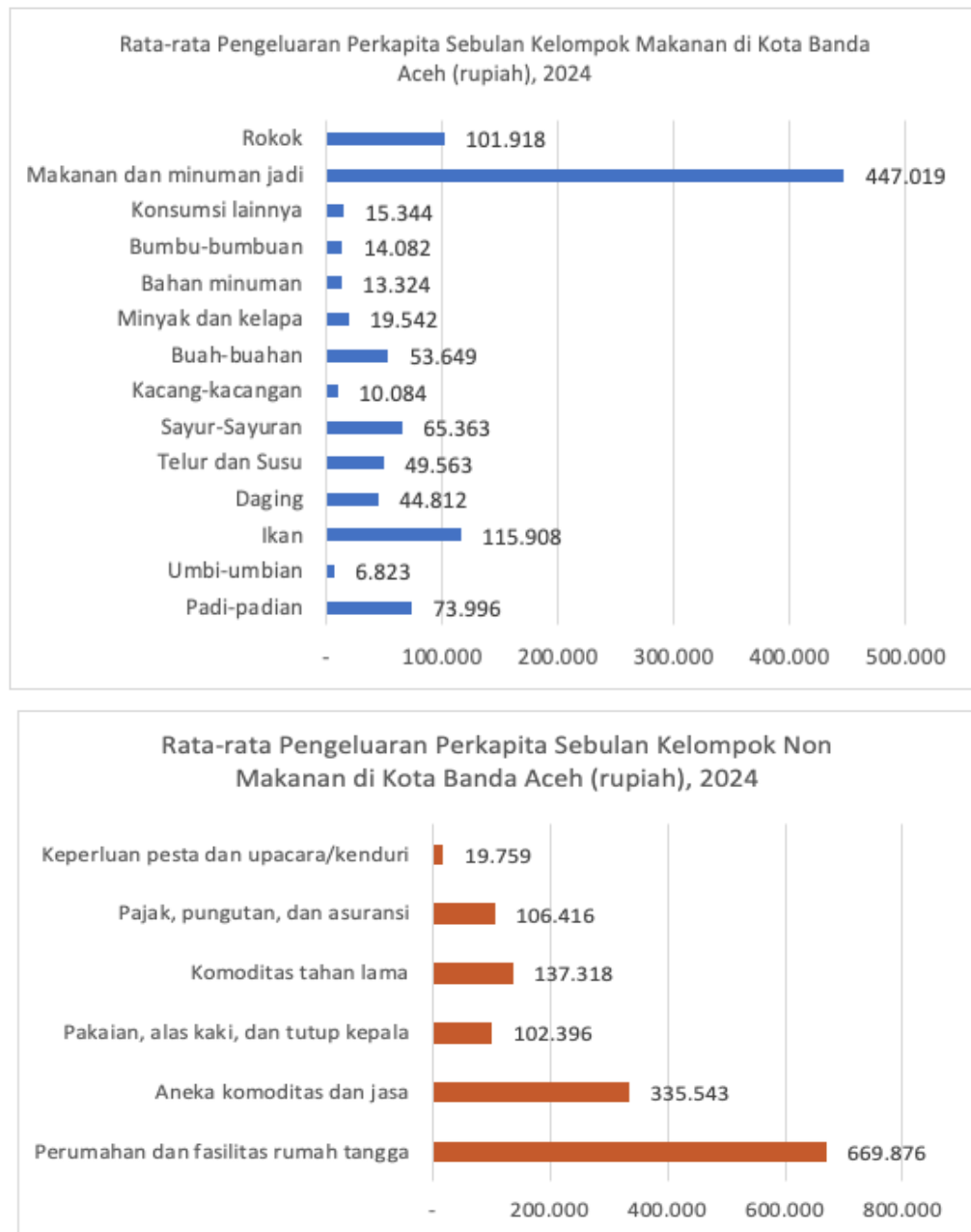
3. Garis Kemiskinan (GK)

Garis Kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Garis Kemiskinan menurut BPS merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Non-Makanan.

Metode yang digunakan dalam perhitungan kemiskinan ini didasarkan atas Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Untuk Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging telur dan susu, sayuran, kacang- kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Penghitungan GK dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

Gambar 3.4



Sumber : Banda Aceh Dalam Angka, 2025

Gambar 3.4. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kelompok Makanan dan Non Makanan di Kota Banda Aceh (Rupiah) Tahun 2024

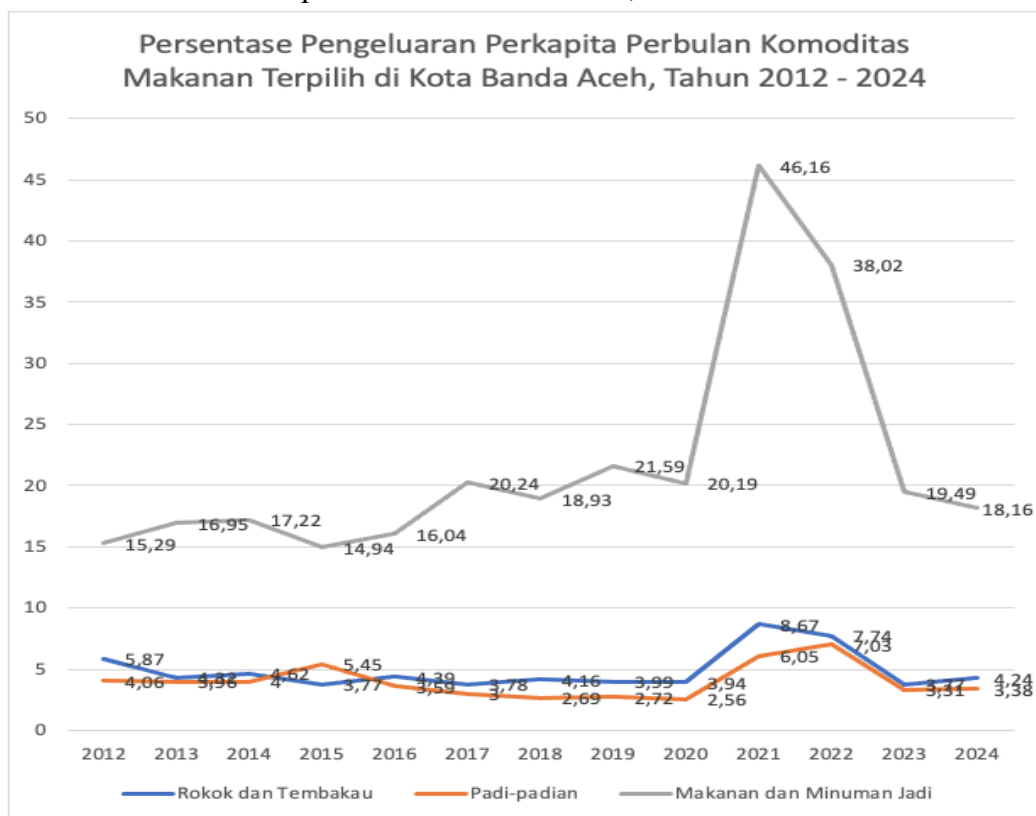
a) Pengeluaran Konsumsi Kelompok Makanan

Banyak faktor yang memengaruhi pola konsumsi pangan rumah tangga. Faktor yang memengaruhi pola konsumsi, di antaranya adalah : (1) Tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pendapatan biasanya sebanding dengan tingkat konsumsi yang tinggi; (2) Selera konsumen, orang berbeda akan memiliki keinginan yang berbeda dan akan memengaruhi pola konsumsi; (3) Harga barang, kenaikan harga berbanding terbalik dengan permintaan akan suatu barang; (4) Tingkat pendidikan masyarakat,

berpengaruh terhadap perilaku, sikap dan kebutuhan konsumsi; (5) Jumlah keluarga, besar kecilnya jumlah keluarga akan memengaruhi pola konsumsinya; (6) Lingkungan, keadaan dan kebiasaan lingkungan akan memengaruhi perilaku konsumsi pangan masyarakat setempat. Bagi masyarakat perkotaan seperti di Kota Banda Aceh, telah terjadi pergeseran pola pengeluaran konsumsi per kapita. Gaya hidup yang ingin instan tanpa perlu menghabiskan waktu dan tenaga serta didukung oleh kemudahan sistem pelayanan pembelian melalui pesan antar secara daring/online telah menyebabkan pengeluaran makanan dan minuman jadi semakin meningkat. Dapat dilihat pada Gambar 3.5, pengeluaran per kapita perbulan untuk pengeluaran makanan dan minuman jadi cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Bila di tahun 2012 seorang penduduk di Kota Banda Aceh baru mengalokasikan 15,29 persen bagian dari pengeluaran per kapita per bulannya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman jadi, alokasi ini terus meningkat menjadi 46,16 persen di tahun 2021. Secara spesifik, peningkatan terbesar tampak di tahun 2021, dimana peningkatan yang terjadi mencapai 25,97 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini terjadi karena selama masa covid layanan transportasi online yang salah satu pelayanan yang diberikan adalah layanan antar pembelian makanan dan minuman secara online mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Namun pada tahun 2023 dan 2024 angka persentase pengeluaran makanan dan minuman jadi cenderung mengalami penurunan yang sangat signifikan terutama pada tahun 2023.

Konsumsi rokok dan padi-padian (padi, jagung, ubi, tepung) pada tahun 2024 cenderung stabil meskipun terdapat sedikit kenaikan. Patut diduga alokasi untuk kedua jenis komoditas makanan telah meningkat dan merupakan hasil dari pergeseran pengeluaran makanan dan minuman jadi.

Gambar 3.5 Persentase Pengeluaran Perkapita Perbulan Komoditas Makanan Terpilih di Kota Banda Aceh, 2012-2024



Sumber : Banda Aceh Dalam Angka, 2025

b) Pengeluaran Konsumsi Kelompok Non Makanan

Sejalan dengan kenaikan pendapatan per kapita, pola konsumsi berubah sehingga : (1) Pengeluaran rumah tangga untuk bahan makanan dan pakaian turun; (2) Belanja untuk barang konsumsi tahan lama meningkat; (3) Pengeluaran untuk jasa meningkat; (4) Pengeluaran untuk leisure meningkat

Pengeluaran Konsumsi Non Makanan biasanya mengalami kenaikan sejalan dengan tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tingginya proporsi pengeluaran untuk non makanan mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan semakin membaik.

Pengeluaran untuk makanan memiliki limitasi karena tidak mungkin perut seseorang terus bertambah seiring kenaikan pendapatan.

Gambar 3.6 Persentase Pengeluaran Perkapita Perbulan Kelompok Pengeluaran Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga di Kota Banda Aceh, 2012-2024

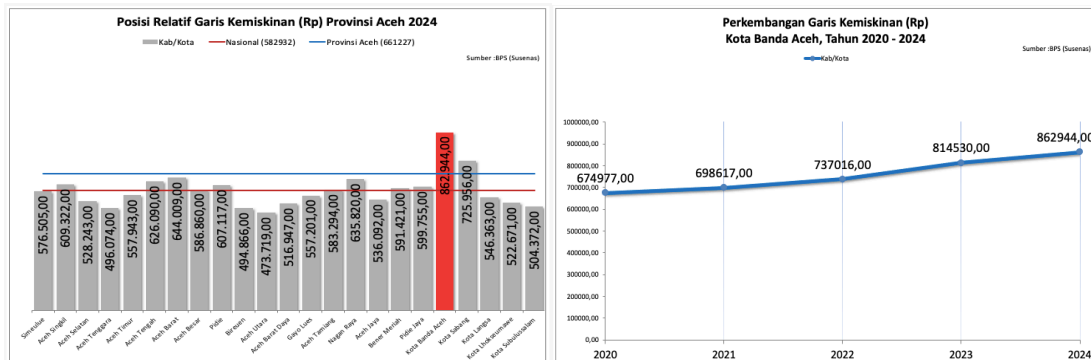


Sumber : Banda Aceh Dalam Angka, 2025

Masyarakat Kota Banda Aceh semakin menunjukkan pergeseran dari rural menuju urban. Kebutuhan pengeluaran yang besar terhadap perumahan, transportasi, dan komunikasi merupakan ciri-ciri masyarakat perkotaan. Pergeseran tersebut tampak pada pola pengeluaran perkapita untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2012, sebanyak 24,44 persen pengeluaran seorang penduduk Kota Banda Aceh dihabiskan setiap bulannya untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Di tahun 2024 proporsi tersebut meningkat menjadi 27,88 persen, bahkan di tahun 2022 pernah mencapai angka 52,18%.

Berdasarkan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan kelompok makanan dan kelompok non makanan, maka diperoleh garis kemiskinan. Dari garis kemiskinan ini kemudian akan diukur berapa banyak penduduk yang memiliki pengeluaran dibawah standar nilai tersebut. Perbandingan dalam persentase antara jumlah penduduk yang pengeluarannya berada dibawah GK terhadap jumlah keseluruhan penduduk disebut sebagai Tingkat Kemiskinan. Oleh karenanya, permasalahan kemiskinan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah baik di pusat, maupun bagi pemerintah daerah. Berbagai kebijakan dan program disusun dalam upaya mendorong sebanyak mungkin masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan dan kerentanan kemiskinan.

Gambar 3.7. Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2024 dan Perkembangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024



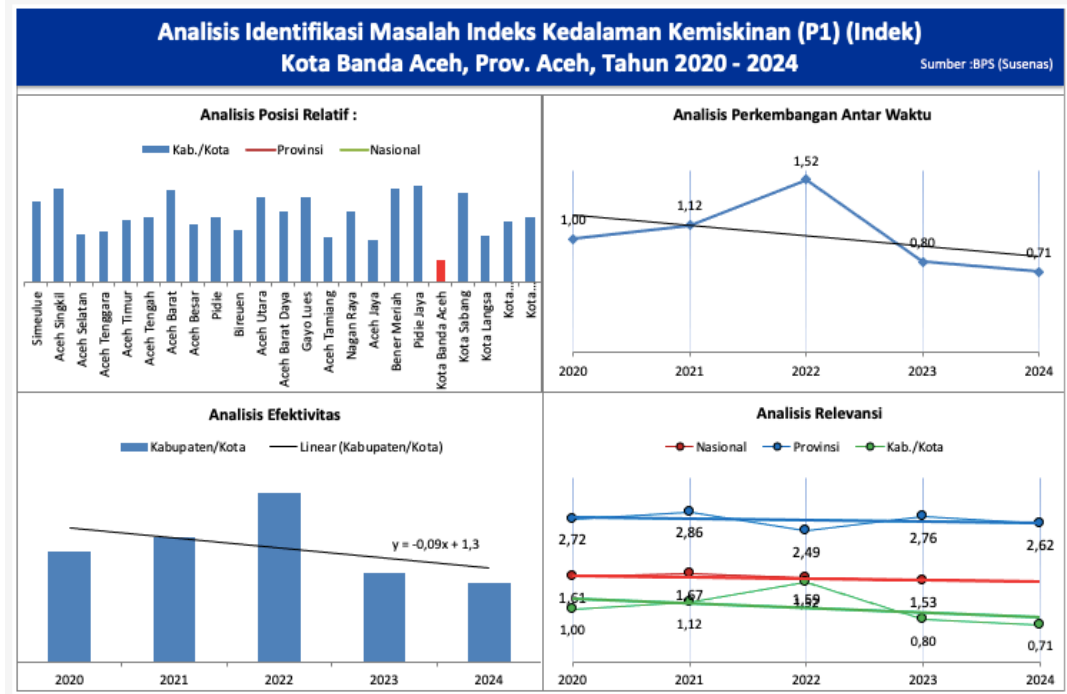
Garis kemiskinan (GK) Kota Banda Aceh tahun 2024 merupakan garis kemiskinan tertinggi di Provinsi Aceh yaitu 862.944 rupiah dan setiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 garis kemiskinan sebesar Rp 674.977,-. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024), garis kemiskinan mengalami peningkatan sebesar Rp 187.967,-. Garis Kemiskinan menunjukkan pendapatan minimum perkapita perbulan yang harus dicapai penduduk untuk dapat hidup. Meningkatnya garis kemiskinan disebabkan oleh inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa. Untuk memperoleh standar hidup yang layak maka daya beli masyarakat diusahakan untuk tidak menurun. Agar daya beli masyarakat tidak turun maka pendapatan harus naik sehingga garis kemiskinan juga naik.

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks kedalaman Kemiskinan Kota Banda Aceh mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2024 mencapai 0,71, turun dibandingkan dengan tahun 2023 (0,80). Penurunan nilai P1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil. Indeks kedalaman kemiskinan menjadi ukuran penting bagi pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah khususnya kabupaten/kota. Meskipun indeks kedalaman kemiskinan mengalami fluktuasi dari

tahun 2020 hingga 2024, namun trendnya menurun dengan rata-rata laju penurunannya sebesar 0,09%.

Gambar 3.8 Analisis Identifikasi Masalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kota Banda , Provinsi Aceh Tahun 2020-2024



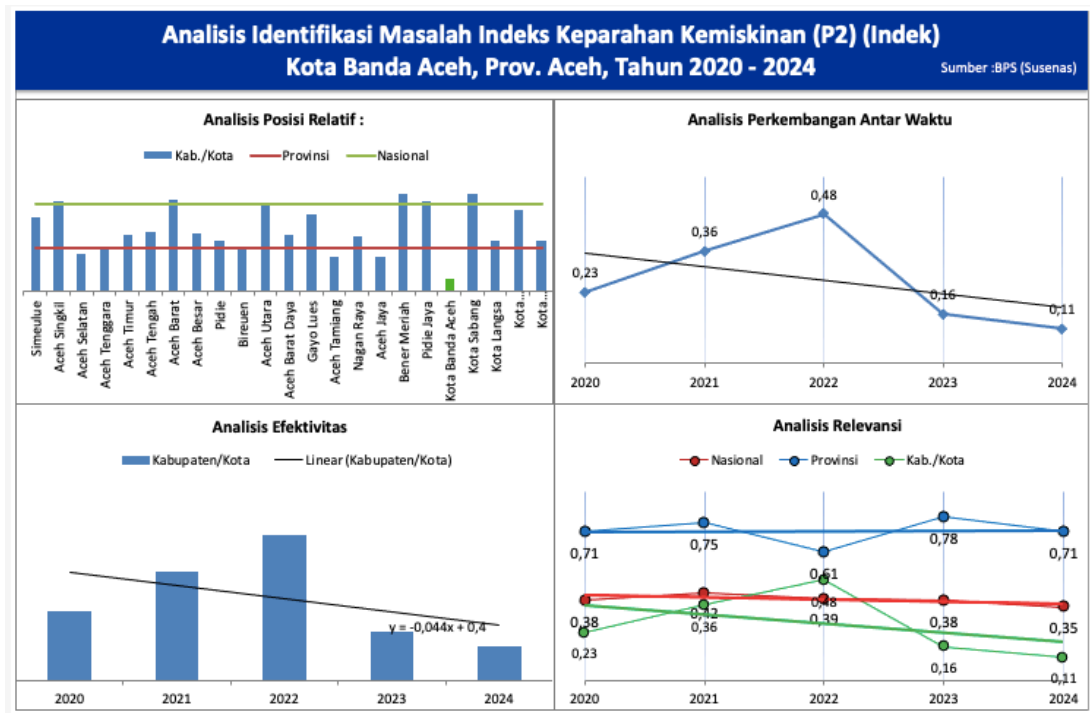
Posisi Relatif Indeks kedalaman Kemiskinan Kota Banda Aceh jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh pada tahun 2024 berada pada posisi paling rendah, yaitu 0,71, angka ini juga berada dibawah indeks P1 nasional yaitu 1,56 dan indeks P1 provinsi Aceh yaitu 2,62. Indeks P1 tertinggi di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Pidie Jaya, yaitu 3,14.

5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Sejalan dengan indeks kedalaman kemiskinan, untuk indeks keparahan kemiskinan juga berfluktuatif dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, Indeks keparahan kemiskinan Kota Banda Aceh mencapai 0,23. sedangkan pada tahun 2024 turun menjadi 0,11.

Gambar 3.9 Analisis Identifikasi Masalah Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kota Banda , Provinsi Aceh Tahun 2020-2024



Berdasarkan analisis posisi relatif, perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan relevansi untuk indikator persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, kedalaman dan keparahan kemiskinan, permasalahan utama kemiskinan Kota Banda Aceh adalah:

1. Persentase penduduk miskin masih tinggi, belum sesuai target RPJM
2. Upaya penurunan angka kemiskinaan belum berhasil dan bahkan jumlah penduduk miskin meningkat
3. Masih besarnya jumlah penduduk rentan miskin
4. Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) fluktuatif dan cenderung meningkat

3.3 Identifikasi Kemiskinan Multidimensi Kota Banda Aceh

Seperti yang telah dijelaskan pada sub sebelumnya, pengukuran kemiskinan diukur melalui Persentase Penduduk Miskin (P0), Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Dimana kondisi kemiskinan yang ada di Kota Banda Aceh ini dapat diidentifikasi dari beberapa permasalahan per urusan yang ada yang juga menjadi pokok permasalahan dalam pembangunan daerah. Berikut akan dijelaskan permasalahan kemiskinan dari beberapa urusan di Kota Banda Aceh:

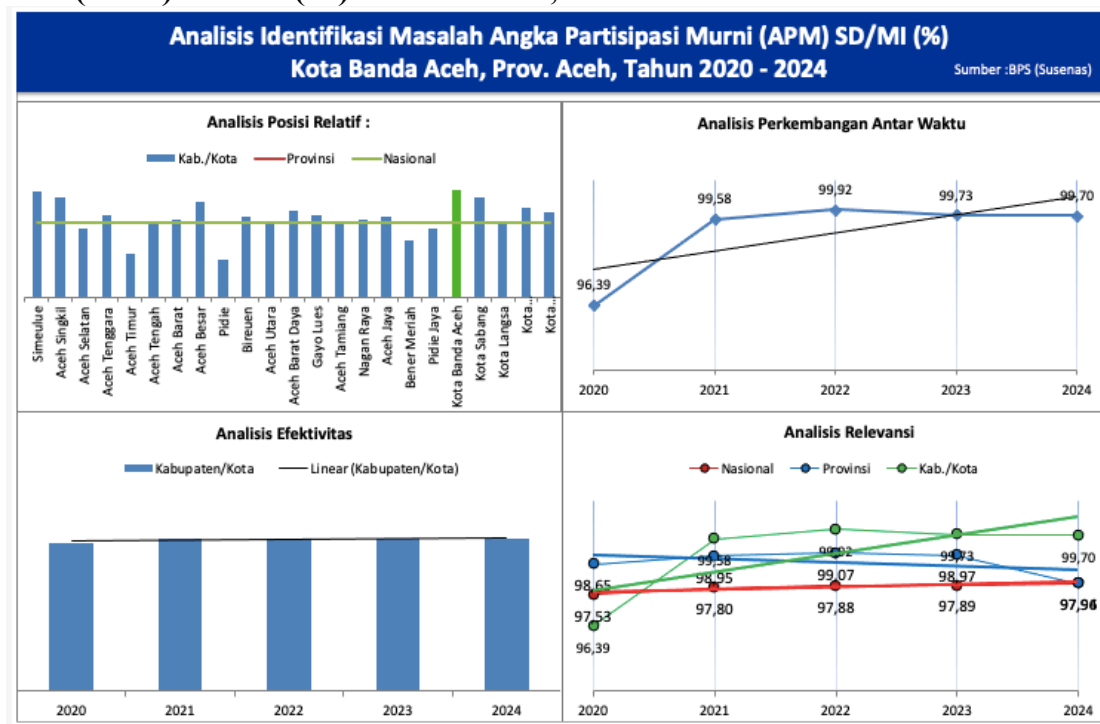
3.3.1 Bidang Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar untuk setiap manusia sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sangatlah penting, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.

Angka Partisipasi Murni SD/MI (APM SD/MI)

Angka Partisipasi Murni pendidikan merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usia, indikator ini akan menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Gambar 3.10 Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kota Banda , Provinsi Aceh Tahun 2020-2024



Pada tahun 2024, capaian Angka Partisipasi Murni SD/MI (APM SD/MI) Kota Banda Aceh adalah 99,70%. Capaian ini masih berada di atas capaian Provinsi Aceh (97,94%) maupun capaian Nasional pada tahun yang sama (97,96%). Untuk provinsi Aceh sendiri, capaian APM SD/MI Kota Banda Aceh adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Dilihat dari perkembangan antar waktu untuk indikator APM SD/MI Kota Banda

Aceh, menunjukkan trend yang meningkat dalam 5 tahun terakhir di 2020-2024. Namun demikian selama periode 2 tahun terakhir (2023 dan 2024) menunjukkan sedikit penurunan.

Tabel 3.2. Jumlah anak usia sekolah, 7-12 Tahun (SD/MI), 13-15 Tahun (SMP/MTs), 16-18 Tahun (SMA/MA) yang Bersekolah dan Tidak Bersekolah Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2022

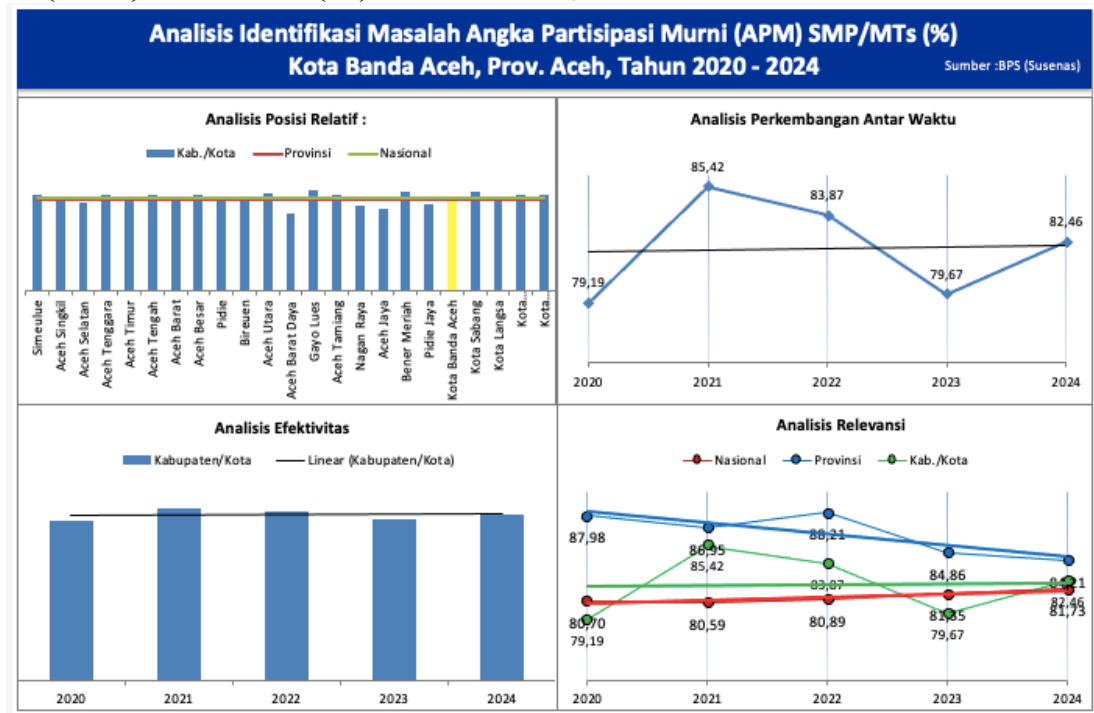
No	Kecamatan	Bersekolah				Tidak Bersekolah			
		Jumlah	7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun	Jumlah	7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun
	Total (9)	19.287	8.979	6.181	4.127	3.708	3.426	167	115
1.	Baiturrahman	2.339	1.057	710	572	469	413	31	25
2.	Kuta Alam	3.425	1.606	1.106	713	628	600	17	11
3.	Meuraxa	3.019	1.477	956	586	499	489	8	2
4.	Syliah Kuala	1.912	891	619	402	370	341	14	15
5.	Lueng Bata	1.638	716	554	368	255	236	12	7
6.	Kuta Raja	1.614	742	543	329	431	363	46	22
7.	Banda Raya	1.874	870	587	417	385	355	13	17
8.	Jaya Baru	1.850	868	610	372	362	333	18	11
9.	Ulee Kareng	1.616	752	496	368	309	296	8	5

Dari capaian Angka Partisipasi Murni SD/MI Kota Banda Aceh tahun 2020 adalah 96,39%, mengartikan bahwa, pada tahun tersebut, terdapat 3,61% anak usia 7-12 tahun (usia SD/MI) yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah. Merujuk kepada data P3KE Kemenko PMK tahun 2022, menunjukkan bahwa terdapat 1.426 anak• anak dalam usia 7-12 tahun (SD/MI) di Kota Banda Aceh yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah.

Dari sebaran kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa anak-anak usia 7-12 tahun yang paling banyak tidak bersekolah adalah di Kecamatan Kuta Alam (600 anak) diikuti oleh Kecamatan Meuraxa (489 anak), Kecamatan Baiturrahman (413 anak) dan seterusnya. Sedangkan kecamatan dengan angka putus sekolah terendah dalam usia 7-12 tahun adalah di Kecamatan Luengbata (236 anak).

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (APM SMP/MTs)

Gambar 3.11 Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kota Banda , Provinsi Aceh Tahun 2020-2024



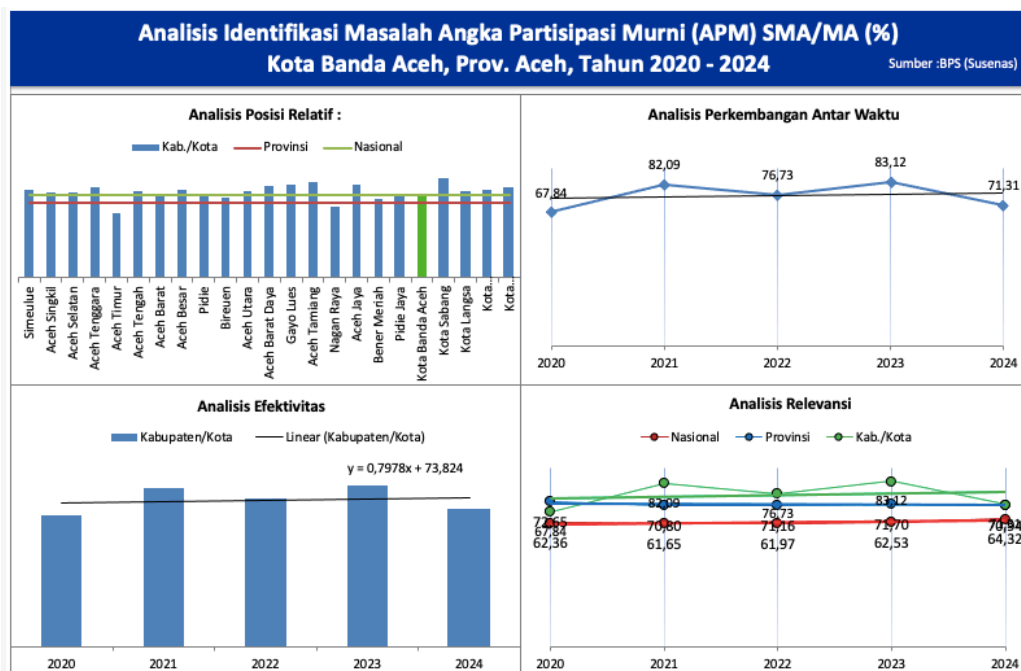
Pada tahun 2024, capaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (APM SMP/MTs) Kota Banda Aceh adalah 82,46%. Capaian ini masih dibawah capaian Provinsi Aceh (81,73%) maupun capaian Nasional pada tahun yang sama (82,21%). Untuk provinsi Aceh sendiri, capaian APM SMP/MTs Kota Banda Aceh masih relatif rendah dan berada di peringkat 18 dari 23 Kabupaten/kota. Dilihat dari perkembangan antar waktu untuk indikator APM SMP/MTs Kota Banda Aceh, menunjak trend yang sedikit meningkat dalam 5 tahun terakhir, meskipun terjadi penurunan tajam pada tahun 2023 yang mencapai 79,67%.

Dari capaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kota Banda Aceh tahun 2024 yaitu 82,46%, mengartikan bahwa, pada tahun tersebut, terdapat 17,54% anak usia 13-15 tahun (usia SMP/MTs) yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah. Merujuk kepada data P3KE Kemenko PMK tahun 2022, menunjukkan bahwa terdapat 167 anak-anak dalam usia 13-15 tahun (SMP/MTs) di Kota Banda Aceh yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah.

Dari sebaran kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa anak-anak usia 13-15 tahun yang paling banyak tidak bersekolah adalah di Kecamatan Kutaraja (46 anak) diikuti oleh Kecamatan Baiturrahman (31 anak), Kecamatan Jaya Baru (18 anak) dan seterusnya. Sedangkan kecamatan dengan angka putus sekolah terendah dalam usia 13-15 tahun adalah di Kecamatan Meuraxa dan Kecamatan Ulee Kareng (masing-masing 8 anak)

Angka Partisipasi Murni SMA/MA (APM SMA/MA)

Gambar 3.12 Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kota Banda Aceh , Provinsi Aceh Tahun 2020-2024



Pada tahun 2024, capaian Angka Partisipasi Murni SMA/MA (APM SMA/MA) Kota Banda Aceh adalah 71,31%. Capaian ini sudah diatas capaian Provinsi Aceh (70,94%) dan berada diatas capaian Nasional pada tahun yang sama (64,32%). Untuk provinsi Aceh sendiri, capaian APM SMA/MA Kota Banda Aceh relatif rendah dan berada di peringkat 13 dari 23 Kabupaten/kota.. Dilihat dari perkembangan antar waktu untuk indikator APM SMA/MA Kota Banda Aceh, menunjak trend yang meningkat sebesar 0,79% dalam 5 tahun terakhir.

Dari capaian Angka Partisipasi Murni SMA/MA Kota Banda Aceh tahun 2024 yaitu 71,31%, mengartikan bahwa, pada tahun tersebut, terdapat 28,69% anak usia 16-18 tahun (usia SMA/MA) yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah. Merujuk kepada data P3KE Kemenko PMK tahun 2022, menunjukkan bahwa terdapat 115 anak-anak dalam usia 16-18 tahun (SMA/MA) di Kota Banda Aceh yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah. Dari sebaran kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa anak-anak usia 16-18 tahun yang paling banyak tidak bersekolah adalah di Kecamatan Baiturrahman (25 anak), diikuti oleh Kecamatan Kuta Raja (22 anak), Kecamatan Banda Raya (17 anak) dan seterusnya. Sedangkan kecamatan dengan angka putus sekolah terendah dalam usia 16-18 tahun adalah di Kecamatan Meuraxa (2 anak).

3.3.2 Bidang Kesehatan

Kesehatan menjadi salah satu modal manusia (human capital) yang sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas setiap manusia. Sehat merupakan suatu kondisi sejahtera secara sempurna fisik, mental dan sosial tidak terbatas pada bebas dari penyakit atau kelemahan saja. Peningkatan pelayanan kesehatan diharapkan dapat menghasilkan derajat kesehatan masyarakat lebih tinggi sehingga memungkinkan masyarakat hidup lebih produktif, baik secara ekonomi maupun sosial sehingga tercipta masyarakat sehat secara keseluruhan. Di samping itu, kondisi kesehatan merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan daerah yang dapat menjadi faktor meningkatnya kemiskinan daerah.

Terkait permasalahan kemiskinan dalam bidang kesehatan, fokus analisis akan dilakukan pada meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak, dengan tetap mempertimbangkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penanganan penyakit.

Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu isu utama pembangunan nasional di bidang kesehatan. Di dalam RPJMN 2020-2024, ada empat kelompok isu utama pembangunan nasional di bidang kesehatan, yaitu kesehatan ibu dan anak; status gizi; pengendalian penyakit; dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian neonatal merupakan pantauan terhadap kasus kematian bayi yang berumur kurang dari 1 bulan pada satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah bayi lahir hidup dikalikan 1000. Di Kota Banda Aceh pada tahun 2024, angka kematian neonatal ini hanya terdapat 3,38 kasus/kejadian atau 0.076% saja. Umumnya dikarenakan faktor gizi, kurangnya pemeriksaan pada periode kehamilan, adanya komplikasi sehingga bayi lahir dengan berat badan rendah.

Angka Kematian Ibu (AKI)

Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, pada tahun 2024 dilaporkan tidak ada kasus Angka Kematian Ibu melahirkan. Hal ini memberikan indikasi yang baik bahwa semakin meningkatnya jumlah ibu-ibu yang memeriksakan kesehatan pasca melahirkan, sehingga berbagai faktor penyebab bisa terpantau dan dukungan suplemen yang tersedia terakses dengan baik. Gambaran angka kematian ibu di Kota Banda Aceh dapat dilihat padagambar berikut:



Sumber : Profil Kesehatan Kota Banda Aceh, 2025

Gambar 3.13
Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kota Banda Aceh, 2020-2024

Gambar di atas menunjukkan angka kematian ibu di Kota Banda Aceh menunjukkan penurunan dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Bahkan pada tahun 2024 tidak ada kasus kematian ibu melahirkan sama sekali.

Angka Kematian Bayi (AKB)

Salah satu indikator utama kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Kematian bayi adalah kematian yang terjadi

antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan naik turunnya angka kematian bayi, diantaranya:

- 1) masih ada ibu dengan penyakit penyerta yang ingin hamil tanpa direncanakan dengan baik;
- 2) masih rendahnya kepedulian dan keterampilan petugas dalam penatalaksanaan ibu hamil dan bayi;
- 3) kurangnya kepedulian keluarga terhadap ibu hamil dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perawatan bayi;
- 4) wanita usia subur (WUS) yang menderita Kurang Energi Kronis (KEK) dan anemia kurang mendapat perhatian sehingga saat hali akan menimbulkan risiko bagi janin yang dikandung.

Sampai dengan akhir tahun 2024 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Banda Aceh sebanyak 3,61 bayi per 1000 kelahiran hidup. Jumlah ini menurun dibandingkan kasus kematian bayi tahun 2020 dimana AKB sebesar 4 bayi per 1000 kelahiran hidup. Ada banyak faktor yang mempengaruhi AKB tetapi tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat AKB.



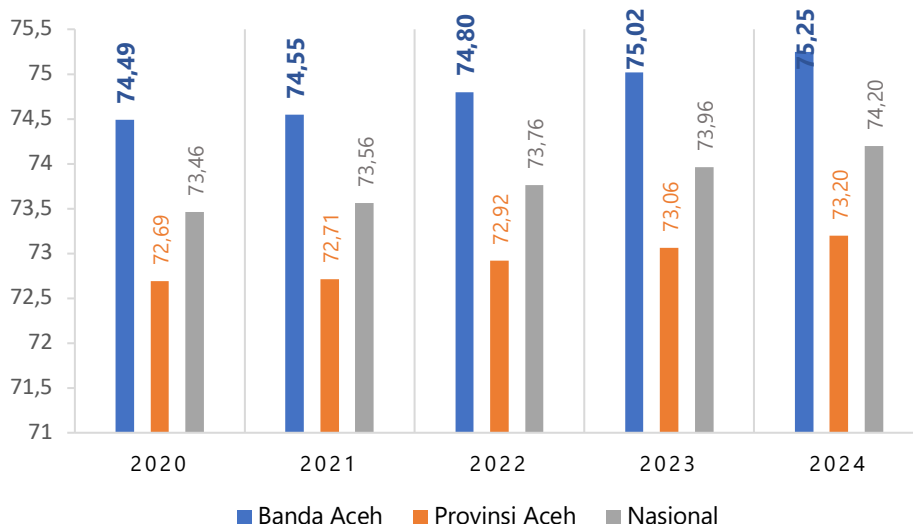
Sumber: Profil Kesehatan Kota Banda Aceh Aceh, 2025

Gambar 3.14
Perkembangan AKB Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan angka kematian bayi di Kota Banda Aceh mengalami trend penurunan meskipun terjadi sedikit kenaikan pada tahun 2024..

Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup (UHH) mengukur rata-rata tahun hidup yang diharapkan bagi anggota suatu populasi pada saat kelahiran, dengan asumsi bahwa tingkat kematian saat ini tetap konstan sepanjang hidup mereka. Angka ini memberikan gambaran umum tentang harapan hidup suatu masyarakat dan digunakan sebagai tolok ukur kesehatan dan stabilitas dan perkembangan demografi Kota Banda Aceh. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Gambar 3.15 Usia Harapan Hidup Kota Banda Aceh (2020-2024)

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka, 2025

UHH di Banda Aceh secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan UHH di Provinsi Aceh secara keseluruhan dan juga UHH nasional. Pada tahun 2020, UHH di Banda Aceh adalah 74,49 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Aceh yang berada di 72,69 tahun dan nasional yang berada di 73,46 tahun.

Perkembangan positif terlihat setiap tahunnya, dengan UHH di Banda Aceh meningkat dari 74,49 tahun pada tahun 2020 menjadi 75,25 tahun pada tahun 2024. Di sisi lain, Provinsi Aceh juga menunjukkan peningkatan, dari 72,69 tahun pada tahun 2020 menjadi 73,20 tahun pada tahun 2024. Namun, meskipun ada peningkatan di tingkat provinsi, UHH di Banda Aceh tetap lebih tinggi. Secara nasional, UHH juga terus meningkat, mencapai 74,20 tahun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa

Banda Aceh berhasil meningkatkan kualitas hidup warganya yang ditunjukkan oleh performa UHH Kota Banda Aceh yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional.

Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak balita. Jadi posyandu adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. Posyandu dibentuk bertujuan untuk :

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas)
2. Membudayakan NKKBS
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Tujuan pembentukan posyandu tersebut didukung dengan 5 kegiatan pokok posyandu, yaitu :

1. KIA
2. KB
3. Imunisasi
4. Gizi
5. Penanggulangan Diare

Tabel 3.3
Perkembangan Rasio Pelayanan Posyandu Per-Satuan Balita di Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
2020	114	27.572	1 : 241
2021	114	19.549	1 : 171
2022	114	19.549	1 : 171
2023	114	11.887	1 : 104
2024	114	11.781	1 : 103

Sumber: Banda Ach Dalam Angka, 2025

Perkembangan rasio pelayanan posyandu di Kota Banda Aceh untuk persatuan balita terus meningkat. Dari tahun 2020 yang hanya bisa melayani 1 posyandu untuk 241 balita, maka pada tahun 2024 sudah bisa melayani 1 posyandu untuk 103 balita. Jumlah ini sangat menggembirakan karena setiap gampong semakin sadar untuk berperan aktif untuk memantau dan menjaga terus kesehatan balita yang ada di lingkungannya melalui layanan Posyandu.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk

Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia meliputi pelayanan rujukan yang berupa:

1. Pelayanan Kesehatan Dasar

Pada umumnya pelayanan dasar dilaksanakan di puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan Pelayanan lainnya di wilayah kerja puskesmas selain rumah sakit.

2. Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pada umumnya dilaksanakan di rumah sakit. Pelayanan keperawatan diperlukan, baik dalam pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan.

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Pelayanan kesehatan dasar yang diterapkan di Indonesia memegang peranan penting dalam pemberian layanan kesehatan yang dapat menjangkau wilayah-wilayah pedesaan. Untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang terjangkau, maka sarana dan prasarana pelayanan kesehatan harus tersedia atau tersebar di setiap kecamatan. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik. Kota Banda Aceh saat ini telah memiliki 11 puskesmas, 27 puskesmas pembantu, 34 polindes/poskedes, 114 posyandu, 54 klinik/balai kesehatan, dan 7 puskesmas keliling yang tersebar di 9 kecamatan dan 90 gampong. Gambaran fasilitas kesehatan di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4**Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2020 - 2024**

Fasilitas Kesehatan	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit Umum	13	14	14	14	14
Rumah Bersalin	7	7	7	7	7
Puskesmas	11	11	11	11	11
Puskesmas Pembantu	27	27	27	27	27
Polindes/Poskedes	34	34	34	34	34
Posyandu	114	114	114	114	114
Klinik/Balai Kesehatan	39	54	54	54	54
Puskesmas Keliling	7	7	7	7	7

Sumber: Banda Ach Dalam Angka, 2025

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan kesehatan dibidang pelayanan langsung seperti Rumah sakit, bertujuan untuk meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi pelaksanaan rujukan medik dan rujukan kesehatan secara terpadu serta meningkatkan dan memantapkan manajemen pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian.

Pelayanan kesehatan rumah sakit di Kota Banda Aceh telah menunjukkan kinerja yang baik. Ketersediaan rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta sudah tersebar dan mencukupi untuk pelayanan kesehatan rujukan. Dengan adanya program BPJS dan JKA pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat sudah memberikan pelayanan yang maksimal.

Tabel 3.5**Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per-Satuan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit (Umum + Swasta)	13	14	14	14	14

Jumlah Penduduk	252,899	255.029	257.635	261.969	265.310
Rasio RS/satuan penduduk	1 : 19.453	1 : 18.210	1 : 18.402	1 : 18.712	1:18.950

Sumber: Banda Ach Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit masih memenuhi standar rasio rumah sakit per-satuan penduduk. Idealnya satu rumah sakit melayani 100.000 penduduk, sementara data diatas menunjukkan rata-rata rumah sakit melayani penduduk dibawah 20 ribu penduduk. Namun over capacity pelayanan dapat terjadi apabila banyaknya pasien dari luar wilayah Kota Banda Aceh yang dirujuk ke rumah sakit di Banda Aceh terutama rumah sakit pemerintah.

Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio Dokter per 100.000 Penduduk adalah Dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di suatu wilayah (di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain) per 100.000 penduduk. Ketersediaan jumlah dokter memberikan gambaran pelayanan kesehatan dari sisi kuantitas tenaga medis terhadap masyarakat. Pola hidup yang semakin berubah terutama diperkotaan menjadikan masyarakat rentan terhadap gejala penyakit maupun keluhan kesehatan lainnya yang membutuhkan penanganan dokter. Kota Banda Aceh sebagai pusat pelayanan kesehatan di Provinsi Aceh memiliki beban besar dalam pelayanan kesehatan terutama penyediaan tenaga medis. Tabel berikut menggambarkan kondisi pelayanan dokter terhadap penduduk di Kota Banda Aceh.

Tabel 3.6
Perkembangan Rasio Dokter Per-100.000 Penduduk di Kota Banda Aceh
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Dokter (rumah sakit dan puskesmas)	469	697	793	706	663
Jumlah Penduduk	252,899	255.029	257.635	261.969	265.310
Rasio dokter/100.000 penduduk	185	273	307	269	249

Sumber BPS Kota Banda Aceh dan Profil Kesehatan Kota Banda Aceh, 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah dokter yang tersedia di Kota Banda Aceh cenderung menurun sejak tahun 2020 sampai dengan 2024. Tahun 2022 jumlah

dokter meningkat drastis, namun tahun 2023 dan 2024 cenderung menurun. Jika dilihat dari rasio dokter per satuan penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan jumlah dokter yang ada di Kota Banda Aceh sudah sangat cukup dalam melayani 100.000 penduduk. Bahkan rasio ini sangat kecil yang artinya di tahun 2024, tersedia 249 orang dokter untuk melayani 100.0000 penduduk.

Rasio Tenaga Medis di Puskesmas per Satuan Penduduk

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Salah satu pengelompokan tenaga kesehatan adalah tenaga medis. Rasio tenaga medis persatuan penduduk Tahun 2020 s/d 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 3.7
Perkembangan Rasio Tenaga Medis di Puskesmas Per-100.000 Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Dokter (rumah sakit dan puskesmas)	333	353	390	348	369
Jumlah Penduduk	252,899	255.029	257.635	261.969	265.310
Rasio Tenaga medis/100.000 penduduk	131	138	151	132	139

Sumber BPS Kota Banda Aceh dan Profil Kesehatan Kota Banda Aceh, 2025

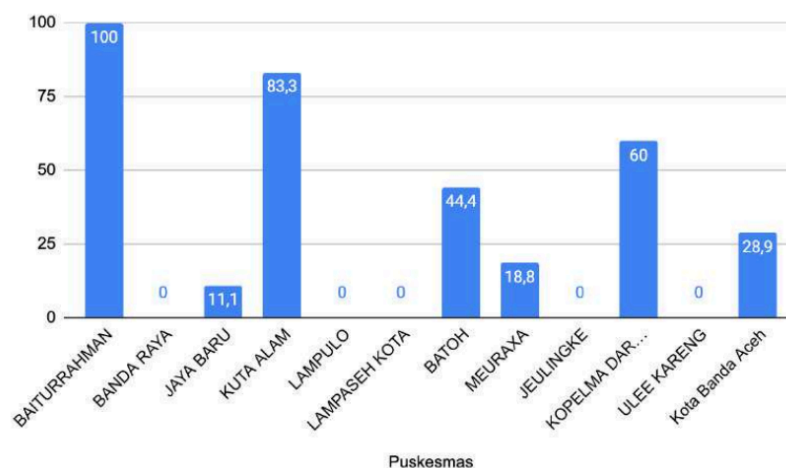
Rasio tenaga medis di Puskesmas Kota Banda Aceh Tahun 2020 adalah 131. Rasio ini terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2024 sebesar 139. Terjadi peningkatan rasio ini diakibatkan karena adanya peningkatan jumlah tenaga medis yang melakukan pelayanan pada UPTD Puskesmas Kota Banda Aceh.

Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI) Menurut Puskesmas

Imunisasi sangat penting untuk melindungi bayi dari penyakit berbahaya dan menular, imunisasi bersifat komunitas maknanya adalah imunisasi harus bersifat menyeluruh atau dalam kata lain keseluruhan anak harus diimunisasi, kalau ada anak yang tidak diimunisasi akan terlindungi dari anak yang di imunisasi di lingkungan nya yang ditarget dalam standar desa UCI (*Universal Child Immunization*).

Program Universal Child Immunization (UCI) merupakan upaya penting

dalam menjamin setiap anak di wilayah Indonesia, termasuk di Kota Banda Aceh, mendapatkan imunisasi dasar lengkap sebelum usia satu tahun. Berdasarkan data cakupan desa UCI per puskesmas tahun 2024, terlihat bahwa capaian program ini masih sangat bervariasi antar wilayah kerja puskesmas. Puskesmas Baiturrahman menunjukkan capaian 100% desa UCI, menandakan seluruh desa atau kelurahan dalam wilayah kerjanya telah mencapai status UCI. Demikian juga dengan Puskesmas Kuta Alam (83,3%) dan Kopelma Darussalam (60%) yang menunjukkan kinerja cukup tinggi. Namun, sejumlah puskesmas masih menunjukkan capaian yang sangat rendah atau bahkan 0%, seperti Banda Raya, Lampulo, Lampaseh Kota, Jeulingke, dan Ulee Kareng. Capaian Kota Banda Aceh secara keseluruhan berada pada angka 28,9%, yang berarti bahwa baru sebagian kecil desa yang telah mencapai standar UCI. Rincian lengkap mengenai cakupan desa/kelurahan UCI pada tahun 2024 menurut kecamatan dapat dilihat pada Gambar 3.16.



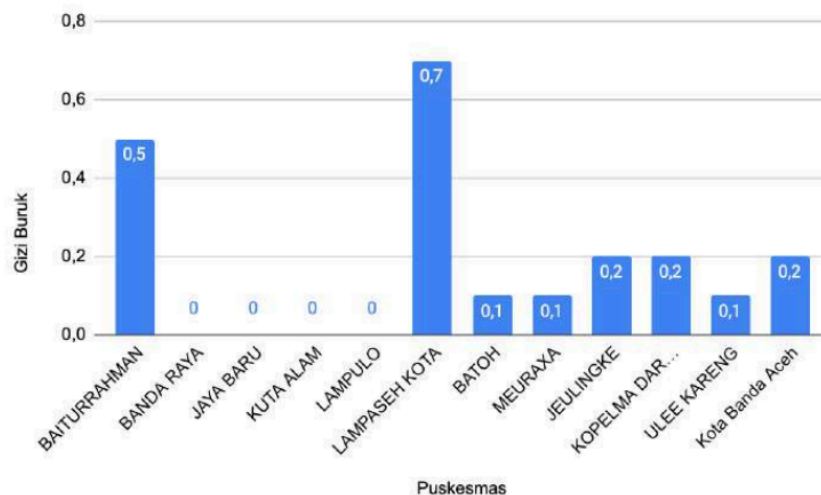
Gambar 3.16 Cakupan Desa UCI Menurut Puskesmas Kota Banda Aceh Tahun 2024

Sumber: Profil Kesehatan Kota Banda Aceh, 2024

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Gizi buruk atau malnutrisi adalah suatu bentuk terparah akibat kurang gizi menahun. Selain akibat kurang konsumsi jenis makanan bernutrisi seimbang, gizi buruk pada anak juga bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh.

Secara umum, angka gizi buruk di kota Banda Aceh relatif rendah, dengan rata-rata 0,2% secara keseluruhan. Puskesmas Lampaseh Kota mencatat angka tertinggi sebesar 0,7%, diikuti oleh Baiturrahman (0,5%), serta beberapa wilayah lain seperti Jeulingke, Kopelma Darussalam, dan Ulee Kareng yang masing-masing mencatat 0,2%. Sementara itu, puskesmas seperti Banda Raya, Jaya Baru, Kuta Alam, dan Lampulo tercatat tanpa kasus gizi buruk (0%).



Gambar 3.17
Persentase Gizi Buruk Pada Balita 0-59 Bulan Menurut Puskesmas
Kota Banda Aceh Tahun 2024

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penyakit demam berdarah *dengue* (DBD) adalah penyakit infeksi virus yang ditularkan oleh nyamuk *aedes aegypti*. Penyakit DBD masih merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya tingginya curah hujan sehingga banyak terjadi genangan air pada wadah atau tempat yang dapat menampung air hujan sebagai tempat perindukan nyamuk DBD di lingkungan luar sekitar rumah, faktor yang lainnya juga dapat dilihat dari tingkat pengetahuan, pemahaman dan kepedulian serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat yang masih rendah, bisa dikarenakan tidak mengetahui ataupun tidak mempunyai kesempatan untuk memantau tempat-tempat

perindukan nyamuk DBD yang ada di dalam rumah, seperti di tempat penampungan air dispenser, kulkas, bak mandi, vas bunga, talang air yang tersumbat dan lain lain. Hal ini menjadi salah satu faktor berkembang biaknya nyamuk DBD secara cepat.

Tabel 3.8
Data Sebaran Kasus DBD Tahun 2020-2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Kuta Alam	14	3	44	33	67
Lueng Bata	9	1	23	20	24
Meuraxa	11	4	75	61	65
Syiah Kuala	15	0	26	28	35
Ulee Kareng	6	3	21	25	36
Banda Raya	14	1	61	36	42
Jaya Baru	15	0	59	24	73
Kuta Raja	2	0	19	18	28
Baiturrahman	12	0	39	25	30
Total	98	13	366	270	399

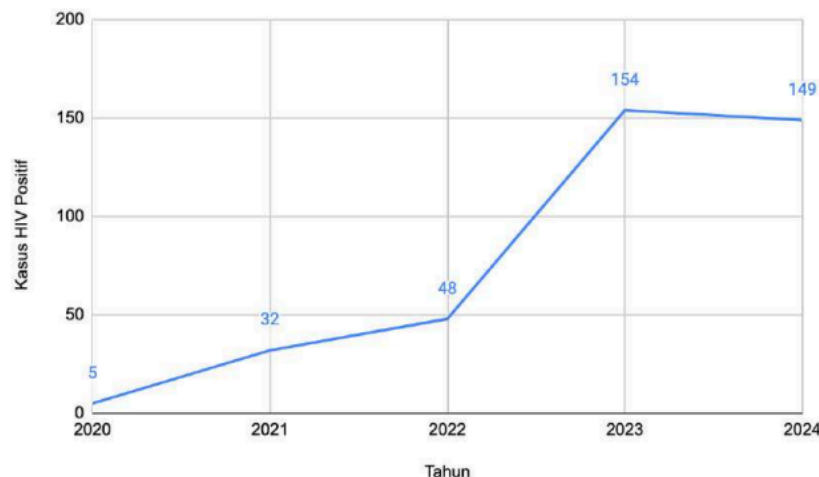
Sumber: Profik Kesehatan Kota Banda Aceh, 2021-2025

Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Banda Aceh pada tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selama periode 2020-2024 yang cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2024 juga terlihat bahwa di semua Puskesmas yang ada di Kota Banda Aceh (11 Puskesmas, di 9 Kecamatan), menunjukkan angka kenaikan kasus DBD.

Penanggulangan DBD yang masih sangat efektif adalah dengan melakukan Gerakan 3M Plus, yaitu Menguras, Menutup dan Mengubur serta Menghindari Gigitan Nyamuk. Pengasapan atau *fogging* hanya membunuh nyamuk dewasa saja, sedangkan jentik nyamuk DBD masih tetap bertahan hidup dan menjadi nyamuk dewasa setelah beberapa hari kemudian. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan pemberantasan tempat-tempat perindukan nyamuk DBD dengan cara Pemberdayaan Masyarakat melalui Kader JUMANTIK = Juru Pemantau Jentik.

Jumlah Kasus HIV dan AIDS

Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah penyakit menular yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan, jika tidak ditangani, dapat berkembang menjadi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), yaitu tahap akhir dari infeksi HIV yang ditandai dengan munculnya berbagai infeksi oportunistik dan komplikasi berat. HIV menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh tertentu seperti darah, air mani, cairan vagina, dan ASI, terutama melalui hubungan seksual tidak aman, penggunaan jarum suntik bersama, serta penularan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Di Indonesia, HIV/AIDS masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius. Pemerintah terus memperkuat upaya penanggulangan melalui strategi “3 Zero”: nol infeksi baru HIV, nol kematian akibat AIDS, dan nol stigma dan diskriminasi. Layanan tes dan konseling sukarela (VCT), pemeriksaan HIV pada ibu hamil, serta pengobatan antiretroviral (ARV) menjadi bagian dari pendekatan terpadu untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini. Menurut Kementerian Kesehatan RI, estimasi jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) di Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 503.261 orang dengan jumlah infeksi baru sebanyak 35.415 orang. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-14 dunia dalam jumlah kasus HIV.



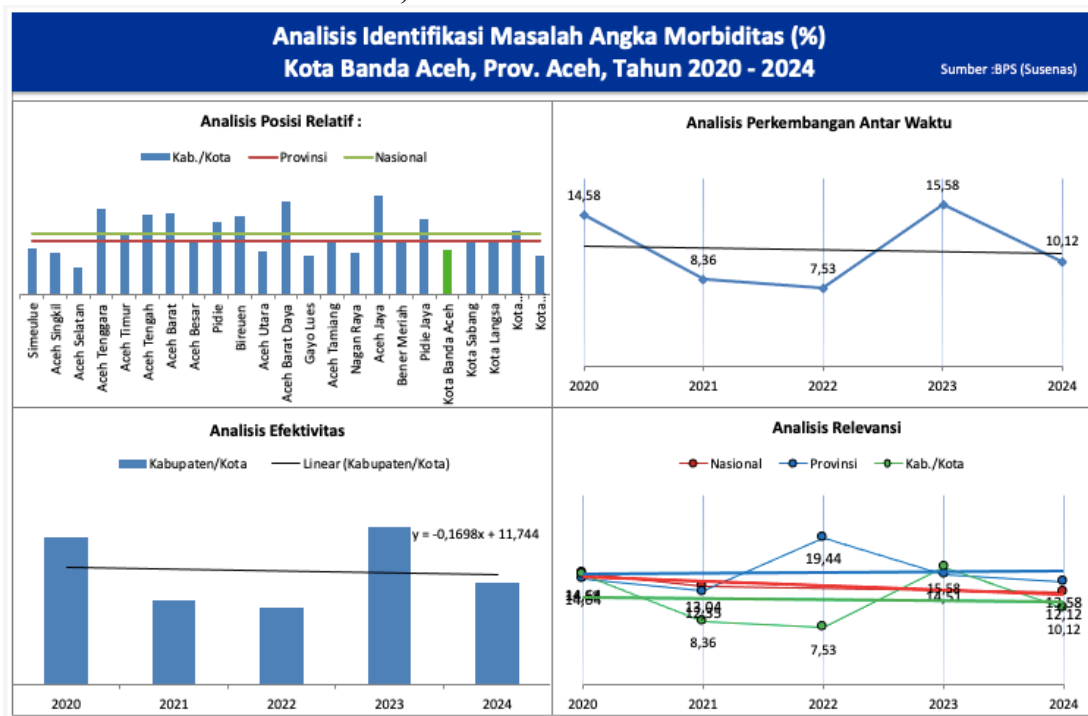
Gambar 3.18
Jumlah Kasus HIV Positif Yang Dilaporkan Kota Banda Aceh
Tahun 2020- 2024

Angka Morbiditas

Angka morbiditas merupakan angka yang menunjukkan tingkat kesakitan akibat gangguan struktur maupun fungsi tubuh seseorang yang merupakan

derajat sakit, cedera maupun gangguan pada populasi yang merupakan penyimpangan dari status sehat atau kesejahteraan suatu masyarakat (BPS). Semakin tinggi morbiditas, menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin buruk.

Gambar 3.19 Analisis Identifikasi Angka Morbiditas (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Tahun 2020-2024



Sejak tahun 2020 - 2024, tingkat kesakitan di Kota Banda Aceh mengalami perkembangan yang fluktuatif yang cenderung menurun dengan persentase tingkat kesakitan terendah pada tahun 2022 (7,53%). Sejak tahun 2020- 2024, perkembangan tingkat kesakitan terus mengalami penurunan. Berbagai pendekatan penanganan atas tingkat kesakitan di Kota Banda Aceh menunjukkan efektif dalam menurunkan angka morbiditas di mana trend penurunan selama periode 2020 - 2022 konsisten menurun di tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan dan Kembali turun di tahun 2024. Penurunan angka morbiditas di Kota Banda Aceh relevan dengan penurunan secara nasional. Trend penurunan lebih baik dari capaian Provinsi Aceh dan capaian Nasional.

3.3.3 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Persentase Rumah Layak Huni (%)

Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memenuhi perumahan layak huni makin besar seiring dengan meningkatnya jumlah pembangunan perumahan yang merupakan dampak dari meningkatnya jumlah penduduk. Dalam lingkungan perumahan harus terdapat fasilitas-fasilitas yang menunjang berkegiatan sehari-hari.

Hal ini bertujuan untuk menjamin kelayakan perumahan yang dihuni sehingga dapat memberikan rasa nyaman, aman, tentram dan sejahtera bagi penghuninya. Peran tersebut telah sesuai dengan peran pemerintah sebagai stabilisator, inovator, dan katalisator. Dalam mewujudkan perumahan yang layak huni, dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni menjadi penting. Gambaran jumlah rumah layak huni dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Rumah Layak Huni Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah	68.507	54.689	54.689	54.689	64.390
2	Jumlah Rumah Layak Huni	64.314	50.424	50.574	50.903	61.463
Persentase		97,88	93,88	92,20	93,07	95,45

Sumber: Dinas Perkim Kota Banda Aceh, 2025

Jumlah rumah layak huni pada tahun 2020 telah mencapai 64.314 unit. Angka ini turun drastis pada tahun 2021, namun sejak tahun 2022 jumlahnya perlahan naik hingga 2024. Hal ini sejalan dengan persentase rumah layak huni. Untuk tahun 2024 jumlah rumah layak huni mencapai angka 61.463 unit (95,45%).

Persentase Permukiman yang Tertata

Pemukiman yang tertata adalah permukiman yang dibangun sesuai tata ruang wilayah dengan memperhatikan hal-hal dasar dalam sebuah kawasan permukiman, seperti rumah layak huni, akses jalan, jaringan drainase, sanitasi, air bersih, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran. Persentase permukiman yang tertata dapat diukur dari perbandingan luas permukiman yang tertata dengan jumlah permukiman keseluruhan. Persentase permukiman yang tertata di Kota Banda Aceh terus meningkat, mulai 23,54,61% di tahun 2020 menjadi 77,76% di tahun 2024. Informasi persentase luas permukiman yang tertata di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10
Persentase Luas Permukiman Tertata Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Area Permukiman tertata (Ha)	620,56	1.485,83	1546,04	929,09	1025,03
2	Luas Area Permukiman Keseluruhan (Ha)	2.635,99	1.936,83	1.936,83	1.304,35	1.318,19
	Persentase	23,54	76,71	79,82	71,23	77,76

Sumber: Dinas Perkim, 2025

Kawasan Permukiman Kumuh

Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh belum sepenuhnya terlepas dari permasalahan lingkungan bersih yang bebas dari kawasan kumuh. Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman kumuh yang umumnya terjadi pada masyarakat miskin adalah rendahnya kualitas lingkungan dan kesehatan yang dianggap sebagai bagian kota yang harus disingkirkan. Terbentuknya permukiman kumuh, yang sering disebut sebagai *slump area* sering dilihat berpotensi menimbulkan banyak masalah perkotaan, karena bisa menjadi sumber timbulnya berbagai masalah lingkungan, kesehatan, dan perilaku menyimpang, seperti kejahatan, serta sumber penyakit sosial lainnya.

Tertatanya kawasan permukiman kumuh akan memberikan manfaat terhadap lingkungan, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan mengurangi kekumuhan
2. Mengurangi dampak pencemaran lingkungan
3. Mengurangi tingkat bahaya pada saat bencana
4. Mengurangi dampak banjir yang kerap terjadi karena tidak tersedianya drainase lingkungan yang layak

Berdasarkan hasil Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) di Tahun Anggaran 2021, luas area permukiman kumuh mengalami penurunan dari 461,48 ha menjadi 451 ha. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan yang telah dilakukan di berbagai wilayah permukiman kumuh sudah baik. Namun perlu juga dilakukan upaya pencegahan agar tidak ada penambahan lokasi kumuh di Kota Banda Aceh. Diharapkan Kota Banda

Aceh bisa mewujudkan terciptanya kotaku (kota tanpa kumuh) sehingga target 0% daerah kumuh dapat terwujud.

Tabel 3.11
Luas Kawasan Kumuh Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	461,48	451,40	451,40	451,40	377,12
2	Luas Wilayah (Ha)	59.002	59.002	59.002	59.002	59.002
3	Luas Penanganan(Ha)	4,90	8,47	60,61	77,39	7,71
4	Sisa Luas Kawasan(Ha)	456,58	451,40	390,79	374,01	369,41

Sumber: Dinas Perkim, 2025

Tabel 3.11 menunjukkan luas kawasan perumahan kumuh dan luas penanganan permukiman kumuh di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2020 luas kawasan kumuh mencapai 461,48 ha, kemudian terus menurun hingga 451,40 ha di tahun 2021 hingga 2023 dan tahun 2024 menjadi 377,12 ha. Luas Kawasan Kumuh (2024) ini hanya 0,64% dari luas wilayah Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan upaya- upaya pengurangan kumuh melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur permukiman, serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah. Luas kawasan yang telah ditangani mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali tahun 2024 yang cenderung menurun. Pada tahun 2024 sisa luas kawasan kumuh yang masih perlu penanganan adalah 369,41 ha.

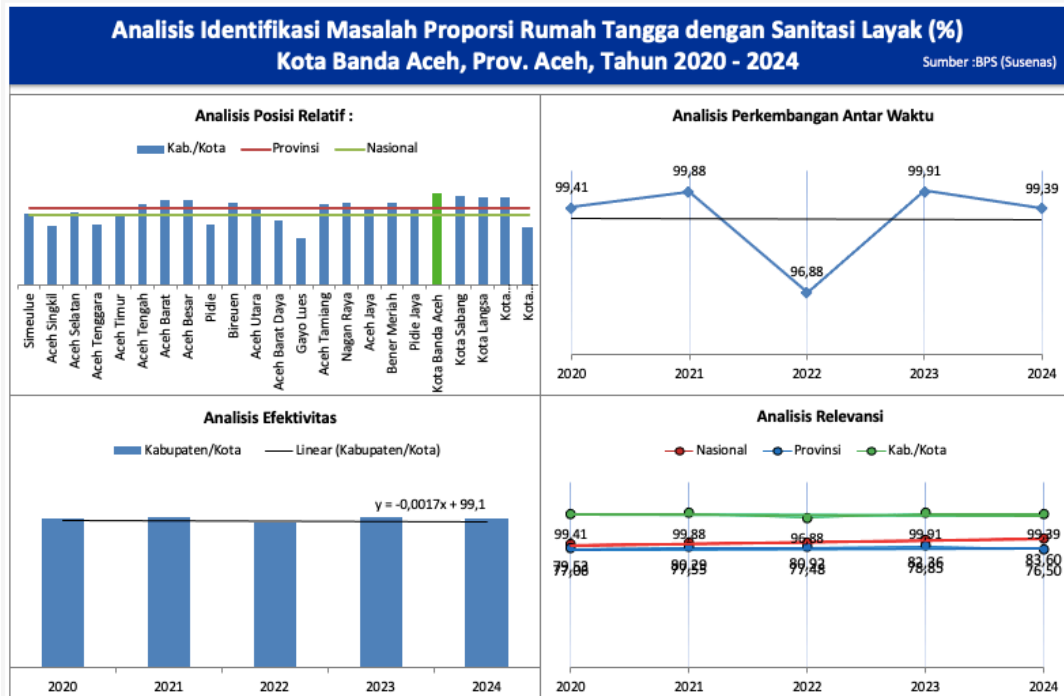
Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)

Pengembangan sanitasi Kota Banda Aceh bertujuan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur serta pelayanan sanitasi menyeluruh sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Koordinasi mendalam antar dinas/ SKPD perlu dilakukan untuk dapat melaksanakan pengembangan sanitasi secara terpadu dan berkesinambungan sebagai bentuk percepatan pembangunan sanitasi kota.

Jumlah rumah tangga dengan sanitasi layak di Kota Banda Aceh menunjukkan trend penurunan dalam 5 tahun terakhir. Pada 2021 pernah mencapai 99,88 persen. Namun pada tahun 2022, jumlah rumah tangga dengan sanitasi layak turun menjadi 96,88 persen. Penurunan ini menjadi perhatian Kota Banda Aceh dan perlu ditingkatkan karena seharusnya jumlah rumah tinggal bersanitasi perlu untuk terus ditingkatkan per tahunnya, hingga mencapai 100 persen. Lebih jelasnya rincian

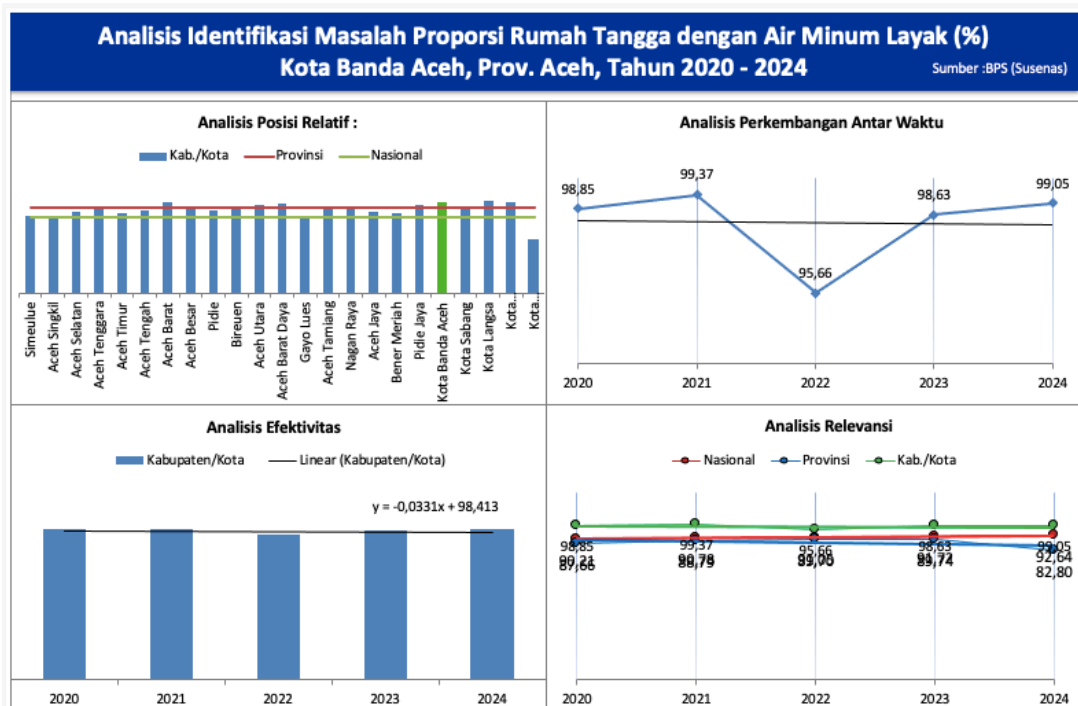
jumlah rumah tangga berakses sanitasi ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.20 Analisis Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak (%) Kota Banda , Provinsi Aceh Tahun 2020-2024



Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

Gambar 3.21 Analisis Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak (%) Kota Banda Aceh , Provinsi Aceh Tahun 2020-2024



Dari gambar diatas menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan air

minum layak di Kota Banda Aceh tahun 2024 adalah 99,05%. Capaian ini lebih baik dari provinsi dan nasional.

Sedangkan berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK, Tahun 2022, menunjukkan bahwa 40% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah di Kota Banda Aceh berdasarkan sumber air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat berdasarkan kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3.12
Jumlah Rumah tangga di Kota Banda Aceh Berdasarkan Sumber
Air Minum Yang Dapat Dikonsumsi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Air Kemasan / Isi Ulang	Leding / PAM	Sumber Terlindung	Sumber Tidak Terlindung	Lainnya
	Total (9)	13.228	2.682	784	23	23
1.	Baiturrahman	1.946	236	61	2	2
2.	Kuta Alam	1.874	1.038	62	2	10
3.	Meuraxa	2.030	81	58	2	1
4.	Sylah Kuala	1.318	318	67	2	0
5.	Lueng Bata	1.209	255	79	3	4
6.	Kuta Raja	1.002	395	14	2	3
7.	Banda Raya	1.225	178	266	6	3
8.	Jaya Baru	1.246	104	109	0	0
9.	Ulee Kareng	1.378	77	68	4	0

Rumah Tangga dengan Akses Listrik

Menurut data BPS persentase Rumah Tangga yang memiliki sambungan listrik PLN di Banda Aceh sudah mencapai 100%. Kondisi ini sudah dicapai sejak tahun 2011.

Berdasarkan data P3KE, dari 16.720 keluarga 40% penduduk miskin, masih terdapat 220 keluarga yang menggunakan listrik non PLN dan 10 keluarga menggunakan penerangan bukan listrik.

Tabel 3.13
Jumlah Rumah tangga di Kota Banda Aceh Berdasarkan Sumber
Penerangan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik
	Total (9)	16.510	220	10
1.	Baiturrahman	2.217	30	0
2.	Kuta Alam	2.956	30	0
3.	Meuraxa	2.164	6	2
4.	Syiah Kuala	1.667	37	1
5.	Lueng Bata	1.535	14	1
6.	Kuta Raja	1.389	26	1
7.	Banda Raya	1.671	7	0
8.	Jaya Baru	1.397	62	0
9.	Ulee Kareng	1.514	8	5

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2022 terdapat 1,38% keluarga penduduk Kota Banda Aceh yang belum memiliki sambungan listrik PLN dan ini perlu mendapatkan perhatian serius Pemerintah Kota Banda Aceh, artinya jika ditahun-tahun mendatang capaian rumah tangga dengan akses listrik ingin dicapai 100%, maka upaya melistriki rumah masyarakat tetap menjadi penting. Secara logika perencanaan, rumah tangga yang belum memiliki akses listrik adalah rumah tangga penduduk dengan kesejahteraan rendah (miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin), maka pemantauan data mikro untuk pensasaran melistriki rumah masyarakat menjadi sangat dibutuhkan.

Dari analisis dan *focus group discussion* yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, permasalahan kemiskinan dalam bidang infrastruktur dasar yang masih menjadi prioritas Pemerintah Kota Banda Aceh adalah:

1. Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak
2. Persentase rumah tangga dengan air minum layak
3. Persentase rumah tangga dengan akses listrik

3.3.4 Bidang Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja merupakan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja terbagi menjadi 2 bagian yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk usia kerja yang besar dapat menjadi sumber pembangunan daerah. Di sisi lain, penduduk usia kerja yang melimpah dan tidak dibekali dengan pengembangan *soft skill* serta lapangan pekerjaan yang

memadai akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Kondisi tersebut tentunya akan mengganggu kestabilan ekonomi suatu daerah. Masalah ketenagakerjaan adalah masalah kemiskinan baik secara nasional, provinsi maupun di lingkup kabupaten/kota, permasalahan timbul karena tidak adanya perimbangan antara pertumbuhan jumlah tenaga kerja dari tahun ke tahun dengan perkembangan jumlah lapangan usaha yang menampung tenaga kerja tersebut.

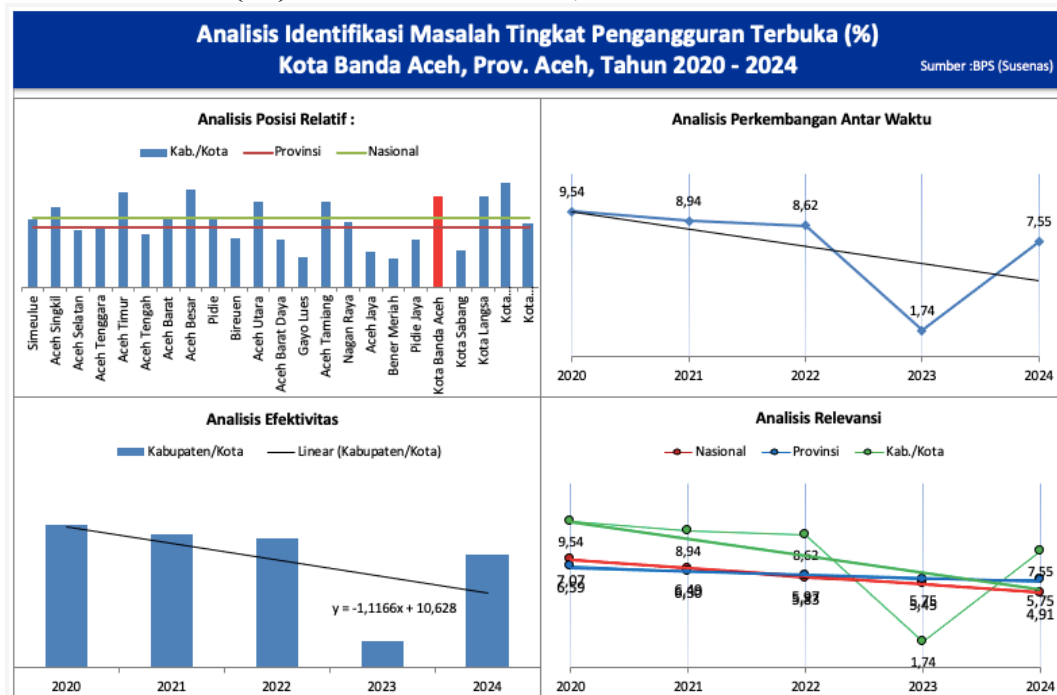
Sejalan dengan prioritas RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, fokus permasalahan ketenagakerjaan meliputi: (1) Terbatasnya lapangan kerja, (2) Rendahnya daya saing tenaga kerja, (3) Daya serap tenaga kerja Orang Asli Aceh (OAP) masih sangat rendah. Permasalahan ketenagakerjaan beririsan langsung dengan isu kemiskinan, pekerjaan yang tidak punya, maka tidak ada pendapatan yang didapati. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan dalam urusan ketenagakerjaan akan dianalisis pada beberapa indikator berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2. Tingkat Kesempatan Kerja (%)
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
4. Setengah Pengangguran (%)

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan salah satu indikator utama dalam bidang ketenagakerjaan, semakin rendah tingkat pengangguran terbuka, semakin besar kesempatan dan partisipasi angkatan kerja di sebuah daerah, demikian juga dengan Kota Banda Aceh, pada tahun 2024, berdasarkan data rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa capaian tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 adalah 7,55% jauh diatas capaian Provinsi Aceh (5,75%) dan capaian Nasional (4,91%), ini menandakan bahwa tingkat pengangguran terbuka Kota Banda Aceh lebih besar dari provinsi dan nasional pada tahun yang sama.

Gambar 3.22 Analisis Identifikasi Masalah Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Banda Aceh , Provinsi Aceh Tahun 2020-2024

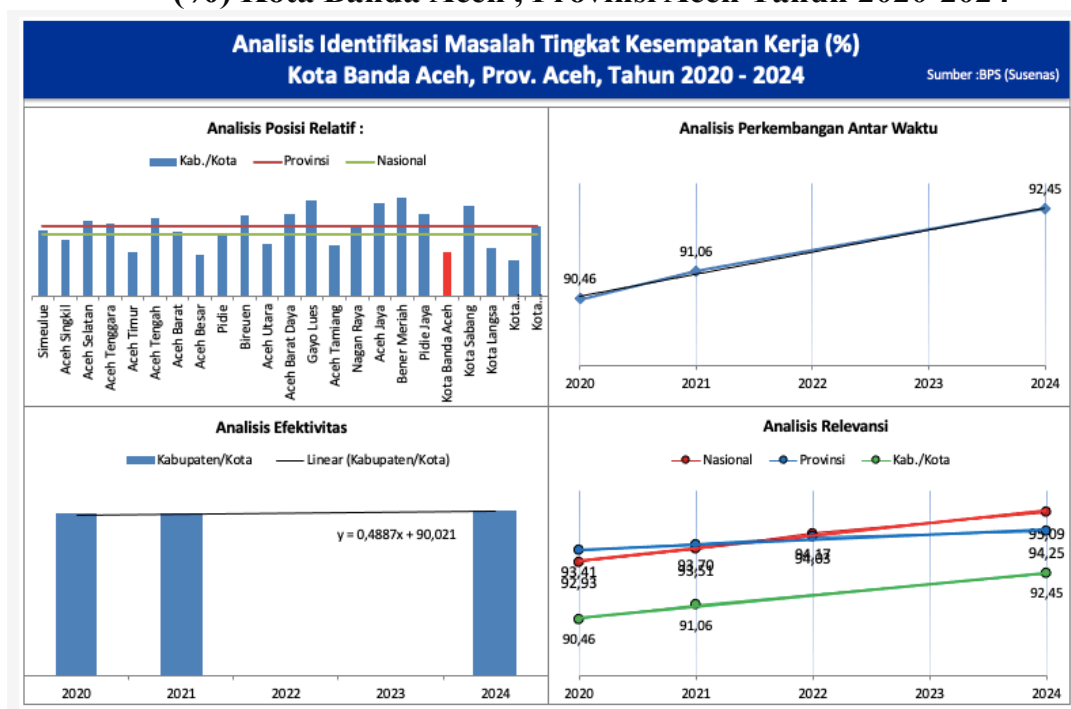


Jika ditinjau dari perkembangan antar waktu, data juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka Kota Banda Aceh menunjukkan trend menurun dalam 5 tahun terakhir (2020-2024). Rata-rata penurunan indikator tingkat pengangguran terbuka Kota Banda Aceh sejak 2020 sampai 2024 adalah 1,11%.

Tingkat Kesempatan Kerja (%)

Tingkat Kesempatan Kerja merupakan salah satu indikator utama dalam bidang ketenagakerjaan, semakin tinggi tingkat kesempatan kerja, semakin besar kesempatan dan peluang bagi angkatan kerja untuk memiliki pekerjaan di sebuah daerah, demikian juga dengan Kota Banda Aceh, pada tahun 2024, berdasarkan data rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa capaian Tingkat Kesempatan Kerja tahun 2024 adalah 92,45%, dibawah capaian Provinsi Aceh (94,25%) dan Nasional (95,09%), ini menandakan bahwa Tingkat Kesempatan Kerja di Kota Banda Aceh lebih buruk jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional pada tahun yang sama.

Gambar 3.23 Analisis Identifikasi Masalah Tingkat Kesempatan Kerja (%) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Tahun 2020-2024

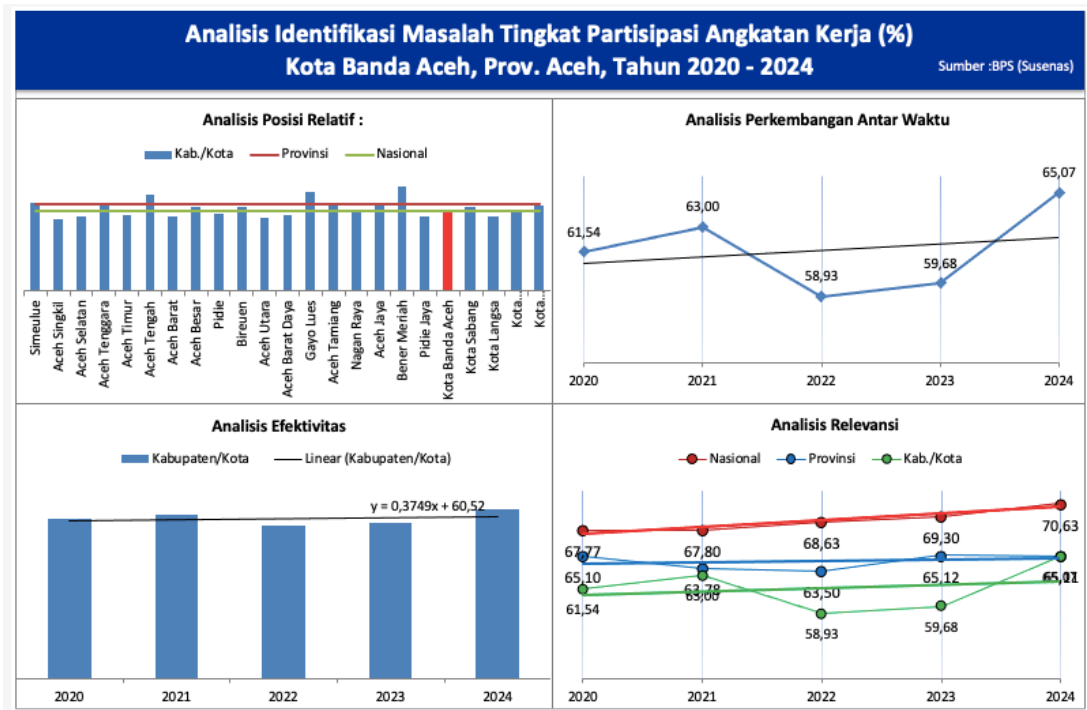


Jika ditinjau dari perkembangan antar waktu, data juga menunjukkan bahwa tingkat kesempatan kerja Kota Banda Aceh menunjukkan trend meningkat pada tahun 2020 – 2024. Rata-rata peningkatan indikator tingkat kesempatan kerja Kota Banda Aceh sejak 2020 sampai 2024 adalah sebesar 0,48% setiap tahunnya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator utama dalam bidang ketenagakerjaan, semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, semakin besar persentase penduduk usia kerja yang mendapatkan pekerja dan atau bekerja di sebuah daerah, demikian juga dengan Kota Banda Aceh, pada tahun 2024, berdasarkan data rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2024 adalah 65,07%, di atas capaian Provinsi Aceh (65,11%) dan di atas capaian Nasional (67,77%), ini menandakan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Banda Aceh masih dibawah capaian provinsi dan nasional pada tahun yang sama.

Gambar 3.24 Analisis Identifikasi Masalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kota Banda Aceh , Provinsi Aceh Tahun 2020-2024



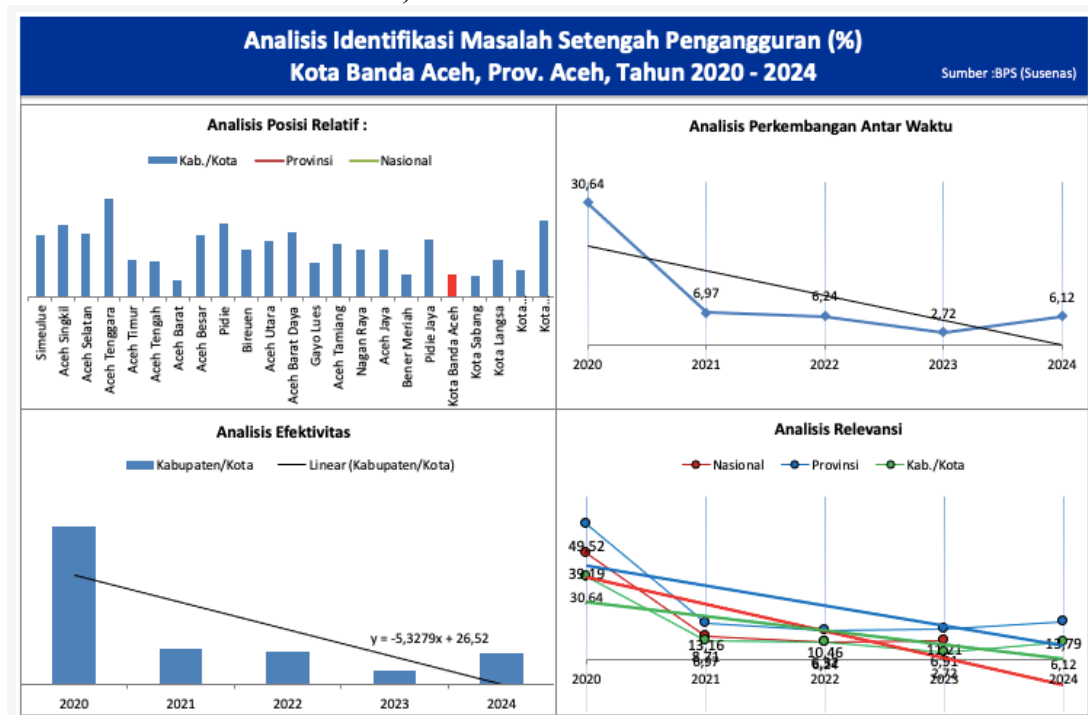
Jika ditinjau dari perkembangan antar waktu, data juga menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Banda Aceh konsisten menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dalam 5 tahun terakhir (2020-2024). Rata-rata peningkatan indikator tingkat kesempatan kerja Kota Banda Aceh sejak 2020 sampai 2024 adalah sebesar 0,37% setiap tahunnya. Kondisi ini juga menandai bahwa, ketika Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Nasional dan Provinsi Aceh melambat perbaikannya, kondisi lebih baik ditunjukkan oleh Kota Banda Aceh dengan meningkatnya persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Setengah Pengangguran (%)

Setengah pengangguran merupakan salah satu indikator utama dalam bidang ketenagakerjaan, semakin rendah setengah pengangguran, semakin besar persentase penduduk usia kerja yang bekerja dan jumlah jam kerjanya semakin meningkat di sebuah daerah, demikian juga dengan Kota Banda Aceh, angka setengah pengangguran pada tahun 2024 relatif rendah (6,12%) dan menunjukkan trend penurunan dalam 5 tahun terakhir (periode 2020 sampai 2024).

Berdasarkan rilis resmi BPS bahwa capaian setengah pengangguran Kota Banda Aceh tahun 2024 sebesar 6,12% masih dibawah capaian Provinsi Aceh (13,79%) dan di bawah capaian Nasional (7,99%), inimenandakan bahwa setengah pengangguran Kota Banda Aceh lebih baik jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional pada tahun yang sama.

Gambar 3.25 Analisis Identifikasi Masalah Setengah Pengangguran (%) Kota Banda , Provinsi Aceh Tahun 2020-2024



Sedangkan berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghausan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Kemenko PMK 2022, menunjukkan bahwa 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah di Kota Banda Aceh berdasarkan data bekerja dan tidak bekerja berdasarkan kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 14
Jumlah Penduduk Miskin dengan Status Bekerja Tidak Bekerja Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	5-14 tahun			15-59 tahun			≥ 60 tahun		
		Jumlah	Bekerja	Tidak Bekerja	Jumlah	Bekerja	Tidak Bekerja	Jumlah	Bekerja	Tidak Bekerja
	Total (9)	20.395	100	20.295	45.825	18.893	26.932	3.218	1.871	1.347
1.	Baiturrahman	2.428	9	2.419	6.343	2.645	3.698	554	293	261
2.	Kuta Alam	3.544	29	3.515	8.382	3.648	4.734	656	420	236
3.	Meuraxa	3.248	8	3.240	5.822	2.363	3.459	210	136	74
4.	Syiah Kuala	1.983	8	1.975	4.448	1.800	2.648	380	228	152
5.	Lueng Bata	1.634	12	1.622	4.274	1.640	2.634	422	230	192
6.	Kuta Raja	1.841	13	1.828	3.834	1.613	2.221	163	112	51
7.	Banda Raya	2.031	11	2.020	4.580	1.864	2.716	291	161	130
8.	Jaya Baru	1.980	7	1.973	4.057	1.689	2.368	213	126	87
9.	Ulee Kareng	1.706	3	1.703	4.085	1.631	2.454	329	165	164

Berdasarkan usia 5-14 tahun, jumlah total penduduk bekerja dan tidak bekerja adalah 20.395 jiwa, dengan rincian 100 anak usia 5-14 tahun (usia sekolah) bekerja dan terdapat 20.295 jiwa (usia sekolah) tidak bekerja, idealnya memang harus demikian, dalam usia 5-15 tahun adalah usia sekolah dan tidak boleh bekerja.

Sedangkan dalam usia 15-59 tahun, usia 15 tahun sampai 18 tahun adalah usia sekolah SMP/MTs dan SMA/MA, selebihnya adalah usia produktif, berdasarkan informasi tersebut, jumlah total yang bekerja dan tidak bekerja adalah 45.825 jiwa dengan rincian yang bekerja sebanyak 18.893 jiwa dan tidak bekerja 26.932 jiwa.

Untuk usia 60 tahun ke atas, data menunjukkan bahwa jumlah total yang bekerja dan tidak bekerja adalah 3.218 jiwa dengan rincian 1.871 jiwa bekerja dan 1.347 jiwa tidak bekerja.

Informasi ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka meningkatkan partisipasi angkatan kerja, kesempatan kerja maupun upaya untuk penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan memberikan dan melibatserta penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin yang tidak bekerja dalam program-program pemberdayaan, padat karya

dan pembukaan lapangan kerja di Kota Banda Aceh.

Dari analisis dan focus group discussion yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja bersama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, permasalahan kemiskinan dalam bidang ketenagakerjaan yang masih menjadi prioritas Pemerintah Kota Banda Aceh adalah:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2. Tingkat Kesempatan Kerja (%)
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
4. Setengah Pengangguran (%)

3.3.5 Isu Strategis Kemiskinan dalam Bidang Lainnya

Berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Kemenko PMK Tahun 2022, menunjukkan bahwa, terdapat 52.738 jiwa penduduk dengan 40% tingkat kesejahteraan terendah (miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin) tidak bekerja, sedangkan sektor paling banyak menampung tenaga kerja adalah wiraswasta dan pekerja lepas.

Tabel 3. 15
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Jenis Pekerjaan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Tidak Bekerja	Petani	Nelayan	Pedagang	Pegawai Swasta	Wiraswasta	Pensiunan	Pekerja Lepas	Lainnya
	Total (9)	52.738	528	688	1.590	1.852	8.771	295	5.275	1.865
1.	Baiturrahman	6.864	57	7	187	237	1.310	47	808	294
2.	Kuta Alam	9.059	119	138	287	451	1.928	64	804	306
3.	Meuraxa	7.483	67	153	279	184	1.002	16	625	181
4.	Syiah Kuala	5.135	60	283	121	129	776	32	466	169
5.	Lueng Bata	4.766	45	16	126	184	778	34	549	150
6.	Kuta Raja	4.542	54	67	186	160	798	17	362	94
7.	Banda Raya	5.307	55	8	146	200	743	30	601	253
8.	Jaya Baru	4.817	38	12	141	160	883	23	354	211
9.	Ulee Kareng	4.765	33	4	117	147	553	32	706	207

Berdasarkan data tersebut, penajaman sasaran program dan intervensi oleh pemerintah Kota Banda Aceh agar dapat diarahkan kepada individu penduduk dengan 40% tingkat kesejahteraan terendah dengan informasi pekerjaan paling dominan seperti

dijelaskan diatas. Bidang prioritas lainnya seperti informasi tersebut mencakup: pegawai swasta, pedagang dan lainnya.

3.3.6 Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah telah menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai agenda prioritas. Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan tujuan pertama dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang harus dicapai pada tahun 2030. Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan kebijakan baru yang disampaikan oleh Pemerintah pada awal tahun 2020. Tanggal 4 Maret 2020 Presiden RI dalam rapat terbatas telah memberikan arahan untuk penghapusan kemiskinan secara nasional menjadi 0% di akhir RPJMN tahun 2024, sedangkan berdasarkan rilis BPS, kemiskinan ekstrem nasional pada tahun 2022 adalah 2,04 persen

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran 1,9 USD PPP sebagai standar yang diacu bersama oleh bangsa-bangsa berdasarkan standar world bank. Berdasarkan hitungan world bank persentase penduduk miskin ekstrem nasional tahun 2022 adalah 2,04%, sedangkan jumlah penduduk miskin nasional adalah 5.800.000 jiwa. BPS Pusat melakukan perhitungan untuk standarisasi 1,9 USD PPP untuk dikonversikan ke dalam rupiah, berdasarkan hitungan BPS bahwa 1,9 USD PPP perkapita perhari pada tahun 2022 adalah Rp. 10.739 per kapita perhari, jika dikalikan dengan 30 hari dalam sebulan, maka garis kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 adalah 322.170/kepala/bulan dan berlaku secara nasional

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, telah memberikan amanat bagi seluruh lapisan pemerintah sampai pemerintahan desa untuk meningkatkan sinergitas dan keterpaduan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk dengan meraih dukungan dari unsur non pemerintah untuk terlibat dalam upaya intervensi. Arahan Presiden tersebut di antaranya:

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran

dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

2. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:
 - a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

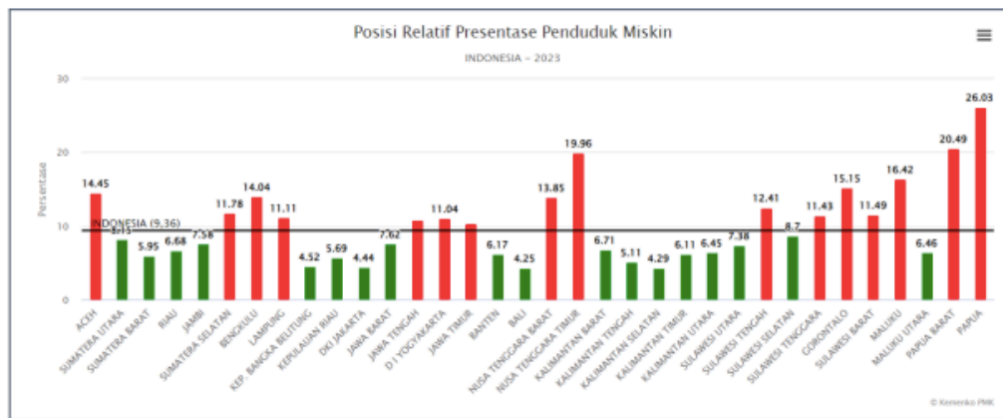
Upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini, dilaksanakan dengan prinsip **Tepat sasaran:** Seluruh penduduk miskin ekstrem memperoleh program PPKE dengan menggunakan data sasaran yang terdapat status/tingkat kesejahteraan, akurat dan terkini, **Pendekatan multidimensi:** Pelaksanaan program PPKE dilakukan dengan tetap memperhatikan berbagai faktor, misalnya terkait kesetaraan gender, disabilitas, lanjut usia, kelompok rentan. **Keterpaduan dan sinergi:** Penduduk miskin ekstrem dapat menerima berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang bersumber dari APBN/P, APBD/P Provinsi, APBD/P Kabupaten/Kota, APBdes, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program yang diberikan tersebut dapat diberikan secara bersamaan dan saling melengkapi untuk mencukupi kebutuhan kelompok miskin ekstrem. **Tersampaikannya dan dipahaminya informasi:** Penyampaian informasi dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi secara intensif dan berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah hingga pemerintah desa/kelurahan dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pihak terkait program PPKE. **Koordinasi dan kerja sama multipihak:** Pelaksanaan program PPKE memerlukan koordinasi dan kerja sama antarpemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan unsur nonpemerintah serta **Terpantau dan terkendali:** Pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan program PPKE dilakukan secara berkala dengan menggunakan instrumen dan indikator yang relevan dan terukur.

Angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,03 persen. Angka ini telah mengalami penurunan sebesar 0,33 persen yang mana semula pada bulan Maret 2023 angka kemiskinan sebesar 9,36 persen. Angka kemiskinan 9,03 persen ini merupakan angka terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Sejalan dengan angka kemiskinan, kondisi kemiskinan ekstrem di Indonesia juga terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83 persen, berhasil turun 0,29 persen poin terhadap Maret 2023 sebesar 1,12 persen.

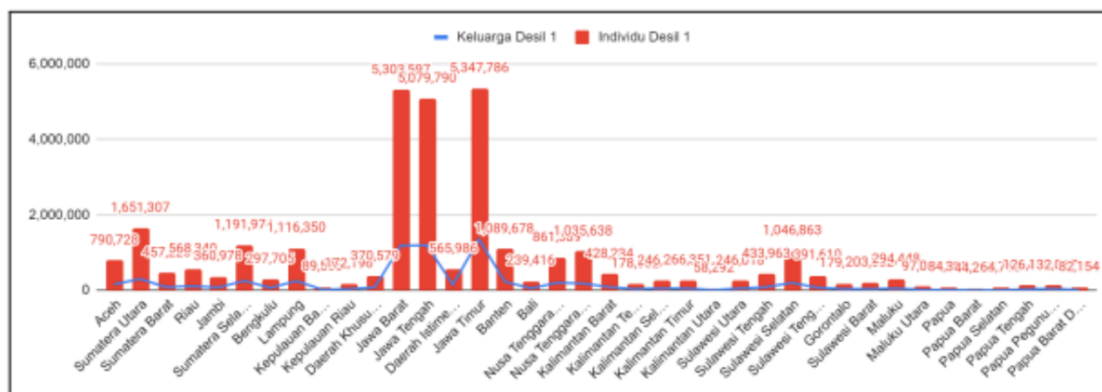
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh BPS, sebaran persentase penduduk miskin ekstrem berdasarkan provinsi pada periode Maret 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.26 Posisi Relatif Presentase Penduduk Kemiskin di Indonesia Tahun 2023



Posisi relatif persentase penduduk miskin di setiap wilayah provinsi belum tentu berbanding lurus dengan sebaran kantong kemiskinan ekstrem. Sebagai contoh, posisi relatif persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat berada di bawah persentase penduduk miskin nasional. Namun demikian, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan kantong kemiskinan terbanyak setelah Jawa Timur dan disusul oleh Jawa Tengah. Konsentrasi penduduk di Pulau Jawa menjadikan 3 provinsi besar ini menjadi kantong kemiskinan terbesar di Indonesia.

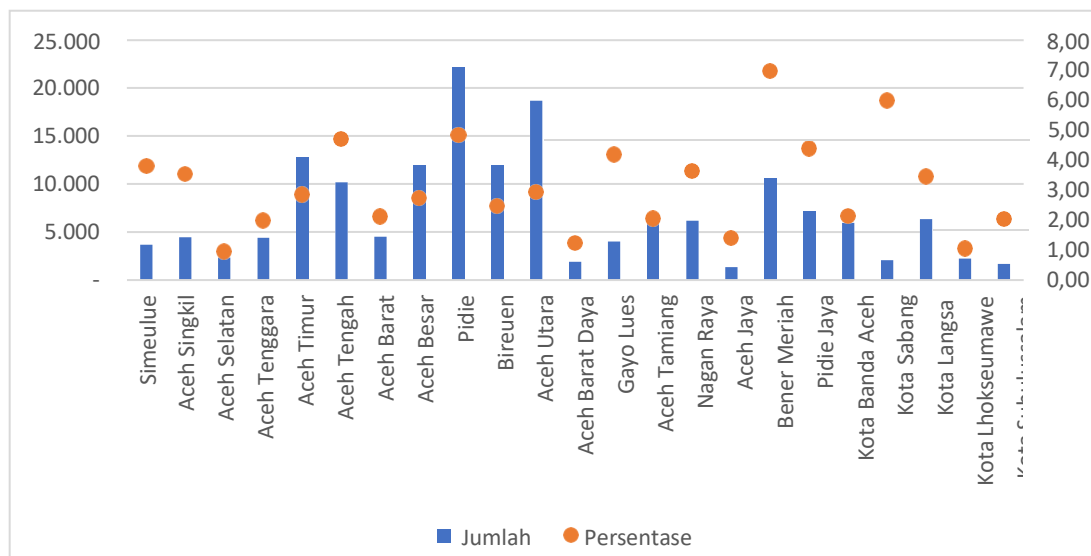
Gambar 3.27 Sebaran Kantong Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Tahun 2023



Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa secara persentase, persentase penduduk miskin paling tinggi ada di Provinsi Papua sebesar 26,92% dengan jumlah penduduk miskin ekstrem Provinsi Papua Tahun 2022 adalah 378.933 Jiwa. Namun secara jumlah berdasarkan Nasional, Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling tinggi secara Nasional.

Sedangkan untuk level Provinsi Aceh, sebaran persentase penduduk miskin ekstrem dan jumlah penduduk miskin ekstrem berdasarkan kabupaten/kota tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.28 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2022

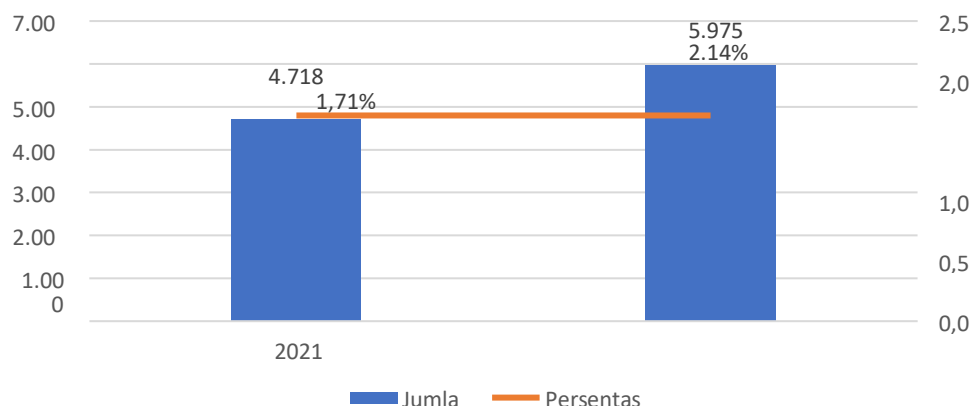


Kabupaten dengan persentase penduduk miskin ekstrem tertinggi adalah Kabupaten Bener Meriah 6,96% sedangkan yang paling rendah persentase penduduk miskin ekstrem adalah Kabupaten Aceh Selatan sebesar 0,94%. Sedangkan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbesar adalah Kabupaten Pidie sebesar 22.147 jiwa, dan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terendah adalah Kota Subulussalam dengan jumlah 1.684 jiwa pada tahun 2022.

Kota Banda Aceh pada tahun 2022, persentase penduduk miskin ekstrem sebesar 2,14% dan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 5.975 jiwa. Baik secara persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem di Kota Banda Aceh menunjukkan peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, dari 1,91% (2021) menjadi 2,14% (2022), atau dari 4.718 jiwa (2021) menjadi 5.975 jiwa (2022).

Berdasarkan data BPS, selain definisi kemiskinan ekstrem menggunakan standar 1,9 US\$ PPP perkapita perhari, ada karakteristik umum yang dimiliki oleh penduduk miskin ekstrem, yang ditemui di hampir seluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Demikian juga dengan Kota Banda Aceh, memiliki karakteristik tersendiri untuk penduduk miskin ekstrem, diantaranya:

Gambar 3.29 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kota Banda Aceh Tahun 2021-2022



BAB IV

PRIORITAS PROGRAM

1.1 Penyusunan Teori Perubahan (*Theory of Change*) atau Logika Program

Teori perubahan (theory of change) atau logika program adalah cara untuk menentukan outcome apa yang ingin diwujudkan dan bagaimana itu akan dicapai melalui intervensi program kebijakan. Alih-alih untuk memproyeksikan outcome dari rangkaian program, logika program membalik proses itu dimana outcome (tujuan) dirunut ke belakang kepada prakondisi untuk pencapaiannya. Dengan demikian, logika program akan menjelaskan alasan mengapa sebuah program atau kebijakan harus ditempuh. Sebagai sebuah peta-jalur (road-map) bagi pencapaian outcome, logika program tidak hanya berguna untuk menentukan program yang dibutuhkan, tetapi juga dapat menjadi basis untuk pemantauan dan evaluasinya.

Penyusunan teori perubahan dapat diawali dengan mengumpulkan dan mereview hasil-hasil kajian dan evaluasi yang pernah dilakukan. Dari bahan ini dapat diperkirakan apa yang akan terjadi jika intervensi yang sama diterapkan. Proses penyusunan logika program melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah pertama. Menetapkan tujuan (goals) dan indikatornya. Pernyataan tujuan menjelaskan dampak (*impact*) akhir yang ingin dicapai oleh program atau kebijakan. Tujuan ini sebaiknya tujuan hanya mengandung satu atau dua inti pernyataan saja. Tujuan ini juga hendaknya menyatakan dampak langsung dari program atau kebijakan; bukan dampak yang terlalu jauh yang hanya mungkin terjadi setelah dampak langsung itu tercapai.

Langkah kedua. Mengidentifikasi capaian antara (*intermediate outcome*) dan indikatornya. Capaian antara adalah seluruh bentuk perubahan, yang dapat dibedakan satu sama lain, yang menjadi syarat atau prakondisi bagi tercapainya tujuan. Bentuk-bentuk perubahan itu harus cukup komprehensif sesuai kompleksitas program.

Langkah ketiga. Mengidentifikasi strategi atau program. Strategi atau program yang dimaksud di sini adalah semua rancangan kebijakan yang bisa membawa manfaat

secara langsung kepada penerimanya. Pernyataan strategi atau program ini harus menjelaskan apa yang hendak dituju oleh rancangan kebijakan itu.

Langkah keempat. Menarik anak panah hubungan sebab-akibat. Anak panah ini akan menunjukkan strategi atau program apa yang ditujukan untuk menghasilkan capaian antara tertentu.

Langkah kelima. Menjelaskan asumsi kunci. Faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan intervensi, di setiap jalur hubungan sebab-akibat yang telah disusun, harus diidentifikasi sebagai asumsi. Asumsi yang dinilai sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan intervensi, yaitu asumsi kunci, perlu menjadi bagian dari aspek yang dievaluasi.

1. Logika Program (*Theory of Change*) Pendidikan

Dari beberapa isu strategis dan permasalahan pendidikan Kota Banda Aceh, Tim teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) mengambil fokus pada peningkatan partisipasi pendidikan dasar khususnya bagi penduduk usia sekolah dari rumah tangga miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin pada usia 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang tidak bersekolah. Logika program (*theory of change*) yang disusun oleh tim teknis tersebut menempatkan sasaran jangka panjang yang akan diperbaiki adalah meningkatnya partisipasi pendidikan dasar, dengan harapan penduduk usia 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang tidak bersekolah dapat menerima manfaat program paling besar.

Logika program (*theory of change*) untuk peningkatan partisipasi pendidikan tersebut memperlihatkan bahwa **meningkatnya partisipasi pendidikan** tersebut (*final outcome/goal*) memiliki empat determinan kunci yaitu **(1) meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, (2) meningkatnya akses pendidikan, (3) meningkatnya kualitas tenaga kependidikan serta (4) meningkatnya kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat miskin dan rentan miskin.**

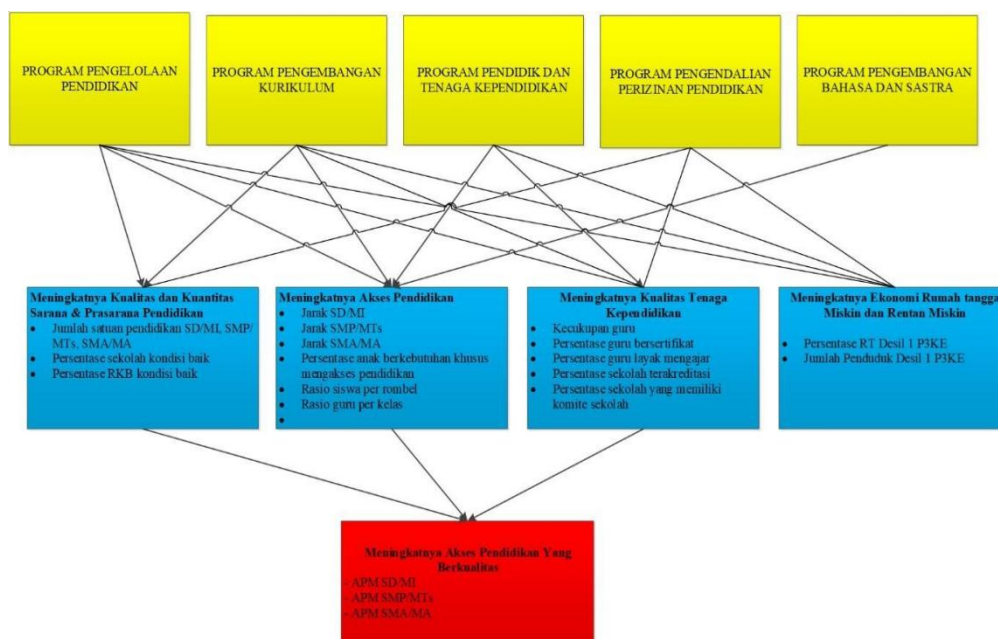
Sedangkan *intermediate outcomes* atau sasaran antara dari keempat determinan kunci tersebut adalah:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, dengan indikator antara: jumlah satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, persentase sekolah dengan kondisi baik serta persentase ruang kegiatan belajar

kondisi baik.

2. Meningkatnya akses pendidikan, dengan indikator antara: Jarak sekolah SD/MI, jarak sekolah SMP/MTs, jarak sekolah SMA/MA, persentase anak berkebutuhan khusus yang mengakses pendidikan, rasio siswa per rombongan belajar dan rasio guru per kelas
3. Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan, dengan indikator antara: kecukupan guru, persentase guru bersertifikat, persentase guru layak mengajar, persentase sekolah terakreditasi dan persentase sekolah yang memiliki komite sekolah.
4. Meningkatnya kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat miskin dan rentan miskin, dengan indikator antara: persentase penduduk desil 1 dari 40% dan jumlah rumah tangga desil 1 dari 40%.

Gambar 4. 1 Theory of Change untuk peningkatan partisipasi dan akses pendidikan dasar di Kota Banda Aceh



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Analisis Tim Teknis TKPK Kota Banda Aceh

Keterangan (program dan kegiatan): Program/kegiatan Prioritas dan pendukung

1. Penambahan ruang kelas sekolah
2. Kegiatan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan
3. Pemberian beasiswa siswa/santri
4. Penyediaan dana penunjang pendidikan
5. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

6. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
7. Penyediaan tambahan pembiayaan operasional sekolah
8. Pelatihan rencana pembelajaran bagi guru
9. Pelatihan kurikulum dan pembelajaran aktif kreatif efektif dan menyenangkan
10. Pelatihan manajemen berbasis sekolah
11. Peningkatan fungsi pengawas sekolah
12. Pembinaan Komite Sekolah
13. Penyaluran zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) atau sejenisnya
14. Perluasan Program Indonesia Pintar
15. Penyediaan dana penunjang pendidikan
16. Penyediaan dukungan sarana transportasi pendidikan
17. Penyediaan dukungan sekolah satap (satu atap)
18. Penyediaan dukungan sarana rumah tinggal guru dan tenaga kependidikan
19. Penyediaan fasilitas pendukung sekolah bagi anak-anak kurang mampu dan miskin
20. Dukungan bantuan ekonomi bagi rumah tangga miskin ekstrem dan miskin
21. Dukungan program mengembalikan anak putus sekolah untuk kembali sekolah
22. Dukungan program sarjana mengajar
23. Distribusi guru dan tenaga kependidikan yang merata.

Program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh dan perangkat daerah terkait pendidikan pun perlu mempertimbangkan karakteristik pendidikan dari penduduk miskin ekstrem, diantara karakteristik tersebut adalah:

1. Rata-rata Lama Sekolah penduduk miskin ekstrem di Kota Banda Aceh selama 13,03 tahun, sementara di Aceh secara keseluruhan selama 9,44 tahun.
2. Angka Putus Sekolah usia 16-18 Tahun merupakan indikator utama yang perlu mendapatkan perhatian, hal ini disebabkan perbedaan capaian yang sangat besar dengan capaian nasional.
3. Di Kota Banda Aceh, Angka Putus Sekolah usia 16-18 Tahun mencapai 16,04 persen, sementara di Aceh secara keseluruhan sebesar 45,61 persen.
4. Tingginya jumlah kepala rumah tangga yang tidak bersekolah serta rendahnya tingkat kelulusan kepala keluarga hampir di setiap jenjang pendidikan menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan rumah tangga.
5. Di Kota Banda Aceh, terdapat 32,64 persen kepala rumah tangga miskin ekstrem

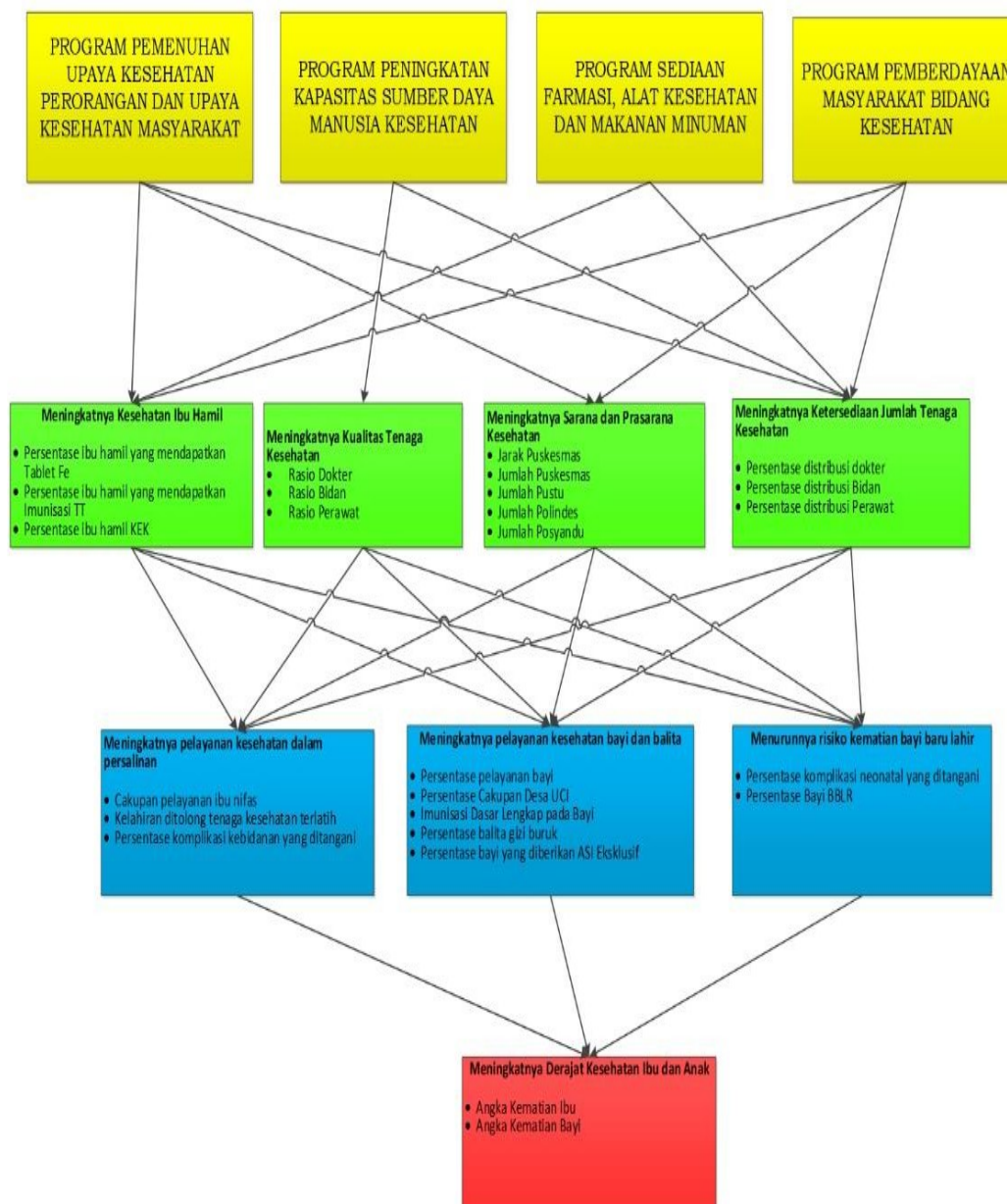
hanya lulusan SD dan 6,09 persen tidak bersekolah.

2. Logika Program (Theory of Change) Kesehatan

Logika program (*theory of change*) yang disusun oleh tim teknis TKPK Kota Banda Aceh untuk meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh mengambil fokus pada derajat kesehatan ibu dan anak sangat beralasan, berdasarkan RPD Kota Banda Aceh, rencana strategis dan profil kesehatan Kota Banda Aceh memberikan fokus pada derajat kesehatan ibu dan anak, dengan masih tingginya temuan jumlah kasus kematian ibu dan bayi dalam level provinsi, maka menjadi keharusan bagi daerah ini untuk melakukan intervensi khusus dalam penanganannya dan khususnya penanganan yang lebih riil bagi penduduk miskin dan rentan miskin untuk kasus kematian ibu dan bayi.

Logika program (*theory of change*) yang telah disusun oleh tim teknis TKPK Kota Banda Aceh memperlihatkan bahwa meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak dengan indikator angka kematian ibu dan bayi (final outcome/goal) memiliki tiga determinan kunci, yaitu (1) Meningkatnya pelayanan kesehatan dalam persalinan (2) Meningkatnya pelayanan kesehatan bayi dan balita dan (3) Menurunnya resiko kematian bayi baru lahir.

Gambar 4. 2 Theory of Change untuk meningkatnya kesehatan ibu dan bayi Kota Banda Aceh



Sumber: Dinas Kesehatan dan Analisis Tim Teknis TKPK Kota Banda Aceh

Keterangan (program dan kegiatan):

1. Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
2. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
3. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
4. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
5. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

6. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
7. Penyelenggaraan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
8. Pelayanan kesehatan pada Bumil dan Bufas.
9. Pelayanan Kesehatan pada Bayi dan Balita
10. Pelayanan Kesehatan pada Usia Dini (PAUD)
11. Pelayanan Kesehatan pada Usia Sekolah Dasar
12. Pelayanan Kesehatan pada Usia Remaja
13. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
14. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lansia
15. Program pembinaan dan supervisi tentang 3T (terlambat mengambil keputusan, terlambat mendapat penanganan, terlambat ke fasilitas kesehatan) dan memaksimalkan rumah tunggu kelahiran
16. Program pemberian PMT Bumil KEK, pemantauan bumil anemi untuk minum tablet tambah darah
17. Program peningkatan kompetensi bidan dalam kegawat daruratan maternal
18. Peningkatan komitmen stakeholder dalam upaya penemuan kematian ibu dan bayi
19. Optimalisasi peran Pokja kelangsungan hidup anak dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
20. Peningkatan kompetensi perawatan NICU dalam menangani kegawatdaruratan
21. Peningkatan kompetensi bidan dalam kegawatdaruratan neonatal, peningkatan cakupan bayi mendapat inisiasi menyusui dini (IMD)
22. Peningkatan cakupan bayi mendapat ASI Eksklusif
23. Peningkatan cakupan Imunisasi dasar lengkap dan
24. Menerapkan MTBS di layanan kesehatan.

Sedangkan intermediate outcomes atau sasaran antara dari ketiga determinan kunci tersebut adalah:

- 1) Meningkatnya kesehatan ibu hamil, dengan indikator: persentase ibu hamil yang mendapatkan FE, persentase ibu hamil yang mendapatkan imunisasi TT dan persentase ibu hamil yang KEK.
- 2) Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan, dengan indikator: rasio dokter, rasio bidan dan rasio perawat.
- 3) Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, dengan indikator: jarak puskesmas, jumlah puskesmas, jumlah pusku, jumlah polindes serta jumlah posyandu.

- 4) Meningkatnya ketersediaan jumlah tenaga kesehatan, dengan indikator: persentase distribusi dokter, persentase distribusi bidan dan persentase distribusi perawat.

Program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan perangkat daerah terkait kesehatan pun perlu mempertimbangkan karakteristik kesehatan dari penduduk miskin ekstrem, di antara karakteristik tersebut adalah:

1. Prevalensi balita kerdil (stunting) di Aceh menurun di tahun 2024 dibandingkan 2023. Data BPS menunjukkan angka prevalensi anak stunting di Aceh tahun 2024 turun menjadi 19,8,% dibanding tahun 2023 sebesar 29,4%.
2. Sedangkan prevalensi balita kerdil (stunting) di Kota Banda Aceh pada tahun 2024 naik menjadi 23,6% dibandingkan tahun 2023 sebesar 21,7%
3. Angka ini relatif tinggi karena melebihi ambang batas yang ditetapkan WHO yakni 20%.
4. Desa-desa di Banda Aceh cenderung tidak mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan, baik rumah sakit bersalin, puskesmas maupun klinik yang sudah banyak tersebar di Kota Banda Aceh.

3. Logika Program (*Theory of Change*) Infrastruktur Dasar

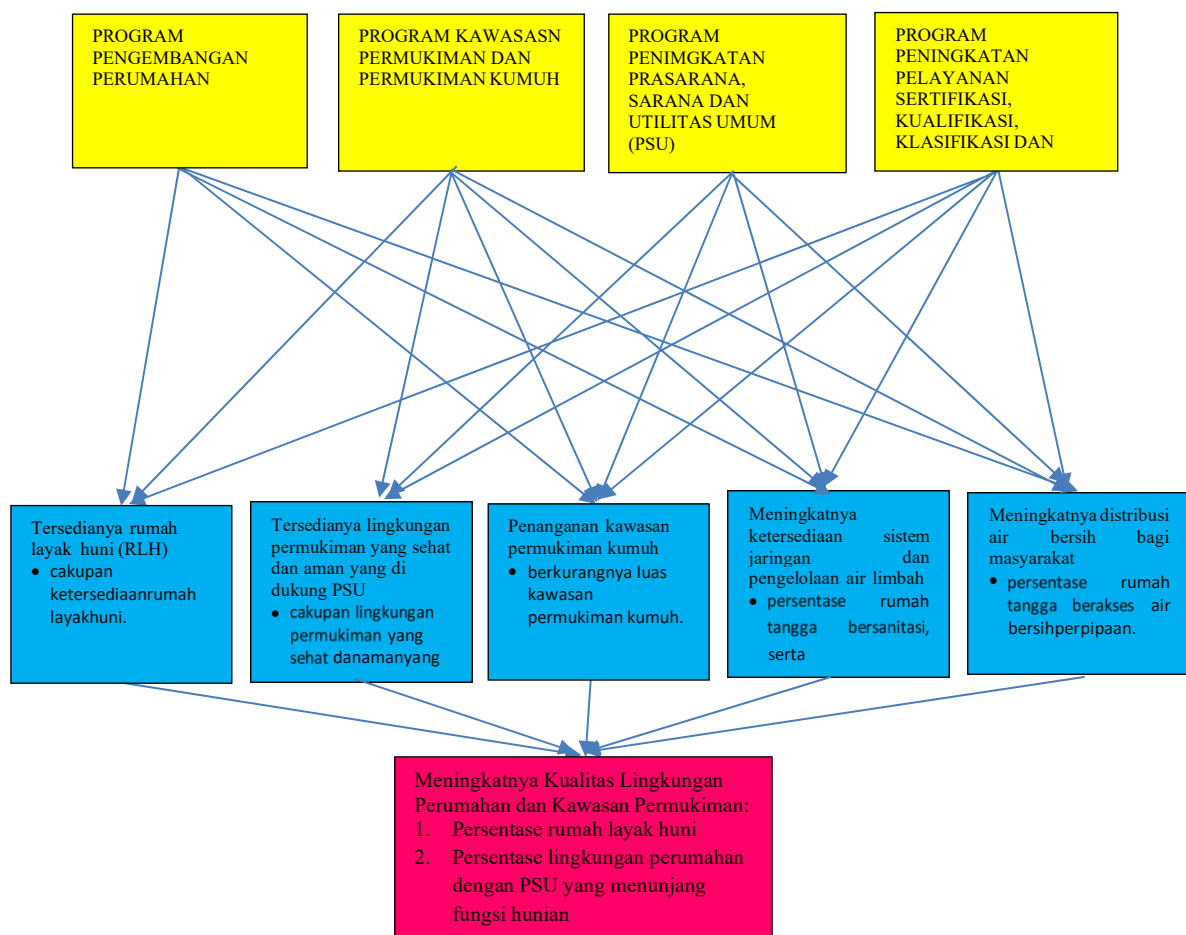
Logika program (*theory of change*) yang disusun oleh tim teknis TKPK Kota Banda Aceh untuk pemenuhan infrastruktur dasar mengambil fokus pada meningkatnya kualitas perumahan dan Kawasan permukiman. Hal ini pun sesuai dengan target RPD Kota Banda Aceh 2023-2026, Rencana Strategis dan Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Masih relatif rendahnya peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, masih relatif rendah persentase rumah tangga dengan sanitasi layak, dan rendah persentase rumah tangga dengan air minum layak, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melakukan intervensi khusus dalam pencapaiannya, khususnya upaya lebih riil bagi penduduk miskin dan rentan miskin di Kota Banda Aceh.

Logika program (*theory of change*) yang telah disusun oleh tim teknis TKPK Kota Banda Aceh memperlihatkan bahwa meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman (final outcome/goal) dengan indikator sanitasi layak, air minum layak dan akses listrik memiliki enam determinan kunci, yaitu:

- 1) Tersedianya rumah layak huni, dengan indikator: cakupan ketersediaan rumah

- layak huni.
- 2) Tersedianya lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang di dukung PSU, dengan indikator: cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang di dukung PSU
 - 3) Penanganan kawasan permukiman kumuh, dengan indikator berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh.
 - 4) Meningkatnya ketersediaan sistem jaringan dan pengelolaan air limbah, dengan indikator: persentase rumah tangga bersanitasi, serta
 - 5) Meningkatnya distribusi air bersih bagi masyarakat, dengan indikator: persentase rumah tangga berakses air bersih perpipaan.

Gambar 4. 3 Theory of Change untuk meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman Kota Banda Aceh



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Analisis Tim Teknis TKPK Kota Banda Aceh

Keterangan (program dan kegiatan):

1. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha;
3. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota;
4. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh dan perangkat daerah lainnya terkait perumahan dan permukiman pun perlu mempertimbangkan karakteristik prasarana dasar penduduk miskin ekstrem, karakteristik tersebut antara lain:

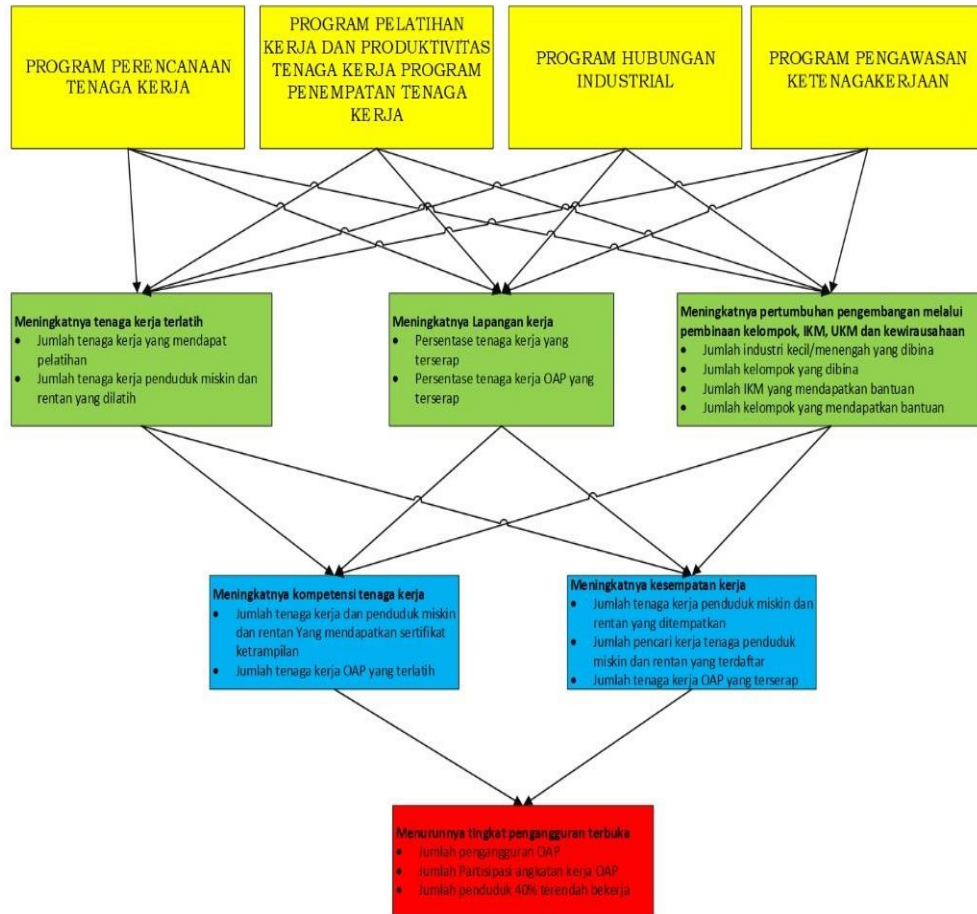
1. Penduduk miskin ekstrem di Kota Banda Aceh masih memiliki keterbatasan akses.
2. Tempat tinggal penduduk miskin ekstrem di Kota Banda Aceh ada 15,66 persen yang tidak memiliki rumah.
3. Masih terdapat 15,16 persen rumah tangga miskin ekstrem di Kota Banda Aceh yang tidak menikmati Akses air minum layak, serta yang 7,69 persen tidak memiliki toilet.

4. Logika Program (Theory of Change) Ketenagakerjaan

Logika program (*theory of change*) yang disusun oleh tim teknis TKPK Kota Banda Aceh untuk bidang ketenagakerjaan, mengambil fokus pada menurunnya tingkat pengangguran, maka sudah barang tentu menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh untuk melakukan intervensi khusus dalam perbaikannya, khususnya upaya lebih riel menysasar penduduk miskin dan rentan miskin di Kota Banda Aceh dalam isu ketenagakerjaan.

Logika program (*theory of change*) yang telah disusun oleh tim teknis TKPK Kota Banda Aceh memperlihatkan bahwa menurunnya tingkat pengangguran terbuka (final outcome/goal) memiliki dua determinan kunci, yaitu (1) meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan (2) meningkatnya kesempatan kerja.

Gambar 4. 4 Theory of Change untuk menurunnya tingkat pengangguran terbuka



Sumber: Dinas Tenaga Kerja serta Analisis Tim Teknis TKPK Kota Banda Aceh

Keterangan (program dan kegiatan):

1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
2. Program peningkatan kualitas tenaga kerja
3. Program peningkatan kesempatan kerja
4. Program penciptaan lapangan kerja baru
5. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
6. Program pengembangan industri kecil dan menengah
7. Program pengembangan iklim investasi
8. Program penciptaan iklim UKM yang kondusif
9. Program pengembangan kewirausahaan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah

10. Meningkatnya aliran modal investasi, dalam kerangka optimalisasi potensi sumber daya alam
11. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
12. Program promosi penanaman modal
13. Program pelayanan penanaman modal
14. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Sedangkan intermediate outcomes atau sasaran antara dari kedua determinan kunci tersebut adalah:

1. Meningkatnya tenaga kerja terlatih, dengan indikator: jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan dan jumlah tenaga kerja penduduk miskin dan rentan miskin yang dilatih
2. Meningkatnya Lapangan kerja, dengan indikator: persentase tenaga kerja yang terserap dan persentase tenaga kerja OAP yang terserap tenaga kerja
3. Meningkatnya pertumbuhan pengembangan melalui pembinaan kelompok, IKM, UKM dan kewirausahaan, dengan indikator: jumlah industri kecil/menengah yang dibina, jumlah kelompok yang dibina, jumlah IKM yang mendapatkan bantuan serta jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan

Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan perangkat daerah yang memiliki kaitan dengan isu ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh perlu mempertimbangkan karakteristik ketenagakerjaan penduduk miskin ekstrem, diantara karakteristik tersebut adalah:

1. Di Kota Banda Aceh, anggota rumah tangga miskin ekstrem usia produktif sebesar 65,10%, sementara di Aceh secara keseluruhan sebesar 68,62%. Kondisi ini menunjukkan potensi tenaga kerja penduduk miskin ekstrem yang melimpah.
2. Jika dilihat dari sumber penghasilan utama kepala rumah tangga miskin ekstrem, terdapat 40,53% wiraswasta, 22,2% pekerja lepas, 7,74% pedagang serta 9,3% tidak bekerja.

Tabel 4. 1 Status Pekerjaan Kepala Keluarga 40% Penduduk Miskin Ekstrem, 2022

No	Kecamatan	Tidak Bekerja	Petani	Nelayan	Pedagang	Pegawai Swasta	Wiraswasta	Pensiunan	Pekerja Lepas	Lainnya
	Total (9)	1.553	222	638	1.296	1.033	6.785	262	3.716	1.235
1.	Baiturrahman	256	14	7	146	126	969	40	491	198
2.	Kuta Alam	243	43	123	231	238	1.386	54	487	181
3.	Meuraxa	141	32	143	235	132	877	16	463	133
4.	Syiah Kuala	173	30	266	97	64	594	29	345	107
5.	Lueng Bata	191	16	15	105	98	591	29	412	93
6.	Kuta Raja	97	29	64	155	88	648	15	249	71
7.	Banda Raya	156	25	6	118	128	593	28	453	171
8.	Jaya Baru	106	17	10	115	89	679	21	276	146
9.	Ulee Kareng	190	16	4	94	70	448	30	540	135

Tabel 4. 2 Status Bekerja Penduduk Miskin Ekstrem Usia 15-59 (dalam persen), 2022

Indikator	Banda Aceh	Aceh	Indonesia
Bekerja	41,2	46,9	53,5
Tidak Bekerja	58,8	53,1	46,5

5. Bidang Strategis lainnya

Berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Kemenko PMK Tahun 2022, menunjukkan bahwa, terdapat 52.738 jiwa (71,65%) penduduk dengan 40% tingkat kesejahteraan terendah (miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin) tidak bekerja, sedangkan sektor paling dominan pekerjaan penduduk 40% ini adalah wiraswasta (8.771 jiwa), pekerja lepas (5.275 jiwa), lainnya (1.865 jiwa), pegawai swasta (1.852 jiwa), pedagang (1.590 jiwa), nelayan (688 jiwa), petani (528 jiwa), serta pensiunan (295 jiwa).

Tabel 4. 3 Informasi 40% Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Pekerjaan Individu Menurut Kecamatan Kota Banda Aceh, Tahun 2022

No	Kecamatan	Tidak Bekerja	Petani	Nelayan	Pedagang	Pegawai Swasta	Wiraswasta	Pensiunan	Pekerja Lepas	Lainnya
	Total (9)	52.738	528	688	1.590	1.852	8.771	295	5.275	1.865
1.	Baiturrahman	6.864	57	7	187	237	1.310	47	808	294
2.	Kuta Alam	9.059	119	138	287	451	1.928	64	804	306
3.	Meuraxa	7.483	67	153	279	184	1.002	16	625	181
4.	Syiah Kuala	5.135	60	283	121	129	776	32	466	169
5.	Lueng Bata	4.766	45	16	126	184	778	34	549	150
6.	Kuta Raja	4.542	54	67	186	160	798	17	362	94
7.	Banda Raya	5.307	55	8	146	200	743	30	601	253
8.	Jaya Baru	4.817	38	12	141	160	883	23	354	211
9.	Ulee Kareng	4.765	33	4	117	147	553	32	706	207

Berdasarkan data tersebut, penajaman sasaran program dan intervensi oleh pemerintah Kota Banda Aceh agar dapat diarahkan kepada individu penduduk dengan 40% tingkat kesejahteraan terendah dengan informasi pekerjaan paling dominan seperti dijelaskan diatas, yaitu (1) Wiraswasta, (2) Pekerja Lepas, (3) Buruh dan tenaga lepas lainnya serta (4) Pegawai Swasta, (5) Pedagang, serta (6) Nelayan/Petani.

Adapun program kegiatan yang dapat diarahkan untuk bidang-bidang strategis lainnya dari 40% penduduk dengan kesejahteraan terendah desil 1, 2, 3, 4 adalah program dan kegiatan yang mengarah kepada:

- 1) Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin, dengan strategi:
 - a) Memastikan kelompok miskin ekstrem memperoleh berbagai program-program perlindungan sosial.
 - b) Meningkatkan koordinasi K/L dan pemerintah daerah untuk mendorong komplementaritas program perlindungan sosial pusat dan daerah.
 - c) Mengembangkan dan melaksanakan inovasi kebijakan dan program perlindungan sosial terutama untuk kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, pekerja informal dan perempuan).
 - d) Melibatkan komunitas, lembaga nonpemerintah, dan swasta.
 - e) Meningkatkan akses masyarakat miskin ekstrem ke dokumen kependudukan (Akta Kelahiran dan NIK).
- 2) Peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin, dengan strategi:
 - a) Melalui peningkatan pendapatan/ akses terhadap pekerjaan dan penyediaan infrastruktur dasar.
 - b) Melalui peningkatan kapasitas SDM
 - c) Melalui peningkatan kapasitas UMKM.
 - d) Melalui peningkatan akses pembiayaan UMKM.
- 3) Pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan yang menyasar penduduk miskin ekstrem, dengan strategi:
 - a) Melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar
 - b) Meningkatkan konektivitas antar wilayah.
 - c) Mendorong konvergensi anggaran
 - d) Mendorong konsolidasi program

- e) Meningkatkan peran daerah dan pemangku kepentingan.

Program, kegiatan dan sub-sub kegiatan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh pun, perlu mempertimbangkan karakteristik penduduk miskin ekstrem dan miskin terkait isu strategis. Diantara karakteristik umum penduduk miskin ekstrem dan miskin adalah proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) mayoritas buruh tani, buruh dagang, buruh industri, mengurus rumah tangga, dan kepala rumah tangga perempuan, mayoritas bekerja di sektor pertanian sebagai buruh dan berstatus informal.

Dengan karakteristik penduduk miskin ekstrem seperti yang sudah dijelaskan diatas, usulan konvergensi program kegiatan intervensi oleh dinas-dinas terkait yang direkomendasikan diantaranya:

1. Untuk Kepala Rumah Tangga berpendidikan rendah sebagai buruh tani
 - Melibatkan penduduk miskin ekstrem dalam program padat karya yang dilaksanakan setelah musim tanam dan sebelum musim panen. Misal pembuatan perpipaan air pada wilayah sulit air (mayoritas penduduk miskin)
2. Untuk Kepala Rumah Tangga perempuan, berpendidikan rendah, usia produktif
 - Melibatkan penduduk miskin ekstrem dalam program pengembangan dan pemanfaatan pekarangan, pelatihan keterampilan dll, termasuk pelaksanaan program P2WKSS
 - Melibatkan penduduk miskin ekstrem dalam pemberdayaan ekonomi kelompok
3. Untuk Rumah Tangga dengan sanitasi, air minum dan rumah tidak layak
 - Melibatkan penduduk miskin ekstrem dalam program padat karya pembangunan sarana sanitasi (WC Komunal), air minum (sumber air minum bersama), dan tenaga bantu renovasi rumah
4. Untuk Anggota Rumah Tangga usia produktif berpendidikan rendah
 - Melibatkan penduduk miskin ekstrem dalam pelatihan keterampilan, budidaya, sumber daya alam setempat menjadi bahan bakuMelibatkan penduduk miskin ekstrem dalam pemberdayaan ekonomi kelompok
5. Untuk Cakupan Imunisasi dasar lengkap pada Balita
 - Melibatkan penduduk miskin ekstrem dalam program bantuan PMT balita

kepada posyandu/PKM untuk menstimulasi kehadiran imunisasi di posyandu/PKM

1.2 Analisis Anggaran Untuk Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh

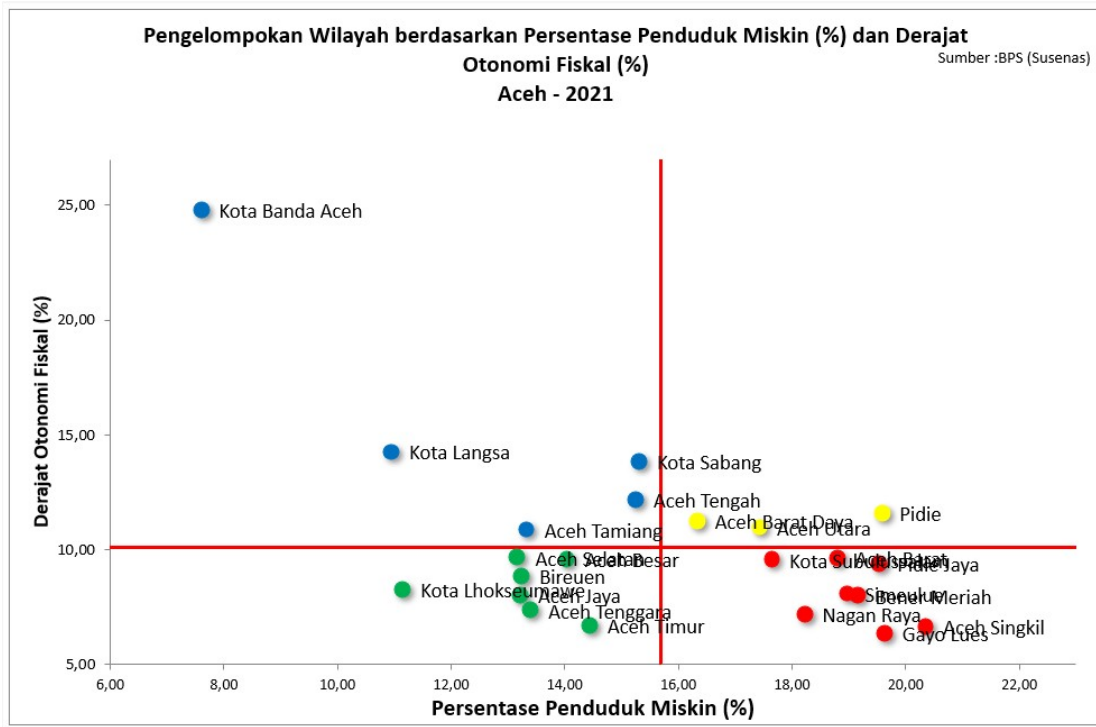
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen bagi Pemerintah dalam rangka melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain APBN dan APBD, Pemerintah dapat mengupayakan pembiayaan dari sumber-sumber yang sah, tidak mengikat dari non pemerintah untuk bersinergi dengan APBN dan APBD dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian juga pemerintah daerah, selain APBD, pemerintah daerah dapat mengupayakan pembiayaan dari sumber-sumber yang sah, tidak mengikat dari non pemerintah untuk bersinergi dengan APBD dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ditingkat daerah.

Untuk menilai kesehatan anggaran bagi Pemerintah Daerah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengetahui derajat otonomi fiskal dan ruang fiskal.

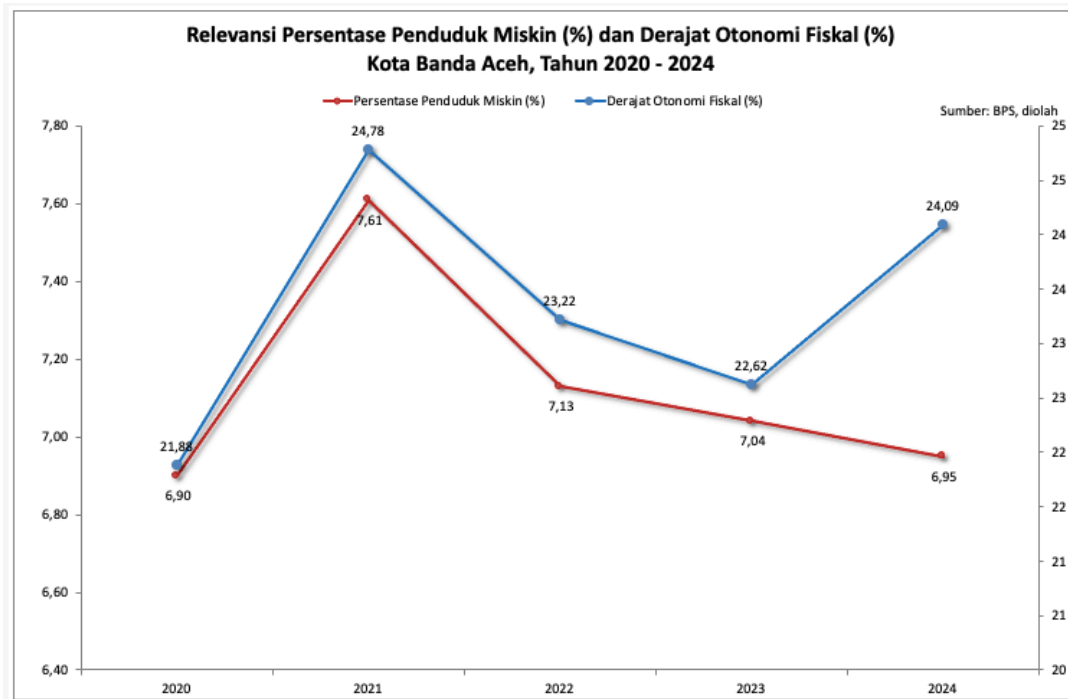
Derajat otonomi fiskal merupakan gambaran kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain. Derajat desentralisasi fiskal merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Sedangkan ruang fiskal merupakan merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan pada Tahun 2021 yang diolah bersama dengan data Kemiskinan Susenas-BPS pada tahun 2021, berikut adalah gambaran kuadran wilayah antara derajat otonomi fiskal, ruang fiskal dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh Tahun 2021.

Gambar 4.5 Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Derajat Otonomi Fiskal (%) Provinsi Aceh Tahun 2021

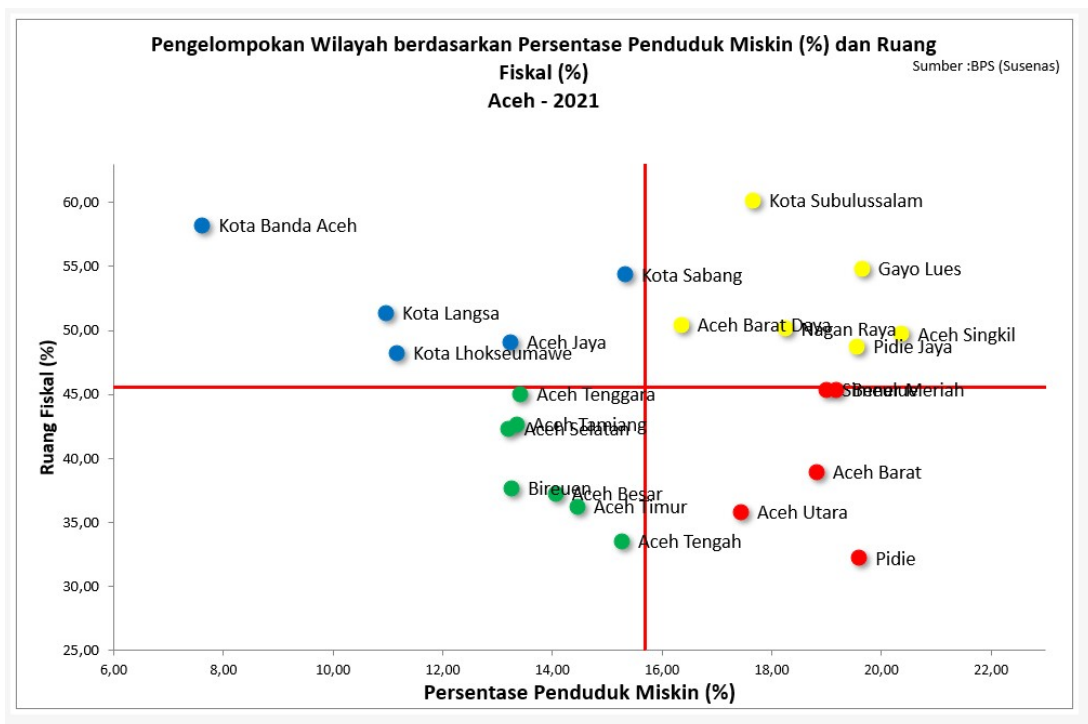


Kuadran wilayah menunjukkan bahwa, posisi Kota Banda Aceh pada tahun 2021 dengan persentase kemiskinan 7,61% dengan derajat otonomi fiskal sebesar 24,78%. Menempatkan Kota Banda Aceh pada kuadran kiri atas yang berarti Kota Banda Aceh merupakan daerah dengan persentase kemiskinan relatif rendah dengan derajat otonomi fiskal relatif tinggi. Artinya total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh relatif besar dalam total pendapatan APBD dibandingkan kabupaten/kota lain di provinsi Aceh. Penggunaan data tahun 2021 ini dikarenakan tidak tersedia data yang memadai untuk tahun 2024, namun sedikit banyak sudah mampu menggambarkan kondisi antar kabupaten/kota di Aceh.

Gambar 4.6 Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) dan Derajat Otonomi Fiskal (%) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024



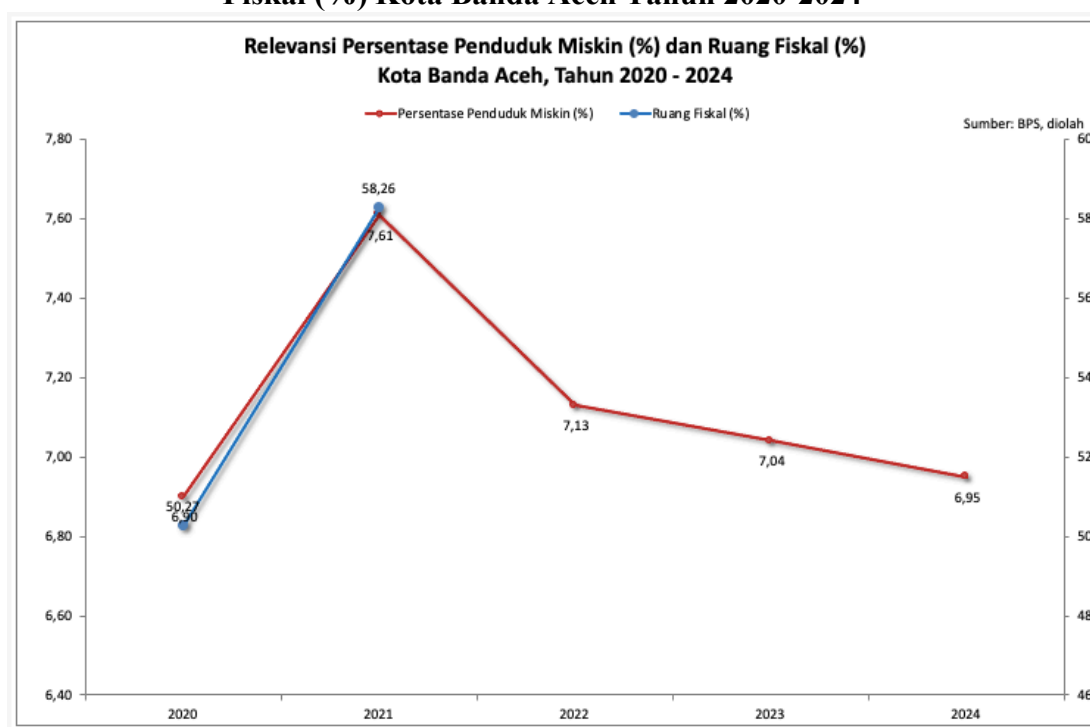
Gambar 4.7 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Ruang Fiskal (%) Aceh Tahun 2021



Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa, dalam kurun waktu 2020 – 2024, tren derajat otonomi fiskal Kota Banda Aceh dalam tren meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021, namun untuk tahun 2022 hingga 2024 tidak tersedia data yang memadai sehingga tidak diketahui tren selanjutnya.

Kuadran wilayah menunjukkan bahwa, posisi Kota Banda Aceh pada tahun 2021 dengan persentase kemiskinan 7,61% dengan ruang fiskal sebesar 58,26%. Menempatkan Kota Banda Aceh pada kuadran kiri atas yang memiliki arti Kota Banda Aceh merupakan daerah dengan persentase kemiskinan relatif rendah juga secara ruang fiskal relatif tinggi. Artinya fleksibilitas APBD untuk membiayai program- program prioritas Kota Banda Aceh relatif tinggi.

Gambar 4.8 Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) dan Ruang Fiskal (%) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

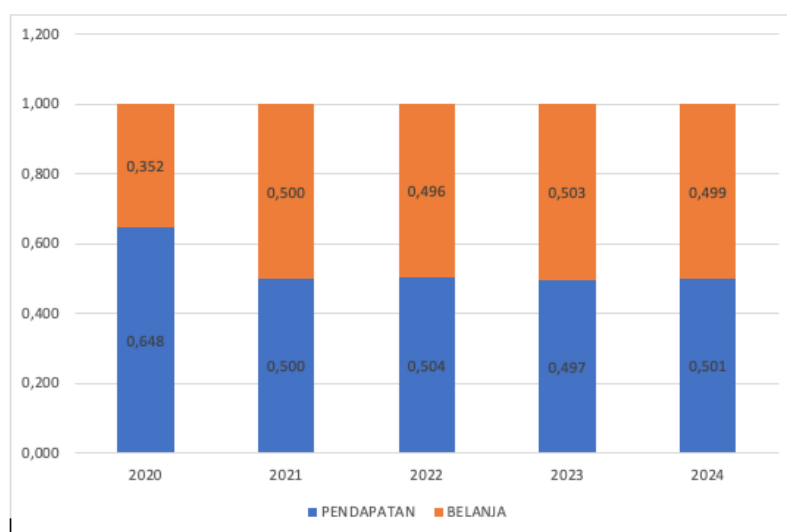


Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa, dalam kurun waktu 2015 – 2021, tren perkembangan ruang fiskal Kota Banda Aceh menunjukkan trend kenaikan sampai 2017 dan sempat anjlok di tahun 2018 dan meningkat kembali 2019-2021. Sedangkan dari sisi persentase penduduk miskin Kota Banda Aceh sejak 2015 sampai 2021 menunjukkan tren penurunan meskipun sempat naik pada tahun 2020.

Komposisi Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan data dan informasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan tahun 2024, menunjukkan bahwa komponen pendapatan Kota Banda Aceh sebesar 50,1% dengan total komponen belanja sebesar 49,9%. Sejak tahun 2020 sampai 2025, komponen pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh rata-rata hampir berimbang (53,01% : 46,99%)

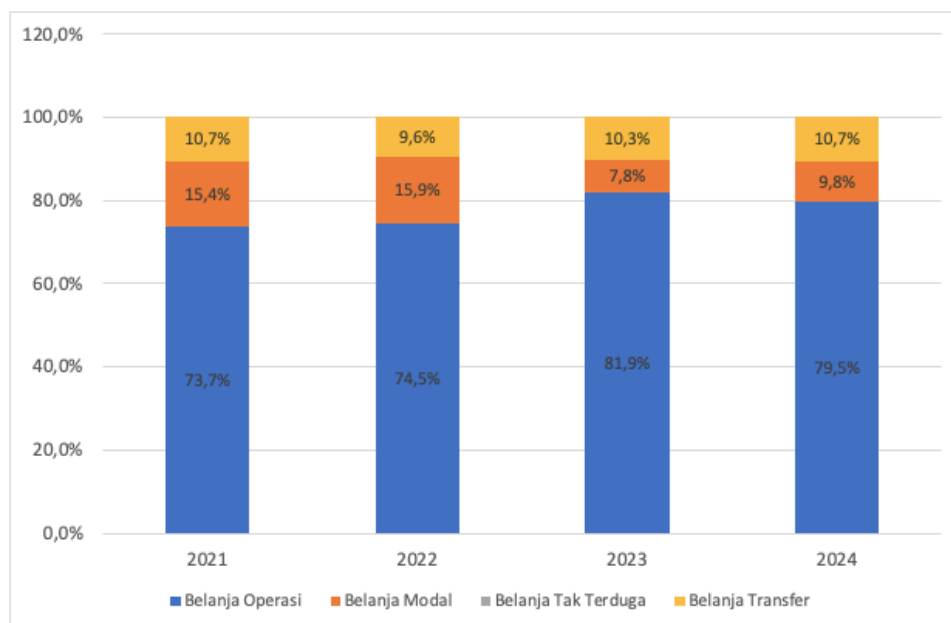
Gambar 4.9 Komposisi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024



Untuk secara detail melihat rincian pendapatan dan rincian belanja Kota Banda Aceh pada tahun 2021 sampai 2025, dapat dilihat pada gambar dibawah, komponen terbesar pendapatan Kota Banda Aceh secara rata-rata bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

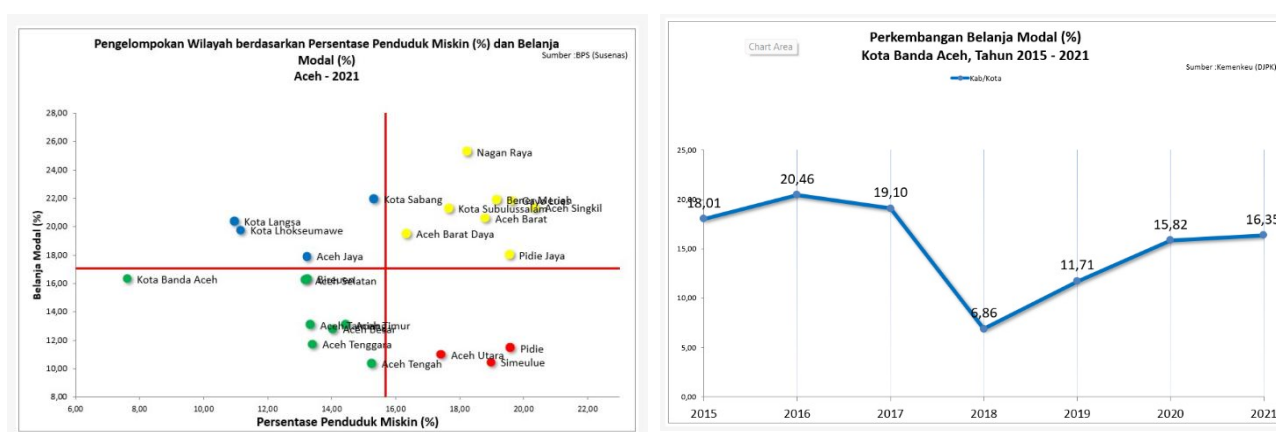
Sedangkan untuk komponen belanja, belanja operasi yang mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bansos, merupakan belanja yang paling dominan, diikuti dengan belanja modal dan belanja transfer dan belanja tak terduga yang porsinya sangat sedikit. Rincian Belanja pembiayaan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.10 Rincian Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2021-2024 (%)



Berdasarkan komponen belanja Pemerintah Kota Banda Aceh, komponen belanja operasi cenderung meningkat dari tahun-ketahun, sedangkan belanja modal cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan ini sedikit banyak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh.

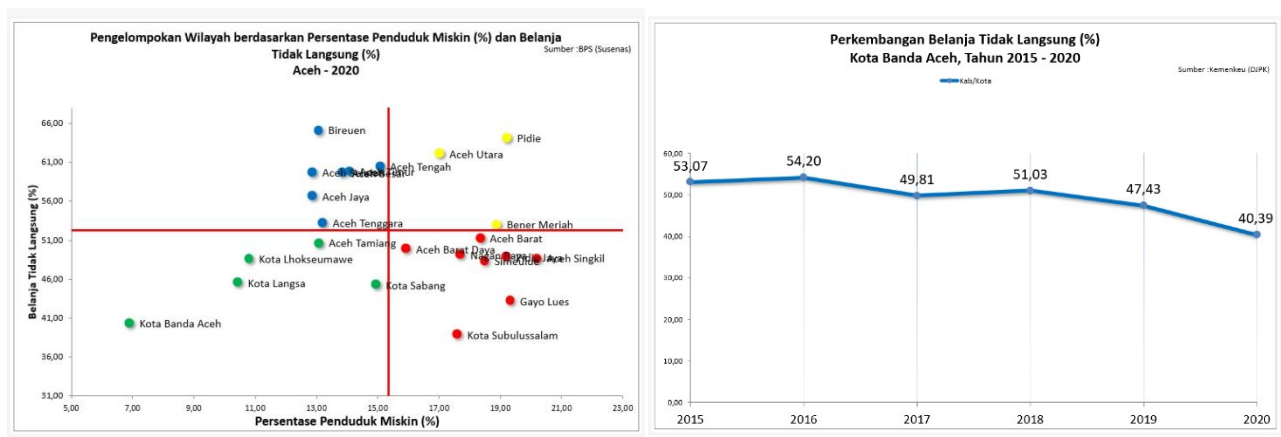
Gambar 4.11 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Penduduk Miskin (%) dan Belanja Modal (%) Aceh Tahun 2021 dan Perkembangan Belanja Modal Kota Banda Aceh Tahun 2015-2021



Sementara berdasarkan komponen belanja pegawai tidak langsung Kota Banda Aceh pada tahun 2021 sebesar 27,45%, relatif sedikit meningkat jika

dibandingkan dengan tahun 2020 (27,28%), semakin rendah komponen belanja pegawai tidak langsung dalam komponen APBD, maka peluang untuk meningkatkan alokasi untuk belanja modal akan semakin meningkat, demikian juga sebaliknya, jika komponen belanja pegawai tidak langsung semakin meningkat, maka proporsi belanja modal akan semakin mengecil dan peluang pertumbuhan ekonomi sekalipun akan mengecil.

Gambar 4.12 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Penduduk Miskin (%) dan Belanja Tidak Langsung (%) Aceh Tahun 2020 dan Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kota Banda Aceh Tahun 2015-2020

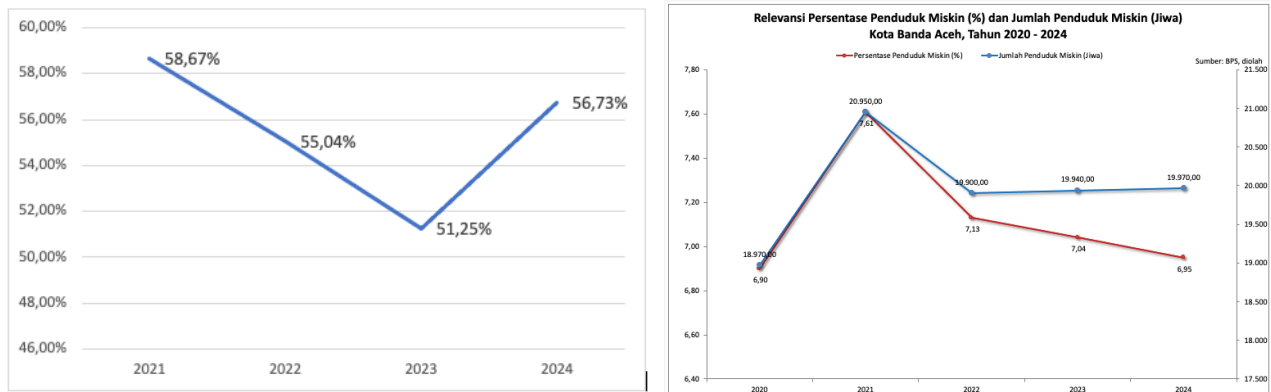


Belanja Menurut Fungsi Terkait Penanggulangan Kemiskinan

a. Belanja Menurut Fungsi Kesejahteraan

Persentase alokasi belanja kesejahteraan Kota Banda Aceh relatif tinggi, Persentase alokasi belanja kesejahteraan belanja kesejahteraan merupakan salah satu instrumen bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persentase alokasi belanja kesejahteraan merupakan total APBD menurut fungsi perlindungan sosial, fungsi pendidikan, fungsi kesehatan serta fungsi fasilitas umum dan perumahan. Dalam kurun empat tahun terakhir (2021-2024), Persentase alokasi belanja kesejahteraan cenderung menurun, pada tahun 2021 (58,67%), terus turun hingga menjadi 51,25% pada tahun 2023 dan naik kembali pada tahun 2024 (56,73%). Persentase belanja publik yang relatif tinggi selama empat tahun terakhir di Kota Banda Aceh, telah berkontribusi sangat positif pada penurunan persentase penduduk miskin secara khusus dalam periode 2020-2024.

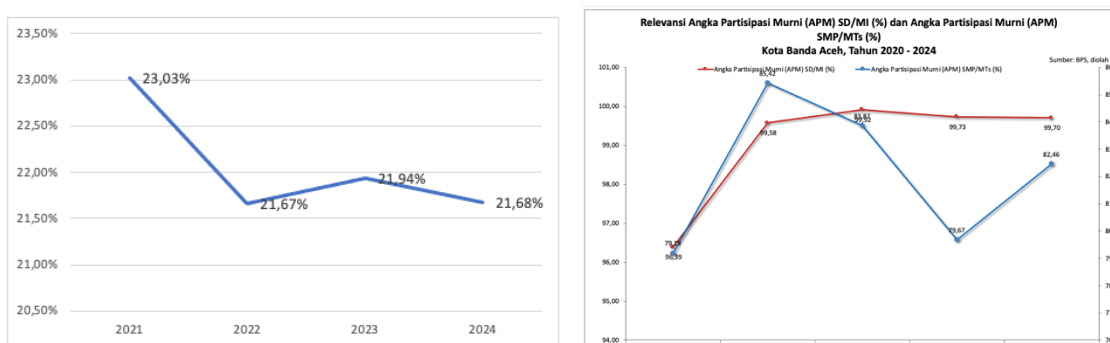
Gambar 4.13 Perkembangan Belanja Kesejahteraan (%) di Kota Banda Aceh Tahun 2021-2024 Serta Relevansi Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024



b. Belanja Menurut Fungsi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu dimensi kemiskinan. Amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49 ayat 1 telah mengatur agar alokasi untuk sektor pendidikan di masing-masing daerah minimal 20% harus teralokasikan dari total APBD, berdasarkan ketentuan tersebut, untuk Kota Banda Aceh dalam kurun waktu empat tahun terakhir cenderung menurun, namun masih diatas 20%. Tahun 2021 alokasi belanja pendidikan mencapai 23,03% dan terus menurun hingga hanya 21,68% pada tahun 2024. Sasaran utama dari besarnya alokasi tersebut adalah pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar wajib belajar dua belas tahun. Data capaian Kota Banda Aceh untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dari tahun 2020 cenderung naik hingga 2022, namun dari tahun 2023 hingga 2024 cenderung menurun, sedangkan APM SMP/MTs berfluktuati dan cenderung menurun sejak tahun 2020 hingga 2024. Secara rata-rata capaian APM SD/MI dan SMP/MTs dari tahun 2020 ke tahun 2024 cenderung menurun.

Gambar 4.14 Perkembangan Belanja Pendidikan di Kota Banda Aceh Tahun 2021-2024 Serta Relevansi AngkaPartisipasi Murni (APM) SD/MI (%) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024

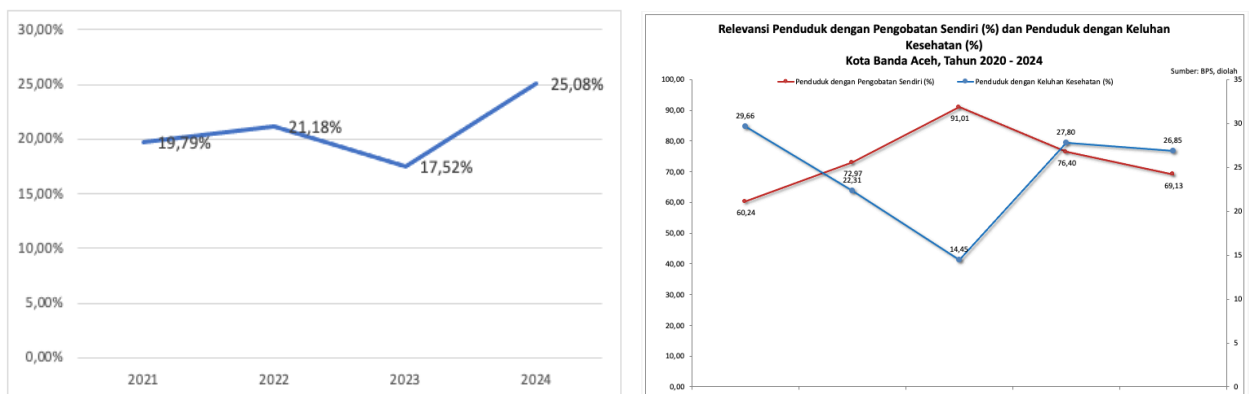


c. Belanja Menurut Fungsi Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu dimensi kemiskinan. Seperti halnya pendidikan, sektor kesehatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari isu kemiskinan itu sendiri, karena prioritasnya isu kesehatan tersebut, undang-undang telah mengatur agar alokasi APBD minimal sekurang-kurangnya 10% harus terpenuhi untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar sektor kesehatan. Kota Banda Aceh merespon ketentuan tersebut dengan terus meningkatkan alokasi belanja kesehatan, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya persentase alokasi belanja kesehatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2021 alokasi belanja kesehatan sebesar 19,79%, terus meningkat hingga 25,08% pada tahun 2024, meskipun pada tahun 2023 sempat turun menjadi 17,52%.

Sasaran utama dari peningkatan alokasi anggaran kesehatan adalah perbaikan indikator-indikator kunci kesehatan seperti kesehatan ibu dan anak, peningkatan kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih, angka morbiditas, perbaikan penduduk dengan keluhan kesehatan dan lain-lainnya. Secara rata-rata dalam periode enam tahun yang lalu, ketika alokasi anggaran kesehatan terus meningkat, kondisi ini diikuti dengan semakin membaiknya indikator penduduk dengan keluhan kesehatan yang semakin menurun, semakin meningkatnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.

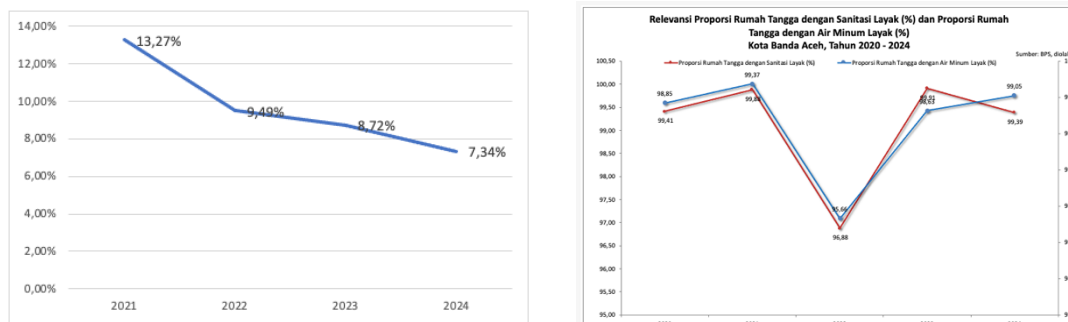
Gambar 4.15 Perkembangan Belanja Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2021-2024 Serta Relevansi Penduduk Dengan Pengobatan Sendiri (%) dan Penduduk Dengan Keluhan Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024



d. Belanja Menurut Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Infrastruktur dasar merupakan salah satu dimensi kemiskinan. Seperti halnya pendidikan dan kesehatan, pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar merupakan bagian tidak terpisahkan dari isu kemiskinan, karena prioritasnya isu pemenuhan infrastruktur dasar, maka alokasi anggaran APBD pun harus tersedia untuk perbaikan indikator-indikator terkait, selain itu, Pemerintah juga memiliki program sanitasi berbasis masyarakat dan 100-0-100 dengan target 100% pemenuhan air bersih, 0 kumuh dan 100% sanitasi layak. Kota Banda Aceh merespon ketentuan tersebut dengan terus meningkatkan alokasi belanja perumahan dan fasilitas umum setiap tahun dalam APBD, hal ini terlihat dari besarnya persentase alokasi belanja infrastruktur di Kota Banda Aceh dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi Aceh. Walaupun demikian trend belanja infrastruktur dalam empat tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2021 alokasi anggaran perumahan dan fasilitas umum sebesar 13,27% turun menjadi 7,34% pada tahun 2024. Sasaran utama dari peningkatan alokasi anggaran infrastruktur dasar adalah perbaikan indikator-indikator kunci perumahan dan fasilitas umum seperti proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak, air minum layak, proporsi rumah tangga dengan akses listrik dan lainnya. Secara rata-rata dalam periode enam tahun, ketika alokasi anggaran perumahan dan fasilitas umum terus meningkat, kondisi ini juga diikuti dengan semakin membaiknya indikator seperti proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak dan proporsi rumah tangga dengan air minum layak, demikian juga untuk proporsi rumah tangga dengan akses listrik.

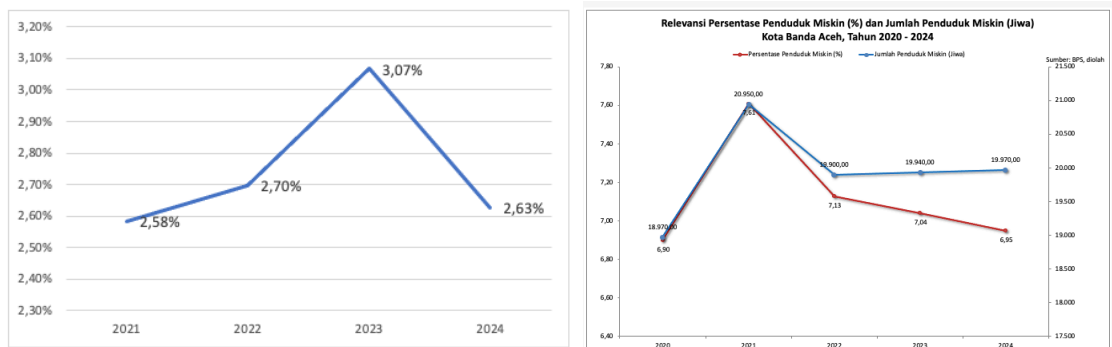
Gambar 4.16 Perkembangan Belanja Infrastruktur di Kota Banda Aceh Tahun 2021-2024 Serta Relevansi Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak (%) dan Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak (%) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024



e. Belanja Sosial

Persentase alokasi belanja sosial Kota Banda Aceh relatif rendah, Persentase alokasi belanja sosial merupakan salah satu instrumen bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat. Namun dalam kurun waktu 2021-2024, alokasi persentase belanja sosial masih cukup rendah dengan rata-rata di proporsi 2,58% di tahun 2021, naik menjadi 3,07% tahun 2023, namun tahun 2024 kembali turun menjadi 2,63% di tahun 2024. Langkah konkrit yang diperlukan adalah meningkatkan alokasi persentase belanja sosial dalam APBD Kota Banda Aceh. Perlindungan sosial bagi masyarakat Kota Banda Aceh selama ini lebih bertumpu kepada program-program Pemerintah Pusat seperti Program BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Indonesia Pintar (PIP), BPUM, BST dan program Sembako.

Gambar 4.17 Perkembangan Belanja Sosial (%) di Banda Aceh 2021-2024, Serta Relevansi Penduduk Miskin (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024



**Tabel 4. 4 ALOKASI ANGGARAN KEMISKINAN PROGRAM PRIORITAS DAN PENDUKUNG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025-2029**

POGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)					SUMBER DANA (APBN/APBA/ APBK)	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029		
1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	20.678.500	20.678.500	20.744.400	20.744.400	29.744.400	APBK	DINSOS
		2. Meningkatkan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	15.434.100	15.434.100	15.434.100	15.434.100	15.434.100	APBK	DINSOS
2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	132.890.000	132.890.000	137.890.000	137.890.000	137.890.000	APBK	DINSOS
		2. Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	87.660.000	87.660.000	92.660.000	92.860.000	93.860.000	APBK	DINSOS
		3. Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	164.819.855	164.819.855	164.819.855	164.819.855	164.819.855	APBK	DINSOS

POGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)					SUMBER DANA (APBN/APBA/ APBK)	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029		
		4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	APBK	DINSOS
		5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	46.200.000	46.200.000	46.200.000	46.200.000	46.200.000	APBK	DINSOS
		6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	49.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000	APBK	DINSOS
		7. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	48.500.000	48.500.000	48.500.000	48.500.000	48.500.000	APBK	DINSOS
		8. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	APBK	DINSOS
		9. Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	104.427.500	104.427.500	104.427.500	104.427.500	104.427.500	APBK	DINSOS
		10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	APBK	DINSOS

POGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)					SUMBER DANA (APBN/APBA/ APBK)	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029		
		11. Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	APBK	DINSOS
3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	APBK	DINSOS
		2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	333.273.030	333.273.030	333.273.030	333.273.030	333.273.030	APBK	DINSOS
4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	167.587.500	167.587.500	167.587.500	167.587.500	167.587.500	APBK	DINSOS
		2. Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	82.612.000	82.612.000	82.612.000	84.612.000	84.612.000	APBK	DINSOS
		3. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.471.000	9.471.000	9.471.000	11.471.000	11.471.000	APBK	DINSOS
		4. Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	9.173.000	9.173.000	9.173.000	11.173.000	11.173.000	APBK	DINSOS

POGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)					SUMBER DANA (APBN/APBA/ APBK)	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029		
		5. Penyediaan Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	17.820.115	17.820.115	17.820.115	17.820.115	17.820.115	APBK	DINSOS
PROGRAM BAITUL MAL	Peningkatan pendistribusian dan pendayagunaan ZISWAF	1. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS Senif Fakir		4.660.900.000	4.660.900.000	4.893.945.000	5.138.642.250	5.395.574.363	APBK	BAITULMAL
		2. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS Senif Miskin		4.995.900.000	5.757.661.701	6.045.544.786	6.347.822.025	6.665.213.127	APBK	BAITULMAL
		3. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS Senif Amil		280.000.000	280.000.000	294.000.000	308.700.000	324.135.000	APBK	BAITULMAL
		4. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS Senif Muallaf		320.000.000	320.000.000	336.000.000	352.800.000	370.440.000	APBK	BAITULMAL
		5. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS Senif Gharimin		90.000.000	90.000.000	94.500.000	99.225.000	104.186.250	APBK	BAITULMAL
		6. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah		3.437.604.020	3.437.604.020	3.609.484.221	3.789.958.432	3.979.456.354	APBK	BAITULMAL
		7. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil		35.700.000	35.700.000	37.485.000	39.359.250	41.327.213	APBK	BAITULMAL
		8. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS Senif Wakaf		1.734.230.000	1.734.230.000	1.820.941.500	1.911.988.575	2.007.588.004	APBK	BAITULMAL

POGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)					SUMBER DANA (APBN/APBA/ APBK)	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029		
		9. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS Senif Infaq		5.000.000	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	APBK	BAITULMAL
		10. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS Guru SMA dan Sederajat		10.000.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	APBK	BAITULMAL
1. Program Kawasan Permukiman	1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1. Rehab rumah tidak layak huni	422.500.000	53.085.100	53.085.100	76.085.100	76.085.100	APBK	PERKIM
		2. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1. Pembangunan rumah layak huni	1.240.000.000	-	-	-	-	DOKA	PERKIM
			2. Pembangunan rumah layak huni	1.860.000.000	1.823.303.500	1.991.647.500	201.880.500	201.880.500	APBK	PERKIM
2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1. Rehab rumah tidak layak huni	1.069.000.000	52.981.000	52.981.000	75.981.000	75.981.000	APBK	PERKIM

POGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)					SUMBER DANA (APBN/APBA/ APBK)	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029		
		2. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	2. Pembangunan rumah layak huni	-	178.265.600	178.265.600	185.765.600	185.765.600	APBK	PERKIM
1. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	1. Pelatihan peningkatan kapasitas bagi UMKM	(Pelatihan Peningkatan kapasitas UMKM)	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	APBK	DISKOPUKM DAG
		2. Pelatihan peningkatan kapasitas bagi UMKM Kota Banda Aceh		-	150.000.000	175.000.000	180.000.000	200.000.000	APBK	DISKOPUKM DAG
		3. Pelatihan peningkatan usaha Kota Banda Aceh		-	100.000.000	150.000.000	180.000.000	200.000.000	APBK	DISKOPUKM DAG
2. Pengembangan UMKM	1. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	1. Pelatihan akses pembiayaan dan klinik UMKM	(Pelatihan Peningkatan kapasitas UMKM)	-	45.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	APBK	DISKOPUKM DAG
		2. Pelatihan digitalisasi dan pemasaran online untuk UMKM		-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBK	DISKOPUKM DAG
		3. Digitalisasi UMKM dan branding konten digital		-	56.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBK	DISKOPUKM DAG
		4. Digitalisasi pembayaran dan pemasaran online		-	53.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBK	DISKOPUKM DAG
		5. Pelatihan manajemen keuangan UMKM		-	45.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000	APBK	DISKOPUKM DAG

POGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)					SUMBER DANA (APBN/APBA/ APBK)	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029		
		6. Pelatihan pajak dan legalitas usaha bagi UMKM		-	52.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBK	DISKOPUKM DAG
3. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1. Pelaksanaan Psar Murah dan Operator Pasar Khusus			800.000.000	700.000.000				DOKA	DISKOPUKM DAG
	2. Pelaksanaan Psar Murah dan Operator Pasar Khusus			-	80.000.000				APBK	DISKOPUKM DAG
1. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1. Pengendalian Program KKBPK	1. Operasional Kelompok Kegiatan (POKTAN)	289.000.000					APBN	DP3AP2KB
			2. Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)		172.500.000	172.500.000	172.500.000	172.500.000	APBN	DP3AP2KB
2. PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum, Sosial Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik Hukum, Sosial dan Ekonomi	1. Pelatihan Manajemen Usaha bagi Perempuan Kota Banda Aceh	100.000.000					APBK	DP3AP2KB
			2. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik Hukum, Sosial dan Ekonomi	200.000.000					APBK	DP3AP2KB
			3. Pelatihan Manajemen Usaha bagi Pelaku Usaha Perempuan	200.000.000					APBK	DP3AP2KB
			4. Pelatihan Manajemen Organisasi bagi Kaum Perempuan	200.000.000					APBK	DP3AP2KB
		2. Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Pelatihan Kepemimpinan Bagi Perempuan Kota Banda Aceh		100.000.000				APBK	DP3AP2KB
			2. Pelatihan Kepemimpinan Bagi Perempuan		100.000.000				APBK	DP3AP2KB
			3. Pelatihan Ketrampilan Usaha Bagi Kelompok Wanita		150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	APBK	DP3AP2KB

POGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)					SUMBER DANA (APBN/APBA/ APBK)	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029		
			4. Pelatihan Manajemen Organisasi Bagi Perempuan		200.000.000				APBK	DP3AP2KB
			5. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Politik Perempuan		150.000.000				APBK	DP3AP2KB
			6. Pelatihan Publik Speaking Bagi Perempuan Kota Banda Aceh		150.000.000				APBK	DP3AP2KB
			7. Pelatihan Publik Speaking Bagi Perempuan		50.000.000				APBK	DP3AP2KB
			8. Pelatihan Publik Speaking Bagi Perempuan		100.000.000				APBK	DP3AP2KB
			9. Pelatihan Publik Speaking Bagi Perempuan		50.000.000				APBK	DP3AP2KB
			10. Pelatihan Publik Speaking Bagi Perempuan		50.000.000				APBK	DP3AP2KB
	2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	1. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan untuk Kaum Perempuan Kec. Syiah Kuala dan Kec. Ulee Kareng	150.000.000					APBK	DP3AP2KB
1. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan PAD	Pembinaan dan Pendampingan DebiturPUEM dalam Pengembangan Usaha	-	-	12.000.000	12.000.000	12.000.000	APBK	DPMG

POGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)					SUMBER DANA (APBN/APBA/ APBK)	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029		
1. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan kompetensi		-	795.840.000	795.840.000	795.840.000	795.840.000	APBK	DISNAKER
2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Iuran Jaminan Keceakaan Kerja Bagi Pekerja Rentan	242.000.000	1.008.000.000	1.008.000.000	1.008.000.000	1.008.000.000	APBK	DISNAKER
1. PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilisasi Pasokan dan Harga PangannTingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Gerakan Pangan Murah (GPM)	1.003.909.150	700.000.000	700.000.000	-	-	APBK	DP2KP
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat Penganekaragama n Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Ketahanan Pangan Keluarga	-	300.000.000	300.000.000	-	-	APBK	DP2KP
2. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Iuran Jaminan Keceakaan Kerja Bagi Pekerja Rentan	242.000.000	1.008.000.000	1.008.000.000	1.008.000.000	1.008.000.000	APBK	DP2KP
3. PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Bantuan Prasarana Penangkapan Ikan	90.000.000	-	2.050.000.000	90.000.000	90.000.000	APBK	DP2KP
		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Bantuan Sarana Penangkapan Ikan	700.000.000	900.000.000	600.000.000	120.000.000	120.000.000	APBK	DP2KP

POGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)					SUMBER DANA (APBN/APBA/ APBK)	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029		
4. PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komunitas Teknologi dan Spesifikasi Lokal	Bantuan Prasarana dan Sarana Pertanian	293.000.000	500.000.000	500.000.000	300.000.000	300.000.000	APBK, APBN	DP2KP
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Bantuan Bibit Ternak Kepada Masyarakat	250.000.000	80.000.000	-	-	-	APBK	DP2KP
1. POGRAM BEASISWA	1. Beasiswa Program PIP Jenjang SD			3.830.400.000	-	-	-	-	APBN	DISDIKBUD
	2. Beasiswa Program PIP Jenjang SMP			2.900.250.000	-	-	-	-	APBN	DISDIKBUD
	3. Beasiswa Yatim/Piatu/Yatim Piatu Jenjang SD			1.150.000.000	-	-	-	-	APBA	DISDIKBUD
	4. Beasiswa Yatim/Piatu/Yatim Piatu Jenjang SMP			1.394.400.000	-	-	-	-	APBA	DISDIKBUD
2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Beasiswa Miskin dan Prestasi Jenjang PAUD	160.000.000	-	-	-	-	APBK	DISDIKBUD
	2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Beasiswa Miskin dan Prestasi Jenjang SD	1.312.500.000	-	-	-	-	APBK	DISDIKBUD
	3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Beasiswa Miskin dan Prestasi Jenjang SMP	1.750.000.000	-	-	-	-	APBK	DISDIKBUD

POGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)					SUMBER DANA (APBN/APBA/ APBK)	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029		
1. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	300.802.300	300.802.300	300.802.300	300.802.300	300.802.300	APBK	PUPR
		2. Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2.000.802.300	2.000.802.300	964.455.574	964.455.574	964.455.574	APBK	PUPR
		3. Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	8.605.524.837	7.605.524.837	4.508.379.000	4.508.379.000	4.508.379.000	APBN/APBA/ APBK	PUPR
		4. Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	7.047.145.837	10.127.833.637	4.000.000.000	4.069.928.563	4.105.179.035	APBN/APBA/ APBK	PUPR
		5. Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	500.810.300	500.810.300	500.810.300	500.810.300	536.060.771	APBK	PUPR
		6. Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	500.946.300	500.946.300	500.946.300	500.946.300	500.946.300	APBK	PUPR
		7. Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2.000.810.300	2.069.610.300	1.069.610.300	1.069.610.300	1.069.610.300	APBK	PUPR
		8. Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2.001.536.826	2.001.536.826	2.001.536.826	2.001.536.826	2.001.536.826	APBK	PUPR
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	8.374.889.000	8.531.929.000	8.531.929.000	8.531.929.000	8.531.929.000	APBN/APBA/ APBK	PUPR
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	2.502.708.000	2.502.708.000	2.502.708.000	2.502.708.000	2.502.708.000	APBN/APBA/ APBK	PUPR

POGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)					SUMBER DANA (APBN/APBA/ APBK)	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029		
Diskon Tarif	Diskon Tarif Kelompok RT-1	Verifikasi Data Pelanggan RT-1	Penerapan diskon tarif dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi dan validasi data pelanggan RT-1 sebagai dasar penerapan diskon tarif.	7.700.000.000	-	-	-	-	APBK	PDAM
Pemasangan Sambungan Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Pemasangan Sambungan Baru Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Baru MBR	Melaksanakan pemasangan sambungan baru air minum bagi pelanggan MBR sesuai standar teknis yang berlaku setelah melakukan pendataan, pengecekan, dan verifikasi kelayakan.	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	APBK	PDAM
1. PROGRAM PEMBIAYAAN	1. Pembiayaan PIP	1. Pembiayaan untuk masyarakat yang memiliki usaha, mikro, kecil, menengah	Pembiayaan ini diberikan dengan plafond maksimal sampai dengan Rp 20.000.000	1.648.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	APBK	LKMS MAHIRAH
	2. Pembiayaan Revolving/Puem	1. Pembiayaan untuk masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil	Pembiayaan dengan Plafond maksimal Rp 10.000.000	1.270.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBK	LKMS MAHIRAH
2. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1. PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	1. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembinat sanggar seni melalui atraksi/festival seni budaya putro phang	-	100.000.000	-	-	-	APBK	PARIWISATA
		2. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		-	100.000.000	-	-	-	APBK	PARIWISATA
3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMIKREATIF	1. PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF	1. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Pelatihan Kewirausahaan Kreatif Pemuda Pemudi Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh	199.525.000		-	-	-	APBK	PARIWISATA

POGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)					SUMBER DANA (APBN/APBA/ APBK)	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029		
			Pelatihan Digital Marketing dan Pengembangan Digitalisasi Pariwisata	-	45.000.000	-	-	-	APBK	PARIWISATA
			Pelatihan Peningkatan SDM Anak Muda Kreatif KotaBanda Aceh	-	100.000.000	-	-	-	APBK	PARIWISATA
			Peningkatan UMKM melalui pelatihan fotografi	-	150.000.000	-	-	-	APBK	PARIWISATA
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pengadaan kendaraan operasional layanan kesehatan (Ambulance Puskesmas Keliling)	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0	APBK	DISKES
			Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas	0	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	APBK	DISKES
			Pengadaan Ambulance Jenazah	1.555.480.000	1.640.000.000	1.640.000.000	1.640.000.000	1.640.000.000	APBK	DISKES
		2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Belanja pemeliharaan konstruksi Pustu lamgugop	0	45.288.424	45.288.424	45.288.424	45.288.424	APBK	DISKES
		3. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Obat dan BMHP	0	3.265.416.173	3.265.416.173	3.265.416.173	3.265.416.173	APBK	DISKES
		4. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Kegiatan distribusi obat dan BMHP utk program : Pelayanan Kesehatan Dasar, Program : TB, HIV, Malaria, Kecacingan, Kesehatan Ibu dan Anak, Pemeriksaan Kesehatan Gratis.	0	163.599.400	163.599.400	163.599.400	163.599.400	APBK	DISKES

POGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)					SUMBER DANA (APBN/APBA/ APBK)	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sosialisasi dan edukasi Pengenalan tanda-tanda bahaya dan perawatan diri pada masa kehamilan kepada ibu hamil di tingkat puskesmas	0	19.903.500	19.903.500	19.903.500	19.903.500	APBK	DISKES
		2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pendampingan kunjungan nifas oleh tenaga kesehatan kerumah pasien	0	25.725.000	25.725.000	25.725.000	25.725.000	APBK	DISKES
			Orientasi Pijat Laktasi bagi Calon Ibu Bersalin	0	65.765.000	65.765.000	65.765.000	65.765.000	APBK	DISKES
		3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kegiatan Tatalaksana Pengambilan Sampel SHK pada Bayi Baru Lahir	0	215.088.000	215.088.000	215.088.000	215.088.000	APBK	DISKES
		4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orientasi Kelas Ibu Balita Bagi Masyarakat	0	76.225.200	76.225.200	76.225.200	76.225.200	APBK	DISKES
		5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kegiatan Bintek "Capacity Bulding Konselor sebaya pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)"	0	98.594.000	98.594.000	98.594.000	98.594.000	APBK	DISKES
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan jiwa berat	Fasilitasi pelaksanaan First Aider Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) di sekolah	0	83.820.000	83.820.000	83.820.000	83.820.000	APBK	DISKES
		6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orientasi pelayanan kesehatan usia lanjut bagi kader	0	26.763.800	26.763.800	26.763.800	26.763.800	APBK	DISKES
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Penyediaan Kartrid TCM	0	789.568.000	789.568.000	789.568.000	789.568.000	APBK	DISKES
			Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir	0	66.800.000	66.800.000	66.800.000	66.800.000	APBK	DISKES
			Skrining TBC di Pesantren	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	APBK	DISKES

POGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)					SUMBER DANA (APBN/APBA/ APBK)	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029		
		8. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB)	0	148.400.000	148.400.000	148.400.000	148.400.000	APBK	DISKES
		9. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	PMT Pasien untuk penambahan gizi pasien TB Resistensi Obat dan Pasien Sensitif Obat	0	59.520.000	59.520.000	59.520.000	59.520.000	APBK	DISKES
		10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pemberian PMT Lokal	1.241.880.000	1.119.837.500	1.119.837.500	1.119.837.500	1.119.837.500	APBK	DISKES
		11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Penyediaan Reagen Sanitarian Kit	0	448.392.175	448.392.175	448.392.175	448.392.175	APBK	DISKES
			Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (KAMRT) dan Surveilans Kualitas Udara dalam Ruang	0	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	APBK	DISKES
		12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Kegiatan verifikasi sinyal/rumor, PE/pelacakan kontak penyakit berpotensi KLB/Wabah, PE penyakit menular lainnya, keracunan makanan dan penychatan lingkungan	0	99.800.000	99.800.000	99.800.000	99.800.000	APBK	DISKES
			Survei dan pengendalian vektor	0	106.400.000	106.400.000	106.400.000	106.400.000	APBK	DISKES
			Skrining dan tindak lanjut hasil skrining masalah kesehatan jiwa di UKBM/Lembaga	0	83.600.000	83.600.000	83.600.000	83.600.000	APBK	DISKES
			Kegiatan fogging fokus	0	329.672.350	329.672.350	329.672.350	329.672.350	APBK	DISKES
			Kegiatan Larvasida	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	APBK	DISKES

POGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)					SUMBER DANA (APBN/APBA/ APBK)	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat	13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi, serta penyehatan lingkungan	0	63.300.000	63.300.000	63.300.000	63.300.000	APBK	DISKES
			Peningkatan pengetahuan serta sosialisasi deteksi dini kanker serviks dan payudara	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBK	DISKES
			Deteksi dini dan cek kesehatan gratis pemantauan dan tindak lanjut penyakit tidak menular	0	656.100.000	656.100.000	656.100.000	656.100.000	APBK	DISKES
		14. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Sosialisasi Penanganan dan Pelayanan Kesehatan Pada Kasus KTPA	0	17.940.000	17.940.000	17.940.000	17.940.000	APBK	DISKES
		15. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	JKN PerPuskesmas	0	16.261.490.280	16.261.490.281	16.261.490.282	16.261.490.283	APBK	DISKES
		16. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pemberian PMT untuk ODHIV	0	46.412.653	46.412.653	46.412.653	46.412.653	APBK	DISKES
		17. Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pelayanan Imunisasi di desa	0	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	APBK	DISKES
			Pelayanan Imunisasi di sekolah	0	80.400.000	80.400.000	80.400.000	80.400.000	APBK	DISKES
		18. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi,	Publikasi Program Kesehatan Melalui Media Cetak (Kota Banda Aceh)	0	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	APBK	DISKES

POGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)					SUMBER DANA (APBN/APBA/ APBK)	OPD
				2025	2026	2027	2028	2029		
	dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan peningkatan kapasitas dan keterampilan Cargiver informal bagi kader	0	25.287.000	25.287.000	25.287.000	25.287.000	APBK	DISKES
			Kampanye dan penggerakan masyarakat untuk hidup sehat	0	99.923.000	99.923.000	99.923.000	99.923.000	APBK	DISKES
			Sosialisasi kontrasepsi kader posyandu didesa	0	15.405.000	15.405.000	15.405.000	15.405.000	APBK	DISKES
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pelatihan Peningkatan Pola Hidup Sehat	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	APBK	DISKES
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANDA ACEH	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Warga dan Dunia Usaha dalam Penanganan Pasca Bencana	-	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	APBK	BPBD
			Pelatihan Desa Tangguh Bencana	-	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	APBK	BPBD

BAB V

LOKASI PRIORITAS

5.1. Isu Strategis

Isu strategis adalah isu-isu yang dianggap prioritas untuk ditangani sebagai hasil dari seluruh analisis program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh yang telah dilakukan pada proses analisis perencanaan dan penganggaran seperti yang telah dijabarkan pada bab 3 dan bab 4. Satu isu strategis dapat memuat beberapa indikator utama dalam satu bidang, di mana isu-isu strategis tersebut menjadi fokus yang harus dicapai melalui program-program yang telah direncanakan.

Berbagai isu strategis dan permasalahan yang dialami masyarakat miskin harus diselesaikan secara komprehensif dan terkonsolidasi bukan parsial. Berikut ini isu-isu strategis dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh:

a. Isu Strategis Bidang Pendidikan

Peningkatan kualitas dan angka partisipasi pendidikan dasar, melalui peningkatan sarana prasarana, tenaga pendidik dan kejar paket dengan memprioritaskan pada wilayah-wilayah pinggiran dan kurang tersentuh.

b. Isu Strategis Bidang Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan dasar, melalui peningkatan sarana prasarana kesehatan untuk perluasan akses layanan dengan prioritas pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, untuk pencegahan stunting, dan balita gizi buruk.

c. Isu Strategis Bidang Infrastruktur Dasar

Peningkatan aksesibilitas antar wilayah, melalui peningkatan sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman dengan memprioritaskan pada rumah tangga miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin.

d. Isu Strategis Bidang Ketenagakerjaan

Peningkatan penyediaan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi, peningkatan keterampilan SDM dan penyerapan tenaga kerja dengan memprioritaskan penduduk asli Aceh, khususnya Banda Aceh.

e. Isu Strategis Bidang Ekonomi

Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha sektor UMKM melalui pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan baik tata kelola keuangan maupun peningkatan omset pemasaran baik online maupun offline sertamengikut sertakan dalam berbagai kegiatan pameran dan study banding guna mewujudkan UMKM naik kelas.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis tersebut dilakukan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah diantaranya dilakukan dengan:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui kelompok program sebagai berikut:

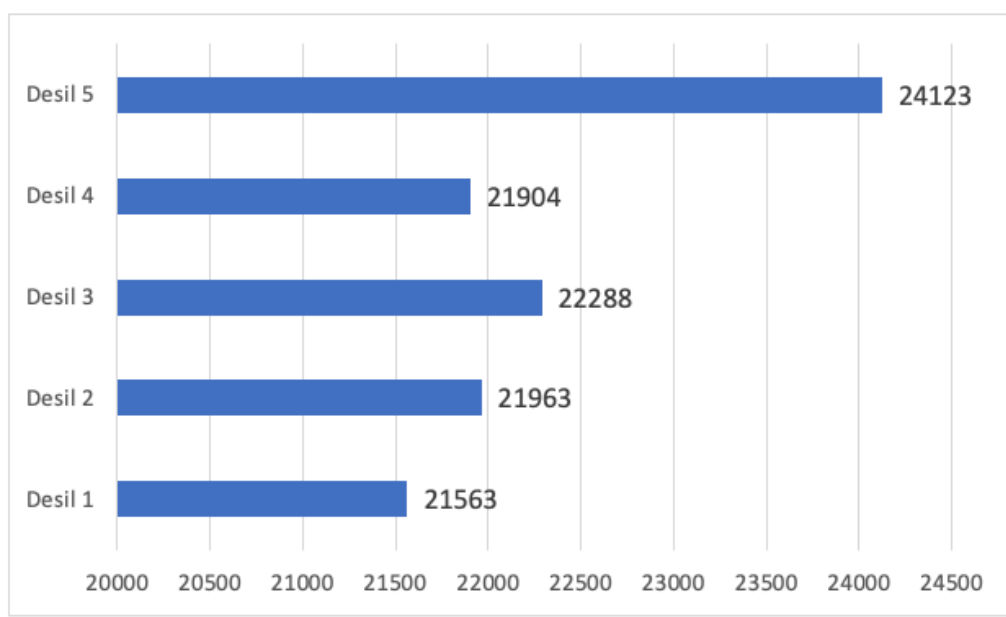
1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapaskelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil
4. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

5.2. Sebaran dan Tingkat Status Kesejahteraan

Sasaran intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ditentukan berdasarkan data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Tahun 2024. Penduduk miskin dilihat berdasarkan status kesejahteraannya dapat dikelompokkan kedalam 10 desil dengan desil I merupakan rumah tangga yang termasuk kedalam kelompok kedalam kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dan desil X kesejahteraan paling tinggi. DTSEN menetapkan bahwa penduduk miskin dan sangat miskin adalah penduduk yang status kesejahteraannya berada pada desil I s/d V. Berdasarkan data DTSEN tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh berjumlah desil I s/d V berjumlah 111.841 jiwa dengan sebaran per desil sebagai berikut:

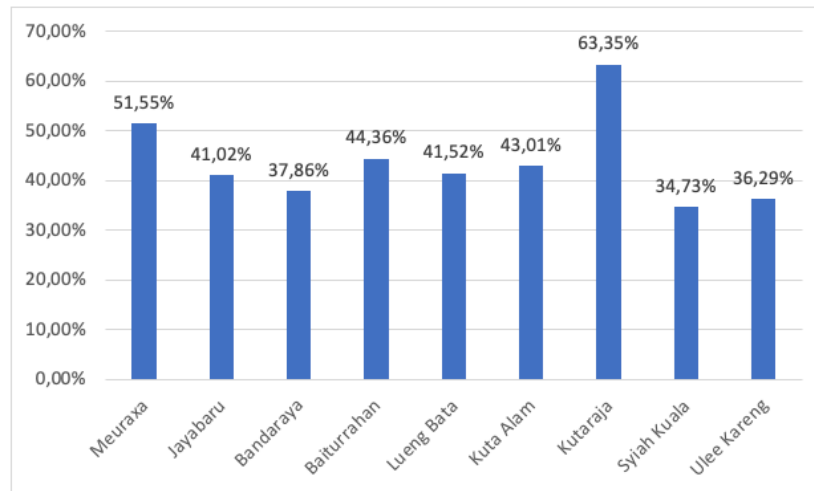
Gambar 5.1
Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Status Kesejahteraan Terendah
(Desil I s/d V) di Kota Banda Aceh Tahun 2024



Sumber : DTSEN Kemensos, 2025

Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kota Banda Aceh, kecamatan dengan persentase penduduk miskin terbesar (Desil I s/d V) di Kota Banda Aceh berada di Kecamatan Kutaraja, Meuraxa, Baiturrahman. Adapun sebaran persentase penduduk miskin di kecamatan-kecamatan di Kota Banda Aceh dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 5.2
Sebaran Penduduk Miskin Berdasarkan Status Kesejahteraan Terendah (Desil I s/d V) di Kota Banda Aceh Tahun 2024



Tabel 5.1
Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Status Kesejahteraan Terendah (Desil I s/d V) di Kota Banda Aceh Tahun 2024

Kecamatan	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Desil 5	Jumlah
Baiturrahman	2.403	2.814	3.025	2.977	3.283	14.502
Kuta Alam	2.880	3.324	3.816	4.196	4.327	18.543
Meuraxa	2.651	2.843	2.997	2.813	3.006	14.310
Syiah Kuala	2.967	2.682	2.249	2.110	2.058	12.066
Luengbata	1.832	2.118	2.268	2.237	2.352	10.807
Kutaraja	2.347	1.997	1.894	1.644	1.708	9.590
Banda Raya	2.033	2.030	1.973	1.874	2.318	10.228
Jaya Baru	2.237	1.905	2.203	2.240	2.701	11.286
Ulee Kareng	2.213	2.250	1.863	1.813	2.370	10.509
Jumlah	21.563	21.963	22.288	21.904	24.123	111.841

Sumber : DTSEN Kemensos, 2025

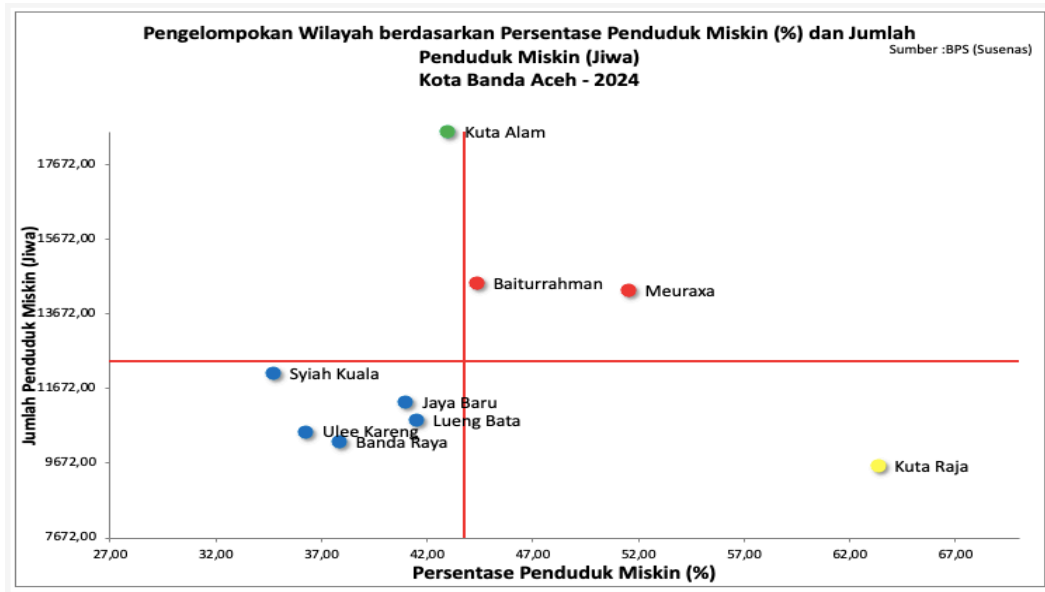
5.3. Lokasi Prioritas

Dengan mempertimbangkan data jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah dan persentase penduduk miskin dibandingkan dengan jumlah total penduduk di Kota Banda Aceh, maka program penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh diarahkan bagi penduduk miskin di Desil I hingga Desil V sesuai dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat

pusat, dimana bantuan bansos dan program penanggulangan kemiskinan ditujukan bagi penduduk Desil I s/d V.

Gambar 5.3

Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Kota Banda Aceh Tahun 2024



Berdasarkan gambar 5.3 diatas, maka wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh adalah :

Prioritas Pertama	Kecamatan Baiturrahman, Meuraxa
Prioritas Kedua	Kecamatan Kutaraja
Prioritas Ketiga	Kecamatan Kuta Alam
Prioritas Keempat	Kecamatan Syiah Kuala, Jaya Baru, Luengbata, Ulee Kareng dan Banda Raya

Penentuan Gampong prioritas didasarkan pada jumlah penduduk miskin pada suatu kecamatan dan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada gampong tersebut.

5.3.1. Kecamatan Baiturrahman

Desa Prioritas I di Kecamatan Baiturrahman; Peuniti, Ateuk Pahlawan dan Seutui. Untuk Prioritas II ada 1 gampong yaitu Ateuk Deah Tanoh. Sedangkan untuk Prioritas III ada 2 gampong yaitu Sukaramai dan Neusu Aceh. Empat

gampong lainnya masuk Prioritas IV yaitu Ateuk Jawo, Kampung Baru, Neusu Jaya dan Ateuk Munjeng.

Tabel 5.4
Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Gampong Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Baiturrahman

No	Gampong	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Prioritas
1	Peuniti	2949	50,24%	Pertama
2	Ateuk Pahlawan	1914	46,12%	Pertama
3	Seutui	1638	50,95%	Pertama
4	Ateuk Deah Tanoh	683	62,03%	Kedua
5	Sukaramai	1741	42,71%	Ketiga
6	Neusu Aceh	1631	41,19%	Ketiga
7	Ateuk Jawo	1320	41,12%	Keempat
8	Kampung Baru	943	36,74%	Keempat
9	Neusu Jaya	792	33,53%	Keempat
10	Ateuk Munjeng	891	40,85%	Keempat

Sumber : DTSEN Kemensos, 2025

5.3.2. Kecamatan Kuta Alam

Berdasarkan jumlah dan persentase penduduk miskin, gampong yang menjadi Prioritas I di Kecamatan Kuta Alam terdiri dari 4 gampong; Mulia, Lampulo dan Lambaro Skep dan Lamdingin. Untuk Prioritas II ada 2 gampong yaitu Laksana dan Peunayong. Sedangkan Prioritas III hanya 1 gampong yaitu Beurawe. Empat gampong lainnya masuk Prioritas IV yaitu Bandar Baru, Keuramat, Kuta Alam dan Kota Baru.

Tabel 5.5
Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Gampong Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kuta Alam

No	Gampong	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Prioritas
1	Mulia	2376	51,57%	Pertama
2	Lampulo	3057	55,75%	Pertama
3	Lambaro Skep	3058	52,11%	Pertama
4	Lamdingin	1679	49,19%	Pertama
5	Laksana	1627	47,55%	Kedua
6	Peunayong	1094	49,55%	Kedua
7	Beurawe	1978	39,13%	Ketiga

8	Bandar Baru	1153	23,16%	Keempat
9	Keuramat	1230	36,38%	Keempat
10	Kuta Alam	984	29,15%	Keempat
11	Kota Baru	307	23,20%	Keempat

Sumber : DTSEN Kemensos, 2025

5.3.3. Kecamatan Meuraxa

Berdasarkan jumlah dan persentase penduduk miskin, gampong yang menjadi Prioritas I di Kecamatan Meuraxa terdiri dari Gampong Alue Deah Teungoh, Lampaseh Aceh, dan Deah Gelumpang. Untuk Prioritas II terdiri dari 6 gampong yaitu Ulee Lheu, Lambung, Deah Baro, Asoe Nanggroe, Gampong Blang dan Gp. Pie. Sedangkan Prioritas III terdiri dari 3 gampong yaitu Blang Oi, Surien, dan Punge Ujong, serta 4 gampong lainnya masuk sebagai prioritas IV.

Tabel 5.6
Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Gampong Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Meuraxa

No	Gampong	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Prioritas
1	Alue Deah Teungoh	1057	69,18%	Pertama
2	Lampaseh Aceh	1538	52,69%	Pertama
3	Deah Gelumpang	869	60,06%	Pertama
4	Ulee Lheu	612	68,69%	Kedua
5	Lambung	608	53,52%	Kedua
6	Deah Baro	705	73,21%	Kedua
7	Asoe Nanggroe	713	73,96%	Kedua
8	Gampong Blang	500	75,87%	Kedua
9	Gampong Pie	479	65,98%	Kedua
10	Blang Oi	1343	44,96%	Ketiga
11	Surien	1069	44,50%	Ketiga
12	Punge Ujong	962	51,12%	Ketiga
13	Lamjabat	677	51,40%	Keempat
14	Punge Jurong	1677	38,40%	Keempat
15	Gampong Baro	827	41,25%	Keempat
16	Cot Lamkueweh	674	43,04%	Keempat

Sumber : DTSEN Kemensos, 2025

5.3.4. Kecamatan Syiah Kuala

Berdasarkan jumlah dan persentase penduduk miskin, gesa yang menjadi Prioritas 1 di Kecamatan Syiah Kuala ada 2 gampong, yaitu Tibang dan Alue Naga. Untuk Prioritas 2 hanya terdiri dari 1 Gampong yaitu Deah Raya. Sedangkan Prioritas 3 terdiri dari 2 gampong yaitu Ie Masen Kayee Adang dan Rukoh. Adapun yang masuk Prioritas 4 ada 5 gampong yaitu Jeulingke, Pineung, Lamgugop, Kopelma Darussalam dan Peurada.

Tabel 5.7
Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Gampong Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Syiah Kuala

No	Gampong	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Prioritas
1	Tibang	1311	62,22%	Pertama
2	Alue Naga	1941	87,83%	Pertama
3	Deah Raya	1179	85,87%	Kedua
4	Ie Masen Kayee Adang	1352	28,61%	Ketiga
5	Rukoh	1507	37,55%	Ketiga
6	Jeulingke	1566	26,76%	Keempat
7	Pineung	884	20,83%	Keempat
8	Lamgugop	1093	24,82%	Keempat
9	Kopelma Darussalam	573	18,28%	Keempat
10	Peurada	660	24,67%	Keempat

Sumber : DTSEN Kemensos, 2025

5.3.5. Kecamatan Lueng Bata

Berdasarkan jumlah dan persentase penduduk miskin, gampong Prioritas I di Kecamatan Lueng Bata adalah Gampong Batoh dan Panterik. Untuk Prioritas 2 terdiri dari 4 gampong yaitu Blang Cut, Lamseupeung, Sukadamai dan Lampaloh. Sedangkan Prioritas III terdiri dari 2 gampong yaitu Lueng Bata dan Cot Mesjid. Gampong yang masuk Prioritas IV adalah Lamdom.

Tabel 5.8
Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Gampong Penanggulangan
Kemiskinan Kecamatan Lueng Bata

No	Gampong	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Prioritas
1	Batoh	2250	42,33%	Pertama
2	Panteriek	1726	47,37%	Pertama
3	Blang Cut	1150	54,22%	Kedua
4	Lamseupeung	829	43,65%	Kedua
5	Suka Damai	707	42,87%	Kedua
6	Lampaloh	265	42,74%	Kedua
7	Lueng Bata	1373	37,95%	Ketiga
8	Cot Mesjid	1588	36,85%	Ketiga
9	Lamdom	919	32,21%	Keempat

Sumber : DTSEN Kemensos, 2025

5.3.6. Kecamatan Kutaraja

Adapun gampong Prioritas I di Kecamatan Kutaraja adalah Keudah, Peulanggahan dan Gampong Jawa. Sedangkan Prioritas II terdiri dari 3 gampong yaitu Merduati, Lampaseh Kota dan Gampong Pande. Sedangkan untuk Prioritas III dan IV tidak ada.

Tabel 5.9
Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Gampong Penanggulangan
Kemiskinan Kecamatan Kutaraja

No	Gampong	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Prioritas
1	Keudah	1600	67,68%	Pertama
2	Peulanggahan	1628	58,39%	Pertama
3	Gampong Jawa	2731	79,00%	Pertama
4	Merduati	1542	53,65%	Kedua
5	Lampaseh Kota	1273	51,23%	Kedua
6	Gampong Pande	816	69,80%	Kedua

Sumber : DTSEN Kemensos, 2025

5.3.7. Kecamatan Jaya Baru

Adapun gampong Prioritas I di Kecamatan Jaya Baru adalah Punge Blang Cut. Untuk Prioritas II adalah Gampong Bitai dan Ulee Pata. Sedangkan

gampong prioritas III Lamteumen Timur dan Lamteumen Barat. Adapun Prioritas IV terdiri dari 4 gampong yaitu: Lamjamee. Lampoh Daya, Emperom dan Geuceu Meunara.

Tabel 5.10
Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Gampong Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Jaya Baru

No	Gampong	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Prioritas
1	Punge Blang Cut	2715	44,71%	Pertama
2	Bitai	885	56,44%	Kedua
2	Ulee Pata	673	61,97%	Kedua
4	Lamteumen Timur	2125	40,99%	Ketiga
5	Lamteumen Barat	1017	36,98%	Ketiga
6	Lamjamee	927	41,95%	Keempat
7	Lampoh Daya	924	40,37%	Keempat
8	Emperom	1146	35,11%	Keempat
9	Geuceu Meunara	874	28,28%	Keempat

Sumber : DTSEN Kemensos, 2025

5.3.8. Kecamatan Bandaraya

Desa Prioritas I di Kecamatan Bandaraya adalah Gampong Lam Ara, Peunyerat dan Lhong Cut. Untuk Prioritas II ada 3 gampong, yaitu Geucheu Kayee Jato, Lhong Raya dan Lampeuot. Untuk Prioritas III ada 2 gampong yaitu Lamlagang dan Mibo. Sedangkan gampong Prioritas IV adalah Gecheu Komplek dan Geucheu Iniem.

Tabel 5.11
Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Gampong Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Bandaraya

No	Gampong	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Prioritas
1	Lam Ara	1513	41,86%	Pertama
2	Peunyerat	1163	47,61%	Pertama
3	Lhong Cut	1169	49,45%	Pertama
4	Geucheu Kayee Jato	632	42,30%	Kedua
5	Lhong Raya	1019	31,18%	Kedua

6	Lampeuot	428	42,97%	Kedua
7	Lamlagang	1582	31,53%	Ketiga
8	Mibo	1074	37,14%	Ketiga
9	Geucheu Komplek	986	34,44%	Keempat
10	Geucheu Iniem	662	32,04%	Keempat

Sumber : DTSEN Kemensos, 2025

5.3.9. Kecamatan Ulee Kareng

Desa Prioritas I di Kecamatan Ulee Kareng adalah Gampong Ilie dan Ceurih. Untuk Prioritas II ada 2 gampong, yaitu Pango Raya dan Ie Masen Ulee Kareng. Untuk Prioritas III ada 2 gampong yaitu Lamlagang dan Mibo. Sedangkan gampong Prioritas IV adalah Gecheu Komplek dan Geucheu Iniem.

Tabel 5.12
Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Gampong Penanggulangan
Kemiskinan Kecamatan Ulee Kareng

No	Gampong	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Prioritas
1	Ilie	1621	41,95%	Pertama
2	Ceurih	1831	45,79%	Pertama
3	Pango Raya	1135	40,08%	Kedua
4	Ie Masen Ulee Kareng	1107	45,54%	Kedua
5	Lambhuk	1700	29,59%	Ketiga
6	Lamteh	896	32,07%	Keempat
7	Pango Deah	396	31,25%	Keempat
8	Doy	930	30,76%	Keempat
9	Lamglumpang	893	29,72%	Keempat

Sumber : DTSEN Kemensos, 2025

5.4. Rekomendasi Kebijakan

5.4.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

- Dukungan politik, komitmen dan kesungguhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi syarat utama dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- Kepemimpinan langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi syarat utama dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan

kemiskinan ekstrem.

- Meningkatkan efektivitas setiap nilai rupiah, program dan anggaran oleh seluruh perangkat daerah agar menjawab apa masalah, menjawab akar masalah, menjawab di mana masalah itu terjadi dan memastikan ketepatan individu dan rumah tangga penerima manfaat secara tepat dan benar.
- Meningkatkan sinergisitas dan keterpaduan pelaksanaan program oleh seluruh perangkat daerah.
- Pemerintah daerah melakukan upaya pengendalian inflasi dan memastikan harga komoditi-komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin agar murah, tersedia dan terjangkau. Menggunakan data DTSEN sebagai satu-satunya data dalam penjangkauan dan penajaman sasaran intervensi oleh seluruh perangkat daerah.
- Memperkuat peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk dalam meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.
- Memastikan program perlindungan sosial yang digulirkan oleh pemerintah pusat dapat diterima secara tepat oleh masyarakat sasaran.

5.4.2. Kebijakan Pendidikan

- Perlunya perhatian pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikan usia sekolah melalui program pemberian beasiswa kepada siswa miskin dan rentan.
- Meningkatkan dan mengoptimalkan program penjangkauan anak putus sekolah melalui program Kejar Paket A dan Paket B dalam meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun.
- Mengarustamakan intervensi program pendidikan inklusif terutama bagi yang berkebutuhan khusus.
- Perlu dipertimbangkan adanya kebijakan melakukan regrouping atau penggabungan beberapa sekolah yang tidak dapat memenuhi standar minimal pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional layanan pendidikan, meningkatkan mutu dan produktivitas proses belajar

mengajar di kelas, meningkatkan minat dan semangat anak untuk hadir dan belajar di sekolah, memaksimalkan pengawasan terhadap sejumlah sekolah, dan terjadinya pemerataan guru

- Melakukan pemerataan tenaga pendidik terutama guru pengajar, baik guru yang berstatus pegawai tetap maupun honorer.
- Meningkatkan persentase alokasi anggaran kegiatan yang mendukung peningkatan mutu kualitas pendidikan dasar seperti peningkatan fasilitas sarana-prasarana sekolah, terutama pembangunan laboratorium, perpustakaan, serta pengadaan buku dan alat praktik.
- Alokasi anggaran pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan lebih diarahkan pada bentuk kegiatan untuk peningkatan mutu kompetensi.
- Mengalokasikan anggaran kegiatan untuk meningkatkan peran dan fungsi dari Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan
- Meningkatkan alokasi anggaran untuk proses penilaian akreditasi sekolah khususnya di daerah-daerah terpencil atau daerah dengan akses infrastruktur yang terbatas Memprioritaskan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan wilayah (kecamatan dan kampung), sehingga tidak dilakukan dengan pola bagi rata di seluruh wilayah.
- Perlu dilakukannya pemutakhiran data dalam Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh yang dilakukan setiap tahun dan dapat diakses oleh publik melalui media online (website pemerintah daerah).

5.4.3. Kebijakan Kesehatan

- Memperkuat basis pelayanan Kesehatan, Ibu dan Anak (KIA) dalam jaminan kesehatan, dimana pemerintah menanggung premi asuransi bagi masyarakat tidak mampu. Selain itu, cakupan pelayanan ibu hamil, melahirkan, pasca melahirkan dan pelayanan kesehatan anak juga tersedia dalam skema jaminan kesehatan.
- Melakukan evaluasi kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan untuk mengetahui sejauh mana tenaga medis dan fasilitas kesehatan terdistribusi secara merata dan berkualitas antar kecamatan atau desa, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

- Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan pelayanan (SOP) kesehatan terutama di puskesmas, pusku, polindes, posyandu, dan rumah sakit.
- Meningkatkan pelayanan antar-jemput gratis persalinan, disertai dengan peningkatan akses infrastruktur terutama jalan menuju tempat persalinan terdekat.
- Penguatan sistem rujukan internal baik untuk maternal maupun neonatal terutama kepada pasien pasca operasi di RSUD.
- Penguatan sosialisasi oleh seluruh puskesmas dan puskesmas pembantu mengenai pentingnya kesadaran ibu hamil agar melahirkan di tempat fasilitas kesehatan dengan bantuan tenaga kesehatan terlatih, mengembangkan sistem deteksi dan kewaspadaan dini penyakit/wabah dengan melibatkan peran serta dari masyarakat di lingkungan setempat, terutama pada ibu hamil, bayi dan balita.
- Meningkatkan pelaksanaan kegiatan supervisi fasilitatif bidan koordinator di tingkat puskesmas kabupaten hingga tingkat desa, dengan pembinaan aspek klinis, non klinis, logistik dan manajemen KIA.
- Meningkatkan kompetensi bidan dalam penatalaksanaan pemeriksaan kehamilan/Antenatal Care (ANC) terpadu sehingga tidak hanya mampu mendeteksi dini ibu hamil dengan risiko tinggi tetapi juga mampu mengetahui faktor risiko penyebab komplikasi.
- Penguatan sistem rujukan balik dari rumah sakit ke puskesmas sehingga setiap kasus neonatal yang terjadi di rumah sakit terdeteksi dengan cepat oleh bidan puskesmas.
- Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi dengan melakukan pelacakan kasus neonatal risiko tinggi.
- Revitalisasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan sosialisasi penundaan usia perkawinan.
- Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan melakukan implementasi kegiatan prioritas untuk penurunan AKI, AKB, dan AKBA. Sehingga anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD dapat

terealisasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran dengan mengalokasikan lebih besar porsi anggaran kepada program-program dan kegiatan prioritas untuk penurunan AKI, AKB, dan AKBA.
- Perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Upaya ini dilakukan dengan memperluas sosialisasi pentingnya PHBS dan lingkungan sehat oleh dinas-dinas terkait.

5.4.4. Kebijakan Infrastruktur Dasar

- Revitalisasi sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang kurang memadai terutama di berbagai kantong wilayah kumuh perkotaan, seperti: penyaluran air bersih, pengolahan limbah, sistem pengelolaan sampah, saluran drainase dan penanggulangan banjir, dan perbaikan kondisi jalan.
- Penajaman ketepatan dan sasaran penerima manfaat program pembangunan rumah layak huni termasuk pengembangan rumah sehat, pipanisasi air bersih, dan air minum bagi rumah tangga miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin.
- Program dan kegiatan infrastruktur yang telah diagendakan dan dialokasikan dalam anggaran APBD sedapat mungkin segera direalisasikan agar pemenuhan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat dengan kurangnya sarana dan prasarana.
- Peningkatan kualitas perencanaan, kebijakan dan penyelenggaran pembangunan kawasan permukiman kumuh berdasarkan pada evidencebased dan data yang tersedia.
- Meningkatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan sanitasi layak, air minum layak, akses listrik, rumah layak huni setiap tahun dalam APBD Kota Banda Aceh.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam revitalisasi kawasan permukiman kumuh, dimana masyarakat dilibatkan pada setiap tahapan dimulai dari

perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan, pengawasan dan pemeliharaan.

5.4.5. Kebijakan Pertanian dan Perkebunan

- Perlunya dukungan dan perhatian khusus Pemerintah Kota Banda Aceh bagi peningkatan kesejahteraan petani dengan berfokus pada peningkatan penghasilan petani miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin.
- Perlunya melakukan identifikasi terhadap penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin yang bekerja sebagai buruh tani, kondisi ini dibutuhkan untuk memastikan agar manfaat program pertanian dan perkebunan juga diterima oleh buruh tani dengan status miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin sehingga tidak hanya berfokus pada kelompok tani.
- Revitalisasi sarana dan prasarana pendukung sektor pertanian dan perkebunan yang kurang memadai terutama bagi kecamatan- kecamatan dengan luas lahan dan produksi sektor pertanian dan perkebunan tinggi serta kecamatan-kecamatan penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin bekerja di sektor pertanian dan perkebunan juga tinggi.
- Penajaman ketepatan dan sasaran penerima manfaat program pembagian alat dan mesin pertanian bantuan bibit, bantuan pupuk, pelatihan petani bagi penduduk tangga miskin dan rentan yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan.
- Peningkatan kualitas perencanaan, kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan sektor peningkatan kesejahteraan petani dapat dilakukan berdasarkan pada evidence based dan data-data mikro yang tersedia
- Meningkatkan alokasi anggaran untuk peningkatan kesejahteraan petani dan tersedia setiap tahun dalam APBD Kota Banda Aceh, dengan memperbesar porsi untuk kebermanfaatan yang lebih besar bagi penduduk miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin yang bekerja sebagai buruh dan petani.
- Perlunya peningkatan penajaman program, kegiatan dan anggaran pada kecamatan-kecamatan dengan status sosial, ekonomi dan kesejahteraan rendah dengan penduduk miskin tinggi bekerja sebagai buruh dan petani miskin.

5.4.6. Kebijakan UMKN

- Perlunya penetapan Pelaku Usaha Mikro yang termasuk dalam katagori miskin, kondisi ini dibutuhkan untuk memastikan ketepatan sasaran dalam memberikan bantuan dan pendampingan sehingga terwujudnya peningkatan pendapatan UMKM dalam waktu singkat dan program UMKM naik kelas dapat terwujud.
- Perlu adanya program peningkatan ekonomi secara terintegrasi bagi pelaku UKMK dengan melibatkan semua potensi anggaran dan program di seluruh OPD terkait, agar derajat kesejahteraan mereka bisa meningkat dan keluar dari jurang kemiskinan.